



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 - 2023





**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Perlu Membentuk Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5941);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
14. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023 (Lembaran Daerah tahun 2015 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah tahun 2015 Nomor 9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2014, Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah tahun 2017 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012, Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya RPJMD tahun 2018-2023 yaitu:

- a. Untuk menjabarkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Untuk memantau perkembangan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. Sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra SKPD;
- e. Sebagai suatu upaya untuk pemecahan danantisipasi bagi kepentingan dan kebutuhan mutakhir daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu:

- a. Menentukan arah dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 5 (lima) tahun kedepan;
- b. Menjamin terciptanya efektivitas, efisiensi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah dan antar fungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang efektif, efisien, berkeadilan serta berkelanjutan;
- d. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan bersifat indikatif yang memuat kerangka makro Kabupaten Sidenreng Rappang dan pilihan program prioritas setelah dibahas dalam rangkaian forum Musrenbang RPJMD;
- e. Menjamin pelaksanaan pembangunan yang partisipatif;
- f. Merupakan bahan acuan utama bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Renstra SKPD;
- g. Menyediakan tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD;
- h. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencapai tujuan pembangunan jangka menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur.

BAB II PENYUSUNAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 berpedoman pada:
 - a. RPJPN 2005-2025;
 - b. RPJMN 2015-2019;
 - c. RPJPD Sulawesi Selatan tahun 2005-2025;
 - d. RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023;
 - e. RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2005-2025;
 - f. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 2012-2032.

- (2) RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
 - a. Visi dan misi, program Bupati dan wakil Bupati terpilih; dan
 - b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD Tahun 2018-2023 sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambara Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan isu Strategi Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. BAB IX : Penutup.
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Kebijakan perencanaan RPJMD Tahun 2018-2023; dan
 - b. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Kebijakan perencanaan RPJMD Tahun 2018-2023;
 - b. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023; dan
 - c. Hasil RPJMD Tahun 2018-2023.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2018-2023

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, dapat dilakukan apabila;
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai Peraturan perundang-undangan;
 - c. Terjadi perubahan mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncanganpolitik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan,

- pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional atau perubahan kebijakan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan; dan/ atau
- d. Bertentangan dengan Kebijakan nasional dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 target sasaran kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka dirumuskan kembali besaran target sasaran kinerja baru;
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 target sasaran kinerja yang ditetapkan sulit tercapai maka dirumuskan penyesuaian kembali besaran target sasaran kinerja baru;
- (3) Target sasaran kinerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati wajib menyiapkan rancangan RPJMD periode berikutnya dan menyusun RKPD tahun pertama RPJMD periode berikutnya;
- (2) Penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun periode Pemerintahan berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2025 dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023;
- (3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode Pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-

- 2025 dan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun;
- (4) RPJMD dijadikan dasar laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2019 yang telah disusun sebelum Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat sebelum APBD Tahun 2020 ditetapkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 28 Juni 2019



diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sudirman Bungin', is written over the text of the Secretary of the Region.

SUDIRMAN BUNGI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN
2019 NOMOR 06

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG, PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.03.068.19

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018-2023

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 5 ayat (5), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional. Selain dari pada itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJPD) dan RTRW Kabupaten serta RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan dan RPJMN. Mekanisme penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dimulai setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang pada tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip: keterkaitan, konsistensi, kelengkapan, dan kedalaman, dan keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan: partisipatif (*bottom up*), top down,

teknokratis, politis dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan digunakan sebagai arahan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG NOMOR 62



DAFTAR ISI

SAMPUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018 – 2023

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xxxii
BAB I : Pendahuluan	I – 1
1.1. Latar Belakang	I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I – 5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I – 11
1.4. Maksud dan Tujuan	I – 13
1.5. Sistematika Penulisan	I – 15
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah	II – 1
2.1. Kondisi Umum Daerah.....	II – 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II – 1
2.1.1.1. Aspek Geografi.....	II – 1
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografi	II – 3
2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah .	II – 16
2.1.1.4. Aspek Demografi.....	II – 25
2.1.1.5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.....	II – 32
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II – 44
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II – 44
2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	II – 44
2.2.1.2. Laju Inflasi	II – 50
2.2.1.3. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	II – 53
2.2.1.4. Indeks Gini	II – 53
2.2.1.5. Indeks Ketimpangan Williamson...	II – 54
2.2.1.6. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	II – 54
2.2.1.7. Persentase PAD Terhadap Pendapatan	II – 54





2.2.1.8.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	II – 55
2.2.1.9.	PDRB Pertanian	II – 55
2.2.1.10.	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB.....	II – 55
2.2.1.11.	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	II – 56
2.2.1.12.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	II – 57
2.2.1.13.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	II – 58
2.2.1.14.	Pertumbuhan PDRB Industri	II – 59
2.2.1.15.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	II – 59
2.2.2.	Fokus Kesejahteraan Sosial	II – 60
2.2.2.1.	Indeks Pembangunan Manusia	II – 60
2.2.2.2.	Angka Melek Huruf (AMH)	II – 61
2.2.2.3.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II – 62
2.2.2.4.	Angka Usia Harapan Hidup	II – 62
2.2.2.5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II – 63
2.2.2.6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	II – 64
2.2.2.7.	Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja.....	II – 65
2.2.2.8.	Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja.....	II – 65
2.2.2.9.	Persentase Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk Yang Bekerja.....	II – 60
2.2.3.	Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II – 67
2.2.3.1.	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	II – 67
2.2.3.2.	Persentase Wirausaha Muda ..	II – 67
2.2.3.3.	Cakupan Pembinaan Olahraga .	II – 68
2.2.3.4.	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat dan Inventarisasi .	II – 68
2.2.3.5.	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	II – 69
2.2.3.6.	Jumlah Atlet Berprestasi	II – 69
2.2.3.7.	Jumlah Prestasi Olahraga	II – 69
2.2.3.8.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	II – 70
2.2.3.9.	Benda, Situs, dan Kawasan	



	Cagar Budaya Yang Dilestarikan.....	II – 70
2.2.3.10.	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	II – 71
2.3.	Aspek Pelayanan Umum	II – 71
2.3.1.	Fokus Layanan Urusan Wajib	II – 71
2.3.1.1.	Bidang Urusan Pendidikan	II – 71
2.3.1.2.	Bidang Urusan Kesehatan	II – 78
2.3.1.3.	Bidang Urusan Pekerja Umum dan Penataan Ruang	II – 109
2.3.1.4.	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II – 125
2.3.1.5.	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	II – 133
2.3.1.6.	Bidang Urusan Sosial.....	II – 136
2.3.2.	Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II – 141
2.3.2.1.	Bidang Urusan Tenaga Kerja ..	II – 141
2.3.2.2.	Bidang Urusan Komunikasi dan Informasi.....	II – 147
2.3.2.3.	Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II – 149
2.3.2.4.	Bidang Urusan Penanaman Modal	II – 152
2.3.2.5.	Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	II – 153
2.3.2.6.	Urusan Statistik	II – 157
2.3.2.7.	Bidang Urusan Persandian	II – 158
2.3.2.8.	Bidang Urusan Kebudayaan	II – 159
2.3.2.9.	Bidang Urusan Perpustakaan..	II – 161
2.3.2.10.	Bidang Urusan Kearsipan	II – 164
2.3.2.11.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	II – 165
2.3.2.12.	Bidang Urusan Pangan	II – 175
2.3.2.13.	Bidang Urusan Pertanahan	II – 176
2.3.2.14.	Urusan Lingkungan Hidup	II – 177
2.3.2.15.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	II – 185
2.3.2.16.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II – 187
2.3.2.17.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II – 191
2.3.3.	Fokus Layanan Urusan Pilihan	II – 209
2.3.3.1.	Bidang Urusan Pariwisata Kunjungan Wisata	II – 209



2.3.3.2.	Bidang Urusan Pertanian	II – 211
2.3.3.3.	Bidang Urusan Kehutanan	II – 213
2.3.3.4.	Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.....	II – 214
2.3.3.5.	Bidang Urusan Perdagangan ..	II – 215
2.3.3.6.	Bidang Urusan Perindustrian...	II – 216
2.3.3.7.	Bidang Urusan Transmigrasi...	II – 217
2.3.3.8.	Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan	II – 217
2.3.4.	Fokus Penunjang Urusan.....	II – 221
2.3.4.1.	Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan	II – 221
2.3.4.2.	Bidang Urusan Keuangan.....	II – 224
2.3.4.3.	Bidang Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan.....	II – 227
2.3.4.4.	Penelitian dan Pengembangan...	II – 230
2.3.4.5.	Pengawasan.....	II – 231
2.3.4.6.	Sekretariat Dewan	II – 233
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II – 234
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi.....	II – 235
2.4.1.1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita.....	II – 235
2.4.1.2.	Pengeluaran Perkapita/Tahun .	II – 235
2.5.	Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II – 236
2.5.1.	Bidang Pendidikan	II – 236
2.5.2.	Bidang Kesehatan	II – 237
2.5.3.	Bidang Pekerjaan Umum	II – 238
2.5.4.	Bidang Perumahan Rakyat	II – 238
2.5.5.	Bidang Trantibumlinmas	II – 239
2.5.6.	Bidang Sosial.....	II – 240
2.6.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	II – 241
BAB III	: Gambaran Umum Keuangan Daerah.....	III – 1
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III – 2
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III – 2
3.1.2.	Kinerja Pendapatan APBD	III – 8
3.1.3.	Kinerja Belanja Daerah	III – 16
3.1.4.	Kinerja Pembiayaan Daerah.....	III – 20
3.1.5.	Neraca Daerah	III – 21
3.1.5.1.	Aset Daerah	III – 27
3.1.5.2.	Kewajiban Daerah	III – 27
3.1.5.3.	Ekuitas Dana	III – 28
3.1.5.4.	Rasio Likuiditas	III – 29
3.1.5.5.	Rasio Solvabilitas	III – 30
3.1.5.6.	Rasio Aktivitas.....	III – 31



3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu ..	III – 32
3.2.1.	Proposisi Penggunaan Anggaran.....	III – 32
3.2.2.	Analisis Pembiayaan	III – 33
3.2.3.	Defisit Riil Anggaran.....	III – 34
3.2.4.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran.....	III – 35
3.2.5.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.....	III – 36
BAB IV	: Permasalahan dan Isu Strategi Daerah.....	IV – 1
4.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV – 1
4.1.1.	Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV – 1
4.1.1.1.	Belum Meratanya Kualitas Hidup Masyarakat	IV – 4
4.1.1.2.	Belum Optimalnya Kualitas Pendidikan Masyarakat.....	IV – 6
4.1.1.3.	Belum Optimalnya Derajat Kesehatan Masyarakat.....	IV – 10
4.1.1.4.	Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian Serta Usaha Industri Pengolahan Hasil Usaha Pertanian.....	IV – 13
4.1.1.5.	Belum Optimalnya Produktivitas Sektor - Sektor Perekonomian Daerah	IV – 15
4.1.1.6.	Rendahnya Kinerja Kelembagaan Usaha Dan Belum Maksimalnya Penanggulangan Kemiskinan..	IV – 16
4.1.1.7.	Belum Optimalnya Investasi Daerah Dan Kompetensi Angkatan Kerja Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	IV – 19
4.1.2.	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	IV – 45
4.1.2.1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar.	IV – 45
4.1.2.2.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.....	IV – 50
4.1.2.3.	Urusan Pilihan.....	IV – 57
4.1.2.4.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	IV – 60
4.2.	Analisis Isu Strategis	IV – 61
4.2.1.	Isu Strategis Global.....	IV – 62
4.2.1.1.	Isu Tujuan Pembangunan	



	Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDGs</i>)....	IV – 63
4.2.1.2.	Ancaman Krisis Ekonomi Global.....	IV – 69
4.2.1.3.	Penerapan <i>Green Economic Global</i> (Ekonomi Ramah Lingkungan)	IV – 69
4.2.1.4.	Penerapan Sumber Energi Alternatif Sebagai Antisipasi Sumber Energi Tak Terbaharukan.....	IV – 70
4.2.1.5.	Antisipasi Perubahan Iklim Global (<i>Global Warming/ Climate Change</i>)	IV – 71
4.2.1.6.	Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Revolusi Industri 4.0	IV – 72
4.2.1.7.	Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).....	IV – 72
4.2.1.8.	Perubahan Iklim	IV – 73
4.2.2.	Penelaahan Isu Strategis Nasional	IV – 75
4.2.2.1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2015-2019.....	IV – 75
4.2.2.2.	Rancangan Teknokrat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2020-2024.....	IV – 81
4.2.3.	Isu Strategis Daerah	IV – 100
4.2.3.1.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.....	IV – 100
4.2.3.2.	Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pelestarian Lingkungan Hidup.....	IV – 101
4.2.3.3.	Perwujudan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Budaya Daerah.....	IV – 102
4.2.3.4.	Penerapan <i>SDG's (Sustainable Development Goals)</i>	IV – 103
4.2.3.5.	Penanggulangan Bencana Alam Melalui Mitigasi Bencana	IV – 104
4.2.3.6.	Pengembangan kawasan energi terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu.....	IV – 105



BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.....	V – 1
5.1. Visi.....	V – 1
5.2. Misi	V – 2
5.3. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 dengan Visi Misi RPJPD Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025.....	V – 4
5.4. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023	V – 8
5.5. Tujuan dan Sasaran	V – 13
BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah	VI – 1
6.1. Strategi Pembangunan Daerah	VI – 1
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI – 6
6.3. Prioritas Pembangunan Daerah.....	VI – 18
6.4. Program Pembangunan Daerah.....	VI – 18
BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.....	VII – 1
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan.....	VII – 1
7.1.1. Asumsi Makro Ekonomi Daerah.....	VII – 1
7.1.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah..	VII – 4
7.1.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan	VII – 11
7.2. Program Perangkat Daerah.....	VII – 16
BAB VIII : Penetapan Indikator Kinerja Daerah.....	VIII – 1
8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	VIII – 1
8.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	VIII – 4
BAB IX : Penutup.....	IX – 1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha) dan Jumlah Desa/Kelurahan	II – 2
Tabel 2.2	: Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017	II – 5
Tabel 2.3	: Jenis Tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009	II – 8
Tabel 2.4	: Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 9
Tabel 2.5	: Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 13
Tabel 2.6	: Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 14
Tabel 2.7	: Kejadian Bencana Akibat Kelalaian Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 15
Tabel 2.8	: Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 18
Tabel 2.9	: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008-2017	II – 26
Tabel 2.10	: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) Tahun 2013-2017 Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 28
Tabel 2.11	: Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa) Tahun 2013-2017 Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 29
Tabel 2.12	: Kepadatan Penduduk Per Km ² Tahun 2009-2016	II – 29
Tabel 2.13	: Sex Ratio Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009 – 2017	II – 31
Tabel 2.14	: Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2009-2017	II – 31
Tabel 2.15	: Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2009-2017	II – 32
Tabel 2.16	: Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan	II – 35
Tabel 2.17	: Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 37
Tabel 2.18	: Potensi Pengembangan Budidaya Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 38
Tabel 2.19	: Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 39
Tabel 2.20	: Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Air Bersih Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 41
Tabel 2.21	: Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 41
Tabel 2.22	: Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan	II –



Tabel 2.23	: Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2032	II – 43
Tabel 2.24	: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang 2013-2017	II – 45
Tabel 2.25	: Perkembangan dan Pertumbuhan Atas Sektor PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 46
Tabel 2.26	: Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2017	II – 48
Tabel 2.27	: Perbandingan PDRB pada Enam Wilayah Kabupaten dan Sulawesi Selatan Tahun 2017 (Juta Rupiah)	II – 48
Tabel 2.28	: Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	II – 49
Tabel 2.29	: Sandingan Perkembangan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare Tahun 2008-2012	II – 50
Tabel 2.30	: Laju Inflasi Kota Parepare Tahun 2013-2017	II – 51
Tabel 2.31	: PDRB Perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016	II – 51
Tabel 2.32	: Perbandingan PDRB Per Kapita pada Enam Wilayah Kabupaten/Kota dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016	II – 52
Tabel 2.33	: Perkembangan PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 52
Tabel 2.34	: Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 53
Tabel 2.35	: Indeks Gini Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 53
Tabel 2.36	: Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 54
Tabel 2.37	: Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 54
Tabel 2.38	: Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 55
Tabel 2.39	: Opini Badan Pemeriksa Keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 55
Tabel 2.40	: PDRB Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 55
Tabel 2.41	: Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 Kontribusi sektor Pertambangan Terhadap PDRB	II – 56
Tabel 2.42	: Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 56
Tabel 2.43	: Indikator Kinerja Urusan Perdagangan	II – 57



Tabel 2.44	: Kontribusi sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 58
Tabel 2.45	: Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 59
Tabel 2.46	: Pertumbuhan PDRB Industri Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 59
Tabel 2.47	: Kontribusi sector Pariwisata Terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 59
Tabel 2.48	: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017	II – 60
Tabel 2.49	: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2017	II – 61
Tabel 2.50	: Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 62
Tabel 2.51	: Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 62
Tabel 2.52	: Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 63
Tabel 2.53	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 63
Tabel 2.54	: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 64
Tabel 2.55	: Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 65
Tabel 2.56	: Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 65
Tabel 2.57	: Persentase Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 66
Tabel 2.58	: Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 67
Tabel 2.59	: Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 67
Tabel 2.60	: Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 68
Tabel 2.61	: Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 68
Tabel 2.62	: Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 69
Tabel 2.63	: Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 69



Tabel 2.64	: Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 70
Tabel 2.65	: Jumlah Penyelenggaraan Festival Senidan Budaya Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 70
Tabel 2.66	: Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 71
Tabel 2.67	: Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 71
Tabel 2.68	: Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 72
Tabel 2.69	: Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 72
Tabel 2.70	: Angka Partisipasi Kasar Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 73
Tabel 2.71	: Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) (%) Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 74
Tabel 2.72	: Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B Tahun 2013-2017 di Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 74
Tabel 2.73	: Angka Partisipasi Murni Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 75
Tabel 2.74	: Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Tahun 2013-2017 Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 76
Tabel 2.75	: Angka Kematian Bayi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 78
Tabel 2.76	: Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 81
Tabel 2.77	: Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016	II – 82
Tabel 2.78	: Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 83
Tabel 2.79	: Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018	II – 84
Tabel 2.80	: Rasio Puskesmas, Poliklinik, Per Satuan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018	II – 85
Tabel 2.81	: Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 86
Tabel 2.82	: Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 87
Tabel 2.83	: Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 88
Tabel 2.84	: Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga	II – 89



	Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	
Tabel 2.85	: Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 90
Tabel 2.86	: Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 91
Tabel 2.87	: Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Dibawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang digunakan Indonesia 2.100. Kkal/ kapita/hari Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 91
Tabel 2.88	: Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017	II – 92
Tabel 2.89	: NonPolio AFP Rate Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 93
Tabel 2.90	: Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 93
Tabel 2.91	: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 94
Tabel 2.92	: Cakupan Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 95
Tabel 2.93	: Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 97
Tabel 2.94	: Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 98
Tabel 2.95	: Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 98
Tabel 2.96	: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 100
Tabel 2.97	: Penderita Diare Yang Ditangani Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 101
Tabel 2.98	: Angka Kejadian Malaria Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 102
Tabel 2.99	: Tingkat Kematian Akibat Malaria Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 102
Tabel 2.100	: Persentase anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (ACT) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 103



Tabel 2.101	: Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 103
Tabel 2.102	: Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 103
Tabel 2.103	: Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 104
Tabel 2.104	: Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 104
Tabel 2.105	: Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 105
Tabel 2.106	: Cakupan Puskesmas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 106
Tabel 2.107	: Cakupan Puskesmas Pembantu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 106
Tabel 2.108	: Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 106
Tabel 2.109	: Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 107
Tabel 2.110	: Cakupan Neonatus dengan Komplikasi Yang Ditangani Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 107
Tabel 2.111	: Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 107
Tabel 2.112	: Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 108
Tabel 2.113	: Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 108
Tabel 2.114	: Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 108
Tabel 2.115	: Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017	II – 109
Tabel 2.116	: Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017	II – 111
Tabel 2.117	: Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 (>40 Km/Jam)	II – 111
Tabel 2.118	: Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 112



Tabel 2.119	: Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 112
Tabel 2.120	: Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 113
Tabel 2.121	: Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2018	II – 114
Tabel 2.122	: Persentase Drainase dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 115
Tabel 2.123	: Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 115
Tabel 2.124	: Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 116
Tabel 2.125	: Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 116
Tabel 2.126	: Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2018	II – 117
Tabel 2.127	: Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 117
Tabel 2.128	: Persentase Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 118
Tabel 2.129	: Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 118
Tabel 2.130	: Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 119
Tabel 2.131	: Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 120
Tabel 2.132	: Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 121
Tabel 2.133	: Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 122
Tabel 2.134	: Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 123
Tabel 2.135	: Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 124
Tabel 2.136	: Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan	II – 124



	Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	
Tabel 2.137	: Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 125
Tabel 2.138	: Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 126
Tabel 2.139	: Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 127
Tabel 2.140	: Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 127
Tabel 2.141	: Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 128
Tabel 2.142	: Persentase Permukiman yang Tertata Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 129
Tabel 2.143	: Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 130
Tabel 2.144	: Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 130
Tabel 2.145	: Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 131
Tabel 2.146	: Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 133
Tabel 2.147	: Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 133
Tabel 2.148	: Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 134
Tabel 2.149	: Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 134
Tabel 2.150	: Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen (WMK) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 135
Tabel 2.151	: Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 136
Tabel 2.152	: Persentase PMKS Yang Tertangani, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 136
Tabel 2.153	: Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun	II – 137



	2013-2017	
Tabel 2.154	: Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 137
Tabel 2.155	: Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 138
Tabel 2.156	: Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 138
Tabel 2.157	: Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 139
Tabel 2.158	: Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 140
Tabel 2.159	: Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 140
Tabel 2.160	: Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 141
Tabel 2.161	: Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 141
Tabel 2.162	: Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 142
Tabel 2.163	: Keselamatan dan Perlindungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 142
Tabel 2.164	: Besaran Pekerja/Buruh Yang menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 143
Tabel 2.165	: Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 144
Tabel 2.166	: Besaran Pemeriksaan Perusahaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 144
Tabel 2.167	: Besaran Pengujian Peralatan Perusahaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 145
Tabel 2.168	: Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan	II – 146



	Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	
Tabel 2.169	: Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 146
Tabel 2.170	: Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 147
Tabel 2.171	: Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 148
Tabel 2.172	: Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 148
Tabel 2.173	: Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 148
Tabel 2.174	: Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 149
Tabel 2.175	: Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 150
Tabel 2.176	: Persentase UKM Non BPR/LKM aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 151
Tabel 2.177	: Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 151
Tabel 2.178	: Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 152
Tabel 2.179	: Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 152
Tabel 2.180	: Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 153
Tabel 2.181	: Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 153
Tabel 2.182	: Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 153
Tabel 2.183	: Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 154
Tabel 2.184	: Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 155
Tabel 2.185	: Cakupan pelatih yang bersertifikat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 155
Tabel 2.186	: Cakupan Pembinaan Atlit Muda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 156
Tabel 2.187	: Jumlah Atlit Berprestasi Kabupaten Sidenreng	II – 156



	Rappang Tahun 2013-2017	
Tabel 2.188	: Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 157
Tabel 2.189	: Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 158
Tabel 2.190	: Buku “Kabupaten Dalam Angka” Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 158
Tabel 2.191	: Buku “PDRB” di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 158
Tabel 2.192	: Persentase Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 158
Tabel 2.193	: Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 159
Tabel 2.194	: Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 159
Tabel 2.195	: Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 160
Tabel 2.196	: Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 160
Tabel 2.197	: Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 161
Tabel 2.198	: Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 162
Tabel 2.199	: Rasio Perpustakaan per Satuan penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 162
Tabel 2.200	: Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 162
Tabel 2.201	: Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 163
Tabel 2.202	: Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 163
Tabel 2.203	: Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 164
Tabel 2.204	: Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 164
Tabel 2.205	: Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga	II – 165



	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	
Tabel 2.206	: Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 165
Tabel 2.207	: Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 166
Tabel 2.208	: Rasio KDRT Kabupaten Sidenreng Rappang 2017	II – 167
Tabel 2.209	: Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 167
Tabel 2.210	: Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 168
Tabel 2.211	: Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Kabupaten Sidenreng Rappang 2017	II – 169
Tabel 2.212	: Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Ktp/A dan PPT/PKT Di Rumah Sakit Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 169
Tabel 2.213	: Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 170
Tabel 2.214	: Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 171
Tabel 2.215	: Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 171
Tabel 2.216	: Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Kekerasan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 172
Tabel 2.217	: Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 172
Tabel 2.218	: Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 173
Tabel 2.219	: Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 173
Tabel 2.220	: Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 174
Tabel 2.221	: Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 174



Tabel 2.222	: Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 174
Tabel 2.223	: Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 175
Tabel 2.224	: Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 175
Tabel 2.225	: Ketersediaan Energi dan Protein perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 176
Tabel 2.226	: Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 176
Tabel 2.227	: Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 176
Tabel 2.228	: Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 177
Tabel 2.229	: Penyelesaian Izin Lokasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 177
Tabel 2.230	: Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 177
Tabel 2.231	: Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana RPPLH Kabupaten/Kota Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 178
Tabel 2.232	: Penyelenggaraan KLHS Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 178
Tabel 2.233	: Indeks Kualitas Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 178
Tabel 2.234	: Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 179
Tabel 2.235	: Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Di Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 179
Tabel 2.236	: Fasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 179
Tabel 2.237	: Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 180
Tabel 2.238	: Terverifikasinya Hak Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 180
Tabel 2.239	: Penetapan Hak MHA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 180
Tabel 2.240	: Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 181



Tabel 2.241	: Terfasilitasinya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 181
Tabel 2.242	: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 181
Tabel 2.243	: Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 182
Tabel 2.244	: Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Derah Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 182
Tabel 2.245	: Timbulan Sampah Yang Ditangani Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 183
Tabel 2.246	: Persentase Jumlah Sampah Yang Berkurang Melalui 3R Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 183
Tabel 2.247	: Persentase Cakupan Area Pelayanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 183
Tabel 2.248	: Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 184
Tabel 2.249	: Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 184
Tabel 2.250	: Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Diterbitkan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 184
Tabel 2.251	: Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 185
Tabel 2.252	: Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 185
Tabel 2.253	: Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 185
Tabel 2.254	: Rasio Pasangan Berakte Nikah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 186
Tabel 2.255	: Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 186
Tabel 2.256	: Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 187
Tabel 2.257	: Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 187
Tabel 2.258	: Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 188



Tabel 2.259	: Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 188
Tabel 2.260	: Persentase LSM Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 189
Tabel 2.261	: Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 189
Tabel 2.262	: Persentase PKK Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 189
Tabel 2.263	: Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 190
Tabel 2.264	: Swadaya Masyarakat Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 190
Tabel 2.265	: Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 190
Tabel 2.266	: Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 191
Tabel 2.267	: Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 191
Tabel 2.268	: Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 192
Tabel 2.269	: Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 192
Tabel 2.270	: Jumlah Kebijakan (Peraturan Perundang-undangan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 193
Tabel 2.271	: Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 193
Tabel 2.272	: Ratio Akseptor KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 194
Tabel 2.273	: Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 194
Tabel 2.274	: Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-49) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 194
Tabel 2.275	: Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Di Bawah 20 Tahun Kabupaten Sidenreng	II – 195



	Rappang Tahun 2013-2017	
Tabel 2.276	: Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet need) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 195
Tabel 2.277	: Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 196
Tabel 2.278	: Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 196
Tabel 2.279	: Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber - KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 196
Tabel 2.280	: Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber -KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 197
Tabel 2.281	: Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber -KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 197
Tabel 2.282	: Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 198
Tabel 2.283	: Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 198
Tabel 2.284	: Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 199
Tabel 2.285	: Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber- KB Mandiri Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 199
Tabel 2.286	: Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 200
Tabel 2.287	: Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 200
Tabel 2.288	: Persentase Fakses dan Jaringannya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi pelayanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 201



Tabel 2.289	: Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di Setiap Desa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 201
Tabel 2.290	: Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 202
Tabel 2.291	: Cakupan Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 202
Tabel 2.292	: Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 202
Tabel 2.293	: Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 203
Tabel 2.294	: Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 203
Tabel 2.295	: Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2018	II – 204
Tabel 2.296	: Rasio Ijin Trayek Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2018	II – 204
Tabel 2.297	: Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2018	II – 205
Tabel 2.298	: Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 205
Tabel 2.299	: Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 206
Tabel 2.300	: Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 207
Tabel 2.301	: Persentase Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2018	II – 207
Tabel 2.302	: Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 208
Tabel 2.303	: Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 208
Tabel 2.304	: Jumlah Orang/ Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 208
Tabel 2.305	: Kunjungan Wisata Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 209
Tabel 2.306	: Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Sidenreng	II – 209



	Rappang Tahun 2013-2017	
Tabel 2.307	: PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	II – 210
Tabel 2.308	: Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 211
Tabel 2.309	: Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 211
Tabel 2.310	: Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 211
Tabel 2.311	: Kontribusi Produksi kelompok Petani terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 212
Tabel 2.312	: Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 212
Tabel 2.313	: Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 212
Tabel 2.314	: Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 213
Tabel 2.315	: Kerusakan Kawasan Hutan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 213
Tabel 2.316	: Rasio Luas Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 214
Tabel 2.317	: Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 214
Tabel 2.318	: Ratio Ketersediaan Daya Listrik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 215
Tabel 2.319	: Persentase Pertambangan Tanpa Ijin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 215
Tabel 2.320	: Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 215
Tabel 2.321	: Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 216
Tabel 2.322	: Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 216
Tabel 2.323	: Persentase Transmigrasi Swakarsa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 217
Tabel 2.324	: Produksi Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 217



Tabel 2.325	: Konsumsi Ikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 218
Tabel 2.326	: Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 218
Tabel 2.327	: Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 219
Tabel 2.328	: Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 219
Tabel 2.329	: Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 220
Tabel 2.330	: Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 220
Tabel 2.331	: Ketersediaan Dokumen RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 221
Tabel 2.332	: Ketersediaan Dokumen RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 221
Tabel 2.333	: Ketersediaan Dokumen RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 222
Tabel 2.334	: Ketersediaan Dokumen RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 222
Tabel 2.335	: Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 223
Tabel 2.336	: Penjabaran Konsistensi Program RKPD dan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 223
Tabel 2.337	: Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 223
Tabel 2.338	: Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 224
Tabel 2.339	: Persentase SILPA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 224
Tabel 2.340	: Persentase Belanja Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 225
Tabel 2.341	: Persentase Belanja Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 225
Tabel 2.342	: Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 226
Tabel 2.343	: Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 226
Tabel 2.344	: Penetapan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 227



	Tahun 2013 – 2017	
Tabel 2.345	: Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 227
Tabel 2.346	: Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 228
Tabel 2.347	: Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Kabupaten sidenreng rappang tahun 2013 – 2017	II – 228
Tabel 2.348	: Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 229
Tabel 2.349	: Jumlah Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 229
Tabel 2.350	: Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 230
Tabel 2.351	: Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 230
Tabel 2.352	: Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 231
Tabel 2.353	: Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 231
Tabel 2.354	: Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 231
Tabel 2.355	: Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 232
Tabel 2.356	: Jumlah Temuan BPK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 232
Tabel 2.357	: Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan DPRD Provinsi/Kab/Kota Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 233
Tabel 2.358	: Integrasi Program-Program Kerja DPRD pada RPJMD dan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 233
Tabel 2.359	: Integrasi Program-Program pada Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 234
Tabel 2.360	: Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Di Kabupaten Sidenreng Rappang 2015-2017	II – 235



Tabel 2.361	: Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Di Kabupaten Sidenreng Rappang 2015-2017	II – 236
Tabel 2.362	: Indiaktor Pencapaian Bidang Pendidikan	II – 236
Tabel 2.363	: Indiaktor Pencapaian Bidang Kesehatan	II – 237
Tabel 2.364	: Indiaktor Pencapaian Bidang Pekerjaan Umum	II – 238
Tabel 2.365	: Indiaktor Pencapaian Bidang Perumahan Rakyat	II – 239
Tabel 2.366	: Indiaktor Pencapaian Bidang Trantibumlinmas	II – 240
Tabel 2.367	: Indiaktor Pencapaian Bidang Perumahan Rakyat	II – 241
Tabel 2.368	: Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional	II – 243
Tabel 2.369	: Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	II – 247
Tabel 2.370	: Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	II – 251
Tabel 3.1	: Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013 s/d Tahun 2017	III – 4
Tabel 3.2	: Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	III – 23
Tabel 3.3	: Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	III – 30
Tabel 3.4	: Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2017	III – 32
Tabel 3.5	: Surplus atau Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2017	III – 34
Tabel 3.6	: Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2015-2017	III – 36
Tabel 3.7	: Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2017	III – 38
Tabel 4.1	: Rumusan Permasalahan “Belum Meratanya Kualitas Hidup Masyarakat”	IV – 13
Tabel 4.2	: Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	IV – 16
Tabel 4.3	: Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	IV – 18
Tabel 4.4	: Rumusan Permasalahan “Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis pertanian serta usaha industri pengolahan hasil	IV – 18



	usaha pertanian”	
Tabel 4.5	: Tabel 4.5 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	IV – 20
Tabel 4.6	: Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	IV – 20
Tabel 4.7	: Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	IV – 20
Tabel 4.8	: PAD Sektor Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	IV – 22
Tabel 4.9	: Rumusan Permasalahan “Belum optimalnya investasi daerah dan kompetensi angkatan kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat”	IV – 26
Tabel 4.10	: Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017	IV – 29
Tabel 4.11	: Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	IV – 30
Tabel 4.12	: Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	IV – 30
Tabel 4.13	: Daftar Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Pelaksanaan Pembangunan	IV – 31
Tabel 4.14	: Rumusan Permasalahan “Infrastruktur yang belum merata dan berkualitas”	IV – 33
Tabel 4.15	: Capaian Indikator TPB Kabupaten Sidrap Terhadap Target Nasional	IV – 37
Tabel 4.16	: Rumusan Permasalahan “Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik”	IV – 37
Tabel 4.17	: Banyaknya desa/ kelurahan menurut sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk	IV – 38
Tabel 4.18	: Banyaknya desa menurut keberadaan sistem informasi desa dan sistem keuangan desa Tahun 2018	IV – 40
Tabel 4.19	: Rumusan Permasalahan “Belum optimalnya pengembangan dan pembangunan desa”	IV – 41
Tabel 4.20	: Banyaknya Narapidana Menurut Jenis Kejahatan dan Golongan Pelanggaran di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017	IV – 41
Tabel 4.21	: Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	IV – 44
Tabel 4.22	: Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	IV – 44
Tabel 4.23	: Rumusan Permasalahan “Maksimalnya Kehidupan Beragama Dan Budaya Lokal Dalam Menciptakan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Aman	IV – 44



	Dan Religius”	
Tabel 4.24	: Kategori A Berdasarkan Tujuan TPB	IV – 64
Tabel 4.25	: Kategori B Berdasarkan Tujuan TPB	IV – 65
Tabel 4.26	: Kategori C Berdasarkan Tujuan TPB	IV – 67
Tabel 4.27	: Indikator Wewenang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	IV – 68
Tabel 5.1	: Pernyataan Visi, Pokok Visi dan Penjelasan Visi	V – 2
Tabel 5.2	: Keterkaitan Rumusan Misi dengan Pokok Visi	V – 3
Tabel 5.3	: Keselarasan Misi RPJPD Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 dengan Misi RPJMD Kab.Sidenreng Rappang tahun 2018 -2023	V – 8
Tabel 5.4	: Keselarasan Misi RPJMD Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2023	V – 11
Tabel 5.5	: Keselarasan Misi RPJMD Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJM Nasional Tahun 2014 -2019	V – 12
Tabel 5.6	: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD	V – 16
Tabel 6.1	: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi	VI – 3
Tabel 6.2	: Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang	VI – 7
Tabel 6.3	: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang 2019 – 2023	VI – 11
Tabel 6.4	: Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Sidenreng Rappang	VI – 19
Tabel 7.1	: Asumsi Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023	VII – 2
Tabel 7.2	: Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2019-2023	VII – 7
Tabel 7.3	: Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023	VII – 12
Tabel 7.4	: Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023	VII – 15
Tabel 7.5	: Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2023	VII – 16
Tabel 8.1	: Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023	VIII – 2
Tabel 8.2	: Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023	VIII – 4



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Hubungan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya	I – 12
Gambar 2.1	: Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 1
Gambar 2.2	: Komposisi Pembagian Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 2
Gambar 2.3	: Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 3
Gambar 2.4	: Peta Geologi Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 6
Gambar 2.5	: Peta Rawan Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang	II – 14
Gambar 2.6	: Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	II – 24
Gambar 2.7	: Persentase Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017	II – 27
Gambar 2.8	: Angka Melek Huruf Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017	II – 61
Gambar 2.9	: Jumlah Gizi Buruk dan Gizi Kurang (Kasus) di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 - 2016	II – 80
Gambar 2.10	: Cakupan Kunjungan Bayi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017	II – 105
Gambar 3.1	: Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (Rp)	III – 8
Gambar 3.2	: Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (persen)	III – 9
Gambar 3.3	: Persentase Tingkat Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (persen)	III – 10
Gambar 3.4	: Persentase Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (persen)	III – 11
Gambar 3.5	: Perkembangan Kontribusi Komponen-komponen PAD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (persen)	III – 12
Gambar 3.6	: Kontribusi Komponen-komponen Dana Perimbangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (persen)	III – 14
Gambar 3.7	: Kontribusi Komponen LLPD yang Sah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (persen)	III – 15



Gambar 3.8	: Perkembangan Nilai Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013 – 2017 (Rp)	III – 16
Gambar 3.9	: Proporsi Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (persen)	III – 17
Gambar 3.10	: Proporsi Alokasi Belanja Langsung Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (persen)	III – 18
Gambar 3.11	: Tingkat Realisasi Serapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (persen)	III – 19
Gambar 3.12	: Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (Rp Juta)	III – 20
Gambar 4.1	: Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	IV – 3
Gambar 4.2	: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017	IV – 5
Gambar 4.3	: Angka Melek Huruf Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	IV – 7
Gambar 4.4	: Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017	IV – 8
Gambar 4.5	: Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017	IV – 10
Gambar 4.6	: Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017	IV – 12
Gambar 4.7	: Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017	IV – 14
Gambar 4.8	: Tingkat Pengangguran Terbuka Se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017	IV – 23
Gambar 4.9	: Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017	IV – 24
Gambar 4.10	: Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017	IV – 25
Gambar 4.11	: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018	IV –
Gambar 5.1	: Keselarasan Hubungan Antara Visi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Visi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang	V – 7



- Gambar 5.2 : Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Visi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 V – 10
- Gambar 5.3 : Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah V – 14
- Gambar 7.1 : Asumsi Ekonomi Makro dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2019-2023 VII – 5
- Gambar 7.2 : Asumsi Ekonomi Makro dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2019-2023 VII – 6



P E N D A H U L U A N

Latar Belakang
Dasar Hukum Penyusunan
Hubungan Antar Dokumen
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan

B A B 1



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 Ayat (1) "Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional". Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan berakhirnya masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Periode Tahun 2013 - 2018 pada Bulan Juni 2018, maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan



pemilihan kepala daerah (Pilkada), dimana Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang terpilih Ir. H. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.Si untuk Periode Tahun 2018 – 2023 telah dilantik oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Desember 2018. Oleh karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu paling lama enam bulan setelah pelantikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sudah harus menyusun dan menetapkan RPJMD Tahun 2018 – 2023.

Dokumen RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 harus memperhatikan dan bersinergi dengan RPJPN 2005 – 2025, RPJMN Tahun 2015– 2019 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023.

Selain itu untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang , Penyusunan RPJMD Tahun 2018 – 2023 harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 khususnya pada Tahap Keempat Rencana Pembangunan Lima Tahunan. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat dalam RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 ditekankan pada:

1. Penuntasan Wajar Dikdas 12 Tahun;
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Daerah Terhadap Kondisi Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Mempertahankan dan Mengembangkan Komoditi Unggulan Spesifik Lokal; dan





4. Mewujudkan Kawasan-Kawasan Bisnis Berskala Nasional.

Dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 menggunakan empat pendekatan yaitu :

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas - bawah dan bawah - atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah provinsi, hingga tingkat nasional.

Pendekatan Teknokratis ini dilakukan diawali dengan penyusunan rencana pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan dilanjutkan dengan penyajian pada rancangan RPJMD.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan dirumuskan permasalahan dan isu strategis. Isu strategis digunakan sebagai dasar untuk menyusun visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dan arah kebijakan. Pendekatan teknokratis juga dilakukan untuk menyusun proyeksi keuangan daerah dan target capaian indikator untuk masing-masing ukuran.

Pendekatan Partisipatif dalam Penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:

1. Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;



2. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
3. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
4. Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
5. Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
6. Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pendekatan politis dalam penyusunan RPJMD adalah upaya untuk menterjemahkan program-program pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih pada saat kampanye, kemudian disusun ke dalam Rancangan RPJMD, melalui tahapan :

1. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
2. Melakukan konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
3. Melakukan pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Pendekatan yang terakhir digunakan dalam Penyusunan RPJMD adalah perpaduan antara pendekatan *bottom up* dan *top down*, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta



sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 - 2023 juga memperhatikan konsepsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) untuk memastikan tujuan, target, maupun indikator TPB benar-benar terintegrasi ke dalam dokumen RPJMD. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menggunakan analisis TPB juga menjadi pedoman dan acuan di dalam penyusunan dokumen RPJMD.

Secara teknis, penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 - 2023 sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 disusun berdasarkan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);



4. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4846);
7. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
8. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016, Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6133);



19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 199);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 136);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13



- Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 927);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1955);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 461);
 31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 868);
 32. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1687);



33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1891);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1538);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 1540);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1619);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
39. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Daerah;



41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Prov. Sulsel Nomor 301);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi selatan, oleh karena itu RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2014 - 2019, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023, disamping berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011 - 2031 serta hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013–2018.

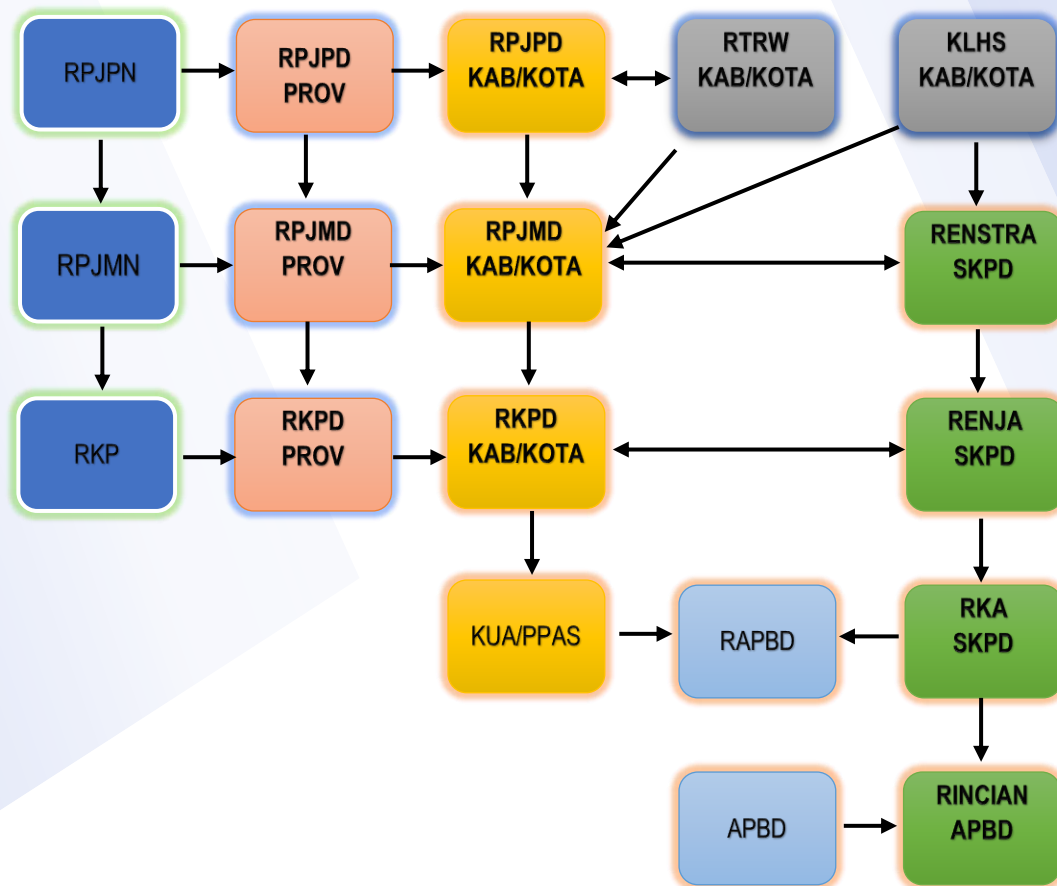


Selain dokumen-dokumen perencanaan di atas, juga perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, yakni :

1. Agenda Pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs);
2. RPJMD dan RTRW kabupaten sekitar; dan
3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023.

Selanjutnya RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1
Hubungan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya





Dokumen RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang juga harus memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 dan RPJPN Tahun 2005 – 2025 serta RPJMN Tahun 2015 - 2019. Sebagai bagian integral dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, desain perencanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang harus sejalan dan sinergitas dengan provinsi maupun nasional secara substansial yang tercermin dari formulasi tujuan, sasaran, strategi maupun arah kebijakan dan program pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 mejadi acuan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya dapat di jabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Selain itu, dokumen RPJMD ini juga dapat dijabarkan ke dalam RKPD setiap tahunnya selama periode 2018 - 2023 dimana RKPD ini selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) setiap tahunnya, untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan daerah di dalam RPJMD ini akan tercapai secara bertahap setiap tahun, sehingga proses pembangunan daerah akan terlaksana dalam suatu sistem yang terencana dan berkelanjutan setiap tahunnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Untuk menjabarkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
2. Untuk memantau perkembangan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Sidenreng



Rappang. Menentukan arah dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 5 (lima) tahun ke depan.

3. Menjamin terciptanya efektivitas, efisiensi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah dan antar fungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang efektif, efisien, berkeadilan serta berkelanjutan.
5. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan bersifat indikatif yang memuat kerangka makro Kabupaten Sidenreng Rappang dan pilihan program prioritas setelah dibahas dalam rangkaian forum Musrenbang RPJMD.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Sebagai suatu upaya pemecahan dan antisipasi bagi kepentingan dan kebutuhan mutakhir daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
4. Menjamin pelaksanaan pembangunan yang partisipatif.
5. Merupakan bahan acuan utama bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.
6. Menyediakan tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah.
7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencapai tujuan pembangunan jangka



menengah dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan dokumen RPJMD.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III. Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah beberapa tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

Bab IV. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini memuat rangkaian proses yang menghasilkan isu-isu strategis pembangunan daerah. Tahapan dimulai dengan perumusan permasalahan pembangunan, dilanjutkan dengan menelaah dokumen perencanaan lainnya maupun isu-isu strategis di tingkat internasional, nasional, regional maupun di lingkungan internal Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan berbagai telaahan tersebut, maka dirumuskan dan ditetapkan isu-isu strategis bagi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang 5 (lima) tahun yang akan datang.

Bab V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Visi adalah rumusan umum mengenai



keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Tujuan dan Sasarana adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Bab VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan arah kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

Bab VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat rencana program perangkat daerah berdasarkan arah kebijakan pembangunan dan urusan/fungsi penunjang dan pendukung urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Penyajian indikasi rencana program disertai dengan indikator kinerja program (*outcome*).

Bab VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini memuat indikator kinerja sebagai penunjuk capaian atas program-program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Bab ini berguna sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta arah bagi Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bab IX. Penutup

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.



GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kondisi Umum DaerahAspek Kesejahteraan MasyarakatAspek Pelayanan UmumAspek Daya Saing DaerahStandar Pelayanan Minimal (SPM)Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)

BAB 2



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten ini Terletak diantara 3^o43' – 4^o09' Lintang Selatan dan 119^o41' – 120^o10' Bujur Timur. Letak Kabupaten Sidenreng Rappang berbatasan dengan :

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang



- Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Barat : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang



Wilayah Admnistrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 1.883,25 Km² terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan.

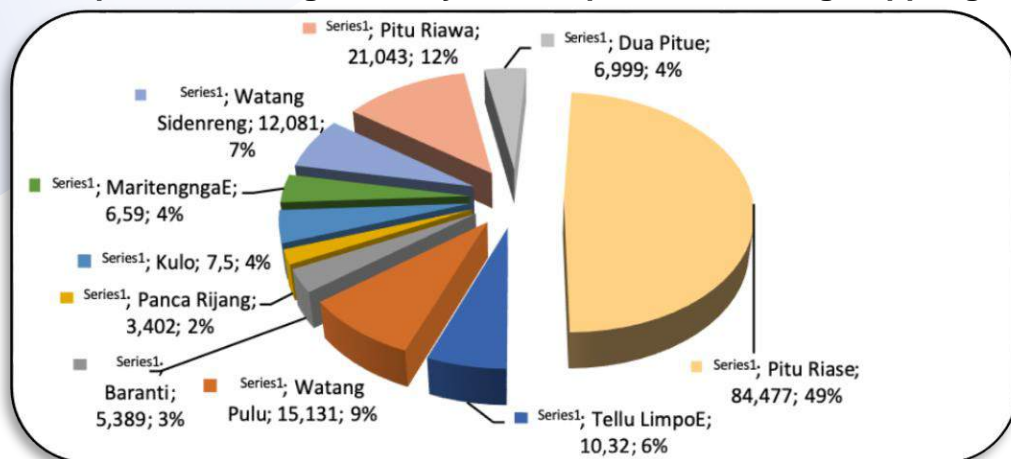
Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan (Ha) dan Jumlah Desa/Kelurahan

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa/Kelurahan	
			Kelurahan	Desa
1	Panca Lautang	15.393	3	7
2	Tellu LimpoE	10.320	6	3
3	Watang Pulu	15.131	5	5
4	Baranti	5.389	5	4
5	Panca Rijang	3.402	4	4
6	Kulo	7.500	-	6
7	MaritengngaE	6.590	7	5
8	Watang Sidenreng	12.081	3	5
9	Pitu Riawa	21.043	2	10
10	Dua Pitue	6.999	2	8
11	Pitu Riase	84.477	1	11
Jumlah		188.325	38	68

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Berdasarkan informasi pada Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 11 kecamatan, terlihat bahwa kecamatan terluas adalah Kecamatan Pitu Riase dengan luas 84.477 Ha, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Maritengngae dengan luas 6.590 Ha, secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.2
Komposisi Pembagian Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang



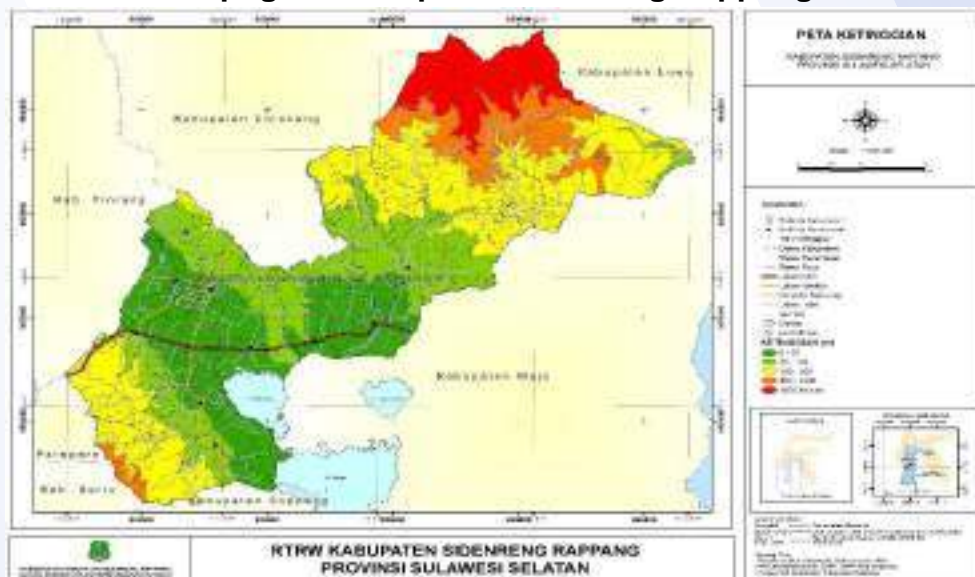


2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografi

Kabupaten Sidenreng Rappang secara geografis terletak di antara 3°43'– 4°09' Lintang Selatan dan 119°41'–120°10' Bujur Timur kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Secara umum kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang didominasi oleh daerah yang datar, kondisi lain adalah daerah perbukitan dan yang lebih kecil adalah daerah pegunungan.

2.1.1.2.1 Kondisi Topografi

Gambar 2.3
Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang



Kabupaten Sidenreng Rappang dilihat dari kondisi kelerengan dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu :

- a. Lereng 0-2% meliputi 42,80% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 80.611 Ha, kelerengan ini tersebar di seluruh kecamatan. Jenis penggunaannya adalah sawah, perkebunan rakyat, kolam masyarakat dan perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 0–2% paling luas adalah Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 11.385 Ha atau 14,12 % dari luas areal yang berlereng 0-2% dan yang tersempit adalah Kecamatan Panca Rijang seluas 3.402 Ha (4,22%) luas areal yang berlereng 0–2%.
- b. Lereng 2-15 % meliputi 4,6% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 8.790 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5



(lima) Kecamatan, kelerengan ini baik dimanfaatkan untuk tanaman pertanian dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah sawah, perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan, Kecamatan yang mempunyai lereng 2–15% paling luas adalah Pitu Riase seluas 3.457 Ha (39,33%), Watang Pulu seluas 2.306 Ha atau 26,23%, Panca Lautang seluas 1.389 Ha (15,80), Pitu Riawa seluas 923 Ha (10,55%) dan Tellu LimpoE seluas 715 Ha atau 8,13%. Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua pituE tidak terdapat jenis kelerengan ini.

- c. Lereng 15-40 % meliputi 16,68% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 31,414 Ha, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) Kecamatan, kelerengan ini masih cukup baik dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan perkebunan dengan tetap memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan rakyat, hutan dan sebagian kecil perkampungan dan persawahan, Kecamatan yang mempunyai lereng 15-40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 20.483 Ha (65,20%), Panca Lautang seluas 3.573 Ha atau 11,37%, Pitu Riase seluas 3.456 Ha (11%), Tellu LimpoE mempunyai luas dengan kelerengan 15-40% 2.244 Ha (7,14%) dan Kecamatan Wattang Pulu seluas 1.658 Ha (5,28%). Sedangkan Kecamatan Baranti, Panca Rijang, Kulo, MaritengngaE, Watang Sidenreng dan Dua PituE tidak terdapat jenis kelerengan ini.
- d. Lereng di atas 40 % meliputi 34,31% dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang atau sekitar 64.614 Ha. Daerah ini merupakan daerah yang harus dihutankan agar dapat berfungsi sebagai pelindung hidrologis serta menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup, kelerengan ini tersebar hanya tersebar pada 5 (lima) kecamatan. Jenis penggunaan saat ini adalah perkebunan, sebagian besar hutan lindung dan tanah yang rusak (kritis), kecamatan yang mempunyai lereng diatas 40% paling luas adalah Kecamatan Pitu Riase seluas 50.811 Ha (78,64%), Pitu Riawa seluas 7.592 Ha (11,75%), Tellu LimpoE mempunyai luas 2.524 Ha (3,91 %), Panca Lautang seluas 2.138 Ha atau 3,31%, dan Kecamatan Watang Pulu seluas 1.549 Ha (2,04 %).

Kondisi topografi untuk wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang bervariasi dengan daratan tertinggi adalah Kecamatan Pitu Riase dengan ketinggian rata-rata 1000 M diatas permukaan laut (dpl), dan dataran



terendah adalah Kecamatan Maritengngae, Panca Rijang, Baranti dengan ketinggian rata-rata mulai dari 0-25 M dpl.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan adalah tanah datar, disusul keadaan tanah bergunung, kemudian berbukit dan terakhir adalah Rawa Danau. Khusus Kecamatan Baranti, Maritengngae dan Dua PituE kondisi topografi 100% tanah datar, sedangkan Kecamatan Panca Lautang, Tellu LimpoE, Watang Pulu dan Pitu Riase didominasi keadaan tanah bergunung. Kondisi Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017

No	Kecamatan	Keadaan Tanah (%)				Total
		Datar	Berbukit	Bergunung	Rawa / Danau	
1	Panca Lautang	15	25	57	3	100
2	Tellu LimpoE	15	35	49	1	100
3	Watang Pulu	25	5	70	-	100
4	Baranti	100	-	-	-	100
5	Panca Rijang	97	3	-	-	100
6	Kulo	90	5	5	-	100
7	MaritengngaE	100	-	-	-	100
8	Watang Sidenreng	85	15	-	-	100
9	Pitu Riawa	60	10	30	-	100
10	Dua Pitue	100	-	-	-	100

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

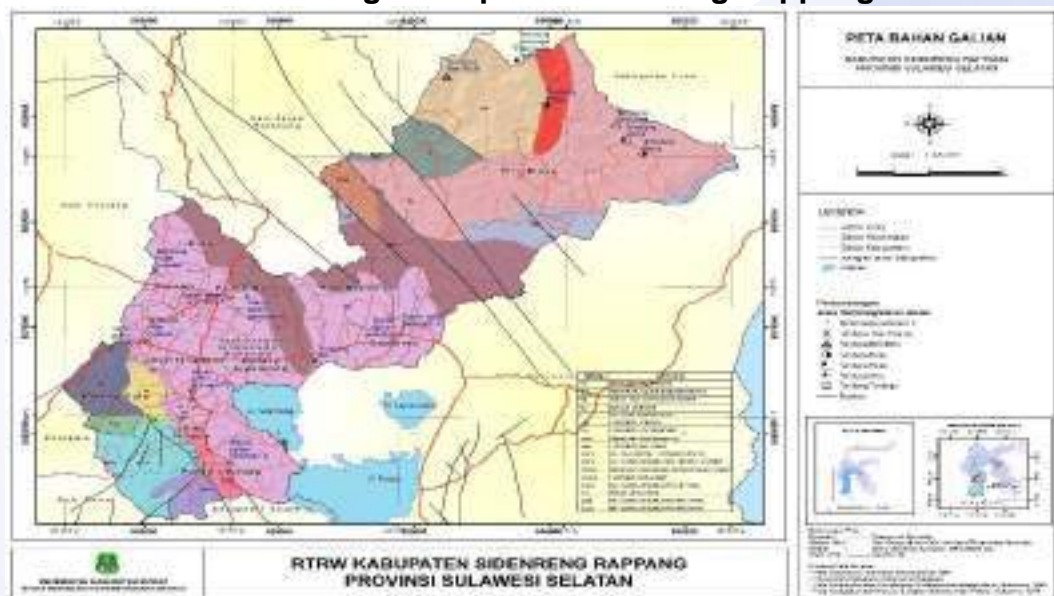
2.1.1.2.2 Kondisi Geologi

Berdasarkan Peta Tinjauan tanah yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian Bogor Tahun 1966, maka jenis tanah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari alluvial, regosol, grumusol, mediteran dan pedsolit. Jenis tanah **Alluvial** meliputi 21,08 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang paling luas terdapat pada Kecamatan Pitu Riawa yaitu 12.110 Ha dan yang paling sempit pada Kecamatan Panca Rijang yaitu 228 Ha. Bahkan ada 2 (dua) Kecamatan



yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Kecamatan Kulo dan Watang Pulu. Fisik tanah ini berupa dataran dan merupakan endapan tanah liat bercampur pasir halus hitam kelabu dengan daya penahan air cukup baik dan tersedia cukup mineral yang berguna bagi tumbuh-tumbuhan. Jenis tanah alluvial terdiri dari alluvial hidromorf daerah kering, alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua, alluvial coklat kekelabuan.

Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Sidenreng Rappang



Jenis tanah **Regosol** seluas 19,74 % atau 37.174 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Wattang Pulu yaitu 14.322 Ha atau sekitar 38,52 % dari luas areal yang berjenis tanah regusol dan yang paling sempit terdapat di Kecamatan Panca Rijang seluas 1.033 Ha. Bahkan terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang tidak terdapat jenis tanah ini yaitu Pitu Riawa, Dua PituE dan Pitu Riase. Jenis tanah Regusol kadang-kadang terdiri dari lapisan cadas terutama yang berpasir berwarna kelabu hitam sampai kelabu coklat, porositas sedang dan agak mudah kena erosi. Tanah regusol vulkanik baik untuk tanaman padi, tebu, tembakau, palawija, sayuran dan beberapa jenis tanaman perkebunan lainnya. Jenis tanah **Grumosol** seluas 1,20 % atau 2.251 Ha dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan MaritengngaE yaitu 1.334 Ha atau sekitar 50,37 %



dari luas areal yang berjenis tanah grumusol, kemudian berturut-turut Kecamatan Watang Pulu seluas 809 Ha (35,94%) dan Kecamatan Tellu LimpoE seluas 308 Ha atau sekitar 13,69%, sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Jenis tanah **Mediteran** seluas 11.416 Ha atau 6,06 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Panca Lautang seluas 5.121 Ha (44,85%) dari luas areal yang berjenis tanah mediteran, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riase yaitu 3.116 Ha atau sekitar 27,30%, Kecamatan Tellu Limpoe seluas 1.677 Ha (14,69%) dan kecamatan Pitu Riawa seluas 1.502 Ha (13,69 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini. Jenis tanah mediteran tersebut terdiri dari kompleks mediteran coklat kekelabuan dan regosol kompleks mediteran coklat regosol dan latosol. Jenis tanah **Podsolit** seluas 94.891 Ha atau 50,39 % dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan yang terluas di Kecamatan Pitu Riase seluas 76.934 Ha (81,07%) dari luas areal yang berjenis tanah padoslit, kemudian berturut-turut Kecamatan Pitu Riawa yaitu 7.431 Ha atau sekitar 7,83%, Kecamatan Kulo seluas 5.408 Ha (5,70 %), Kecamatan Watang Sidenreng seluas 2.977 Ha (3,14 %) dan Kecamatan Panca Rijang seluas 2.141 Ha (2,26 %), sedangkan Kecamatan lainnya tidak terdapat jenis tanah ini.

Sumber daya alam berupa tanah dan tambang yang terkandung di dalam tanah sangat dipengaruhi oleh struktur batuan dan proses geologi yang terjadi. Berdasarkan pengamatan peta geologi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Pertambangan 1977, maka di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat beberapa peristiwa geologi. Peristiwa geologi yang ada dan mempunyai luasan yang paling luas adalah Alluvium dan Endapan Pantai (Qac) yang mencapai 29,86 % dari luas Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian peristiwa geologi Batuan Gn Api besifat Basah (TPv) seluas 38.788 Ha (20,60%), Mulosa Sulawesi Sorasin (Tcm) seluas 30.638 Ha.



Berdasarkan penjelasan jenis tanah tersebut diatas, kondisi Geologi di masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Jenis Tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2009

No	Kecamatan	Jenis Tanah
1	Panca Lautang	- Kompleks Mediteran Coklat regosal dan Retosol - Regosol Coklat - Alluvial Kekelabuan - Alluvial Hidromorf
2	Tellu Limpoe	- Alluvial Kelabu Tua - Alluvial Hidromorf - Alluvial Colkat Kelabu - Regosol Coklat
3	Watang Pulu	- Regosol Coklat Kelabu - Grumesol Kelabu tua - Regosol Coklat
4	Baranti	- Alluvial Kelabu Tua - Regosol Kekelabuan - Alluvial Hidromorf
5	Panca Rijang	- Alluvial Kelabu - Padsolit Coklat - Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & Regosol
6	Kulo	- Regosol coklat kekelabuan - Podosolik merah kekuningan
7	Maritengngae	- Alluvial Kelabu Tua - Alluvial Coklat Kelabu - Grumesol Kelabu Tua - Kompleks Padsolit Coklat Kekuningan & regosol - Regosol Coklat Kelabuan
8	Watang Sidenreng	- Regosol Coklat Kelabuan - Podosolik merah kekuningan - Alluvial Coklat Kelabu
9	Pitu Riawa	- Alluvial Coklat Kelabu - Alluvial Hidromorf
10	Dua Pitue	- Alluvial coklat kelabu - Alluvial Hirdomorf - Padsolit Merah kekuningan - Kompleks padsolit coklat Kekuningan & regosol
11	Pitu Riase	- Kompleks Mediteran Coklat kekelabuan & regosol - Podosolik coklat - Padsolit Merah kekuningan



2.1.1.2.3 Kondisi Hidrologi

Pada wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 38 (Tiga Puluh Delapan) sungai yang mengalir berbagai Kecamatan. Di Kecamatan Panca Lautang terdapat 6 (enam) aliran sungai sepanjang 33.750 M, Kecamatan Tellu LimpoE dengan panjang 18.000 M, Kecamatan Watang Pulu dengan panjang 39.000 M, Kecamatan Baranti dengan panjang 15 M, Kecamatan Panca Rijang dengan panjang 19.550 M, Kecamatan Kulo dengan panjang 25.700 M, Kecamatan MaritengngaE dengan panjang 5.000 M, Kecamatan Dua PituE dengan panjang 68.460 M, merupakan Kecamatan yang memiliki aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang 7.500 M. Untuk mengetahui lebih jelas, dapat diketahui nama, panjang, lebar dan kedalaman sungai yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman Sungai
Kabupaten Sidenreng Rappang

NO.	KECAMATAN	NAMA SUNGAI	PANJANG (M)	LEBAR (M)	KEDALAMAN (M)
1.	Panca Lautang	- Bilokka	20.000	22	9
		- Lokabatu	2.000	6	3
		- Pape	2.000	2	3
		- Cakkarella	1.500	2	2
		- Bengkulu	5.000	6	2,5
		- Sessanriu	3.250	13	2,5
2.	Tellu Limpoe	- La Toling	5.000	5	2
		- Pemantingan	7.000	7	2,5
		- Watang Lowa	6.000	3	1,5
3.	Watang Pulu	- Bangkae	5.000	10	8
		- Cakkaloloe	5.000	10	5
		- Alekarajae	11.000	8	3
		- Lompengan	5.000	8	2,5
		- DataE	3.000	6	2,5
		- Pabbaresseng	4.000	5	2,5
		- Polojiwa	3.000	4	2,5
		- Batu Pute	3.000	3	3
4.	Baranti	- Rappang	15.000	30	5
5.	Panca Rijang	- Rappang	10.000	25	8



NO.	KECAMATAN	NAMA SUNGAI	PANJANG (M)	LEBAR (M)	KEDALAMAN (M)
		- Poka	2.500	5	7
		- Tellang	2.550	5	7
		- Taccipi	4.500	6	5
6.	Kulo	- Pangkiri	4.200	10	8
		- Kulo	7.500	7	5
		- AnrelliE	2.000	7	6
		- Anyuara	4.200	8	5
		- Cinra Angin	7.500	8	5
7.	Maritengngae	- Takkalasi	5.000	8	3
8.	Dua Pitue	- Bila	15.100	70	4
		- Baramasih	11.750	50	5
		- Betao	10.085	50	3
		- Tanru Tedong	4.250	100	5
		- Kalempang	6.375	80	4
		- Lancirang	8.150	10	3
		- Samallangi	2.500	8	2
		- Loka	10.250	25	3
9.	Pitu Riawa	- AnabannaE	5.000	7	3
		- Banjara	2.500	6	2.5

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

2.1.1.2.4 Kondisi Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi Shcmidt dan fergusson terdapat tiga macam iklim di Kabupaten Sidenreng Rappang, Tipe Pertama adalah iklim tipe C, yaitu iklim yang bersifat agak basah jumlah bulan kering rata-rata kurang dari tiga bulan dan bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Bulan basah adalah jumlah curah hujan bulanan lebih dari 100 mm. Bulan kering tersebut rata-rata terjadi pada bulan Juni, Juli dan Agustus, bulan-bulan lainnya adalah bulan basah. Daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah Utara bagian Timur mendekati Pegunungan Latimojong di Kecamatan Pitu Riase.

Tipe Kedua adalah iklim tipe D, artinya bersifat sedang dimana jumlah bulan kering rata-rata 3-4 bulan dan erlangsung Bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus. Daerah yang termasuk iklim ini terletak disebelah Timur dan bagian Tengah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan Dua PituE, Watang Sidenreng, MaritengngaE, Panca Rijang dan sebagian



Kecamatan Watang Pulu (bagian Barat) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Utara). Tipe Ketiga adalah iklim tipe E, artinya yang bersifat agak kering, dimana jumlah bulan kering rata-rata 4-6 bulan. Bulan-bulan kering terjadi pada bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September. Daerah yang termasuk iklim ini terletak sebelah Barat dan sebagian sebelah Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang, Kecamatan yang termasuk di dalam iklim ini adalah Kecamatan Baranti, Tellu LimpoE, Panca Lautang sebagian Kecamatan Dua Pitue, Watang Sidenreng, MaritengngaE, Panca Rijang dan sebagian Kecamatan Watang Pulu (bagian Timur) serta sebagian kecil Kecamatan Kulo (bagian Barat sebelah Timur). Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat tujuh (7) Station Penakar Hujan (SPH) untuk menakar curah hujan antara lain di Tanru Tedong, Rappang, Amparita, Bilokka, Baranti, Lawawoi, Pangkajene BPP Sereang. Penyebaran curah hujan yang berbeda menyebabkan pola penyebaran tipe iklim yang berbeda pula. Pada daerah yang mempunyai iklim C, rata-rata curah hujan setiap tahun lebih dari 2.500 mm dan hari hujan bulanan lebih dari 10 hari. Dengan demikian jumlah curah hujan yang tertinggi dalam waktu yang cukup lama. Curah hujan tertinggi dijumpai pada bulan Desember, Januari, Pebruari dan kemudian menurun mencapai nilai minimum sekitar bulan Agustus dan September.

Pada daerah yang mempunyai iklim D jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-2.000 mm dengan jumlah curah hujan bulanan berkisar 8-16 hari. Dengan demikian jumlah curah hujan yang cukup tinggi terjadi dalam waktu yang cukup lama. Pada daerah yang mempunyai iklim tipe E, jumlah curah hujan dapat bervariasi. Curah hujan tersebut mencapai kurang dari 1.600 mm. Jumlah curah hujan bulan berkisar antara 5-8 hari setiap bulan, dengan demikian jumlah curah hujan yang cukup tinggi terjadi dalam waktu yang tidak begitu lama.

Persentase curah hujan bulanan erat kaitannya dengan kegiatan yang akan dilaksanakan terutama dalam bidang pertanian. Prosentase



curah hujan bulanan ini menyatakan prosentase jumlah curah hujan yang jatuh pada tiap bulan. Pertumbuhan sebagian besar untuk tanaman tropik terletak antara 5–15 % (optimal: 8,3-11,5 %). Nilai dibawah 5 % menunjukkan kondisi yang tidak menguntungkan, tetapi idealnya untuk masa pemasakan dan panen. Nilai diatas 15 % menunjukkan curah hujan yang berlebihan dan berkelembaban yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan problem dalam pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Di tempat yang mempunyai iklim yang berbeda akan menyebabkan perbedaan prosentase curah hujan bulanan. Perbedaan ini disebabkan oleh waktu dan jumlah curah hujan.

2.1.1.2.5 Kondisi Penggunaan Lahan

Sumber daya lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terlihat dari kondisi tutupan lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah, klimatologi wilayah, dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan lahan yang terbentuk hingga saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri atas Sawah, Pemukiman, Kebun Campur, Ladang, Kolam/Tambak/Rawa, Danau/Sungai, Perkebunan Rakyat, Hutan, Lapangan Olahraga, Semak/Belukar.

Penggunaan lahan didominasi oleh Kawasan Hutan dengan luas 82.669,05 Ha atau mencapai 43,89% dari total luas wilayah Kabupaten sebesar 188.325 Ha, dan Persawahan dengan luas 38.989,58 Ha atau sebesar 20,70% dari luas kabupaten. Khusus untuk kawasan permukiman dengan luas 5.989,95 (3,18%) dengan luas permukiman yang paling besar berada di Kecamatan Maritengngae dengan luas 1.154,57 Ha dan yang paling kecil Kecamatan Baranti dengan luas 282,58 Ha. Secara lengkap struktur penggunaan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:



Tabel 2.5
Penggunaan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	PERUNTUKAN KAWASAN BUDIDAYA	LUAS LAHAN (Ha)
1	Sawah	38.989,58
2	Permukiman	5.989,95
3	Kebun Campur	22.403,32
4	Ladang/Tegalan	2.487,02
5	Kolam/Tambak/Rawa	265,10
6	Danau/Sungai	5.867,86
7	Perkebunan Rakyat	9.323,65
8	Hutan	82.669,05
9	Lapangan Olahraga	5,83
10	Semak/Belukar	20.323,64
	Total	188.325,00

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2018

2.1.1.2.6 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 3 (tiga) jenis bencana yang sering terjadi yaitu:

Banjir

Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat titik rawan banjir yang tersebar pada beberapa kecamatan diantaranya di Kecamatan Tellu Limpoe, Panca Lautang, dan Kecamatan Watang Sidenreng yang berada disekitar Danau Sidenreng, Kecamatan Watang Pulu dan di Kecamatan Dua Pitue.

Longsor

Dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan hasil survey dan pengumpulan data instansi yang diperkuat oleh hasil wawancara terhadap masyarakat yang ada disekitar kawasan rawan longsor, terdapat potensi rawan longsor pada beberapa lokasi diantaranya di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa, dan beberapa desa yang ada di Kecamatan Pitu Riase yaitu Desa Lepingeng, Desa Tana Toro, dan Desa Belawae.

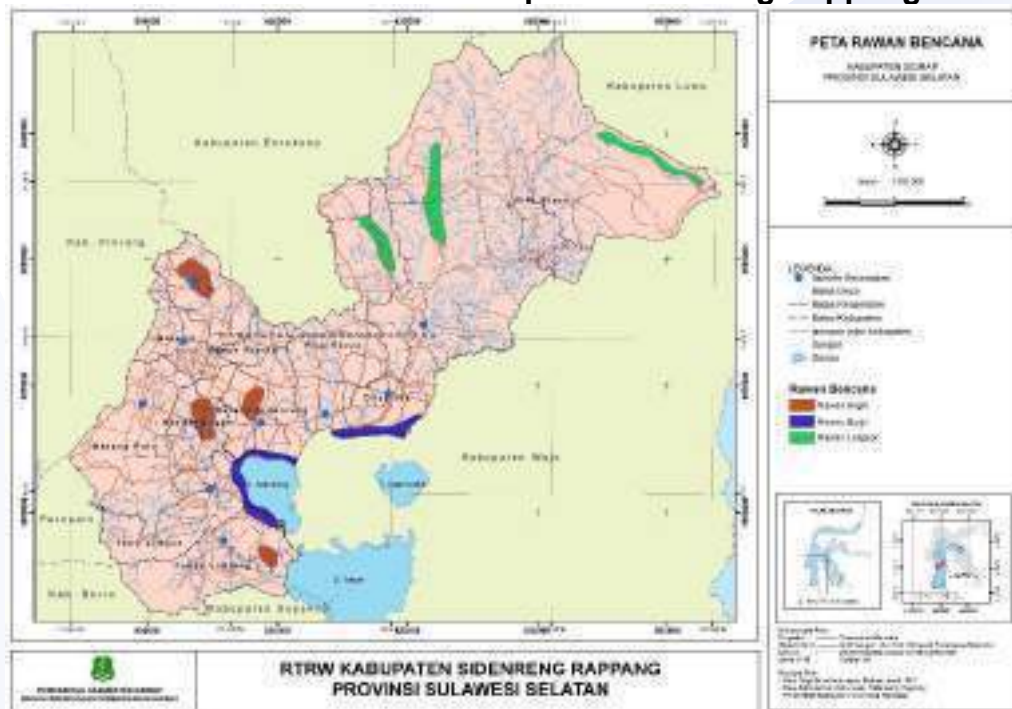
Angin Puting Beliung

Kawasan rawan bencana rawan angin terdapat beberapa titik yang sering terkena dampak yaitu di Kecamatan Kulo, Kecamatan Watang Sidenreng,



Kecamatan Maritangngae, Kecamatan Tellu Limpoe serta Kecamatan Panca Lautang.

Gambar 2.5
Peta Rawan Bencana Kabupaten Sidenreng Rappang



Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah kejadian bencana alam yaitu angin puting beliung/kencang sebanyak 77 kali kejadian, banjir sebanyak 21 kejadian dan longsor sebanyak 4 kejadian yang tersebar di beberapa desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan total kerugian sebesar Rp.85.655.162.000,- seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Tahun	Kejadian bencana	Lokasi kejadian	Jumlah kejadian	Nilai kerugian (Rp)	Ket.
2013	Angin Kencang / Puting Beliung	Tersebar di 11 kecamatan	23 kali	3,418.143.000,-	
	Banjir	Tersebar di 7 kecamatan	7	43,790.750.000,-	
2014	Angin Kencang /	Tersebar di 9	19 kali	1,796.571.000,-	



Tahun	Kejadian bencana	Lokasi kejadian	Jumlah kejadian	Nilai kerugian (Rp)	Ket.
	Puting Beliung	kecamatan			
	Banjir	Tersebar di 4 kecamatan	7	696.000.000.-	
2015	Angin Kencang / Puting Beliung	Tersebar di 10 kecamatan	22 kali	853,505,000.-	
	Banjir	Tersebar di 2 kecamatan	2 kali	1,398,000.000.-	
	Longsor	1 kecamatan	2 kali	150.000.000.-	
2016	Angin Kencang / Puting Beliung	Tersebar di 5 kecamatan	7 kali	1,232,592,000.-	
	Banjir	1 kecamatan	2 kali	1,016,000.000.-	
	Longsor	1 kecamatan	1 kali	40.000.000.-	
2017	Banjir	Tersebar di 4 kecamatan	6 kali	154,550,000.-	
	Longsor	Tersebar di 6 kecamatan	6 kali	1,240,000.000.-	
	Banjir /Longsor	1 kecamatan	1 kali	9,605,700.000.-	

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2017

Untuk bencana yang timbul akibat kelalaian manusia yaitu kebakaran dalam kurung waktu 5 tahun terakhir mulai tahun 2013-2017 jumlah kejadian sebanyak 78 kali yang tersebar di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan total kerugian sebesar Rp. 17.366.320.000,- seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7
Kejadian Bencana Akibat Kelalaian Manusia
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Tahun	Kejadian bencana	Lokasi kejadian	Jumlah kejadian	Nilai kerugian (Rp.)	Ket.
2013	Kebakaran	Tersebar di 9 kecamatan	19 Kali	2,708.640.000,-	
2014	Kebakaran	Terjadi di 9 kecamatan	23 Kali	5,858,630.000,-	
2015	Kebakaran	Tersebar di 8 kecamatan	16 Kali	6.108.500.000,-	
2016	Kebakaran	Tersebar di 6 kecamatan	12 Kali	1,823,000,000.-	
2017	Kebakaran	Tersebar di 8 kecamatan	16 Kali	867,550.000,-	
Total			86 Kali	17,366,320.000,-	

Sumber : RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang;2013-2017



2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Kebijakan penataan ruang dikembangkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan wilayah yang mampu mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup, melalui upaya pengaturan keseimbangan kawasan lindung (daerah aliran sungai, daerah resapan air, ruang terbuka hijau, hutan lindung dll), sistem pusat-pusat permukiman (termasuk didalamnya permukiman skala besar), serta arahan sistem jaringan prasarana wilayah (sistem transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, sistem pembuangan limbah) dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pembangunan sektoral yang berbasis ruang perlu mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi dan efisiensi pembangunan, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor yang berkepentingan dan dampak merugikan pada masyarakat luas. Selain itu perlu dipertimbangkan kondisi pasar atau trend yang lagi berkembang di masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri penataan ruang banyak dibentuk oleh kondisi pasar.

Sehubungan dengan hal tersebut Kebijakan Penataan Ruang diarahkan pada :

- a. Penataan dan penyebaran penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
- c. Pembentukan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata berdasarkan potensi lokal;
- d. Penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong iklim investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan;



- e. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam berupa pengurangan resiko bencana geologi (bencana gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami) dan kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi utamanya adalah fungsi lindung dan tidak boleh dialih fungsikan untuk kegiatan budidaya;
- f. Pengembangan kawasan budidaya melalui optimalisasi fungsi kawasan dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- g. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang lestari, produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi; dan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

2.1.1.3.1 Rencana Struktur Ruang

Dalam rencana struktur ruang Pembagian pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri atas : 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, 2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau desa dan 3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu Kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, pusat dan distribusi hasil perindustrian, pariwisata, permukiman dan transportasi. Sedangkan PPK ditetapkan di Kawasan Perkotaan Otting Kecamatan Pitu Riawa, Kawasan Perkotaan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng, Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe, Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Kawasan Perkotaan Baranti Kecamatan Baranti, Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang, Kawasan Perkotaan Kulo Kecamatan



Kulo, Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, Kawasan Perkotaan Barukku Kecamatan Pitu Riase, Kawasan Perkotaan Bilokka Kecamatan Panca Lautang. Sedangkan untuk PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) ditetapkan di Panreng di Kecamatan Baranti, Maddenra di Kecamatan Kulo, Teppo di Kecamatan Tellu Limpoe, Batu di Kecamatan Pitu Riase, Wanio di Kecamatan Panca Lautang, Salobukkang di Kecamatan Dua Pitue, Kanyuara di Kecamatan Watang Sidenreng, Uluale di Kecamatan Watang Pulu, Ponrangae di Kecamatan Pitu Riawa, dan Lalebata di Kecamatan Panca Rijang. Untuk lebih jelas pusat-pusat kegiatan dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	PKL	PPK	PPL
1	Kawasan Perkotaan Pangkajene	Kawasan Perkotaan Amparita	Teppo di Kecamatan Tellu Limpoe
2		Kawasan Perkotaan Lawawoi	Uluale di Kecamatan Watang Pulu
3		Kawasan Perkotaan Baranti	Panreng di Kecamatan Baranti
4		Kawasan Perkotaan Rappang	Lalebata Kecamatan Panca Rijang
5		Kawasan Perkotaan Kulo	Madenra di Kecamatan Kulo
6		Kawasan Perkotaan Empagae	Kanyuara di Kecamatan Watang Sidenreng
7		Kawasan Perkotaan Otting	Ponrangae di Kecamatan Pitu Riawa
8		Kawasan Perkotaan Tanru Tedong	Salobukkang di Kecamatan Dua Pitue
9		Kawasan Perkotaan Barukku	Batu di Kecamatan Pitu Riase
10		Kawasan Perkotaan Bilokka	Wanio di Kecamatan Panca Lautang

Sumber : RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017 (Data diolah)

2.1.1.3.2 Kawasan Strategis Kabupaten

- a. KSK dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
 1. Kawasan Cepat Tumbuh agribisnis modern di Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Baranti;
 2. Rencana kawasan Peruntukan Industri dan pergudangan Kecamatan Watang Pulu;
 3. Pengembangan kawasan tertinggal di Kecamatan Pitu Riase;



4. Pengembangan kawasan pariwisata alam Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Kulo, dan Kecamatan Tellu Limpoe dan
 5. Pengembangan kawasan pariwisata buatan di Kecamatan Watang Pulu.
 6. Pengembangan kawasan Wisata Danau Sidenreng Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Desa Tetuji di Kecamatan Tellu Limpoe dan Kelurahan Wettie di Kecamatan Panca Lautang;
 7. Pengembangan Kawasan Wisata Puncak Bila di Kecamatan Pitu Riase;
 8. Pengembangan Wisata Kincir Angin Kecamatan Watang Pulu.
- b. KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup terdiri atas;
1. Perlindungan kawasan Wisata Danau Sidenreng di Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Watang Sidenreng dan Kecamatan Panca Lautang;
 2. kawasan rawan bencana longsor ditetapkan di Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Watang Sidenreng dan Kecamatan Dua Pitue;
 3. kawasan rawan bencana banjir di Kecamatan Dua Pitue, Pitu Riawa dan Kecamatan Panca Lautang;
 4. Reklamasi Kawasan Tambang Gunung Allakkuang, Kecamatan Maritengngae;
 5. Pelestarian air terjun Salu Maridi Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng.
- c. KSK dengan sudut kepentingan sosial budaya terdiri atas;
1. Kawasan pariwisata budaya ditetapkan di Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Watang Pulu;
 2. Rumah Adat Datae Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu
- d. KSK dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terdiri atas;
1. Pengembangan energi terbarukan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Kecamatan Watang Pulu;
 2. Rencana kawasan pertambangan mineral dan batubara di Kecamatan Pitu Riawa, Kecamatan Pitu Riase, dan Kecamatan Panca Rijang; dan
 3. Rencana kawasan eksploitasi panas bumi di Kecamatan Tellu Limpoe



2.1.1.3.3 Kawasan Peruntukan Pertanian dan Perikanan

- a. Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:
 1. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 2. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 3. Kawasan peruntukan perkebunan; dan
 4. Kawasan peruntukan peternakan.
- b. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan luasan 54.940,45 (lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh koma empat puluh lima) hektar, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng; dan
- c. Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan luasan 35.525,35 (tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima koma tiga puluh lima) hektar di sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Maritenggae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautan, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng;
- d. Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan luasan 14.640,71 (empat belas ribu enam ratus empat puluh koma tujuh puluh satu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Maritenggae,



sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautan, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng.

- e. Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdiri atas:
 1. Kawasan peruntukan pengembangan ternak besar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu dan sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang dengan luasan 24.450 (dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh) hektar; dan
 2. Kawasan peruntukan pengembangan peternakan unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Maritengngae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Baranti, dan sebagian wilayah Kecamatan Kulo dengan luasan 2.446 (dua ribu empat ratus empat puluh enam) hektar;
- f. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan 43.425 (empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima) hektar.
- g. Kawasan peruntukan perikanan, merupakan kawasan peruntukan budidaya perikanan darat;
- h. Kawasan peruntukan budidaya perikanan darat, merupakan kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar;
- i. Kawasan peruntukan budidaya perikanan air tawar, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng.

2.1.1.3.4 Kawasan Peruntukan Pariwisata

- a. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas:
 1. Kawasan peruntukan pariwisata budaya;
 2. Kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 3. Kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- b. Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:



1. Kawasan Monumen Ganggawa di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae;
 2. Kawasan Monumen Bambu Runcing di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang;
 3. Kawasan Monumen Andi Cammi di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu;
 4. Kawasan Masjid Kuno Jarrae di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae; dan
 5. Kawasan upacara adat Maccera Tappareng di Kelurahan Wettee Kecamatan Panca Lautang.
- c. Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada b, terdiri atas:
1. Kawasan Bungnge Tjitta Allakuang di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae;
 2. Kawasan Taman Wisata Alam Maddenra di Desa Maddenra Kecamatan Kulo;
 3. Kawasan Permandian Air Panas di Kelurahan Massepe Kecamatan Tellu Limpoe;
 4. Kawasan Danau Sidenreng di sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe dan sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang; dan
 5. Kawasan Gua Parinding di Kecamatan Pitu Riase;
- d. Kawasan peruntukan pariwisata buatan huruf c, terdiri atas:
1. Kawasan Taman Rekreasi Datae di Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu;
 2. Kawasan Taman Rekreasi Puncak Harapan Desa Lagading di Kecamatan Pitu Riase;
 3. Kawasan Taman Rekreasi Transpark di Kelurahan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu; dan
- e. Kawasan Agrowisata di Kecamatan Kulo, Kecamatan Baranti, Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Lautang, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Watan Pulu, Kecamatan Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riawa, dan Kecamatan Watang Sidenreng.

2.1.1.3.5 Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Migas

- a. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan merupakan kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral;



b. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral sebagaimana tersebut di atas, terdiri dari:

1. Wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa batubara, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Maritenggae, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng;
2. Wilayah usaha pertambangan bukan logam dan batuan, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Maritenggae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe, sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng;
3. Wilayah usaha pertambangan logam, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Baranti, sebagian wilayah Kecamatan Dua Pitue, sebagian wilayah Kecamatan Kulo, sebagian wilayah Kecamatan Maritenggae, sebagian wilayah Kecamatan Panca Rijang, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riase, sebagian wilayah Kecamatan Pitu Riawa, sebagian Wilayah Kecamatan Watang Pulu dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Sidenreng;
4. Wilayah usaha pertambangan radio aktif ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Panca Lautang, sebagian wilayah Kecamatan Tellu Limpoe dan sebagian wilayah Kecamatan Watang Pulu.

2.1.1.3.6 Kawasan Peruntukan Industri

- a. Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 1. Kawasan peruntukan industri sedang; dan
 2. Kawasan peruntukan industri rumah tangga.
- b. Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan kawasan industri pengelolaan hasil pertanian dan industri peternakan di arahkan ke Mattirotasi Kec. Watang Pulu, sebagian Kec. Panca Lautang, dan sebagian Kecamatan Kulo; dan
- c. Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf b, berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan diseluruh Kecamatan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



2.1.1.3.7 Potensi Energi Baru Terbaharukan (EBT)

Ketersediaan listrik serta penambahan pembangkit yang relatif agresif tersebut menjadi sebuah sinyal dorongan akselerasi perekonomian daerah. Ketersediaan pasokan listrik dengan cadangan daya yang terus membesar tersebut bahkan bisa menjadi momentum bagi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk bertransformasi menjadi lumbung energi dan melengkapi predikat daerah yang sebelumnya sebagai salah satu lumbung pangan di Tanah Air. Namun ketersediaan serta penambahan pembangkitan memerlukan dukungan peningkatan kapasitas transmisi dan konsistensi pelayanan serta pemerataan distribusi listrik guna mendukung kebijakan pengembangan industri.

Saat ini Kabupaten Sidenreng Rappang sedang melanjutkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) tahap kedua dengan kapasitas 70 MW yang merupakan investasi asing bekerjasama dengan perusahaan Indonesia di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kapasitas awal 75 MW.

Gambar 2.6
Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)





2.1.1.4 Aspek Demografi

2.1.1.4.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu potensi oleh suatu daerah dalam menyediakan tenaga kerja dengan kriteria keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses pembangunan. Potensi demografi ini harus dapat diimbangi dengan kualitas kehidupan yang baik agar jumlah penduduk yang besar tersebut tidak menjadi beban tetapi membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi disuatu daerah termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008-2017

NO.	KECAMATAN	TAHUN									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Panca Lautang	16,948	17,071	17,241	17,339	17,442	18,113	17,277	17,242	17,203	17,151
2	Tellu Limpoe	21,356	21,511	22,728	22,871	23,089	23,415	23,456	23,582	23,700	23,812
3	Watang Pulu	25,772	25,959	30,128	30,582	30,947	31,590	33,420	34,235	35,061	35,904
4	Baranti	26,378	26,569	28,068	28,369	28,522	28,997	29,476	29,763	30,045	30,313
5	Panca Rijang	25,077	25,258	27,086	27,332	27,613	28,195	28,173	28,383	28,584	28,779
6	Kulo	10,583	10,660	11,345	11,462	11,586	11,831	11,917	12,031	12,147	12,256
7	Maritengngae	40,473	40,767	46,139	46,643	47,203	48,197	48,955	49,563	50,172	50,767
8	Watang Sidenreng	15,616	15,729	17,051	17,203	17,395	17,762	17,605	17,703	17,805	17,893
9	Pitu Riawa	24,038	24,212	24,980	25,213	25,473	26,210	25,831	25,984	26,132	26,269
10	Dua Pitue	26,151	26,340	27,272	27,549	27,865	28,252	28,513	28,775	29,040	29,300
11	Pitu Riase	18,274	18,407	19,873	20,089	20,316	20,745	21,987	22,526	23,096	23,681
Jumlah		250,666	252,483	271,911	274,652	277,451	283,307	286,610	289,787	292,985	296,125

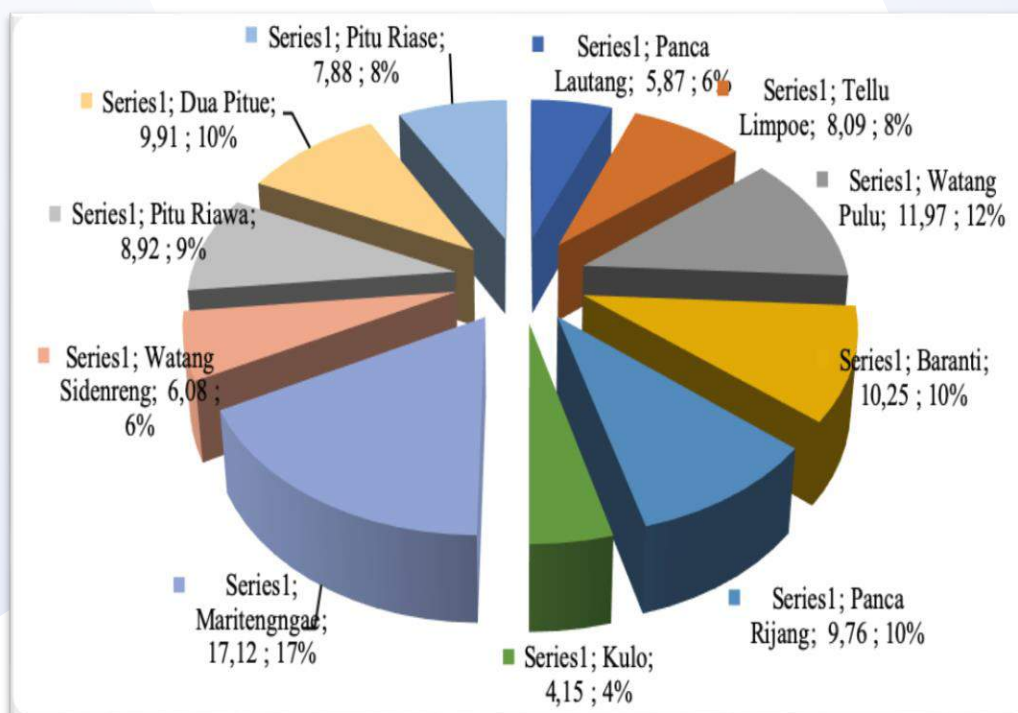
Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2008-2017





Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang selama sepuluh tahun terakhir ini terus mengalami kenaikan dan terkonsentrasi di kecamatan yang menjadi ibukota kabupaten, Kecamatan Panca Rijang dan kecamatan-kecamatan sekitar ibukota kabupaten. Pada 19.428 jiwa, yaitu dari 252.483 menjadi 271.911 jiwa. Pada tahun 2011 terjadi kenaikan tabel tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk tiap tahunnya. Pada tahun 2009 kenaikan sebesar 1817 jiwa, dari 250.666 jiwa menjadi 252.483 jiwa. Pada tahun 2010 terjadi kenaikan paling besar untuk lima tahun terakhir yaitu sebesar 2741 jiwa menjadi 274.652 jiwa dan pada tahun 2012 terjadi kenaikan menjadi 277.451 jiwa atau terdapat kenaikan 2799 jiwa. Lebih jelas mengenai persentase penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.7
Persentase Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017





Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) Tahun 2013-2017
Kabupaten Sidenreng Rappang

NO.	KECAMATAN	TAHUN									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Panca Lautang	8,726	9,387	8,368	8,909	8,364	8,878	8,364	8,839	8,340	8,811
2	Tellu Limpoe	11,167	12,248	11,146	12,310	11,223	12,359	11,223	12,477	11,356	12,456
3	Watang Pulu	15,577	16,013	16,538	16,882	16,971	17,264	16,971	18,090	17,839	18,065
4	Baranti	13,988	15,009	14,254	15,222	14,415	15,348	14,415	15,630	14,708	15,605
5	Panca Rijang	13,591	14,604	13,605	14,568	13,727	14,656	13,727	14,857	13,947	14,832
6	Kulo	5,762	6,069	5,811	6,106	5,875	6,156	5,875	6,272	5,999	6,257
7	Maritengngae	23,400	24,797	23,746	25,209	24,080	25,483	24,080	26,092	24,717	26,050
8	Watang Sidenreng	8,720	9,042	8,652	8,953	8,716	8,987	8,716	9,089	8,828	9,065
9	Pitu Riawa	12,858	13,352	12,739	13,092	12,833	13,151	12,833	13,299	13,000	13,269
10	Dua Pitue	13,866	14,386	13,865	14,648	14,013	14,762	14,031	15,009	14,294	15,006
11	Pitu Riase	10,451	10,294	11,082	10,905	11,371	11,155	11,371	11,725	11,975	11,706
Jumlah		138,106	145,201	139,806	146,804	141,588	148,199	141,606	151,379	145,003	151,122
Sex Rasio		95,11		95,23		95,54		95,54		95,95	

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017





Secara umum, penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Secara rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 sebesar 95,11 hingga tahun 2017 sebesar 95,95. Artinya, dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 96 penduduk laki-laki.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa) Tahun 2013-2017
Kabupaten Sidenreng Rappang

KELOMPOK UMUR	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
0-4	26.568	27.024	27.032	26.922	26.813
5-9	28.485	25.870	25.971	26.126	26.257
10-14	28.143	26.136	25.999	25.954	25.958
15-19	23.523	24.774	24.900	24.885	24.737
20-24	20.873	21.644	21.905	22.242	22.618
25-29	24.032	23.135	23.333	23.563	23.821
30-34	22.071	21.642	21.573	21.583	21.594
35-39	21.937	21.452	21.542	21.535	21.521
40-44	19.450	20.314	20.521	20.710	20.846
45-49	16.567	18.554	19.089	19.597	20.056
50-54	13.635	14.936	15.497	16.042	16.615
55-59	10.478	12.052	12.479	12.997	13.458
60-64	9.288	9.713	10.051	10.409	10.817
65-69	18.257	7.712	7.944	8.139	8.345
70-74	-	5.730	5.862	6.031	6.208
75+	-	-	6.089	6.270	6.461
JUMLAH	283.257	286.610	289.787	292.985	296.125

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang

Selain jumlah penduduk, data lain yang terkait dengan aspek demografi adalah kepadatan penduduk tiap kilometer persegi, seperti yang disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.12
Kepadatan Penduduk Per Km2 Tahun 2009-2016

No	Kecamatan	Tahun								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Panca Lautang	111	112	113	113	117	112	112	112	111



No	Kecamatan	Tahun								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2	Tellu Limpoe	208	220	222	224	226	227	228	230	231
3	Wattang Pulu	172	199	202	205	208	220	226	232	237
4	Baranti	493	521	526	529	538	546	552	558	563
5	Panca Rijang	742	796	803	812	828	828	834	840	846
6	Kulo	142	151	153	154	157	158	160	162	163
7	Maritengngae	619	700	708	716	731	742	752	761	770
8	Watang Sidenreng	130	141	142	144	147	145	146	147	148
9	Pitu Riawa	115	119	120	121	124	122	123	124	125
10	Dua Pitue	376	390	394	398	403	407	411	415	419
11	Pitu Riase	22	24	24	24	24	26	26	27	28
Jumlah Rata-Rata		134	144	146	147	150	152	154	156	157

Sumber data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2010-2017

Terlihat bahwa sebaran kepadatan penduduk per kilometer persegi di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009-2015 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan kepadatan penduduk rata-rata tahun 2009-2016 sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk tiap kecamatan dengan luas wilayah kecamatan. Untuk kecamatan yang memiliki jumlah penduduk besar sementara wilayah administrasi kecamatannya relatif sempit maka tingkat kepadatan perkilometranya juga besar. Terlihat bahwa walaupun jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Maritengngae yang juga sebagai ibukota kabupaten, kepadatan perkilometranya masih dibawah Kecamatan Panca Rijang, hal ini karena luas wilayah kecamatan Panca Rijang lebih sempit dari pada kecamatan Maritengngae, hal yang sama juga berlaku bagi kecamatan yang memiliki potensi kependudukan dan wilayah kecamatan yang kurang lebih sama.

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah $1.883,25 \text{ Km}^2$ yang didiami oleh 292,985 jiwa, pada delapan tahun terakhir yaitu 2009-2016 mengalami peningkatan dengan rata-rata kepadatan perkilometranya adalah 313 km^2 , akan tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan dengan kepadatan rata-rata 156 km^2

Faktor lain yang perlu dijelaskan pada aspek demografi adalah sex ratio atau perbandingan berdasarkan jenis kelamin seperti yang ditampilkan pada data berikut ini :



Tabel 2.13
Sex Ratio Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2009 – 2017

NO	KECAMATAN	TAHUN								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Panca Lautang	90.57	93.18	93.17	92.99	92.96	93.93	94.21	94.38	94.65
2	Tellu Limpoe	88.51	89.92	90.21	90.22	91.17	90.54	90.81	90.96	91.17
3	Watang Pulu	96.38	97.15	97.2	97.08	97.28	97.96	98.3	98.48	98.75
4	Baranti	91.39	93.03	93.26	92.51	93.2	93.64	93.92	94.05	94.25
5	Panca Rijang	92.6	92.73	92.9	92.81	93.06	93.39	93.66	93.8	94.03
6	Kulo	94.28	94.46	94.93	94.69	94.94	95.17	35.44	95.6	95.88
7	Maritengngae	93.14	93.5	93.96	94.12	94.37	94.2	94.49	94.65	94.88
8	Watang Sidenreng	93.64	95.88	96.29	96.18	96.44	96.64	96.98	97.15	97.39
9	Pitu Riawa	95.51	96.65	96.7	96.63	96.3	97.3	97.58	97.73	97.97
10	Dua Pitue	92.91	94.07	95.02	95.08	96.66	94.65	94.93	95.06	95.26
11	Pitu Riase	102.1	100.74	101.13	101.25	101.53	101.62	101.94	102.06	102.30

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2010-2017

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Secara sex ratio penduduk kabupaten Sidenreng Rappang selang delapan tahun terakhir menunjukkan angka dibawah 100 pada 10 kecamatan, sedangkan pada Kecamatan Pitu Riase menunjukkan angka di atas 100 yang artinya khusus di Kecamatan Pitu Riase jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki.

Data lain yang perlu diketahui dari sisi demografi adalah data jumlah rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga Indonesia menurut kecamatan tahun 2009 sampai tahun 2016. Berikut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.14
Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2009-2017

NO	KECAMATAN	TAHUN								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Panca Lautang	4,317	4,303	4,427	4,427	4,455	4,329	4,320	4,317	4,312
2	Tellu Limpoe	5,440	5,155	5,304	5,354	5,388	5,357	5,300	5,412	5,440
3	Watang Pulu	6,567	7,289	7,500	7,589	7,639	7,917	8,098	8,293	8,491
4	Baranti	6,720	7,042	7,246	7,285	7,332	7,332	7,379	7,436	7,487
5	Panca Rijang	6,389	6,450	6,637	6,705	6,748	6,666	6,703	6,748	6,790



NO	KECAMATAN	TAHUN								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
6	Kulo	2,695	2,761	2,841	2,872	2,890	2,888	2,909	2,935	2,959
7	Maritengngae	10,311	10,678	10,987	11,118	11,118	11,139	11,244	11,359	11,472
8	Watang Sidenreng	3,979	4,077	4,195	4,242	4,269	4,277	4,313	4,355	4,394
9	Pitu Riawa	6,124	5,767	5,934	5,995	6,033	5,996	6,098	6,084	6,128
10	Dua Pitue	6,663	6,257	6,438	6,512	6,553	6,569	6,632	6,701	5,625
11	Pitu Riase	4,657	4,734	4,871	4,926	4,957	5,236	5,236	5,487	6,770
Jumlah Rata-Rata		63,862	64,513	66,380	67,025	67,382	67,706	68,373	69,127	69,868

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2009-2017

Tren pertumbuhan jumlah anggota rumah tangga selang delapan tahun terakhir tahun 2009-2016 cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2010-2011 yang menurun sebesar 0,7. Pada tahun 2015-2017 jumlah rumah tangga tetap yaitu 68,373 artinya pada setiap satu rumah tangga terdapat 4 orang penghuni rumah tangga.

Tabel 2.15
Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan Tahun 2009-2017

NO	KECAMATAN	TAHUN								
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Panca Lautang	4.00	4.01	3.92	3.94	4.07	3.99	3.99	3.98	3.98
2	Tellu Limpoe	4.00	4.41	4.31	4.31	4.35	4.38	4.45	4.38	4.38
3	Wattang Pulu	4.00	4.13	4.08	4.08	4.14	4.22	4.23	4.23	4.23
4	Baranti	4.00	3.99	3.92	3.92	3.95	4.02	4.03	4.04	4.05
5	Panca Rijang	4.00	4.2	4.12	4.12	4.18	4.23	4.23	4.24	4.24
6	Kulo	4.00	4.11	4.03	4.03	4.09	4.13	4.14	4.14	4.14
7	Maritengngae	4.00	4.32	4.25	4.25	4.34	4.39	4.41	4.42	4.43
8	Watang Sidenreng	4.00	4.18	4.1	4.1	4.16	4.12	4.1	4.09	4.07
9	Pitu Riawa	4.00	4.33	4.25	4.25	4.34	4.31	4.26	4.3	4.29
10	Dua Pitue	4.00	4.36	4.28	4.28	4.31	4.34	4.34	4.33	4.33
11	Pitu Riase	4.00	4.2	4.12	4.12	4.18	4.2	4.30	4.21	4.21
Jumlah Rata-Rata		4.00	4.21	4.14	4.14	4.2	4.23	4.24	4.24	4.24

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2010-2017

2.1.1.5 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tentang Daya Dukung dan Daya dan Daya Tampung Lingkungan

Kajian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini



terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan. Dalam menentukan daya dukung kawasan perlu melibatkan banyak aspek, karena sangat bersifat kompleks yang melibatkan banyak faktor dalam menggambarkan interaksi antara kegiatan dengan ekosistem. Misalnya intensitas penyebaran dalam ruang dan waktu serta tujuan. Dengan kata lain dalam penentuan daya dukung suatu kawasan harus mencakup aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang memuat pengertian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Menurut UU Nomor 23 Tahun 1997. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Penentuan daya dukung berbasis potensi terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi daya dukung secara komprehensif dan kurang dapat menggambarkan data secara spasial kewilayahan. Hasil penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis potensi ini terkadang kurang dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam penentuan kebijakan pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena penentuan daya



dukung berbasis potensi hanya menggambarkan kondisi kapasitas lingkungan berbasis wilayah administrasi saja.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (*goods*) dan pelayanan (*services*). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau *disebut* pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu: Jasa penyediaan (*provisioning*); Jasa pengaturan (*regulating*); Jasa budaya (*cultural*); Jasa pendukung (*supporting*).

Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem dihitung dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang nilai 0–1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang



dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung dioverlaykan untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan.

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.16
Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan

No	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan yang diperkenankan
1	I	Semua jenis penggunaan lahan
2	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi
3	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi dan Pi (hanya Psd)
4	IV	Pt, semua jenis penggembalaan, semua jenis hutan
5	V	Semua jenis penggembalaan (Pgi, Pgsd, Pgt), semua jenis hutan
6	VI	Pgsd, Pgt, semua jenis hutan
7	VII	Pgt, hutan
8	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

Sumber : Klingebiel dan MontgOmery (1961, diringkats) dan Fenton (2014)

Keterangan : Psi: Pertanian sangat intensif; Pi : pertanian intensif; psd : pertanian intensitas sedang; Pt: pertanian terbatas; Pgi : Penggembala intensif; Pgsd : penggembala sedang; Pgt : Penggembala terbatas



Penjelasan kelas kemampuan lahan sebagai berikut: Kelas I, tanah pada kelas ini memiliki sedikit faktor pembatas dan memiliki resiko kerusakan yang kecil. Jenis tanah pada kelas ini sangat baik dan dapat diusahakan untuk segala jenis pertanian. Tanah ini umumnya relatif datar, bahaya erosi kecil, solum tanah dalam, drainase baik, mudah diolah, penahan air yang baik dan responsive terhadap pemupukan.

Kelas II, tanah pada kelas ini mempunyai sedikit faktor pembatas yang dapat mengurangi pilihan penggunaannya atau membutuhkan tindakan konservasi yang sedang. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran – saluran air.

Kelas III, tanah pada kelas ini mempunyai lebih banyak faktor pembatas daripada tanah pada kelas II, dan apabila digunakan untuk usaha pertanian akan memerlukan tindakan konservasi yang serius, yang umumnya lebih sulit baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharannya. Faktor – faktor pembatas pada lahan kelas ini dapat berupa lereng yang agak miring, cukup peka terhadap erosi, drainase jelek, permeabilitas tanah sangat lambat, solum dangkal, kapasitas menahan air rendah, kesuburan dan produk aktifitas tanah rendah dan sulit untuk diperbaiki.

Kelas IV, tanah pada kelas ini merupakan faktor pembatas yang lebih besar dari pada kelas III, sehingga jenis penggunaan/jenis tanaman yang diusahakan juga sangat terbatas. Tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curam (15% - 30%), sehingga sangat peka terhadap



erosi, drainasenya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah.

Kelas V, tanah pada kelas ini terletak pada tempat yang datar/ agak cekung, selalu basah/tergenang air, atau terlalu banyak batu di atas permukaan tanah. Karena itu tanah pada kelas ini tidak sesuai untuk usaha pertanian tanaman semusim, namun lebih sesuai untuk ditanami dengan vegetasi permanen seperti tanaman makanan ternak/ dihutankan.

Kelas VI, tanah pada kelas ini terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/telah mengalami erosi yang sangat berat/mempunyai solum yang sangat dangkal. Tanah pada kelas ini tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen.

Kelas VII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curang, telah tererosi berat, solum sangat dangkal dan berbatu. Karena itu tanah ini hanya cocok untuk ditanami dengan vegetasi permanen.

Kelas VIII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang sangat curam, permukaan sangat kasar, tertutup batuan lepas/batuan singkapan/tanah pasir pantai. Karena itu tanah pada kelas ini dibiarkan pada keadaan alami dibawah vegetasi alami (cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi).

Tabel 2.17
Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang

Kelas	Luas (Ha)	Persentase (%)
II	15.001,58	8,68
IV	25.907,20	14,99
V	59.236,09	34,27
VI	72.717,66	42,07

Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasilnya sebesar 42,07% luas lahan kelas VI, 32,27% luas lahan kelas V, 14,99% luas lahan kelas IV, dan 8,68% luas lahan kelas II. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar



lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih sesuai untuk vegetasi permanen, terletak pada lereng yang cukup curam, sehingga sangat peka terhadap erosi, drainasinya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah, penggembalaan terbatas dan semua jenis hutan, selain itu juga didominasi untuk kegiatan pertanian terbatas, serta sangat sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan factor pembatas, lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya terlalu banyak batu di atas permukaan tanah dan cenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air. Terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi berat. Hanya cocok untuk padang rumput, hutan produksi terbatas tanpa adanya perlindungan. Sebaiknya dibiarkan secara alami. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan airudara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran – saluran air.

Adapun kecamatan yang berpotensi untuk pengembangan budidaya pertanian diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.18
Potensi Pengembangan Budidaya Pertanian
Kabupaten Sidenreng Rappang

KECAMATAN	KELAS			
	II	IV	V	VI
Baranti			4.370,23	
Dua Pitue		1.098,09	6.393,05	
Kulo	2.316,44	1.075,05	3.810,52	
Maritengngae	43,10		7.163,47	
Panca Lautang	584,76	1.161,04	6.932,72	5.559,56
Panca Rijang	2.326,11	13,43	2.050,88	
Pitu Riase	868,81	12.686,64	4.076,20	53.354,52



KECAMATAN	KELAS			
	II	IV	V	VI
Pitu Riawa	1.191,33	6.095,26	7.719,81	5.888,26
Tellu Limpoe	2.127,96	175,90	3.477,08	3.299,53
Watang Pulu	999,39	3.601,80	7.333,31	4.615,80
Watang Sidenreng	4.543,68		6.448,83	
TOTAL	15.001,58	25.907,20	59.236,09	72.717,66

Berdasarkan tabel diatas, daerah pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Watang Sidenreng (4.534,68 ha) dan Kecamatan Panca Rijang (2.326,11 ha) dan Kecamatan Kulo (2.316,44 ha). Sedangkan untuk Sebagian daerah Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen beberapa bagian juga di kecamatan ini diarahkan untuk peruntukan cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi seperti kecamatan Pitu Riase dan Pitu Riawa.

Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem yang datanya tersedia adalah daya dukung penyediaan air bersih dan penyediaan pangan. Penentuan ambang batas dihitung berdasarkan jasa eksosistem penyediaan air bersih dengan pendekatan ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) melalui pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi dengan menggunakan system grid skala ragam. Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih dan pangan menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Penyediaan air bersih di Kabupaten Sidenreng Rappang diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.19
Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih
Kabupaten Sidenreng Rappang

KECAMATAN	STATUS AIR TAHUN 2017 (M3/TAHUN)		
	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	SELISIH
Baranti	8.455.802,96	2.608.742,24	5.847.060,73
Dua Pitu	13.937.493,13	3.986.337,65	9.951.155,49
Kulo	9.569.227,67	2.951.171,73	6.618.055,94
Maritengngae	14.451.130,92	4.000.779,60	10.450.351,32
Panca Lautang	16.587.455,49	3.925.108,53	12.662.346,96



KECAMATAN	STATUS AIR TAHUN 2017 (M3/TAHUN)		
	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	SELISIH
Panca Rijang	5.993.983,42	2.258.435,31	3.735.548,11
Pitu Riase	58.899.756,85	6.898.122,23	52.001.634,63
Pitu Riawa	22.677.898,44	5.531.268,77	17.146.629,68
Tellu Limpoe	10.522.180,44	3.097.381,61	7.424.798,84
Watang Pulu	16.984.295,23	4.781.361,30	12.202.933,93
Watang Sidenreng	15.299.076,39	4.413.389,84	10.885.686,55
TOTAL	193.378.300,95	44.452.098,78	148.926.202,17

Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 193.378.300,95 m³/tahun, sementara kebutuhan sebesar 44.452.098,78 m³/tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 148.926.202,17 m³/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Pitu Riase (52.001.634,63 m³/Tahun), dan Pitu Riawa (17.146.629,68 m³/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang tutupan lahannya masih bagus (bervegetasi) dan berada dalam kawasan hutan. Sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Panca Rijang (3.735.548,11 m³/Tahun).

Adapun proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk setiap kecamatannya diperlihatkan pada T Tabel 2.18. Untuk hasil proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air tahun 2022, 2027 dan 2032 secara umum masih mencukupi dengan pertumbuhan penduduk 1- 2%, dengan asumsi ketersediaan air tetap. Pada tahun 2022, 2027 dan 2032 kebutuhan air di Kabupaten Sidenreng Rappang masing-masing 47.628.392,00 m³/tahun, 51.187.303,92 m³/tahun, 55.183.829,21 m³/tahun.



Tabel 2.20
Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Air Bersih
Kabupaten Sidenreng Rappang

KECAMATAN	VOLUME STATUS AIR (M3/TAHUN)				
	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN 2017	KEBUTUHAN 2022	KEBUTUHAN 2027	KEBUTUHAN 2032
Baranti	8.455.802,96	2.608.742,24	2.772.559,16	2.946.663,04	3.131.699,83
Dua Pitue	13.937.493,13	3.986.337,65	4.191.630,94	4.407.496,69	4.634.479,35
Kulo	9.569.227,67	2.951.171,73	3.121.832,15	3.302.361,52	3.493.330,55
Maritengngae	14.451.130,92	4.000.779,60	4.302.846,83	4.627.720,78	4.977.123,38
Panca Lautang	16.587.455,49	3.925.108,53	3.859.627,71	3.795.239,28	3.731.925,01
Panca Rijang	5.993.983,42	2.258.435,31	2.353.799,21	2.453.189,91	2.556.777,45
Pitu Riase	58.899.756,85	6.898.122,23	8.040.659,66	9.372.435,82	10.924.794,34
Pitu Riawa	22.677.898,44	5.531.268,77	5.704.112,17	5.882.356,65	6.066.171,00
Tellu Limpoe	10.522.180,44	3.097.381,61	3.194.376,24	3.294.408,26	3.397.572,78
Watang Pulu	16.984.295,23	4.781.361,30	5.547.214,70	6.435.738,49	7.466.581,37
Wt. Sidenreng	15.299.076,39	4.413.389,84	4.539.733,22	4.669.693,47	4.803.374,13
TOTAL	193.378.300,95	44.452.098,78	47.628.392,00	51.187.303,92	55.183.829,21

Hasil proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa tidak terdapat Kecamatan yang diperkirakan kebutuhan airnya sudah lebih besar dari ketersediaan airnya pada tahun 2022, 2027 dan 2032.

Adapun hasil kajian ketersediaan pangan juga menunjukkan masih belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. Ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 2.232.163.078,39 kkal/tahun, sementara kebutuhan sebesar 355.616.790,24 kkal/tahun, sehingga masih terdapat selisih sebesar 1.876.546.288,15 kkal/tahun. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada kecamatan Pituriase (708.957.661,09 kkal/tahun), dan untuk selisih terkecil terdapat pada Kecamatan Baranti (50.848.148,98 kkal/tahun).

Tabel 2.21
Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan
Kabupaten Sidenreng Rappang

KECAMATAN	STATUS PANGAN TAHUN 2017 (KKAL/TAHUN)		
	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	SELISIH
Baranti	71.718.086,86	20.869.937,88	50.848.148,98
Dua Pitue	125.447.796,72	31.890.701,16	93.557.095,56
Kulo	104.409.179,91	23.609.373,84	80.799.806,07



KECAMATAN	STATUS PANGAN TAHUN 2017 (KKAL/TAHUN)		
	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	SELISIH
Maritengngae	123.918.794,23	32.006.236,80	91.912.557,43
Panca Lautang	189.733.035,09	31.400.868,24	158.332.166,85
Panca Rijang	69.350.855,73	18.067.482,48	51.283.373,25
Pitu Riase	764.142.638,89	55.184.977,80	708.957.661,09
Pitu Riawa	272.697.416,72	44.250.150,12	228.447.266,60
Tellu Limpoe	131.884.599,88	24.779.052,84	107.105.547,04
Watang Pulu	220.470.835,02	38.250.890,40	182.219.944,62
Watang Sidenreng	158.389.839,33	35.307.118,68	123.082.720,65
TOTAL	2.232.163.078,39	355.616.790,24	1.876.546.288,15

Hal ini menunjukkan bahwa daerah Pitu Riase, Pitu Riawa dan Watang Pulu dalam perkembangannya masih seimbang atau bahkan kelebihan antara ketersediaan pangannya dibandingkan kebutuhannya. Keragaman konsumsi pangan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan yang ditentukan dari nilai-nilai kebiasaan/adat (tradisi dan kepercayaan) yang berhubungan dengan pangan, pengetahuan gizi dan kualitas pangan. Menggantikan beberapa jenis pangan tertentu dengan pangan lain yang memiliki kandungan gizi serupa membawa konsekuensi pada ketersediaan pangan yang mungkin berhubungan dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari keragaman konsumsi pangan sejenis tetapi tidak dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari sebagian besar kelompok pangan. Jika jenis pangan di seluruh wilayah yang tersedia sama, maka akan sulit untuk memasukkan jenis pangan yang tersedia sebagai salah satu determinan keragaman konsumsi pangan. Keragaman pangan setiap wilayah berbeda-beda dan dipengaruhi oleh faktor luar seperti iklim, kondisi tanah dan keadaan biologis wilayah, yang nantinya berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di wilayah tersebut.

Adapun proyeksi kebutuhan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk setiap kecamatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.22
Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2032

KECAMATAN	VOLUME STATUS AIR (M3/TAHUN)				
	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN 2017	KEBUTUHAN 2022	KEBUTUHAN 2027	KEBUTUHAN 2032
Baranti	71.718.086,86	20.869.937,88	22.180.473,32	23.573.304,31	25.053.598,65
Dua Pitue	125.447.796,72	31.890.701,16	33.533.047,56	35.259.973,52	37.075.834,83
Kulo	104.409.179,91	23.609.373,84	24.974.657,19	26.418.892,17	27.946.644,40
Maritengngae	123.918.794,23	32.006.236,80	34.422.774,68	37.021.766,22	39.816.987,07
Panca Lautang	189.733.035,09	31.400.868,24	30.877.021,70	30.361.914,26	29.855.400,12
Panca Rijang	69.350.855,73	18.067.482,48	18.830.393,68	19.625.519,30	20.454.219,62
Pitu Riase	64.142.638,89	55.184.977,80	64.325.277,30	74.979.486,53	87.398.354,68
Pitu Riawa	272.697.416,72	44.250.150,12	45.632.897,34	47.058.853,23	48.529.367,99
Tellu Limpoe	131.884.599,88	24.779.052,84	25.555.009,88	26.355.266,05	27.180.582,27
Watang Pulu	220.470.835,02	38.250.890,40	44.377.717,63	51.485.907,95	59.732.650,96
Wt.Sidenreng	158.389.839,33	35.307.118,68	36.317.865,75	37.357.547,78	38.426.993,07
TOTAL	2.232.163.078,39	355.616.790,24	381.027.136,03	409.498.431,32	441.470.633,65

Hasil proyeksi kebutuhan pangan di Kabupaten menunjukkan bahwa tidak terdapat Kecamatan yang diperkirakan kebutuhannya pangannya sudah lebih besar dari ketersediaan pangannya pada tahun 2022, 2027, dan 2032. Hal ini sudah cukup bagus dalam menetapkan masalah pangan yang juga menjadi tanggung jawab unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat lainnya. Bahan pangan untuk konsumsi sehari-hari di kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikelompokkan menjadi 9 kelompok besar. Jenis pangan pada masing-masing kelompok dapat berbeda-beda pada setiap rumah tangga sesuai sumber pangan yang tersedia. Secara nasional bahan pangan dikelompokkan sebagai berikut: (1) Padi-padian: beras, jagung, sorgum dan terigu (2) Umbi-umbian: ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, sagu, dan umbi lainnya (3) Pangan hewani: ikan, daging, susu dan telur (4) Minyak dan lemak: minyak kelapa, minyak sawit (minyak goreng, minyak jagung, margarin) (5) Buah/biji berminyak: kelapa, kemiri, jambu mete dan coklat (6) Kacang-kacangan: kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan kacang lainnya (7) Gula: gula pasir, gula merah (8) Sayur dan buah:



semua jenis sayuran dan buah-buahan yang biasa dikonsumsi (9) Lainnya: teh, kopi, sirup, bumbu-bumbuan, makanan dan minuman jadi

Untuk lebih menumbuhkan motivasi dan mengoptimalkan partisipasi aparatur, lembaga swasta dan masyarakat lainnya, perlu ada gerakan-gerakan yang mampu meningkatkan kinerja lembaga-lembaga tersebut dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan sesuai dengan perannya masing-masing. Salah satu cara untuk memotivasi kelompok tani, lembaga pedesaan (Koperasi Tani, KUD, dan sebagainya) dan aparatur pelayanan agar lebih efektif berpartisipasi dalam pelaksanaan program peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani, adalah dengan penyelenggaraan perlombaan ketahanan pangan. Perlombaan ini telah diyakini sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi petani secara aktif agar petani mau dan mampu meningkatkan produksi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diukur dengan melihat kondisi perekonomian secara makro, diukur berdasarkan perkembangan dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didukung oleh 17 (tujuh belas) sektor penting. PDRB dibedakan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dipengaruhi oleh perkembangan harga, dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Indikator Makro dalam mengukur kinerja Pemerintah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan serta pembangunan adalah tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi suatu wilayah dengan memperlihatkan capaian perekonomian secara makro.

2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami pertumbuhan yang



fluktuatif. Namun demikian, nilai PDRB yang berhasil diciptakan dari tahun ke tahun terus meningkat dari berbagai sektor, yang berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dari tahun ke tahun. Dominasi Sektor Pertanian dalam struktur PDRB rata-rata mencapai di atas 43 persen per tahun, sementara sektor pendukung ke 2 (dua) adalah sektor jasa-jasa rata-rata mencapai di atas 20 persen pertahun.

Tabel 2.23
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Rappang 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sidenreng Rappang (ADH berlaku)	%	6,94	8,05	9,31	10,77	11,96
Sidenreng Rappang (ADH konstan)	%	6,93	7,87	8,03	8,81	7,11
Sidenreng Rappang	%	6,93	7,87	8,03	8,81	7,11
Sulawesi Selatan	%	7,62	7,54	7,19	7,42	7,23
Nasional	%	5,56	5,01	4,88	5,03	5,07

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018



Tabel 2.24
Perkembangan dan Pertumbuhan Atas Sektor PDRB ADHB dan ADHK
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	SEKTOR	2013		2014		2015		2016		2017	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	35.27	5.84	34.06	3.46	34.055	9.35	33.35	6.63	34.82	12.5
2	Pertambangan & Penggalian	3.32	17.27	3.62	9.3	4.42	14.52	4.74	9.62	4.84	12.34
3	Industri Pengolahan	13.33	14.23	13.83	9.8	14.24	9.56	14.43	9.59	14.35	8.3
4	Pengadaan Listrik Dan Gas	0.1	12.22	0.09	8.58	0.09	13.39	0.07	-1.94	0.07	12.49
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang	0.03	4.61	0.02	5.38	0.02	2.16	0.02	0.33	0.02	3.22
6	Konstruksi	13.77	9.84	14.32	10.42	14.08	3.97	14.22	9.32	14.34	9.24
7	Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	10.64	11.16	10.31	6.45	9.74	7.63	9.54	6.81	9.12	6.94
8	Transportasi Dan Pergudangan	1.61	8.16	1.65	8.45	1.776	10.57	1.98	9.53	1.95	9.67
9	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	0.59	6.26	0.59	6.2	0.586	5.9	0.59	7.07	0.58	5.53



NO	SEKTOR	2013		2014		2015		2016		2017	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
10	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	2.51	17.81	2.6	13.82	2.54	10.44	2.45	11.14	2.29	7.73
11	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	2.85	14.63	2.98	12.41	2.95	6.44	2.96	9.29	3.05	16.64
12	REAL ESTATE	4.08	7.83	4.16	7.77	4.15	7.28	4.16	7.72	4.04	5.04
13	JASA PERUSAHAAN	0.1	9.84	0.1	9.67	0.1	6.94	0.1	5.64	0.1	8.21
14	ADM. PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB	5.7	1.85	5.44	4.44	5.25	3.08	5.5	8.92	4.54	-7.67
15	JASA PENDIDIKAN	3.89	7.38	3.99	8.09	3.72	3.57	3.58	6.11	3.56	5.55
16	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	1.31	9.55	1.33	8.73	1.367	9.69	1.39	9.06	1.4	10.91
17	JASA LAINNYA	0.9	8.36	0.91	5	0.92	7.06	0.92	7.55	0.93	7.89

Sumber Data : BPS Sidenreng Rappang, 2017





Tabel 2.25
Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2017

TAHUN	ATAS DASAR HARGA BERLAKU (ADHB)		ATAS DASAR HARGA KONSTAN (ADHK)	
	JUMLAH (JUTA RP.)	% PERKEMBANGAN	JUMLAH (JUTA RP.)	% PERTUMBUHAN
2012	6.108.344,52		5.297.538,52	
2013	6.936.042,95	13,55	5.664.558,05	6,93
2014	8.047.481,60	16,03	6.110.201,65	7,87
2015	9.304.933,25	15,36	6.597.660,75	7,92
2016	10.772.990,25	16,04	7.191.284,24	9,00
2017	11.955.380,00	10,98	7.688.830,00	7,11

Sumber Data : BPS Sidenreng Rappang, 2017

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa, Rata-rata nilai PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Atas dasar Harga Berlaku kurun waktu 5 (lima) Tahun mencapai Rp.3,573 Triliun atau berkembang rata-rata 22,39%. Jika berdasarkan Atas dasar Harga konstan Nilai PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai Rp.1,45 Triliun atau tumbuh rata-rata 7,91%. Untuk melihat perbandingan PDRB terhadap 6 (enam) Kabupaten tetangga selengkapanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
Perbandingan PDRB pada Enam Wilayah Kabupaten dan Sulawesi Selatan Tahun 2017 (Juta Rupiah)

NO.	KABUPATEN/KOTA	HARGA BERLAKU	% TERHADAP SUL SEL	HARGA KONSTAN	% TERHADAP SUL SEL
1	Pare-Pare	5,544,661.05	1,46	4,106,873.75	1,52
2	Enrekang	5,901,552.14	1,55	3,899,612.41	1,44
3	Wajo	16,540,503.20	4,36	11,620,820.85	4,29
4	Pinrang	14,792,038.47	3,89	10,404,179.13	3,84
5	Sidenreng Rappang	10,772,990.25	2,49	7,191,284.24	2,66
6	Soppeng	7,935,787.23	2,09	5,554,053.77	2,05
	Sulawesi Selatan	421,949,922.79		270,623,255.84	

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa, dari 6 (enam) kabupaten yang memberikan kontribusi terhadap nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yang tertinggi pada tahun 2017 adalah Kabupaten Wajo yaitu Rp. 16,54



Triliun atau 4,36%, Kabupaten Sidenreng Rappang urutan ke 3 (tiga) dengan nilai kontribusi 10,77 Triliun atau 2,49%, yang terendah adalah Kota Parepare dengan nilai kontribusi Rp. 5,54 Triliun atau 1,46% dari Total Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Rp. 421,94 Triliun.

Untuk melihat perbandingan perkembangan Nilai dan kontribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada tabel ini.

Tabel 2.27
Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

NO.	BIDANG URUSAN	KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (JUTA RP)	%	PROPINSI SULAWESI SELATAN (MILYAR RP)	%	NASIONAL (TRILIUN RP)	%
1.	Pertanian	2.243.865,26	45,49	39.518,40	24,79	1.190,40	14,44
2.	Pertambangan dan Penggalian	23.610,54	0,48	8.803,00	5,52	970,60	11,78
3.	Industri Pengolahan	276.000,51	5,60	19.492,50	12,23	1.972,90	23,94
4.	Listrik, gas dan air bersih	59.182,37	1,20	1.439,20	0,90	65,10	0,79
5.	Konstruksi	272.776,91	5,53	9.109,80	5,71	861,00	10,45
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	526.309,95	10,67	28.349,60	17,78	1.145,60	13,90
7.	Komunikasi keuangan, persewaan	130.678,98	2,65	12.982,90	8,14	549,10	6,66
8.	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	260.930,95	5,29	11.803,30	7,40	598,50	7,26
9.	Jasa-jasa	1.139.154,18	23,09	27.928,40	17,52	888,70	10,78
	PDRB	4.932.509,65	100	159.427,10	100	8.241,90	100

Sumber: BPS Sidenreng Rappang, 2013 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018

Tabel di atas menunjukkan kontribusi Nilai PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2012 mencapai Rp.4,93 Triliun sangat kecil jika dibanding dengan Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp.159,43 Triliun dan Nasional Rp.8.241,9 Triliun. Optimisme



Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendorong Peningkatan Nilai PDRB pada setiap Tahunnya sangat besar.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Semakin tinggi inflasi akan semakin berpengaruh nyata terhadap daya beli masyarakat pada level menengah ke bawah. Berikut ini Tabel Perkembangan Laju inflasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2008-2012. khusus untuk informasi inflasi Kabupaten Sidenreng Rappang, diambil dari data daerah tetangga yaitu Kota Parepare.

Tabel 2.28
Sandingan Perkembangan Laju Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare Tahun 2008-2012

TAHUN	NASIONAL (%)	PROVINSI SULAWESI SELATAN (%)	KOTA PAREPARE (%)
2012	4,41	4,30	3,49
2013	6,22	8,38	6,31
2014	8,61	8,38	9,38
2015	4,48	3,85	1,58
2016	8,02	2,94	2,11

Sumber: RPJMD 2013-2018 dan BPS Parepare

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa, secara nasional inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014. Tingginya inflasi disebabkan karena gejolak ekonomi akibat krisis global. Selanjutnya pada Tahun 2016-2013 inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare cenderung memperlihatkan perkembangan inflasi fluktuatif meskipun pada tahun 2014 berada pada kisaran 9,386%. Inflasi ini masih positif dan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap menurunnya daya beli masyarakat.



Tabel 2.29
Laju Inflasi Kota Parepare Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Parepare	%	6,31	9,38	1,58	2,11	3,43
Sulawesi Selatan	%	6,22	8,61	4,48	2,94	4,44
Nasional	%	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61

Sumber : Badan Pusat Statistik, tahun 2018

PDRB Per Kapita

PDRB Perkapita merupakan hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besarnya penduduk suatu daerah sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan perkapita daerah tersebut.

Tabel 2.30
PDRB Perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016

TAHUN	NILAI (RP)	PERKEMBANGAN (%)
2011	19,015,641.04	
2012	21,830,329.60	14,80
2013	24,482,427.01	59,48
2014	28,078,160.66	14,71
2015	32,109,560.00	14,10
2016	36,769,767.21	16,67
Rata-rata	27,047,647.68	26,26

Sumber: BPS Sidenreng Rappang, 2017

Data tersebut menunjukkan bahwa, kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami peningkatan. Rata-rata pendapatan perkapita mencapai Rp.13.354.520 dan rata-rata persentase perkembangannya mencapai 17,88%. Jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita tahun 2008 Rp.9.596.593 dengan Tahun 2012 Rp.17.777.949 persentase kenaikannya hampir 2 kali Lipat. Dari dasar ini pula mendorong Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang kurun waktu



5 (lima) tahun ke depan 2014-2018 pendapatan perkapita masyarakat ditargetkan meningkat 2 kali lipat daritahun 2012.

Tabel 2.31
Perbandingan PDRB Per Kapita pada Enam Wilayah Kabupaten/ Kota dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016

NO.	KABUPATEN/KOTA/NASIONAL	INCOME PER KAPITA (JIWA) ATAS DASAR HARGA BERLAKU (RP)
1	Pare-Pare	5,544,661.05 (39,49)
2	Enrekang	5,901,552.14 (29,27)
3	Wajo	16,540,503.20 (41,93)
4	Pinrang	14,792,,990.25 (40,02)
5	Sidenreng Rappang	10,772,990.25 (36,77)
6	Soppeng	7,935,787.23 (35,07)
Propinsi Sulawesi Selatan		379,209,481.75 (44,06)

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan, 2017

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, perolehan PDRB Perkapita tertinggi pada enam wilayah Kabupaten/Kota pada tahun 2016, diduduki oleh Kabupaten Wajo dengan nilai Rp.16,540,503.20,-. Urutan kedua Kabupaten Pinrang dengan nilai PDRB sebesar Rp.14,792,,990.25,- kemudian Kabupaten Sidenreng Rappang dengan urutan ke tiga dengan nilai PDRB sebesar Rp. 10,772,990.25,-.

Tabel 2.32
Perkembangan PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten SidenrengRappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR PDRB PERKAPITA (ADHB)	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sidenreng Rappang	Juta Rp	24,48	28,07	32,10	36,76	40,37
Sulawesi Selatan	Juta Rp	31,03	35,34	39,94	44,11	48,21
Nasional	Juta Rp	38,40	41,90	45,10	48,00	51,90

Sumber :Badan Pusat Statistik, Tahun 2018



2.2.1.3. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Tabel 2.33
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	34,06	34,06	33,33	34,74	34,46

Sumber : Pusat Data Statistik, Tahun 2018

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu 33,33% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi selama tahun 2016 dan 2017 sektor pertanian kembali mengalami kenaikan disebabkan adanya program nasional yaitu penanaman padi selama 3 kali dalam setahun.

2.2.1.4. Indeks Gini

Tabel 2.34
Indeks Gini Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR Indeks Gini	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sidenreng Rappang	Juta Rp	-	0,35	0,36	0,38	0,32
Sulawesi Selatan	Juta Rp	0,432	0,448	0,404	0,400	0,429
Nasional	Juta Rp	0,406	0,414	0,402	0,394	0,391

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Table diatas menunjukan bahwa indeks gini kabupaten sidenreng Rappang mengalami keanaikan dari tahun 2014 sampai pada tahun 2016 kemudian turun pada tahun 2017 sebesar 0,06 poin dari yang sebelumnya 0,38 pada tahun 2016 menjadi 0,32 pada tahun 2017 .



2.2.1.5. Indeks Ketimpangan Williamson

Tabel 2.35
Indeks Ketimpangan Williamson
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Ketimpangan Williamson	%	Tidak Tersedia Data				

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Data indeks ketimpangan Williamson Kabupaten Sidenreng tidak tersedia pada tahun 2013 sampai tahun 2017.

2.2.1.6. Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan

Tabel 2.36
Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Penduduk Di atas Garis Kemiskinan	%	93,7	94,18	94,45	94,55	94,68

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa garis kemiskinan kabupaten sidenreng rappang mengalami kenaikan dari tahu ke tahun. Tahun 2013 persentase garis kemiskinan 93,7 % dan pada tahun 2017 menjadi 94,64 %. Garis kemiskinan merupakan cerminan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan yaitu sebesar 2.100 kalori.

2.2.1.7. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidenreng Rappang terus meningkat dari tahun ke tahun. Proporsinya terhadap total Pendapatan Daerah juga menunjukkan kenaikan dari 5,08% pada tahun 2013 menjadi 11,19% pada tahun 2017. Fakta ini mengindikasikan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terus membaik dalam lima tahun terakhir.



Tabel 2.37
Persentase PAD Terhadap Pendapatan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase PAD Terhadap Pendapatan	5,08	7,87	7,14	8,3	11,19

2.2.1.8. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang terus menunjukkan perbaikan. Ini tampak pada penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 2016 dan berlanjut di tahun 2017.

Tabel 2.38
Opini Badan Pemeriksa Keuangan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

2.2.1.9. PDRB Pertanian

PDRB sektor pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan yang fluktuatif setiap tahun. Dari 2,36 trilyun pada tahun 2013 menjadi 4,12 pada tahun 2017.

Tabel 2.39
PDRB Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
PDRB Pertanian	Trilyun	2,36	2,74	3,10	3,74	4,12

2.2.1.10. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Kategori Pertambangan dan Penggalian dirinci menjadi 4 subkategori, antara lain: sub kategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi, subkategori Pertambangan Batubara dan Lignit, sublapangan usaha Pertambangan Biji Logam, dan sub kategori



Pertambangan dan Penggalian lainnya. Di Kabupaten Sidenreng Rappang Pertambangan dan Penggalian sebagian besar ditopang oleh usaha tambang Galian C.

Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang relatif rendah selama 5 (lima) tahun terakhir. Kontribusinya hanya sebesar 355,42 milyar rupiah atau sekitar 3,62% persen tahun 2013 dan meningkat menjadi 553,05 milyar rupiah atau sekitar 4,63 persen pada tahun 2017. Meskipun demikian, pertumbuhan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian ini mengalami pertumbuhan yang paling tinggi pada tahun 2016, yaitu 4,84%.

Tabel 2.40
Kontribusi sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	3,62	4,42	4,74	4,84	4,63

Sumber : Pusat Data Statistik, Tahun 2018

2.2.1.11. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Tabel 2.41
Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor Kelautan dan perikanan Terhadap PDRB	%	0,23	1,03	0,73	0,63	0,57

Sumber : Pusat Data Statistik, Tahun 2018

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan kenaikan yang fluktuatif tiap tahun karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu musim kemarau, adanya revitalisasi danau dan kurang *restocking*.



2.2.1.12. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Keberadaan data dengan kondisi seperti menyebabkan penghitungan ekspor impor antar wilayah menjadi komponen diberlakukan sebagai item penyeimbang yakni perbedaannya antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu ekspor antara daerah dan impor antara daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah yang hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda positif berarti nilai ekspor antara daerah lebih besar daripada impor antara daerah, demikian pula sebaliknya.

Cakupan bina kelompok pedagang /usaha informal berupa bantuan binaan Pemda pada tahun 2013-2014 tidak ada kelompok pengrajin sedangkan pada tahun 2015 terdapat 3 kelompok tahun 2016 ada 26 kelompok sedangkan pada tahun 2017 terdapat 16 kelompok.

Tabel 2.42
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
A	Ekspor bersih perdagangan (Berat Bersih)	0	-8,54	-9,15	-6,64	0
B	Cakupan bina kelompok perdagangan / usaha informal					
1	Bantuan binaan Pemda	0	0	3	26	16
2	Jumlah kelompok pengrajin	0	0	3	26	16
3	Cakupan bina kelompok	0	0	100	100	100

Sumber : BPS dan Dinas Perdagangan Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2018

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 sebesar 10,31% kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2016 menjadi 9,23% kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 sebesar 9,51%



Tabel 2.43
Kontribusi sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	10,31	9,74	9,54	9,23	9,51

2.2.1.13. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Urusan perindustrian mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi yaitu sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya.

Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi terutama dalam pembentukan PRDB sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (*prime-mover*) karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi. Selain itu industri juga dapat membuka peluang untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan, yang berarti meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kemiskinan.

Walaupun telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting, namun dirasakan industri belum tumbuh seperti yang diharapkan dan ada kecenderungan menurunnya daya saing industri di pasar nasional maupun internasional. Penurunan daya saing ini terkait dengan tingginya biaya atau kurang efisiennya proses produksi. Masalah biaya industri ini umumnya dikaitkan dengan meningkatnya biaya energi dan ekonomi biaya tinggi terkait dengan layanan birokrasi. Sementara kelemahan struktur industri juga ditunjuk sebagai salah satu penyebabnya. Kelemahan struktur industri ini tercermin dari lemahnya keterkaitan antar industri, misalnya antara industri hulu dan hilir dan antara industri besar dan kecil, serta belum berkembangnya industri pendukung. Klaster-klaster



industri yang belum sepenuhnya terbangun juga merupakan indikator lemahnya struktur industri.

Tabel 2.44
Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB	%	13,83	14,24	14,42	14,35	14,21

2.2.1.14. Pertumbuhan PDRB Industri

Pertumbuhan PDRB Industri Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 sebesar 2,98 % dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 2,96 % dan tidak mengalami perubahan sampai tahun 2017

Tabel 2.45
Pertumbuhan PDRB Industri
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pertumbuhan PDRB Industri	%	2,98	2,96	2,96	2,96	2,96

2.2.1.15. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB

Tabel 2.46
Kontribusi sector Pariwisata Terhadap PDRB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi sektor Pariwisata Terhadap PDRB	%	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Sektor pariwisata bukan termasuk sektor unggulan di Kabupaten Sidenreng Rappang dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB. Karena sangat kecil, struktur perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang tidak dapat menghitung besaran kontribusi sector ini terhadap PDRB secara keseluruhan. Oleh karena itu, sektor pariwisata dimasukkan ke dalam sector penyediaan akomodasi dan makan minum. Seperti yang ditunjukkan oleh tabel di atas, kontribusi di



sector pariwisata hanya sebesar 0,59%. Diharapkan, di tahun-tahun yang akan datang, sector pariwisata bias menjadi salah satu sector yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB. Salah satu usaha pemerintah daerah untuk menggenjot sector pariwisata adalah dengan cara revitalisasi daerah tujuan wisata seperti Dataé dan DanauMojong. Usaha lain yang di lakukan pemerintah adalah mempromosikan wisata kuliner asli daerah Sidenreng Rappang untuk menarik wisatawan.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Paradigma dalam pembangunan yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, dimana indikator dalam mengukur kemajuan pembangunan suatu daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia. IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu berumur panjang dan sehat, memiliki ilmu pengetahuan dan dapat hidup secara layak.

Tabel 2.47

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2013-2017

INDIKATOR	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sidenreng Rappang	67,15	68,14	69,00	69,39	69,84
Sulawesi Selatan	67,92	68,49	69,15	69,76	70,34
Nasional	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Dalam perhitungan IPM Tahun 2015, Badan Pusat Statistik melakukan perubahan metodologi perubahan metodologi yang menyebabkan level IPM metode baru lebih rendah dibanding metode lama, selain itu terjadi perubahan peringkat, namun hal tersebut tidak bisa dibandingkan karena perbedaan metodologi dan indikator. Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 67,15 poin dan pada tahun 2015 sebesar 69.00 poin, dengan perkembangan rata-rata 0,92 poin.



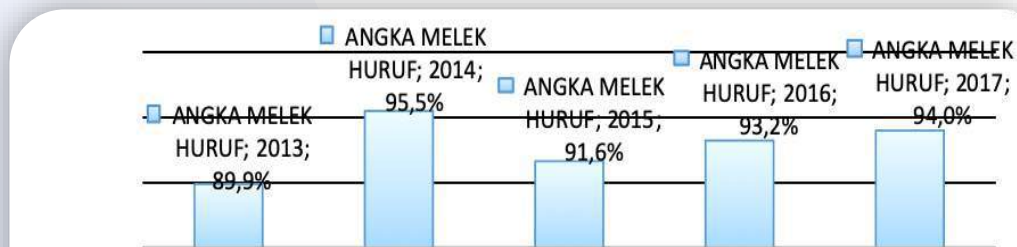
Tabel 2.48
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidenreng Rappang,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2013-2017

INDIKATOR	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Sidenreng Rappang									73,71	67,97
Provinsi Sulawesi Selatan	71.84	66.34	72.59	67.22	72.98	67.81	73.61	68.30	74.21	68.90
Nasional	72.69	65.56	73.36	66.27	73.58	66.98	74.26	67.44	74.85	68.08

2.2.2.2. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis. Hasil Susenas 2015 menunjukkan persentase penduduk 10 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis sebesar 93.23 persen atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 94.07 persen. Seperti tahun-tahun sebelumnya, persentase penduduk laki-laki 10 tahun keatas yang mampu membaca dan menulis masih lebih tinggi dibanding perempuan. Angka Melek Huruf Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada grafik dibawah :

Gambar 2.8
Angka Melek Huruf Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017



Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017

Grafik diatas menunjukkan bahwa angka melek huruf di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat terlihat peningkatan yang cukup signifikan sebesar 89,90 persen di tahun 2013 menjadi 95,50 persen di tahun 2014. Namun pada tahun 2015 terjadi



penurunan sekitar 3,9 persen di tahun sebelumnya yaitu sebesar 91,65 persen. Namun di tahun 2016 dan 2017 kembali mengalami peningkatan.

Tabel 2.49
Angka Melek Huruf (AMH)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Melek Huruf	%	89,90	95,50	91,65	93,2	94,0

2.2.2.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Lama sekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator dimensi pendidikan pendukung pembangunan manusia (IPM) dan dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Rata-rata lama sekolah Tahun 2013-2017 mengalami dari tahun ke tahun sebagaimana Tabel di bawah ini. Pada tahun 2014 dengan penggunaan metode baru (2010) diperoleh capaian angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,6 tahun hingga tahun 2017 mencapai angka 7,89 tahun. Hal ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah dan masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan di Bidang Pendidikan.

Tabel 2.50
Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

INDIKATOR	SATUAN	ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata Lama sekolah	Tahun	7,08	7,6	7,74	7,75	7,89

2.2.2.4. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada



umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir dan mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup saat lahir dihitung dari hasil proyeksi SP2010. Adapun Capaian Angka Harapan Hidup pada tahun 2013 yaitu 68.05 tahun, hingga tahun 2017 mencapai 68,94 Tahun.

Tabel 2.51
Angka Usia Harapan Hidup
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	68,05	68,07	68,57	68,75	68,94

2.2.2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Ukuran yang menunjukkan seberapa besar penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat diukur /dilihat pada tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan rasio antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Namun semakin besar tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu daerah semakin baik karena cenderung menunjukkan lebih banyaknya penduduk yang termasuk dalam golongan angkatan kerja dan dapat meningkatkan perekonomian di daerah itu sendiri.

Berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2013 – 2017, terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan.

Tabel 2.52
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Angka Usia Harapan Hidup				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angkatan Kerja	Orang	104.006	112.252	112.592	114.970	124.499
Bekerja	Orang	96.076	105.295	104.741	109.359	121.103
Pengangguran	Orang	7.930	6.957	7.851	5.611	3.396
Bukan Angkatan Kerja	Orang	95.046	95.618	98.754	100.241	110.635



Indikator	Satuan	Angka Usia Harapan Hidup				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penduduk Usia Kerja	Orang	199.052	207.870	211.346	215.211	217.659
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	52,25	54	53,27	53,42	57,19

2.2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam bidang ekonomi dapat dilihat atau diukur dari rendahnya tingkat pengangguran. Semakin rendahnya tingkat pengangguran di suatu daerah maka menunjukkan semakin sejahteranya masyarakat dan stabilnya tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut. Selain itu penyebab rata-rata pendapatan masyarakat akan tinggi apabila tingkat pengangguran yang semakin rendah.

Adapun berdasarkan data ketenagakerjaan Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu lima tahun mulai dari tahun 2013-2017, terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di kabupaten sidenreng rappang masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengangguran yang dicapai daerah Sulawesi Selatan, akan tetapi tingkat pengangguran di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2013 – 2017 mengalami penurunan yang sebelumnya di tahun 2013 tingkat pengangguran sebanyak 7,62% dan pada tahun 2017 tingkat pengangguran sebanyak 3,17 %.

Tabel 2.53
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	Tingkat Pengangguran Terbuka				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sidenreng Rappang	%	7,62	6,19	6,97	6,97	3,17
Sulawesi Selatan	%	5,10	5,08	5,95	4,80	5,61
Nasional	%	6,17	5,94	6,18	5,61	5,50

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018



2.2.2.7. Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja

Penduduk bekerja adalah penduduk dari kelompok angkatan kerja yang melakukan kegiatan pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama sepekan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Rasio penduduk yang bekerja yang di ukur dari perbandingan penduduk bekerja dengan jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang memperlihatkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2013 rasio penduduk yang bekerja mencapai 94,90 % dan pada tahun 2017 menurun menjadi 94,39 %. Ada pun rasio penduduk yang bekerja di daerah kabupaten sidenreng rappang dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengisyaratkan semakin sempitnya kesempatan kerja yang tersedia di daerah ini guna untuk memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya/penduduknya sendiri.

Tabel 2.54
Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	%	94,90	94,92	94,05	95,20	94,39

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

2.2.2.8. Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja

Tabel 2.55
Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	LAJU PERTUMBUHAN PDB PER TENAGA KERJA				
		2013	2014	2015	2016	2017
Sidenreng Rappang	%					
Sulawesi Selatan	%	9,60	0,35	8,46	1,34	10,09
Nasional	%	5,39	3,31	4,62	1,83	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018



Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja Kabupaten Sidenreng Rappang tidak tersedianya data dari tahun 2013 sampai tahun 2017

2.2.2.9. Persentase Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk Yang Bekerja

Pengertian proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total penduduk yang bekerja, sebagai indikator pekerja informal sedikit berbeda dengan definisi pekerja informal yang dijelaskan dalam Kepmen Ketenagakerjaan RI No.206 Tahun 2017 tentang pedoman pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan., bahwa penduduk yang bekerja secara informal adalah penduduk yang bekerja dengan status pekerjaan utama sebagai berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu pekerja tidak tetap.

Indikator proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total penduduk yang bekerja dapat diukur dengan membandingkan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja baik yang berstatus berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total penduduk 15 tahun keatas yang bekerja, adapun persentase tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total penduduk yang bekerja dapat di lihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.56
Persentase Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk Yang Bekerja Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Penduduk Yang Bekerja	%	34,72	35,44	36,86	35,65	37,26

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018



2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

2.2.3.1 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu dan menjadi harapan dalam setiap kemajuan didalam suatu bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemudalah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang berilmu serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Jumlah organisasi pemuda pada tahun 2013 berjumlah 28 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2013 yaitu 85% dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2016 dan 2017 yaitu 90%.

Tabel 2.57
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Organisasi Pemuda aktif		24	25	25	27	27
Jumlah seluruh organisasi pemuda		28	28	28	30	30
Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	85	89	89	90	90

2.2.3.2 Persentase Wirausaha Muda

Jumlah wirausaha muda tahun 2013 sebanyak 17.081 dan ada peningkatan dalam kurung waktu lima tahun terakhir sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 23.900. Peningkatan ini disebabkan karena semakin terbukanya teknologi informasi.

Tabel 2.58
Persentase Wirausaha Muda
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Wirausaha	Orang	4	4	4	5	6
Jumlah seluruh	Orang	17.081	19.660	21.457	22.885	23.900



INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Wirausaha						
Persentase Wirausaha Muda	%	0,5	0,02	0,01	0,02	0,03

2.2.3.3 Cakupan Pembinaan Olahraga

Dari penambahan jumlah cabang olah raga yang menjadi binaan Dinas kepemudaan, olah raga dan pariwisata kabupaten sidenreng rapping sejak dari tahu 2013 sampai dengan tahun 2017 sebanyak satu cabang olahraga. Adapun jumlah keseluruhan cabang olah raga yang terdaftar di komite olahraga nasional Indonesia (KONI) kabupaten sidenreng rapping sejak dari tahun 2013 sampai tahun 2017 sebanyak 18 cabang olahraga.

Tabel 2.59
Cakupan Pembinaan Olahraga
Kabupaten Sidenreng Rapping Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Cabang Olahraga yang dibina	Cabor	14	16	15	16	16
Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cabor	16	16	17	18	18
Cakupan Pembinaan olahraga	%	87	100	88	88	88

2.2.3.4 Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi dan Inventarisasi

Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan.

Tabel 2.60
Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi
Kabupaten Sidenreng Rapping Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pelatih Bersertifikat	Orang	4	4	5	7	8
Jumlah seluruh Pelatih	Orang	32	32	34	36	36
Cakupan Pelatih yang bersertifikat	%	13	13	15	19	22



2.2.3.5 Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Jumlah atlet binaan dari tahun 2013 sampai tahun 2016 dalam kurung waktu empat tahun terakhir mengalami peningkatan sebanyak 25 atlet akan tetapi di tahun 2017 mengalami penurunan jumlah atlet binaan sebanyak 10 atlet binaan dari jumlah atlet binaan di tahun 2016 sebanyak 60 atlet binaan. Sedangkan jumlah seluruh atlet pelajar di kabupaten sidenreng rappang dari tahun 2013 hingga 2017 tidak mengalami peningkatan.

Tabel 2.61
Cakupan Pembinaan Atlet Muda
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Atlet Pelajar Yang Dibina	Atlet	35	35	38	60	50
Jumlah Seluruh Atlet Pelajar	Atlet	80	80	80	80	80
Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	44	44	48	75	63

2.2.3.6 Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan internasional Kabupaten Sidenreng Rappang terbanyak pada tahun 2014 yaitu 43 atlet dan menurun pada tahun hamper setengahnya pada tahun 2015 yaitu 22 atlet. kemudian meningkat 3 orang atlet pada tahun 2016 menjadi 25 atlet dan tidak mengalami peningkatan sampai tahun 2017.

Tabel 2.62
Jumlah Atlet Berprestasi
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah atlet memenangi kejuaraan Tingkat Nasional dan Internasional dalam satu tahun	Atlet	35	43	22	25	25

2.2.3.7 Jumlah Prestasi Olahraga

Pencapaian prestasi cabang olahraga binaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berfluktuasi dari tahun 2013 hingga 2017.



Peningkatan kualitas pelatih yang ada dan kuantitas latihan bagi para atlet sangat dibutuhkan guna untuk meningkatkan pencapaian target prestasi kedepan. Dan perlunya perhatian dan harapan agar pemerintah setempat dapat mendorong terbentuknya organisasi kepemudaan dan olahraga secara keseluruhan serta menginisiasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk membuat inovasi sitem informasi kepemudaan dan olahraga.

Tabel 2.63
Jumlah Prestasi Olahraga
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun	Medali	20	27	12	14	14

2.2.3.8 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Tabel 2.64
 Jumlah Penyelenggaraan Festival Senidan Budaya
 Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penyelenggaraan Festival seni budaya	Kali					

Jumlah Penyelenggaraan Festival Senidan Budaya Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak tersedia.

2.2.3.9. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Pencapaian prestasi cabang olahraga binaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berfluktuasi dari tahun 2013 hingga 2017. Peningkatan kualitas pelatih yang ada dan kuantitas latihan bagi para atlet sangat dibutuhkan guna untuk meningkatkan pencapaian target prestasi kedepan. Dan perlunya perhatian dan harapan agar pemerintah setempat dapat mendorong terbentuknya organisasi kepemudaan dan olahraga secara keseluruhan serta menginisiasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan



Pariwisata untuk membuat inovasi sistem informasi kepemudaan dan olahraga.

Tabel 2.65
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Buah	33	33	38	45	49

2.2.3.10. Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kabupaten Sidenreng Rappang sampai tahun 2017 terdapat 6 buah

Tabel 2.66
Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Buah	4	3	3	6	6

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Bidang Urusan Pendidikan

2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD+MI, SMP+MTs, SMA+MA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap indikator pendidikan dalam rangka menghitung tingkat partisipasi pendidikan maka, tingkat



capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi pada tahun 2013 terhadap semua jenjang pendidikan terdapat di tingkat SD+MI yaitu 105,92 persen. Perkembangan APK per jenjang pendidikan 7 (lima) tahun terakhir 2013-2017 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.67
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)
Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD+MI	105,92	104,61	103,73	102,57	101,81
2	SMP+MTs	94,25	70,57	100,22	107,71	100,06
3	SMA+MA	73,27	89,70	79,19	82,36	81,15

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Secara umum untuk semua jenjang pendidikan hingga tahun 2017 berada diatas angka 100%. Dimana APK tertinggi sebesar 107,71% berada pada tahun 2016, hal ini umumnya disebabkan karena adanya murid diluar usia sekolah yang bersekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan adanya siswa yang mengulang tingkat atau tinggal kelas.

Tabel 2.68
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Dasar
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URUSAN/ JENJANG	INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI/ Paket A	Jumlah Siswa yang bersekolah Di Jenjang SD/MI/Paket A	36.024	32.881	32.373	32.082	31.958
		Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 - 12 Tahun	34.011	31.432	31.209	31.278	31.390
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/PAKET A (%)	105,92	104,61	103,73	102,57	101,81
2.	SMP/MTs/ Paket B	Jumlah Siswa yang bersekolah Di Jenjang SMP/MTs /Paket B	14.855	11.003	15.521	16629	15.386
		Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 - 15 Tahun	15.761	15.592	15.487	15.439	15.377
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	94,25	70,57	100,22	107,71	100,06

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017



Menurut kecamatan tertinggi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan SMP/MTs adalah kecamatan Panca Rijang . (APK) SD/MI sebesar 115,34% dan (APK) SMP/MTs sebesar 123,26

Tabel 2.69
Angka Partisipasi Kasar Menurut Kecamatan Tahun 2017
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTS		
		Jumlah Murid Sd/Mi/Paket A	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Thn	Apk	Jumlah Murid Smp/Mts/Paket B	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Thn	APK
1	Baranti	2.948	3.393	86,88	2.259	1.692	133,51
2	Dua Pitue	3.255	3.034	107,28	1.384	1.482	93,39
3	Kulo	1.218	1.360	89,56	493	685	71,97
4	Maritengngae	5.597	5.138	108,93	2.939	2.594	113,30
5	Panca Lautang	1.814	1.736	104,49	885	815	108,59
6	Panca Rijang	3.504	3.038	115,34	1.881	1.526	123,26
7	Pitu Riase	2.340	2.759	84,81	892	1.180	75,59
8	Pitu Riawa	3.092	2.763	111,91	1.239	1.267	97,79
9	Tellu Limpoe	2.414	2.338	103,25	1.194	1.221	97,79
10	Watang Pulu	3.805	4.004	95,03	1.314	2.033	64,63
11	Watang Sidenreng	1.970	1.827	107,83	906	882	102,72
APK Kabupaten Sidrap				101,81			100,06

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

2.3.1.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100%. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) secara



umum untuk semua jenjang pendidikan hingga pada tahun 2016 masih di bawah 100%. Pada tahun 2013 APM tertinggi juga berada pada jenjang pendidikan SD+MI yaitu 93,23 persen.

Kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas). Angka kematian bayi merupakan indikator penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel 2.70
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) (%)
Kabupaten Sidenreng Rappang

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	SD+MI	93,23	89,70	84,22	85,69	86,59
2	SMP+MTs	67,66	77,29	57,89	60,71	58,52

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017

Tabel 2.71
Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B
Tahun 2013-2017 di Kabupaten Sidenreng Rappang

NO.	URUSAN/ JENJANG	INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017
1.	SD/MI/Paket A	Jumlah Siswa Usia 7 - 12 Tahun di jenjang SD/MI/ Paket A	31.708	28.193	26.284	26.803	27.182



NO.	URUSAN/ JENJANG	INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017
		Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	34.011	31.432	31.209	31.278	31.390
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/PAKET A (%)	93,23	89,70	84,22	85,69	86,59
2.	SMP/MTs/ Paket B	Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun Di Jenjang SMP/MTs /Paket B	10.664	11.053	8.966	8.926	8.998
		Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	15.761	15.592	15.487	15.439	15.377
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	67,661	70,889	57,894	57,815	58,52

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Secara umum untuk semua jenjang pendidikan hingga tahun 2017 masih dibawah 100%. Dimana APM tertinggi sebesar 93,23% berada pada tahun 2013, hal ini disebabkan diantaranya karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah yang bersekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan adanya siswa yang mengulang tingkat atau tinggal kelas.

Tabel 2.72
Angka Partisipasi Murni Menurut Kecamatan Tahun 2017
Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTS		
		Jumlah Murid Usia 7-12 Tahun	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	Apm	Jumlah Murid Usia 13-15 Tahun	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	APM
1	Baranti	2.489	3.393	73,36	1.262	1.692	74,59
2	Dua Pitue	2.442	3.034	80,49	832	1.482	56,14
3	Kulo	1.033	1.360	75,96	262	685	38,25
4	Maritengngae	4.773	5.138	92,90	1.712	2.594	66,00



No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTS		
		Jumlah Murid Usia 7-12 Tahun	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	Apm	Jumlah Murid Usia 13-15 Tahun	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	APM
5	Panca Lautang	1.520	1.736	87,56	473	815	58,04
6	Panca Rijang	3.065	3.038	100,89	1.242	1.526	81,39
7	Pitu Riase	2.031	2.759	73,61	550	1.180	46,61
8	Pitu Riawa	2.714	2.763	98,23	698	1.267	55,09
9	Tellu Limpoe	2.088	2.338	89,31	615	1.221	50,37
10	Watang Pulu	3.328	4.004	83,12	733	2.033	36,06
11	Watang Sidenreng	1.699	1.827	92,99	619	882	70,18
APM Kabupaten Sidrap				86,59			58,52

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Secara umum untuk semua kecamatan tahun 2017 masih dibawah 100%, kecuali Kec.Panca Rijang yang memiliki APM tertinggi pada Jenjang SD/MI/Paket A sebesar 100,89%.

2.3.1.1.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK

Selain Angka partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar terdapat beberapa indikator bidang pendidikan dan kebudayaan lainnya, yang bisa digunakan untuk mengukur pengembangan dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang, diantaranya :

Tabel 2.73
Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Tahun 2013-2017
Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pendidikan Anak Usia Dini					
1	APK PAUD (%)	6,76	31,32	34,04	55,72	58,47
2	TK/RA Kondisi Bangunan Baik	71,08	67,17	38,32	57,52	55,22



NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
	(%)					
2	Pendidikan Dasar					
1	APS SD/MI/SDLB (%)	93,23	95,97	103,7 3	105,1 1	99,74
2	APS SMP/MTs/SMPLB (%)	67,67	79,21	100,2 2	96,55	99,39
3	Apts SD/MI/SDLB (%)	0,4	0,40	0,51	0,25	0,26
4	Apts SMP/MTs/SMPLB (%)	0,5	0,75	0,78	0,89	0,61
5	Angka Kelulusan (AL) SD/MI/SDLB (%)		99,52	99,40	100	100
6	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/SMPLB (%)		98,03	99,62	100	100
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI/SDLB Ke SMP/MTs (%)	76,64	98,93	96,87	103,1 1	101,4 3
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs/SMPLB ke SMA/SMK/MA (%)	58,81	91,05	85,96	88,34	97,39
9	SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%)	74,01	63,92	64,65	53,63	54,52
10	SMP/MTs/SMPLB Kondisi Bangunan Baik (%)	67,23	65,08	64,35	50,74	47,51
11	Rasio Ketersediaan SD terhadap Penduduk Usia 7 – 12 Tahun	72,04	78,26	79,14	79,29	79,01
12	Rasio Ketersediaan SMP terhadap Penduduk Usia 13-15 Tahun	45,05	47,46	47,78	47,93	48,12
13	Rasio Guru/Murid SD/MI sesuai SPM 1:32	12	13	13,12	13,07	13
14	Rasio Guru/Murid SMP/MTs sesuai SPM 1:36	11	12	10,79	11,35	01:11
15	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,08	7,6	7,74	7,75	7,89
3	Pendidikan Non Formal					
1	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 – 24 Tahun (%)	89,90	95,50	91,65	93,23	94,00
4	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan					
1	Guru berkualifikasi S1/D.IV di semua jenjang pendidikan (%)	83,00	89,13	91,22	93,88	88,80





NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
5	Program Pengelolaan Keragaman Budaya					
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	-	-	-	4	-
6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					
1	Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola Secara Terpadu (Kawasan)	1	1	1	4	1
2	Jumlah Total Cagar Budaya	33	33	38	45	49
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	3,03	3,03	2,63	8,89	2,04
4	Jumlah Karya Budaya Yang direvitalisasi dan Inventarisasi	-	-	-	-	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017

2.3.1.2 Bidang urusan Kesehatan

2.3.1.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup dalam satu tahun. Imunisasi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan dasar dari segi preventif yang memegang peranan dalam menurunkan angka kematian bayi. Upaya pelayanan imunisasi dilakukan melalui kegiatan imunisasi rutin dan tambahan dengan tujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

Tabel 2.74
Angka Kematian Bayi
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran hidup	Jiwa	8	4	7		

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017



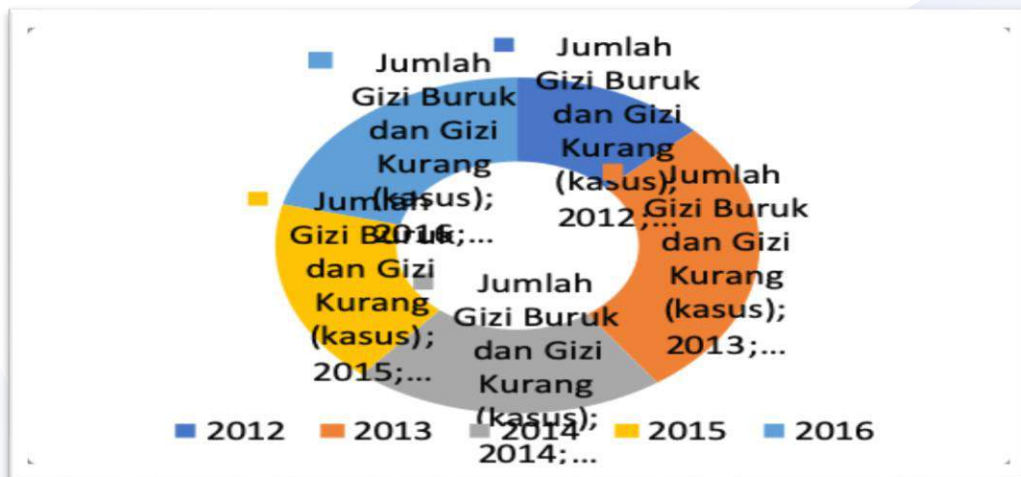
Perkembangan angka kematian bayi selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2014 angkanya mencapai 4 kasus, selanjutnya naik pada tahun 2015 menjadi 7 kasus, dan tahun 2016 angka kematian bayi kembali turun yakni 5 kasus. Pada tahun 2017 angka kematian bayi naik menjadi 6 kasus. Tahun 2013 – 2017 cakupan Kematian Bayi berada pada posisi stagnan namun menurun pada akhir tahun, perbedaan/gap antara target dan cakupan disebabkan oleh penetapan target yang agak rendah, sehingga sulit dicapai. Penurunan angka kematian bayi ini terjadi setelah mengalami kenaikan selama 3 tahun berturut-turut. Terjadinya penurunan AKB merupakan dampak positif dari naiknya angka persalinan dengan bantuan tenaga medis dan meningkatnya proporsi tingkat pendidikan perempuan secara umum, khususnya para ibu dengan pendidikan yang lebih tinggi. Dalam usaha meminimalkan AKB diperlukan penanganan yang intensif baik dari faktor eksternal maupun internal, antara lain melalui keberadaan penolong persalinan yang mumpuni dan kemudahan akses ke tempat pelayanan kesehatan serta peningkatan perawatan bayi seperti pemberian asupan makanan yang cukup serta pemberian ASI dan imunisasi.

Terkait dengan kasus Gizi Balita Berikut ini digambarkan kasus gizi berdasarkan tinggi badan per berat badan yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2012-2016, dimana kasus gizi kurang pada tahun 2012 sebesar 287 kasus mengalami penurunan pada tahun 2014 sebanyak 451 kasus dan tahun 2015 sebanyak 386 kasus, tetapi mengalami peningkatan mencapai 454 kasus pada Tahun 2016. Sedangkan kasus gizi buruk tahun 2013 sebanyak 10 kasus, tahun 2014 meningkat sebanyak 15 kasus, tahun 2015 menurun menjadi 2 kasus dan tahun 2016 tidak ada kasus.

Terlepas dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, namun tidak menutup kemungkinan adanya beberapa kasus terkait dengan angka kematian ibu, angka kematian balita serta kasus gizi buruk sebagaimana diuraikan berikut ini :



Gambar 2.9
Jumlah Gizi Buruk dan Gizi Kurang (kasus)
di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016



Kurang gizi berarti tubuh dalam kondisi kekurangan nutrisi penting yang diperlukan, baik makanan-makanan sumber kalori, vitamin ataupun mineral. Apabila hal ini terus dibiarkan maka status gizi bisa jatuh menjadi gizi buruk yang dapat menyebabkan kelemahan dan kerusakan pada fungsi vital tubuh. Berdasarkan data diatas dari tahun 2012 – 2016 balita yang mengalami gizi kurang tertinggi pada tahun 2013 sebanyak 587 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 454 kasus. Hal ini menandakan balita gizi kurang di Kabupaten Sidenreng Rappang masih perlu mendapat perhatian dan penanganan yang baik agar dapat mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera di masa-masa mendatang.

Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Pelatihan penatalaksanaan kasus gizi buruk dengan output terbentuknya Tim Tata Laksana Gizi Buruk Terlatih di tingkat Puskesmas maupun RS;
- b. Peningkatan deteksi dini kasus-kasus gizi buruk di Posyandu;



- c. Pemberian Makanan Tambahan pada balita kurus dan bumil KEK selama 90 hari makan;
- d. Melaksanakan konseling menyusul dan konseling gizi di Puskesmas

2.3.1.2.2 Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 KH. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan. AKABA di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 sebesar 5 jiwa per 1.000 KH, sedangkan tahun 2014 menjadi 6 jiwa per 1.000 KH, tahun 2015 turun menjadi 3 jiwa per 1.000 KH. Tahun 2016 turun menjadi 2 jiwa per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2017 tidak terjadi kematian balita seperti tampak pada Tabel berikut:

Tabel 2.75
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	Jiwa	5	6	3	2	0

Menurunnya Angka Kematian Balita (AKABA) menjadi fokus utama bagi Dinas Kesehatan. Berbagai program dan kegiatan yang mengacu pada target tersebut dilanjutkan kembali, dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber daya, mengingat bahwa perlu keterpaduan berbagai kegiatan dan kesinambungan program dari tahun ke tahun.

Kasus kematian Balita dari tahun 2013 sampai 2017, cenderung meningkat namun terjadi penurunan pada akhir tahun 2017 bahkan tidak terjadi kematian balita. Kematian balita pada umumnya disebabkan oleh Diare dan Phemonia, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat yang belum optimal serta bagaimana



masyarakat dalam mendapatkan pertolongan pada anak sakit. Disamping itu hal ini juga berkaitan dengan deteksi dini faktor resiko serta tatalaksana dalam penanganan balita sakit.

2.3.1.2.3 Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Tahun 2013 angka kematian Neonatal mengalami peningkatan sebanyak 45 jiwa pada tahun 2014-2015 cenderung mengalami penurunan. Tahun 2016 tidak terjadi kematian Neonatal dan pada tahun 2017 terjadi peningkatan angka kematian Neotanal sebanyak 18 jiwa. Hal ini disebabkan diantaranya adalah kualitas kesehatan ibu hamil yang masih rendah, kompetensi petugas dalam penatalaksanaan bayi baru lahir masih kurang, dukungan sarana prasarana yang kurang memadai serta deteksi faktor resiko yang belum akurat.

Tabel 2.76
Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran hidup	Jiwa	45	27	23		1

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017

2.3.1.2.4 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 KH. AKI berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas. Angka Kematian Ibu melahirkan di Kabupaten Sidenreng Rappang selama lima tahun terakhir (Tahun 2013-2017) yaitu pada tahun 2013 sebesar 5 jiwa per 100.000 KH, tahun 2014 menjadi 6 jiwa per 100.000 KH, tahun



2015 turun menjadi sebesar 4 jiwa per 100.000 KH, tahun 2016 turun menjadi 3 jiwa per 100.000 KH, dan pada tahun 2017 sebanyak 3 jiwa per 100.000 KH.

Kematian ibu atau maternal adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam yaitu Meningkatkan Kesehatan Ibu. SDGs menargetkan bahwa setiap negara yang telah menyepakati SDGs harus berhasil mengurangi $\frac{3}{4}$ resiko jumlah kematian ibu. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 Tahun yaitu pada tahun 2013 sebesar 5 jiwa per 100.000 KH, tahun 2014 menjadi 6 jiwa per 100.000 KH, tahun 2015 turun menjadi sebesar 4 jiwa per 100.000 KH, tahun 2016 turun menjadi 3 jiwa per 100.000 KH, dan pada tahun 2017 sebanyak 3 jiwa per 100.000 KH. Hal ini menandakan bahwa kemampuan pemerintah untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia perlu menjadi perhatian serius dan penanganan secara berkesinambungan.

Tabel 2.77
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Jiwa	5	6	4	3	3

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017

2.3.1.2.5 Rasio Posyandu per Satuan Balita

Keberadaan posyandu merupakan upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita. Berdasarkan data Dinas Kesehatan,



Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 mewujudkan jumlah posyandu dan jumlah balita di Kabupaten Sidenreng Rappang relative meningkat. Pada tahun 2013, jumlah posyandu sebanyak 309 unit, meningkat menjadi 310 unit pada tahun 2015. Sedangkan jumlah balita pada tahun 2013 sebanyak 656.298 jiwa, meningkat pada tahun 2017 sebanyak 863.350 jiwa. Rasio Posyandu persatuan Balita pada tahun 2013 adalah 14,34 per1000 balita dan menjadi 11,30 per 1000 balita pada tahun 2017. Permasalahan dalam fungsi pelayanan posyandu diantaranya:

- a. Masyarakat tidak membawa balitanya kembali ke Posyandu setelah imunisasi dasarnya lengkap;
- b. Pelayanan posyandu kurang inovatif,
- c. Keterlibatan lintas sektor (Tim Pokjanal Posyandu) kurang maksimal dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Posyandu.

Keberadaan posyandu merupakan upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita. Berdasarkan data jumlah Posyandu pada tahun 2014 sebanyak 309 unit, terjadi penambahan posyandu pada tahun 2015-2018 sebanyak 1 posyandu menjadi 310 unit. Rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2014 adalah 11,36 per 1000 balita dan menjadi 13,05 per 1000 balita pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan posyandu termasuk memadai dalam melayani balita yang ada.

Tabel 2.78
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Posyandu per Satuan Balita	Per 1000 balita	1:81	1:81	1:79	1:79	1:80

2.3.1.2.6 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Per Satuan Penduduk

Jumlah Posyandu pada tahun 2014 sebanyak 309 unit, terjadi penambahan posyandu pada tahun 2015-2018 sebanyak 1 posyandu



menjadi 310 unit. Rasio Puskesmas, Poskesdes dan Pustu per 100.000 penduduk pada tahun 2013 sebesar 45,58 dan menurun sekitar 44,17 di tahun 2016, 2017 dan 2018.

Di Kabupaten Sidenreng Rappang jumlah Puskesmas adalah 14, Pustu 42 dan 2 Klinik. Adapun rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 0,195 persen. Hal ini didapatkan dari penjumlahan dari 14 Puskesmas ditambah 42 Pustu dan 2 Klinik totalnya 58 dan di bagi total jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang (296,125) dikalikan 1000 dan hasilnya adalah 0,195 persen.

Tabel 2.79
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Per Satuan Penduduk
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk	Per 100.000 penduduk		1:19.818	1:20.236	1:20.699	1:21.152
Rasio Pustu Per Satuan Penduduk	Per 100.000 penduduk		1:6.606	1:6.745	1:6.900	1:6.659
Rasio Klinik Per Satuan Penduduk	Per 100.000 penduduk		1:277.451	1:283.307	1:89.929	1:146.493
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Per Satuan Penduduk	Per 100.000 penduduk	125	128	128	128	130

2.3.1.2.7 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan sarana prasarana kesehatan yaitu Rumah Sakit . Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2013-2018 sebanyak 3 rumah sakit. Rasio Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk sebesar 1,04 pada tahun 2017 memperlihatkan besarnya beban Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan rendahnya mutu pelayanan serta sulitnya masyarakat mengakses



pelayanan Rumah Sakit yang cepat. Sejak berlakunya JKN pada tahun 2014, kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan Rumah Sakit semakin meningkat. Trend kebutuhan pelayanan tersebut menyebabkan beberapa pihak swasta mendirikan rumah sakit untuk menangkap peluang tersebut. Kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan RS semakin meningkat. Trend kebutuhan pelayanan tersebut menyebabkan beberapa pihak swasta mendirikan rumah sakit untuk menangkap peluang tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2017 tren pertumbuhan rumah sakit relatif meningkat karena fenomena JKN tersebut, khususnya di daerah perkotaan seperti Kabupaten Sidenreng Rappang .Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesungguhnya lebih banyak berpengaruh oleh waktu tempuh dibandingkan karena jarak tempuh, menyebabkan beberapa daerah yang secara geografis memiliki wilayah yang luas dan kepadatan penduduk yang rendah menyulitkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, maka ratio RS terhadap jumlah penduduk harus ditingkatkan. Hal ini akan berpengaruh terhadap mutu pelayanan dan akses penduduk terhadap pelayanan rujukan. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah harus melakukan kajian dalam menyediakan layanan kesehatan rujukan untuk meningkatkan akses masyarakat. Meskipun pertumbuhan RS mulai terasa sejak 2014, tetapi angka tersebut didominasi oleh RS Swasta. Padahal peran dan kewajiban pemerintahlah untuk menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan akses tersebut.

Tabel 2.80
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Rumah Sakit	Unit	3	3	3	3	3
Jumlah Penduduk	Jiwa	283,307	286,610	289,787	292,985	296,125



INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Rumah Sakit Per Satuan	Per 100.000 penduduk	1,05	1,05	1,04	1,04	1,04

Sumber : Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, 2018

2.3.1.2.8 Rasio Dokter dan tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio dokter persatuan penduduk dan tenaga medis yaitu dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi pada tahun 2017 tercatat tenaga medis sebanyak 61 orang. Rasio dokter dan tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2014 yaitu 14,12% dan terjadi peningkatan pada tahun 2017 menjadi 19,78%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah dokter dari tahun 2013-2017 belum sebanding dengan pertambahan penduduk. Distribusi tenaga kesehatan belum merata di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Tabel 2.81
Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Dokter dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	Per 100.000 penduduk		14,12	19,67	19,67	19,78

Sumber : Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, 2018

2.3.1.2.9 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan, hal ini disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (propesional).

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2014 sebesar 96,5 % tahun 2015 dan 2016 meningkat menjadi 82,8%, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 113, Jika melihat data tersebut penanganan komplikasi kebidanan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan hal ini disebabkan tenaga



kesehatan telah melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K) yang merupakan suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bidan di Desa dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan Masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil termasuk perencanaan penggunaan KB Pasca Persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan Bayi Baru Lahir.

Tabel 2.82
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%		96,5	82,5	82,8	113,0

Sumber : Kesehatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, 2018

2.3.1.2.10 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2014 sebesar 91,44% berarti masih ada sekitar 8,56% yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan. Tahun 2015 dan 2016 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 98,90% dan yang ditolong oleh non kesehatan sekitar 1,1%. Tahun 2017 cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 96,00% dan masih ada yang ditolong bukan oleh tenaga kesehatan sekitar 4,00%.

Indikator Cakupan Persalinan yang ditolong oleh Bidan atau tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan mencapai 100 persen. Hal ini merupakan sebuah prestasi besar dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi mengingat bahwa seringkali penyebab kematian ibu dan bayi saat melahirkan adalah karena ditolong /ditindak oleh dukun atau orang yang tidak memiliki kompetensi yang memadai dibidang persalinan. Kejadian pendarahan, infeksi, atau pun timbulnya eklampsia pasca persalinan adalah penyebab utama kefatalan dalam persalinan. Faktor



lain yang cukup berhasil dan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan program adalah indikator gizi buruk, gizi kurang dan penanganannya yang telah sesuai target.

Jika melihat cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dari tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan namun capaian pada tahun 2017 menurun hal ini disebabkan karena adanya ibu hamil yang melahirkan bukan di fasilitas kesehatan dan pertolongan bukan oleh tenaga kesehatan. Hal tersebut dipengaruhi diantaranya jarak dengan fasilitas kesehatan, alat transportasi, letak demografi daerah dan pengetahuan mencari penolong persalinan yang aman dan pengetahuan tersebut mempengaruhi keputusan dalam meminta bantuan penolong persalinan.

Tabel 2.83
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%		91,44	99,3	87,0	96,0

2.3.1.2.11 Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Pencapaian Universal Child Immunization (UCI) pada dasarnya merupakan proyeksi terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Pencapaian UCI tingkat desa/kelurahan pada tahun 2013 95,28%, tahun 2014 100%, tahun 2015 97,43%, tahun 2016 88,7%, tahun 2017 meningkat menjadi 93,4%. Pelayanan imunisasi rutin di posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan. Cakupan dasar pada bayi (cakupan imunisasi campak).

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) selama 5 (Lima) tahun cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2013 capaian UCI sebesar 95,28% menurun menjadi 93,4% pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan gencarnya upaya yang dilakukan dalam rangka



mencapai dan mempertahankan status imunisasi masyarakat yang lengkap sehingga kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat.

Tabel 2.84
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Desa/Kelurahan UCI	Desa/Kel	101	106	103	94	99
Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan	Desa/Kel	106	106	106	106	106
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	95,28	100	97,43	88,7	93,4

2.3.1.2.12 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Program Penanggulangan Kasus Gizi Buruk masih sektoral (kesehatan) padahal permasalahannya multifaktor bukan hanya dari aspek kesehatan/Gizi tapi juga dari aspek Kemiskinan, Lingkungan, Air bersih dll (Intervensi Sensitif dan Spesifik).

Gizi buruk merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan karena kekurangan asupan energi dan protein juga mikronutrien dalam jangka waktu lama. Anak disebut gizi buruk apabila berat badan dibanding umur tidak sesuai (selama 3 bulan berturut-turut tidak naik). Perawatan bagi balita Gizi Buruk di Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 telah tertangani dengan baik. Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan, menunjukkan angka 100 persen. Hal ini menandakan bahwa pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang memiliki perhatian serius terhadap permasalahan gizi buruk tersebut.

Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Pelatihan penatalaksanaan kasus gizi buruk dengan output terbentuknya Tim Tata Laksana Gizi Buruk Terlatih di tingkat Puskesmas maupun RS;



- b. Peningkatan deteksi dini kasus-kasus gizi buruk di Posyandu;
- c. Pemberian Makanan Tambahan pada balita kurus dan bumil KEK selama 90 hari makan;
- d. Melaksanakan konseling menyusul dan konseling gizi di Puskesmas

Tabel 2.85
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Balita		15	4	0	3
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Balita		15	4	0	3
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100

2.3.1.2.13 Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Dibawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar Yang Digunakan Indonesia 2.100.Kkal/kapita/hari)

Tabel 2.86
Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Dibawah Tingkat
Konsumsi Minimum (Standar yang digunakan Indonesia 2.100.Kkal/
kapita/hari Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Dibawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang digunakan Indonesia 2.100.Kkal/kapita/hari)	%	Tidak Tersedia Data				

2.3.1.2.14 Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Hal ini antara lain didukung oleh upaya-upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Diharapkan capaian kinerja ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun



mendatang mengingat pemberian kekebalan anak terhadap penyakit campak ini merupakan investasi masa depan.

Indonesia dinyatakan telah berhasil menekan terjangkitnya jumlah penyakit cacar dan polio. Pada 2020 mendatang, Indonesia diharapkan untuk terbebas dari penyakit campak. Di Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2017 terjadi penurunan persentase anak usia 1 tahun yang di imunisasi. Pada tahun 2017 telah menunjukkan nilai 92,8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa imunisasi campak bagi anak usia 1 tahun di Kabupaten Sidenreng Rappang belum merata dilakukan secara menyeluruh, dan diharapkan capaian kinerja ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang mengingat pemberian kekebalan anak terhadap penyakit campak ini merupakan investasi masa depan.

Tabel 2.87
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak	%	99,8	102,6	98,1	92,8	92,8

2.3.1.2.15 Non Polio AFP Rate

Pelacakan kasus lumpuh layu di kabupaten/kota sangat ditentukan oleh SDM yang ada. Kasus lumpuh layu didapatkan dari rumah sakit dan masyarakat. Permasalahan dalam penemuan kasus lumpuh layu adalah:

- a. Tenaga klinis tidak pernah dilatih tentang surveilans lumpuh layu/AFP;
- b. Keterbatasan anggaran;
- c. Pemeriksaan specimen tinja kasus AFP masih dikirim ke BBLK Surabaya sebagai laboratorium rujukan nasional.

Kasus AFP adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya flacid (layu) terjadi secara akut (mendadak) dan bukan disebabkan oleh rudapaksa. Jumlah Non Polio AFR Rate per 100.000 penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang



sejak tahun 2016 mencapai angka 2,53 persen dan pada tahun 2017 tidak ada lagi terjadi lumpuh layu.

Tabel 2.88
Non Polio AFP Rate
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kasus AFP yang dilaporkan	Kasus					
Jumlah penduduk yang berumur <15 tahun	Jiwa					
Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	Per 100.000 Penduduk	0	0	0	2,53	0

2.3.1.2.16 Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani

Pneumonia merupakan infeksi saluran pernafasan bawah akut umumnya menyebabkan hampir semua kematian ISPA pada balita. Di negara berkembang pneumonia merupakan penyakit yang terabaikan (the neglected disease) atau penyakit yang terlupakan (the forgotten disease) karena begitu banyak anak yang meninggal karena pneumonia, namun sangat sedikit perhatian yang diberikan kepada masalah pneumonia.

Cakupan balita pneumonia yang ditangani tahun 2014 sebanyak 13,36%, tahun 2015 sejumlah 37,1%. Capaian di tahun 2016 terjadi penurunan sebanyak 31,6%, tahun 2017 sebanyak 27%, Capaian yang sangat rendah disebabkan karena petugas ISPA di tingkat Puskesmas belum mendapatkan pelatihan tentang pelaksanaan kegiatan program ISPA dan tatalaksana Pneumonia/ISPA

Tabel 2.89
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani	Jiwa	343	301	94	275	299
	%		13,6	37,1	31,6	27,6



2.3.1.2.17 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Penemuan pasien baru TBC-BTA Positif adalah penemuan pasien TB melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada waktu tertentu. Di tahun 2013 Dinas Kesehatan dalam hal ini Seksi P2M Dinas Kesehatan telah mendapatkan nilai Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit TB-BTA selama 5 tahun terakhir. Di tahun 2013 sampai 2017 penanggulangan terus meningkat dari 46,2 persen dan terus naik sehingga pada tahun 2017 mencapai nilai 100,5 persen.

Tabel 2.90
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan & diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun	Jiwa	273	274	323	248	732
Jumlah perkiraan penderita baru penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	Jumlah	590	583	593	609	738
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	46,2	46,9	54,2	40,7	100,5

Tuberkulosis paru adalah penyakit yang disebabkan oleh *M. tuberculosis*. Pada tahun 2011 Indonesia menduduki peringkat ke-4 dunia untuk kasus tuberkulosis. Sumber infeksi berasal dari penderita yang membatukkan dahaknya. Tuberkulosis paru atau yang biasa disebut TB paru adalah suatu penyakit infeksi kronik yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* (atau kadang kadang oleh *M. bovis* dan *africanum*). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, namun juga dapat menyerang organ lain seperti kelenjar getah bening, selaput otak, kulit, tulang dan persendian, usus, ginjal serta organ tubuh lainnya.



Perhatian aktivitas kesehatan sedunia telah dikejutkan oleh deklarasi “kedaruratan kesehatan global” (*the global health emergency*) tuberkulosis paru pada tahun 1993 dari WHO, munculnya deklarasi tersebut disebabkan oleh sebagian besar negara-negara di dunia tidak berhasil mengendalikan penyakit TB paru. Diperkirakan sekitar sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi oleh *Mycobacterium tuberculosis*. Pada tahun 1995 ada 9 juta pasien TB baru dan 3 juta kematian akibat TB diseluruh dunia. Dimana 95% dari kasus TB dan 98% kematian akibat TB di dunia tersebut terjadi pada negara-negara berkembang. Diantara mereka 75% berada pada usia produktif, yaitu 15-50 tahun. Berdasarkan laporan WHO Global Tuberculosis Control tahun 2012, diketahui bahwa pada tahun 2011 Indonesia menduduki peringkat ke-4 dunia untuk kasus TB. Lima negara dengan jumlah terbesar insiden tuberkulosis terbesar pada tahun 2011 tersebut adalah India, China, Afrika Selatan, Indonesia, dan Pakistan. Tingginya prevalensi TB paru ini disebabkan oleh rendahnya angka kesembuhan penderita yang berdampak pada tingginya penularan.

2.3.1.2.18 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Target program penanggulangan TBC secara nasional telah ditetapkan eliminasi TBC akan dicapai pada tahun 2030. Dalam roadmap eliminasi TBC menunjukkan sampai tahun 2020 diharapkan adanya upaya akselerasi untuk meningkatkan penemuan kasus TBC. Angka penemuan kasus berdasarkan data yang telah didapatkan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2013-2015. Hal ini menggambarkan jumlah kasus yang telah didapatkan di pelayanan kesehatan dan dilaporkan di program terus meningkat.

Tabel 2.91
Cakupan Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	Per 100.000 Penduduk	132	139	213	196	250





Penanganan penyakit TB dilakukan secara komprehensif dari penemuan kasus hingga pengobatan pada pasien TB. Tanpa pengobatan maka angka kematian akibat TB menjadi tinggi. Selain untuk menyembuhkan pasien dan mencegah kematian, tujuan pengobatan TB lainnya yaitu mencegah kekambuhan dan memutuskan rantai penularan. Salah satu upaya untuk menekan timbulnya kasus TB serta kematian akibat TB adalah membentuk strategi pengobatan TB secara global. Sekitar 37 juta orang berhasil diselamatkan melalui diagnosa dan pengobatan TB pada periode 2000-2013 (WHO,2014).

Adapun tingkat prevalensi Tuberkulosis di Kabupaten Sidenreng Rappang per 100.000 penduduk dari tahun 2013 adalah 132 kasus, 2014 dan 2015 terjadi peningkatan dari 139 kasus menjadi 213 kasus dan 2016 turun menjadi 196 kasus dan tahun 2017 terjadi peningkatan signifikan sebanyak 250 kasus.

2.3.1.2.19 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Penyakit Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu penyakit menular yang sangat berbahaya. Di Indonesia, kasus TBC terus meningkat. Menurut Kepala Bidang Penyakit Menular dan Tropis, Departemen Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Hindri, tuberkulosis berada di urutan kedua dari sejumlah penyakit menular yang masuk 10 besar penyebab kematian di Indonesia. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini tidak lepas dari rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih. Tempat hidup yang kotor merupakan tempat tumbuh kembang virus, bakteri, dan kuman penyakit. Selain itu kualitas air dan sanitasi juga memiliki dampak yang fatal. Di Kabupaten Sidenreng Rappang tingkat kematian karena Tuberkulosis dari tahun ketahun mengalami peningkatan jumlah kasus kematian per 100.000 penduduk. Tahun 2013 angka mencapai 5,7% dan tahun 2017 terjadi peningkatan menjadi 11%.



Tabel 2.92
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	Per 100.000 Penduduk	5,7	6,4	8,1	6,5	11

2.3.1.2.20 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

DOTS (Directly Observed Treatment, Short-course) adalah pengawasan langsung pengobatan jangka pendek. DOTS dapat dimulai dengan keharusan setiap pengelola program tuberkulosis untuk direct attention dalam usaha menemukan penderita dengan kata lain mendeteksi kasus dengan pemeriksaan mikroskop. Kemudian setiap penderita harus di observed dalam memakan obatnya, setiap obat yang ditelan penderita harus di depan seorang pengawas. Selain itu tentunya penderita harus menerima treatment yang tertata dalam sistem pengelolaan, distribusi dengan penyediaan obat yang cukup. Kemudian, setiap penderita harus mendapat obat yang baik, artinya pengobatan short course standard yang telah terbukti ampuh secara klinis. Akhirnya, harus ada dukungan dari pemerintah yang membuat program penanggulangan tuberkulosis mendapat prioritas yang tinggi dalam pelayanan kesehatan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya Dinas Kesehatan telah melaksanakan Program DOTS ini selama beberapa tahun dengan didaptkannya Proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi. Pada tahun 2013 sampai 2015 terjadi peningkatan jumlah proporsi dan tahun 2016 menurun menjadi 40,7 persen dan tahun 2017 terjadi peningkatan 100,5%.



Tabel 2.93
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam
Program DOTS Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	Kasus	265	205	273	252	263
	%	46,2	46,9	54,2	40,7	100,5

2.3.1.2.21 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS

Indonesia merupakan an negara dengan jumlah penderita TB paru terbesar ke-3 di dunia setelah India dan Cina. Jumlah penderita TBC sebesar 10 persen dari total penderita TB paru dunia. Pelayanan TB strategi DOTS merupakan program nasional dan menjadi sasaran Millenium Development Goals (MDG's), disediakan dan diberikan kepada pasien sesuai dengan ilmu pengetahuan kedokteran mutakhir dan standar yang telah disepakati oleh seluruh organisasi profesi di dunia, yang memanfaatkan kemampuan dan fasilitas rumah sakit secara optimal dengan mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan serta memenuhi etika kedokteran. Proporsi kasus Tuberkulosis yang di obati dan sembuh dalam Program DOTS di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah baik. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dan 2014 meningkat dari angka 84,2 persen menjadi 85,4 persen. Pada tahun berikutnya 2015 terjadi penurunan dari angka 76,1 , Tahun 2016 terjadi peningkatan 77% dan pada tahun 2017 terjadi penurunan sebanyak 74%.

Tabel 2.94
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh
Dalam Program DOTS Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS	Kasus	278	229	229	189	189
	%	84,2	85,4	76,1	77	74



2.3.1.2.22 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Penyakit ini dikenal dengan gejala yang sangat khas, yaitu suhu tubuh tinggi atau panas sekaligus nyeri sendi, sakit kepala, otot, tulang, dan sakit area belakang mata. Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Di Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri penanganan untuk penderita DBD sudah tertangani dengan baik dalam kurun waktu 5 tahun. Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan pada tahun 2013 yaitu 173 kasus, yang ditangani sesuai SOP berjumlah 173 kasus. Pada tahun 2017 jumlah kasus DBD yang ditemukan dan ditangani mengalami penurunan dari tahun 2016 dengan jumlah temuan 149 kasus. Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan dan yang ditangani sesuai SOP pada tahun 2017 sebanyak 17 kasus.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mencapai 100, resiko penularan di masyarakat seperti angka bebas jentik 100%. Kekurangan logistik untuk penemuan kasus dan penanggulangan kasus serta perlunya sosialisasi tatalaksana kasus DBD untuk Dokter dan Petugas di Puskesmas. Persentase cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mencapai 100%, karena jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah seluruhnya dapat ditangani sesuai standar/SOP.



Tabel 2.95
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah	Jiwa	173	56	82	149	17
Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wilayah dalam kurun waktu yang sama	Jiwa	173	56	82	149	17
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100

Data profil pada tahun 2013 menurun menjadi 173 kasus per100.000 penduduk dengan angka kesakitan 61,6, pada tahun 2014 menurun menjadi 57 kasus per100.000 penduduk dengan angka kesakitan 20,5, pada tahun 2015 meningkat menjadi 82 kasus per100.000 penduduk dengan angka kesakitan 20,5, pada tahun 2016 menurun menjadi 80 kasus per100.000 penduduk dengan angka kesakitan 27.6, pada tahun 2017 menurun menjadi 14 kasus per100.000 penduduk dengan angka kesakitan 4.8.

2.3.1.2.23 Penderita Diare Yang Ditangani

Diare merupakan kondisi yang ditandai dengan encernya tinja yang dikeluarkan dengan frekuensi buang air besar (BAB) yang lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit. Biasanya diare hanya berlangsung beberapa hari, namun pada sebagian kasus memanjang hingga berminggu-minggu. Diare bisa berdampak fatal apabila penderita mengalami dehidrasi, akibat kehilangan banyak cairan dari tubuh. Oleh sebab itu diare tidak boleh dianggap enteng walaupun kondisi ini umum terjadi. Adapun penderita diare yang ditangani oleh petugas di fasilitas kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 sampai 2014 terjadi peningkatan



dari 11,259, menjadi 11,324 sedangkan ditahun 2016 menurun menjadi 8,555. Kemudian di tahun 2017 menurun menjadi 8,344 penderita Diare.

Menurunnya jumlah kasus yang dilaporkan dari tahun 2013-2017 setiap tahun belum mencerminkan bahwa jumlah kasus diare sudah berkurang di masyarakat. Hal ini terlihat dari target cakupan penemuan dan pelayanan penderita diare sampai akhir tahun 2017 belum mencapai target 100%. Beberapa hal yang menjadi kendala sehingga target cakupan penemuan dan pelayanan belum tercapai di antaranya adalah petugas diare di puskesmas dan kabupaten belum secara rutin dan tepat waktu mengirimkan laporannya,

Kasus-kasus diare yang tangani di RS belum semua dilaporkan, masih kurangnya kegiatan sosialisasi di masyarakat tentang pentingnya penanganan kasus diare di pelayanan kesehatan khususnya kepala balita, sehingga banyak orang tua yang menangani sendiri kasus diare di rumah tangga dengan cara yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan tatalaksana diare pada balita.

Tabel 2.96
Penderita Diare Yang Ditangani
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penderita Diare Yang Ditangani	Orang	11.259	11.324	10.444	8.555	8.344

2.3.1.2.24 Angka Kejadian Malaria

Malaria adalah penyakit yang menyebar akibat gigitan nyamuk yang sudah terinfeksi parasit. Infeksi malaria bisa terjadi hanya dengan satu gigitan nyamuk. Jika tidak ditangani dengan benar, penyakit ini bisa menyebabkan kematian. Malaria jarang sekali menular secara langsung dari satu orang ke orang lainnya. Penyakit ini bisa menular jika terjadi kontak langsung dengan darah penderita. Janin di dalam kandungan juga bisa terinfeksi malaria karena tertular dari darah sang ibu. Gejala malaria



timbul setidaknya 10-15 hari setelah digigit nyamuk. Munculnya gejala melalui tiga tahap selama 6-12 jam, yaitu menggigil, demam dan sakit kepala, lalu mengeluarkan banyak keringat dan lemas sebelum suhu tubuh kembali normal. Tahapan gejala malaria dapat timbul mengikuti siklus tertentu, yaitu 3 hari sekali (tertiana) atau 4 hari sekali (kuartana). Angka kejadian malaria di Kabupaten Sidenreng Rappang dari Tahun 2013 sampai dengan 2016 terjadi peningkatan, tetapi pada Tahun 2017 terjadi penurunan kejadian malaria sebanyak 9 kasus. Penurunan Angka Kejadian Malaria diperoleh dengan berbagai upaya yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, diantaranya adalah peningkatan Kapasitas SDM, Mass Bolod Survey (MBS), Penyemprotan Rumah, Distribusi Kelambu, Surveilans Migrasi, Sosialisasi Sistem Surveilans Malaria kepada LS/LP, pengamatan daerah reseptif dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.97
Angka Kejadian Malaria
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kejadian Malaria	Jiwa	12	15	16	16	9
	Per 100.000 Penduduk	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07

2.3.1.2.25 Tingkat Kematian Akibat Malaria

Tabel 2.98
Tingkat Kematian Akibat Malaria
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat kematian akibat Malaria	Orang	Tidak Tersedia Data				

Tingkat kematian akibat malaria Kabupaten Sidenreng Rappang tidak memiliki data dari tahun 2013 sampai tahun 2017.



2.3.1.2.26 Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat

Tabel 2.99
Persentase anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (ACT) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat (ACT)	%	Tdk ada data	100	100	Tdk ada data	Tdk ada data

Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat Kabupaten Sidenreng Rappang hanya memiliki data pada tahun 2014 sebesar 100% dan tahun 2015 sebesar 100%.

2.3.1.2.27 Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi

Tabel 2.100
Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Prevalensi HIV/AIDS (Persen) dari total populasi	Jiwa	15	22	20	20	22
	%	0,0007	0,0007	0,007	0,005	0,009

Jumlah Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan tahun 2017 yaitu 22 jiwa.

2.3.1.2.28 Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir

Tabel 2.101
Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Terakhir Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	%	Tidak Tersedia Data				



Kabupaten Sidenreng Rappang tidak memiliki data penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi pada tahun 2013 sampai tahun 2017.

2.3.1.2.29 Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Tabel 2.102
Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	Tidak tersedia data				

Kabupaten Sidenreng Rappang tidak memiliki data Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS pada tahun 2013 sampai tahun 2017.

2.3.1.2.30 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Tabel 2.103
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

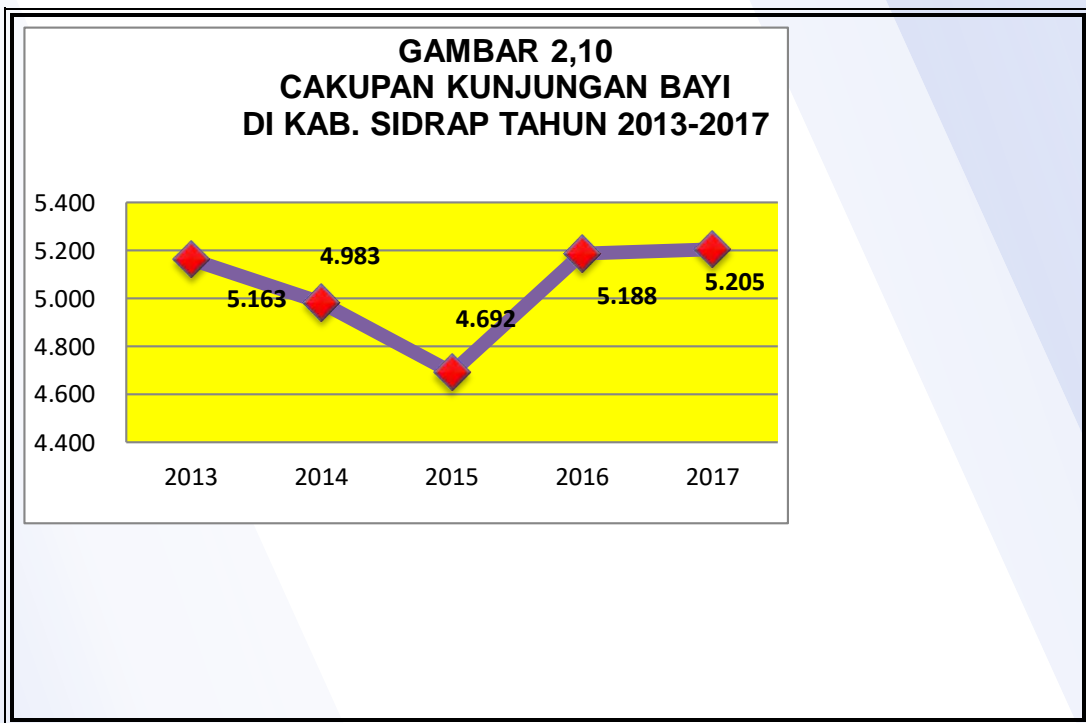
URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	Jiwa	3.244	2.734	54.843	91.147	90.123

Berdasarkan tabel diatas pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan yang sangat tinggi dimana semula pada tahun 2013 sebesar 3.244 jiwa menjadi 91.147 pada tahun 2016 kemudian mengalami penurunan sedikit pad tahun 2017 menjadi 90123.



2.3.1.2.31 Cakupan Kunjungan Bayi

Hasil pengumpulan data menunjukkan cakupan persentase kunjungan bayi pada tahun 2013 sebesar 96,8%(5163 bayi) laki-laki 2.559 bayi dan perempuan 2.604 bayi, tahun 2014 sebesar 94,5%(4.983 bayi) laki-laki 2.292 bayi dan perempuan 2.691 bayi, tahun 2015 sebesar 92,6%(4.642 bayi) laki-laki 2.244bayi dan perempuan 2.398 bayi, tahun 2016 sebesar 94%(5.522 bayi) laki-laki 2.651 bayi dan perempuan 2.537 bayi, tahun 2017 sebesar 95,7%(5.205 bayi) laki-laki 2.724bayi dan perempuan 2.481 bayi.



Sumber: Profil Kesehatan Dinkes Kab. Sidrap

**Tabel 2.104
Cakupan Kunjungan Bayi
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017**

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Kunjungan Bayi	96,8%	94,5%	92,6%	94%	95,7%



2.3.1.2.32 Cakupan Puskesmas Kecamatan

Tabel 2.105
Cakupan Puskesmas
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Puskesmas	%	127	127	127	127	127

Berdasarkan tabel diatas cakupan puskesmas Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengalami perubahan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 yaitu sebesar 127%.

2.3.1.2.33 Cakupan Puskesmas Pembantu

Tabel 2.106
Cakupan Puskesmas Pembantu
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Puskesmas Pembantu	%	Tidak Tersedia Data				

Cakupan puskesmas pembantu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak memiliki data.

2.3.1.2.34 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Tabel 2.107
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	-	72,8	78,6	70,6	78,0

Berdasarkan tabel diatas cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Sidenreng Rappang berkisar diangka 70% dimana sampai pada tahun 2017 sebesar 78%.



2.3.1.2.35 Cakupan Pelayanan Nifas

Tabel 2.108
Cakupan Pelayanan Nifas
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	216	2017
Cakupan pelayanan Nifas	%	-	87,0	96,5	87,5	95,3

Berdasarkan tabel diatas cakupan pelayanan nifas Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 tidak memiliki data dan pada tahu 2017 sebesar 95,3%.

2.3.1.2.36 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani

Tabel 2.109
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi Yang Ditangani
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	-	92,3	48,7	73,0	43,4

Berdasarkan tabel diatas cakupan neonatus dengan Komplikasi Yang Ditangani Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 92,3% menjadi 43,4% pada tahun 2017.

2.3.1.2.37 Cakupan Pelayanan Anak Balita

Tabel 2.110
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan pelayanan anak balita	%	-	87,8	83,5	83,6	84,1

Bedasarkan tabel diatas cakupan pelayanan anak balita Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014 sebesar 87,8% dan mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014 yaitu sebesar 83,5 dan 83,6%. Kemudian megalami kenaikan pada tahun 2017 yaitu sebesar 84,1 %.



2.3.1.2.38 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin

Tabel 2.111
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	%	-	91,3	85,2	77,8	91

Berdasarkan tabel diatas cakupan pemberian makanan pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 sebesar 91,3% dan mengalami penurunan 85,2% tahun 2015 dan 77,8 tahun 2016 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2017 yaitu sebesar 91%.

2.3.1.2.39 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Tabel 2.112
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	Tidak Tersedia Data				

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan Setingkat Kabupaten Sidenreng Rappang tidak memiliki data dari tahun 2013 sampai tahun 2017.

2.3.1.2.40 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Tabel 2.113
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	Tidak Tersedia Data				



Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak tersedia data.

2.3.1.3 Bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1 Pekerjaan Umum

2.3.1.3.1.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Infrastruktur merupakan faktor penunjang bagi berbagai aktivitas masyarakat di dalam suatu wilayah. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, efektif dan efisien mutlak diperlukan untuk mendorong pengembangan wilayah sesuai dengan struktur dan pola ruang yang telah direncanakan. Penyediaan dan layanan infrastruktur yang baik dan sesuai dengan standar selain akan sangat menunjang aktivitas perekonomian, juga meningkatkan aksesibilitas suatu lokasi/daerah serta meningkatkan kualitas hidup penghuni di wilayah tersebut. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, jalan dalam kondisi baik sepanjang 915,85 km. Berikut rincian Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik dan Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang :

Tabel 2.114
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Km	780.27	835.12	889.76	919.79	915,85
2	Panjang Jalan Negara	Km	68.05	68.05	68.05	68.05	68.05
3	Panjang Jalan Provinsi	Km	41.00	41.00	41.00	59.90	59.90
4	Panjang Jalan Kabupaten	Km	1,028.86	1,028.86	1,290.04	1,290.04	1,290.04
5	Panjang Jalan Seluruhnya	Km	1,137.91	1,137.91	1,399.09	1,417.99	1,417.99
6	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik		0.69	0.73	0.64	0.65	0.65

Sumber: Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang; 2017



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa panjang jalan dalam kondisi baik dari tahun 2013-2017 selalu meningkat dari 780,27 km menjadi 915,85 km terhadap panjang jalan yaitu 1.417,99 km. Namun, jika melihat proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik nilainya berfluktuasi dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh mutu jalan di Indonesia sangat tinggi tetapi terlalu banyak jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang pemeliharaannya masih buruk.

2.3.1.3.1.2 Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Hubungan kebutuhan infrastruktur pada masyarakat bisa di ukur dengan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk. Sementara rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk (ribu jiwa) suatu wilayah dengan panjang jalan (km). Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah ribu jiwa penduduk. Rasio ini menggambarkan tingkat penggunaan jalan meskipun tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur kepadatan jalannya melainkan melalui rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki Rasio Panjang Jalan terhadap jumlah penduduk pada tahun 2013 – 2017 yang relatif menurun. Pada tahun 2013 ke 2014 tidak ada penambahan panjang jalan, meskipun jumlah penduduk tahun 2013 ke tahun 2014 meningkat sebesar 3.303 Jiwa. Panjang jalan kabupaten bertambah cukup signifikan dari tahun 2014 ke tahun 2015 karena adanya peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten sepanjang 261,18 Km. Tahun 2015 ke tahun 2016 terdapat pengalihan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sepanjang 18,9 Km. Strategi ini memberikan peluang yang lebih besar dari sisi penganggaran. Walaupun pada Tahun 2017 tidak ada peningkatan status jalan namun dari data 4 tahun sebelumnya memberikan gambaran bahwa pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang senantiasa menempatkan bidang infrastruktur jaringan jalan sebagai salah satu prioritas pembangunan.



Tabel 2.115
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Panjang Jalan Seluruhnya	1,137.91	1,137.91	1,399.09	1,417.99	1,417.99
2	Jumlah Penduduk	283,307	286,610	289,787	292,985	296,125
3	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk (Km/Jiwa)	0,0040	0,0039	0,0048	0,0048	0,0047

Sumber: Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2017

2.3.1.3.1.3 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)

Tabel 2.116
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 (>40 Km/Jam)

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	780,27	835,12	889,76	919,79	915,85
2	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten (KM)	1.028,86	1.028,86	1.290,04	1.290,04	1.290,04
3	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 (>40 Km/Jam)	46,05	76,1	78,93	79,14	79,14

Sumber: Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dari tahun 2013-2017 terus meningkat dari 780,27 km menjadi 915,85 km, begitu pula dengan panjang jalan seluruh kabupaten (km) pada tahun 2013-2017 yaitu dari 1.028,86 km menjadi 1.290,04 km. Akan tetapi, persentase jalan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi yang disebabkan kualitas jalan di Indonesia



khususnya daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tinggi tetapi masih banyak jalan yang pemeliharaannya masih dalam kategori buruk.

2.3.1.3.1.4 Persentase Jalan Kabupaten Yang Memiliki Trotoar Dan Drainase / Saluran Pembuangan Air (Minimal 1,5 m)

Tabel 2.117

Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase (KM)	Tidak Tersedia Data				1
2	Panjang Jalan kewenangan Kabupaten (KM)	1.028,86	1.028,86	1.290,04	1.290,04	1.290,04
3	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (minimal 1,5 m)	Tidak Tersedia Data				0,08

Sumber: Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2017

Dari tabel di atas terlihat bahwa panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase tahun 2017 adalah 1 km terhadap panjang jalan seluruh kabupaten tahun 2017 sebesar 1.290,04 km. Sehingga diperoleh persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) yaitu 0,08%.

2.3.1.3.1.5 Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar

Tabel 2.118

Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar (KM)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,72
2	Panjang Jalan kewenangan	1,028.86	1,028.86	1,290.04	1,290.04	1,290.04



NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Kabupaten (KM)					
3	Persentase Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar	0,06	0,06	0,04	0,04	0,06

Sumber: Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2017

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar berkisar 0,05% selama tahun 2013-2017 atau sekitar setengah sempadan jalan ditempati pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar setiap 1 km jalan kabupaten.

2.3.1.3.1.6 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Tabel 2.119
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi			59.667	65.463	72.114
2	Jumlah Rumah Tinggal			69.876	73.554	77.425
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	83,73	73,79	79,83	89,09	93

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Berdasarkan tabel di atas, bahwa persentase rumah tinggal yang sudah terakses sanitasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang layak di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi perhatian yang cukup serius. Bahwa tahun 2019 merupakan target RPJMN pencapaian Universal Access yaitu 100% sanitasi yang layak, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses air bersih yang layak. Sehubungan dengan target RPJMN tersebut pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan



Bupati Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan dana, Pasal 12 bahwa :

- a. Penggunaan belanja modal dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, harus sesuai dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan diprioritaskan digunakan untuk (a) Pembangunan/rehabilitasi sarana air bersih di desa; (b) Pembangunan Jamban Keluarga; (c) Pembangunan sarana sanitasi lainnya.
- b. Setelah prioritas dan target kebutuhan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya, desa dapat melakukan penggunaan belanja modal dan pembangunan untuk : (a) Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa; (b) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan berupa jalan; (c) Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian; (d) Pembangunan sarana dan prasarana kebutuhan dasar; (e) Pembangunan sarana dan prasarana dasar; (f) Bantuan biaya pemilihan kepala desa.

2.3.1.3.1.7 Persentase Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar

Tabel 2.120
Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2018

NO	URAIAN	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Panjang Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	Tidak Tersedia Data					50
2	Panjang Seluruh Sempadan Sungai (KM)						463,20
3	Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	Tidak Teridentifikasi					10,79

2.3.1.3.1.8 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Salah satu faktor yang mengakibatkan sering terjadinya genangan atau banjir di suatu wilayah adalah kondisi drainase yang tersumbat. Persentase kondisi drainase yang tersumbat di Kabupaten Sidenreng Rappang terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 70,73% pada akhir tahun 2017. Kondisi ini mengalami penurunan jika dibanding dengan kondisi tahun 2013. Kondisi paling tinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sekitar



75,87%, tetapi kalo dilihat dari panjang drainase tiap tahunnya yang terus mengalami peningkatan hal ini disebabkan upaya pembangunan drainase yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.121
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Drainase Tersumbat Pembuangan Aliran Air (KM)	93,43	104,43	131,43	151,43	161,43
2	Panjang Seluruh Drainase (KM)	128,24	143,24	173,24	208,24	228,24
3	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	72,86	72,91	75,87	72,72	70,73

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

2.3.1.3.1.9 Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor

Tabel 2.122
Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah lokasi pemb.turap Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	Tidak Tersedia Data				
2	Jumlah seluruh wilayah rawan longsor					
3	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	Tidak Teridentifikasi				

Sumber: Dinas PU, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang, 2018

Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun tidak memiliki data dan tidak teridentifikasi dari tahun 2013 sampai tahun 2017.

2.3.1.3.1.10 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Daerah Irigasi (D.I) kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015



berjumlah 94 D.I dengan luas areal 11.299 Ha yang tersebar pada 11 Kecamatan.

Keandalan infrastruktur jaringan irigasi sangat mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian khususnya tanaman padi. Berdasarkan data tahun dari tahun 2013 – 2017, kondisi jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik tiap tahunnya mengalami peningkatan, untuk Tahun 2013 luas irigasi dalam kondisi baik adalah 6.779 Ha, atau sekitar 60% dari total luas irigasi kabupaten dan tahun Tahun 2017 meningkat menjadi 10.000 Ha Luas irigasi dalam kondisi baik atau sekitar 88,50% dari total luas irigasi kabupaten.

Tabel 2.123
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi baik	6.779	7.447	8.020	9.651	10.000
2	Luas irigasi kabupaten	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299
3	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	60,00	66,00	71,00	85,41	88,50

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

2.3.1.3.1.11 Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan Irigasi diperoleh dari Panjang saluran irigasi dibagi luas lahan budidaya pertanian. Rasio jaringan irigasi ini cenderung konsisten tiap tahunnya karena tidak adanya perubahan luas saluran irigasi maupun luas lahan budidaya pertanian.

Tabel 2.124
Rasio Jaringan Irigasi
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas Saluran Irigasi	Ha	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299
2	Luas Lahan Budidaya Pertanian	Ha	43,425	43,425	43,425	43,425	43,425
3	Rasio Jaringan Irigasi		0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017



2.3.1.3.1.12 Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Jumlah penduduk yang memiliki kemampuan mengakses air minum di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung mengalami peningkatan. Sejak tahun 2013 persentase penduduk yang mampu mengakses air minum sebesar 72%, dan terus meningkat tiap tahunnya. Peningkatan paling besar terjadi pada tahun 2015 dari 77,11% naik sekitar 4,89% ditahun 2016 menjadi 82%. Dan untuk tahun 2017 jumlah penduduk yang dapat mengakses air minum sebesar 252.772 Jiwa dari total jumlah penduduk 296.125 jiwa atau sebesar 85,36% seperti tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.125
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2018

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Penduduk Berakses Air Minum	-	210,228	223,455	240,248	252,772
2	Jumlah Penduduk	283,307	286,610	289,787	292,985	296,125
3	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	72	73.35	77.11	82.00	85.36

2.3.1.3.1.13 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan

Tabel 2.126
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan
Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi & berkelanjutan	Jiwa	1.181	1.012	525	228	2.813
Jumlah penduduk seluruhnya	Jiwa	283.307	286.610	289.787	292.985	296.125
Proporsi Rumah Tangga Dengan	%					



INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Akses Berkelanjutan Terhadap Air minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan						

Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 sebesar 0,42% dan pada tahun 2017 sebesar 0,95%

2.3.1.3.1.14 Persentase Areal Kawasan Kumuh

Tabel 2.127
Persentase Areal Kawasan Kumuh
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas Kawasan Kumuh	Ha	0	22.404	22.404	20.504	18.004
2	Luas Wilayah	Ha	188,325	188,325	188,325	188,325	188,325
3	Persentase Areal Kawasan Kumuh	%	0	0.012	0.012	0.011	0.010

Persentase Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan yaitu dari tahun 2014 sebesar 0,012% menjadi 0,010% pada tahun 2017

2.3.1.3.1.15 Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan

Tabel 2.128
Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Volume Sampah Di Perkotaan Yang Mengalami Guna Ulang, Daur Ulang, Pengelolaan Di Tempat	1,211.75	1,211.75	3,522.95	7,014.95	8,235.35



NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
	Pengelolaan Sampah Sebelum Masuk TPA					
2	Total Volume Sampah	40,867.74	41,272.30	42,308.90	42,775.81	43,234.25
3	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan	2.97	2.94	8.33	16.40	19.05

Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan yang besar dalam 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 sebesar 2,97% dan pada Tahun 2017 19,05%.

2.3.1.3.1.16 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tabel 2.129
Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum	189,453	174,297	159,141	143,984	128,828
2	Jumlah Penduduk	283,307	286,610	289,787	292,985	296,125
3	Rasio Tempat Pemakaman Umur Per Satuan Penduduk	66.87	60.81	54.92	49.14	43.50

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan setiap tahun yaitu dari tahun 2013 sebesar 66,87% menjadi 43,50% pada tahun 2017.

2.3.1.3.1.17 Rasio Tempat Ibadah Per Setaun Penduduk

Setiap warga negara dijamin kebebasannya dalam beragama dan beribadah. Bentuk jaminan tersebut salah satunya dilihat dari kemampuan daerah dalam menyediakan rumah ibadah untuk umat beragama. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, mayoritas penduduknya memeluk agama



Islam sehingga rumah peribadatan paling banyak adalah mesjid dan mushollah, sementara tempat ibadah agama lain tidak ada. Berdasarkan data, rasio tempat ibadah per satuan penduduk lima tahun terakhir cenderung tetap dan walaupun ada peningkatannya tidak terlalu signifikan, hal ini disebabkan pembangunan jumlah ibadah juga diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Tabel 2.130
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Tempat Ibadah	443	455	455	493	495
2	Jumlah Penduduk	283,307	286,610	289,787	292,985	296,125
3	Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17

2.3.1.3.2 Penataan Ruang

2.3.1.3.2.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau memiliki berbagai macam fungsi yang menentukan keberhasilan pembangunan. Ruang terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. RTH dapat menjalankan empat (4) fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi ekologis antara lain : paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, serta menahan angin.
- b. Fungsi sosial budaya antara lain : menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi, dan tempat rekreasi warga.
- c. Fungsi ekonomi antara lain : sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur. Beberapa juga



berfungsi sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.

- d. Fungsi estetika antara lain meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro (halaman rumah/lingkungan pemukiman), maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan); menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbangun hingga tahun 2017 seluas 68,74 Ha.

Tabel 2.131
Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas ruang terbuka hijau	Tidak Tersedia Data				68,74
2	Luas wilayah ber HPL/HGB	Tidak Tersedia Data				
3	Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB					

Sumber: Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2018

2.3.1.3.2 Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Setiap pembangunan pasti ada resiko dan manfaat yang ditimbulkan, disamping semua manfaatnya, pembangunan kota juga memiliki resiko jika tidak dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Dalam perencanaan tata ruang wilayah kota, perencanaan meliputi rencana umum dan rencana rinci. Salah satu muatan yang harus ada di dalam sebuah rencana tata ruang wilayah kota adalah rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan yang berisi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat, proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Apabila luas RTH publik di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau



perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. Proporsi 20% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Berdasarkan tabel di bawah ini luas RTH Publik pada Tahun 2017 yaitu 68,74 Ha atau 11,34 % dari yang seharusnya dimana data tersebut menandakan bahwa ruang untuk RTH di Kawasan Perkotaan Kabupaten Sidenreng Rappang belum memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan.

Tabel 2.132
Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Luasan RTH Publik Yang Tersedia Di Akhir Tahun Pencapaian SPM					68.74
2	Luasan RTH Publik Yang Seharusnya Tersedia Di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	Tidak Tersedia Data				606.00
3	Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan					11.34

Sumber: Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2018

2.3.1.3.2.3 Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan

IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan data lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan jumlah bangunan yang mempunyai IMB yaitu pada tahun



2013 sejumlah 862 unit menjadi 1.093 unit di tahun 2017 berarti terdapat penambahan 231 unit bangunan. Namun apabila dilihat dari rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan proporsi setiap tahun terjadi fluktuatif. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah bangunan baru lebih tinggi di banding dengan jumlah bangunan yang memiliki IMB. Perlu adanya kebijakan Pengendalian dan Sosialisasi yang lebih intensif tentang IMB.

Tabel 2.133
Rasio Bangunan ber- IMB per Satuan Bangunan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Bangunan Ber IMB	862	790	1,053	1,033	1,093
2	Jumlah Bangunan	8,162	9,090	9,763	10,043	10,193
3	Rasio Bangunan Ber IMB Per Satuan Bangunan	10.56	8.69	10.78	10.28	10.72

Sumber: Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2018

2.3.1.3.2.4 Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya

Ruang publik adalah ruang terbuka yang mampu menampung kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang ini memungkinkan terjadinya pertemuan antara manusia untuk saling berinteraksi. Karena pada ruang ini seringkali timbul berbagai kegiatan bersama, maka ruang-ruang terbuka ini dikategorikan sebagai ruang umum. Ruang publik ditandai oleh tiga hal yaitu :

- a. Responsif, artinya ruang yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan luas.
- b. Demokratis, artinya ruang publik dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi dan budaya serta aksesibel bagi berbagai kondisi fisik manusia.
- c. Bermakna artinya ruang publik harus memiliki tautan antara manusia, ruang, dan dunia luas dengan konteks sosial.



Tabel 2.134
Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya	%	Tidak Tersedia Data				

2.3.1.3.2.5 Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan

Berdasarkan informasi yang didapatkan di bidang penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan foto udara terhadap luas daratan tidak tersedia datanya karena belum pernah dilakukan kegiatan tersebut mengingat terbatasnya anggaran.

Tabel 2.135
Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
<i>Rasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit dan Survey Foto Udara Terhadap Luas Daratan</i>	%	Tidak Tersedia Data				

2.3.1.3.2.6 Ketaatan Terhadap RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah. Pengaturan RTRW ini diatur karena keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dokumen tata ruang sebagai produk



dari kegiatan perencanaan ruang, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan mencegah terjadinya konflik antar-fungsi dalam proses pemanfaatan ruang, juga ditujukan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya-bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang aturan yang memuat tentang RTRW tertuang dalam Perda No. 5 Tahun 2012 yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju dan sejahteradengan berbasis pada pembangunan agribisnis modern yang didukung oleh peningkatan indeks pembangunan manusia yang tinggi.

Berdasarkan tabel di bawah ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun 2013 belum adakarena rencana peruntukan di RTRW sudah ada sementara RPJMD belum ada.Sedangkan untuk tahun 2014 sampai tahun 2018 mengalami penurunan karena jumlah program yang terealisasi belum sesuai dengan rencana peruntukan Program di RTRW. Hal ini disebabkan pemanfaatan RTRW sebagai acuan pelaksanaan pembangunan belum optimal dilakukan.

Tabel 2.136
Ketaatan terhadap RTRW
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Realisasi RTRW	0	18	17	17	17	17
2	Rencana Peruntukan	24	25	29	34	40	40
3	Ketaatan Terhadap RTRW	0	72	58.62	50	42.5	42.5

Sumber: Dokumen RTRW 2018

2.3.1.4 Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

2.3.1.4.1 Rasio Rumah Layak Huni

Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur permukiman dimaksudkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang baik, sehingga pembangunan harus didukung strategi yang matang dan



didukung dengan fakta, data, serta regulasi yang mampu menjangkau dan mengantisipasi permasalahan pembangunan ke depan.

Infrastruktur permukiman berperan penting dalam membantu pembangunan masyarakat perkotaan. Penataan lingkungan, jaringan penerangan jalan umum, saluran drainase, jalan lingkungan, penyediaan air minum, penyediaan bak sampah di sekitar permukiman merupakan suatu sistem infrastruktur terpadu. Keberhasilan dan keteraturan sistem infrastruktur tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2.137
Rasio Rumah Layak Huni
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	-	-	58.503	66.052	67.534
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	283.307	286.610	289.787	292.985	296.125
3	Rasio Rumah Layak Huni	0	0	0,2108	0,2254	0,2280

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017(diolah)

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2018 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Jumlah rumah layak huni pada tahun 2015 berjumlah 58.503 unit kemudian meningkat menjadi 66.052 unit di tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi 67.534 unit pada tahun 2017. Jumlah ini bertambah sesuai jumlah rumah yang mengalami peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas ini diperoleh dari kegiatan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) reguler dan strategis salah satunya melalui program bedah rumah. Berdasarkan hal tersebut, rasio rumah layak huni di kabupaten Sidenreng



Rappang dari tahun ke tahun semakin meningkat dari 0,2018 menjadi 0,2280. Dalam mewujudkan perumahan yang layak huni yang menjadi faktor pendukung antara lain adanya bantuan dari pemerintah berupa pembangunan secara fisik melalui pengembang perumahan yang membangun perumahan sederhana. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya sumber daya manusia, pendanaan pembangunan perumahan yang terbatas dan data yang tidak tersedia sehingga bantuan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran.

2.3.1.4.2 Rasio Permukiman Layak Huni

Tabel 2.138
Rasio Permukiman Layak Huni
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas Permukiman Layak Huni	-	-	1.170	1.321	1.351
2	Luas Wilayah Permukiman	-	-	5.659	5.659	5.659
3	Rasio Permukiman Layak Huni	-	-	0,2067	0,2334	0,2387

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan disebabkan oleh adanya program kegiatan perbaikan permukiman diantaranya pembangunan drainase lingkungan dan pengurangan kawasan kumuh perkotaan. Data rasio permukiman layak huni Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 dan tahun 2014 tidak tersedia data.

2.3.1.4.3 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Tabel 2.139
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	-	-	58,503	66,052	67,534



NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
2	Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	-	-	69,876	73,554	77,425
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	-	-	83.72	89.80	87.23

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017 (diolah)

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22/PERMEN M/2008, indikator rumah layak huni salah satunya adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni. Nilai SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud adalah 100 %. Ini berarti Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Sidenreng Rappang masih dibawah nilai SPM yaitu sebesar 83, 72 % di tahun 2015 kemudian pada tahun 2016 menjadi 89,80 % dan pada tahun 2017 yaitu 87,23 %. Adapun faktor yang menjadi pendukung pencapaian nilai cakupan ini adalah tingginya jumlah penduduk di pusat kota mengharuskan terpenuhinya kebutuhan akan rumah layak huni untuk menampung penduduk yang bekerja di sekitar kawasan CBD. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya ketersediaan lahan, sehingga untuk menambah jumlah hunian penduduk sering mengabaikan aturan dasar pengadaan bangunan rumah seperti kualitas bahan, jenis ruang, garis sempadan jalan dan jarak antar rumah.

2.3.1.4.4 Cakupan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau

Tabel 2.140
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	-	-	30	808	734
2	Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	-	-	9,098	8,452	7,913
3	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	-	-	0.33	9.56	9.28

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017 (diolah)





Cakupan Rumah Layak Huni yang Terjangkau diperoleh dari perhitungan jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga MBR kurun waktu tertentu yang menghasilkan Cakupan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 0,33 % di tahun 2015 kemudian pada tahun 2016 menjadi 9,56 % dan pada tahun 2017 yaitu 9,28 %. Nilai SPM untuk Cakupan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau adalah 70%. Hal ini berarti nilai SPM Kabupaten Sidenreng Rappang masih di bawah nilai SPM yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya partisipasi dan tidak menarik dari segi bisnis serta ketidakmampuan berusaha karena faktor usia penghuni.

2.3.1.4.5 Persentase Permukiman Yang Tertata

Tabel 2.141
Persentase Permukiman yang Tertata
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas area permukiman tertata	71.50	88.00	104.50	140.53	157.03
2	Luas area permukiman keseluruhan	5,659.00	5,659.00	5,659.00	5,659.00	5,659.00
3	Persentase permukiman yang tertata	1.26	1.56	1.85	2.48	2.77

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017 (diolah)

Persentase Permukiman Yang Tertata di Kabupaten Sidenreng Rappang meningkat dari 1,26 pada tahun 2013 menjadi 2,77 di tahun 2017. Peningkatan ini belum signifikan dikarenakan karena masih banyak rumah penduduk yang saling berhimpit satu dengan lainnya dan juga masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan.



2.3.1.4.6 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Tabel 2.142
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	0	22.404	22.404	20.504	18.004
2	Luas wilayah	Ha	188.325	188.325	188.325	188.325	188.325
3	Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0	11.89	11.89	10.88	9.56

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017 (diolah)

Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Sidenreng Rappang menurun secara signifikan dari 11,89% menjadi 9,56%. Faktor yang menjadi pendukung dalam penanganan permukiman kumuh diperoleh dari kesesuaian visi dan misi dengan kondisi yang ada, komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan maksimal, fungsi dinas sebagai penyedia aksesibilitas sebagai upaya menggali kekurangan dana melalui pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh), program sanitasi berupa air limbah, persampahan dan drainase dan fasilitas pemadam kebakaran. Faktor penghambat antara lain anggaran yang terbatas, kurangnya penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh, adanya tuntutan Sustainable Development Goals dan banyaknya sarana prasarana permukiman yang rusak.

2.3.1.4.7 Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan

Tabel 2.143
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Luasan permukiman kumuh yang tertangani	Ha	0.00	0.00	0.00	1.90	2.50
2	Luas permukiman kumuh	Ha	22.40	22.40	22.40	22.40	22.40



NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2013	2014	2015	2016	2017
3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	0.00	0.00	0.00	8.48	11.16

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017 (diolah)

Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan mengalami peningkatan dari 8,48% pada tahun 2016 menjadi 11,16% pada tahun 2017. Hal ini disebabkan kenaikan laju pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan memiliki dampak pada tingginya akses pada kebutuhan primer khususnya rumah tinggal. Hal tersebut merupakan salah satu pemicu munculnya permukiman kumuh yang ditandai dengan kondisi fisik bangunan yang tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang di bawah standar, kondisi sarana prasarana yang kurang baik serta kurangnya pengendalian hukum dalam menangani kawasan permukiman kumuh di perkotaan.

2.3.1.4.8 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Tabel 2.144
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	-	-	267	222	192
2	Jumlah seluruh rumah tangga	-	-	68.373	69.127	69.868
3	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	-	-	0,390	0,321	0,274

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017 (diolah)

Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2015 adalah 0,390 %, tahun 2016 sebesar 0,321 % dan pada tahun 2017 yaitu 0,274 %. Proporsi ini semakin membaik



karena adanya akses berkelanjutan terhadap sanitasi dan air minum yang layak.

2.3.1.4.9 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU

Sesuai Permenpera Nomor 22 Tahun 2008, dalam Pasal 3 ayat (4), tercantum bahwa indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Pengertian prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam UU No. 1 Tahun 2011 ini disebutkan pengertian prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 21 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b: Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal layak, sehat, aman, dan nyaman, paling sedikit terdiri dari jalan, drainase, sanitasi dan jaringan air minum.
- b. Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b: Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, paling sedikit terdiri dari rumah ibadah dan ruang terbuka hijau (RTH).
- c. Pasal 1 angka 23 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b: Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian, paling sedikit terdiri dari jaringan listrik termasuk KWH meter dan jaringan telepon.

Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan.



Tabel 2.145
Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu	-	1	2	4	5
2	Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu	5	6	7	9	11
3	Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0	16.67	28.57	44.44	45.45

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang; 2017 (diolah)

Dari data di atas diperoleh cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada tahun 2014 sebesar 16,67 %, tahun 2015 yaitu 28,57 %, tahun 2016 sebesar 44,44 % dan di tahun 2017.

2.3.1.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.3.1.5.1 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Tabel 2.146
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	100 Orang petugas Linmas di Kabupaten/ Kota daerah pemekaran baru	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284
2	1 Wilayah kerja Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1
3	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Personil)	13	13	13	13	13

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun tidak mengalami perubahan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 yaitu 13 personil.



2.3.1.5.2 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)

Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan) di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini tidak lepas dari sinergi pemerintah daerah dan seluruh masyarakat yang menyadari pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan sebagai prasyarat dasar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.147
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran
K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	50	45	55	68	72

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Sidenreng Rappang ; 2018

2.3.1.5.3 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

Pada tahun 2013-2016, cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami stagnasi (28%), hal ini disebabkan karena tidak bertambahnya jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran karena kurangnya sarana dan prasarana penunjang. Kondisi ini mengalami perbaikan di tahun 2017 menjadi 46,8% dan diharapkan di tahun-tahun yang akan datang, cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Sidenreng Rappang akan terus mengalami perbaikan.

Tabel 2.148
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	KM ²	528,78	528,78	528,78	528,78	881,3
Luas wilayah kabupaten	KM ²	188,325	188,325	188,325	188,325	188,325
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	28	28	28	28	46,8

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Sidenreng Rappang ; 2018



2.3.1.5.4 Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen (WMK)

Dilihat dari tingkat waktu tanggap (response time rate) Daerah Layanan wilayah Manajemen (WMK), terlihat angka yang terus meningkat sejak tahun 2013 hingga 2017 seperti yang terlihat padatablel di atas, salah satu factor penyebabnya adalah karena semakin baiknya kondisi infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang memudahkan akses petugas pemadam kebakaran untuk menjangkau daerah terdampak.

Tabel 2.149
Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen (WMK) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	Kasus	28	37	36	18	49
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	Kasus	50	58	45	22	60
Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen (WMK)	%	56	63,79	80	81,8	81,7

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Sidenreng Rappang ; 2018

2.3.1.5.5 Persentase Penegakan PERDA

Persentase penegakkan PERDA di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 berkisar di angka 95% yaitu pada tahun 2013 sebesar 95,7 % dan pada tahun 2017 sebesar 95,29%.

Tabel 2.150
Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Penegakan PERDA	%	95,7	95,7	97,3	96,25	95,29



2.3.1.6 Bidang Urusan Sosial

2.3.1.6.1 Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para PMKS yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunan sosial, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang mendukung. Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain adalah meningkatkan kualitas pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan bagi disabilitas, pembinaan dan pemberian modal usaha bagi keluarga miskin.

Tabel 2.151
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	12.080	12.080	12.063	12.043	10.244
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	12.093	12.083	12.080	12.080	10.300
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	99,89	99,98	99,86	99,69	99,46

2.3.1.6.2 Persentase PMKS Yang Tertangani

Tabel 2.152
Persentase PMKS Yang Tertangani,
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah PMKS yang tertangani	Tidak Tersedia Data				
2	Jumlah PMKS yang ada					
3	Persentase PMKS yang tertangani					



Persentase PMKS Yang Tertangani, Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak tersedia data.

2.3.1.6.3 Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Tabel 2.153
Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah PMKS yang bantuan sosial dalam 1 tahun	Tidak Tersedia Data				
2	Jumlah PMKS yang ada					
3	Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar					

PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak tersedia data.

2.3.1.6.4 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosialekonomi sejenis lainnya

Tabel 2.154
Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi pesertase program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	328 Klp	Tidak Tersedia Data			
2	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	328 Klp				
3	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atai kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Tidak teridentifikasi				



Berdasarkan tabel diatas persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak tersedia data dan tidak teridentifikasi.

2.3.1.6.5 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial

Tabel 2.155
Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	4	4	4	4	4
2	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	4	4	4	4	4
3	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak mengalami perubahan yaitu 100%.

2.3.1.6.6 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Tabel 2.156
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	1	1	2	2	2



NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
2	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos skala	51	51	51	51	51
3	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	1,96	1,96	3,92	3,92	3,92

Berdasarkan tabel diatas persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 dan tahun 2014 sebesar 1,96% kemudian tahun 2015 sampai tahun 2017 sebesar 3,92%.

2.3.1.6.7 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Tabel 2.157
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	4	4	4	4	4
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	4	4	4	4	4
3	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat	100	100	100	100	100

Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak mengalami perubahan yaitu 100%



2.3.1.6.8 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana Prasarana tanggap darurat lengkap

Tabel 2.158
Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun	Tidak Tersedia Data				
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala					
3	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap					

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak tersedia data.

2.3.1.6.9 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Tabel 2.159
Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	10	10	20	10	0
2	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	20	20	25	15	0
3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	50	50	80	66,66	-



Berdasarkan tabel diatas persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 hanya 50% karena jumlah yang menerima 10 orang yang seharusnya 20 orang sedangkan pada tahun 2017 tidak tersedianya data.

2.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Bidang Urusan Tenaga Kerja

2.3.2.1.1 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Tabel 2.160
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah sengketa pengusaha-pekerja	0	0	0	2	2
2	Jumlah perusahaan	167	180	198	215	250
3	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per tahun	0	0	0	0,93	0,8

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap

Berdasarkan tabel diatas sengketa pengusaha-pekerja tidak terjadi pada tahun 2013-2015, dan pada tahun 2016 dan 2017 terjadi sengketa antara pengusaha dengan pekerja sebanyak 2 kasus. Hal tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara pengusaha dengan pekerja yang ada.

2.3.2.1.2 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Tabel 2.161
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0	0	0	100	100

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap

Di Kabupaten Sidenreng Rappang minim terjadi kasus perselisihan pengusaha-pekerja , tahun 2013 – 2015 tidak ada kasus sedangkan pada



tahun 2016 dan 2017 masing-masing terdapat 2 kasus namun kasus yang terjadi pun langsung diselesaikan secara tripartite.

2.3.2.1.3 Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Tabel 2.162
Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	∑ pencari kerja yang ditempatkan	359	272	125	308	517
2	∑ pencari kerja yang terdaftar	1.375	842	763	884	994
3	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	26,1	32,3	16,4	34,8	52

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap

Tahun 2013 besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan sebesar 26,1 persen dari 1.375 jiwa pencari kerja yang terdaftar terdapat 359 jiwa pencari kerja yang ditempatkan. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 24 persen menjadi 32,3 persen. Meskipun tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 49 persen yang hanya menjadi 16,4 persen namun akhirnya meningkat kembali pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar 16,4 persen menjadi 34,8 persen dan 17,2 persen menjadi 52 persen, hal ini disebabkan karena besaran pencari kerja yang ditempatkan sangat bergantung pada jumlah formasi pekerjaan yang tersedia khususnya ASN, juga bergantung pada laporan dari pencari kerja yang telah mendapat penempatan, namun kenyataannya masih banyak yang tidak melapor.

2.3.2.1.4 Keselamatan dan Perlindungan

Tabel 2.163
Keselamatan dan Perlindungan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada Tahun n	3	5	10	12	15
2	Jumlah perusahaan di wilayah	167	180	198	215	250



NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
	kabupaten pada tahun n					
3	Keselamatan dan Perlindungan	1,8	2,8	5,1	5,6	6

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap

Keselamatan dan perlindungan merupakan perbandingan antara jumlah perusahaan yang menerapkan K3 terhadap jumlah perusahaan. Tahun 2013-2017 Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja mengalami tern positif, namun masih sangat minim, hanya berkisar pada 1,8 persen – 6 persen, hal ini menunjukkan kurang sadarnya perusahaan akan pentingnya keselamatan, kesehatan dan perlindungan kerja bagi para pekerjanya.

2.3.2.1.5 Besaran Pekerja/Buruh Yang menjadi Peserta Program Jamsostek

Tabel 2.164
Besaran Pekerja/Buruh Yang menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Besaran Pekerja/ Buruh Yang menjadi Peserta Program Jamsostek (%)	62	51,8	75,4	77,2	81,8

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab.Sidrap

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek dari tahun 2013 – 2017 mengalami peningkatan. Walaupun pada tahun 2014 sempat mengalami penurunan sebesar 10,2 persen yang dari tahun 2013 sebesar 62 persen turun menjadi 51,8 persen, namun di tiga tahun terakhir konsisten menaik. Pada Tahun 2015 sebanyak 75,4 persen, tahun 2016 sebanyak 77,2 persen dan tahun 2017 menjadi 81,8 persen, hal ini dikarenakan pekerja/buruh mulai menyadari pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.



2.3.2.1.6 Perselisihan Buruh dan Pengusaha terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Tabel 2.165
Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	%	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap

Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah Daerah tidak ada sepanjang tahun 2013–2017, hal ini dikarenakan adanya harmonisasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah.

2.3.2.1.7 Besaran Pemeriksaan Perusahaan

Tabel 2.166
Besaran Pemeriksaan Perusahaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	40	0	0	0	36,4

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap

Tahun 2013 – 2016 tidak ada besaran pemeriksaan perusahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Hal ini disebabkan tidak adanya pegawai di Kabupaten Sidenreng Rappang yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi pemeriksa, sedangkan tahun 2017 pemerintah daerah propinsi yang melakukan pemeriksaan perusahaan sebesar 53,21 persen terhadap 91 perusahaan dari 171 perusahaan yang telah terdaftar di Kabupaten Sidenreng Rappang.



2.3.2.1.8 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan

Tabel 2.167
Besaran Pengujian Peralatan Perusahaan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIaKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Besaran Pengujian Peralatan Perusahaan	%	0	0	50	31,3	100

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap

Peningkatan besaran pengujian peralatan di perusahaan perlu terus ditingkatkan agar dapat meminimalkan kecelakaan kerja. Setiap peralatan kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya kecelakaan kerja atau dibutuhkan sertifikasi untuk memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja dalam setiap operasinya. Di Indonesia setiap peralatan kerja harus disertifikasi sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan. Sebagaimana yang telah diketahui dan dijalankan sampai saat ini, sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan lokasi dimana peralatan kerja tersebut akan dioperasikan. Seperti di pabrik-pabrik produksi dan perkebunan untuk sertifikasinya dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Pengujian peralatan perusahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 dan 2014 tidak dilakukan, Tahun 2015 sebanyak 5 peralatan yang telah diuji dari 10 peralatan yang telah terdaftar atau sebesar 50 persen, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 32 peralatan yang terdaftar hanya 10 yang telah dilakukan pengujian, di tahun 2017 naik menjadi 100 persen dari 61 peralatan yang terdaftar semuanya telah diuji. Namun yang menjadi hambatan dari pengujian peralatan kerja perusahaan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah minimnya petugas yang berkualifikasi untuk menjadi penguji peralatan.



2.3.2.1.9 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tabel 2.168
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	52,85	47,67	0,00	76,9	63,74

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap

Pelatihan berbasis kompetensi sangat dibutuhkan dalam kaitan meningkatkan skill tenaga kerja agar dapat bersaing di pasar kerja. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi mengalami fluktuatif, pada tahun 2013 berkisar 52,85 persen, pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 47,67 persen dan tahun 2015 turun drastis menjadi 0 persen, tapi di tahun 2016 naik menjadi 76,9 persen namun turun lagi menjadi 63,74 persen pada tahun 2017, hal ini disebabkan pelatihan yang dilaksanakan mengikuti ketersediaan anggaran yang ada.

2.3.2.1.10 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Tabel 2.169
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	0	0	80	66,7	53

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap

Pelatihan berbasis kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam memberdayakan UKM, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan produktifitas UKM.



Pada tahun 2013 dan 2014 tidak ada tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, di tahun 2015 ada sebesar 80 persen, tahun 2016 dan 2017 turun menjadi 66,7 dan 53 persen tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan, hal ini pun disebabkan karena mengikuti ketersediaan anggaran yang ada.

2.3.2.2 Bidang Urusan Komunikasi dan Informasi

2.3.2.2.1 Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat

Urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada bidang komunikasi dan informatika dan tugas pembantuan di daerah. Dalam hal pengawasan terhadap media dan pembangunan tower telekomunikasi, sampai dengan tahun 2013 jumlah tower telekomunikasi sebanyak 99 buah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat (*realtime*). Dalam konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Tabel 2.170
Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah KIM	9	10	10	11	10
2	Jumlah kecamatan yang ada dalam Kab/Kota	11	11	11	11	11
3	Cakupan Pengembangan Dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan	81,82%	90,91%	90,91%	90,91%	90,91%



2.3.2.2.2 Cakupan Layanan Telekomunikasi

Tabel 2.171
Cakupan Layanan Telekomunikasi
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah wilayah yang tercoverage	108.200	108.200	108.200	116.824	120.325
2	Jumlah wilayah keseluruhan	189.803	189.803	189.803	189.803	189.803
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	57,01%	57,01%	57,01%	61,55%	63,39%

Cakupan layanan telekomunikasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan wilayah yang tercoverage.

2.3.2.2.3 Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Tabel 2.172
Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk yang menggunakan HP/Telepon	216.360	232.720	246.120	261.556	262.755
2	Jumlah penduduk	283.307	286.610	289.787	292.985	296.125
3	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon	76,37%	81,20%	84,93%	89,27%	88,73%

Berdasarkan tabel diatas persentase penduduk yang menggunakan hp/telepon Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun mengalami kenaikan dari tahun 2013 samapai tahun 2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 tetapi jumlah penduduk yang menggunakan hp mengalami kenaikan setiap tahun.

2.3.2.2.4 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Tabel 2.173
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah rumah tangga	29.126	39.260	43.730	44.624	45.743



NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
	memiliki akses internet					
2	Jumlah rumah tangga	67,382	67,706	68,373	69,127	69,868
3	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	43,22%	57,99%	63,96%	64,55%	65,47%

Berdasarkan tabel diatas proporsi rumah tangga dengan akses internet Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan setiap tahun seiring dengan kenaikan jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet.

2.3.2.2.5 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi

Tabel 2.174
Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	28.770	28.540	29.840	31.168	30.660
2	Jumlah rumah tangga	67,382	67,706	68,373	69,127	69,868
3	Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi	42,69%	42,15%	43,64%	45,09%	43,88%

Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan dari tahun 2013 sebesar 42,69% sampai tahun 2016 sebesar 45,09% dan turun pada tahun 2017 sebesar 43,88%.

2.3.2.3 Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

2.3.2.3.1 Persentase Koperasi Aktif

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat urusan ini memiliki peran strategis dalam kontribusinya bagi peningkatan perekonomian daerah dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.



Secara umum persentase koperasi aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurung waktu 2013 hingga 2017 menunjukkan capaian yang positif. Pada tahun 2013 tercatat sebesar 68,03% meningkat menjadi 75,61% di tahun 2017. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan manajemen koperasi dan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan hasil produksi koperasi.

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Persentase usaha mikro dan kecil terhadap seluruh UKM di Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurung 2013 hingga 2017 tercatat sebesar 93,46%. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan dalam table di bawah ini. Koperasi merupakan bangun usaha yang paling mencerminkan maksud dari Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945. Jadi pembangunan koperasi merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat utamanya pemerintah. Perkembangan koperasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.175
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah koperasi aktif	168	174	180	182	185
2	Jumlah seluruh koperasi	359	358	365	366	367
3	Persentase Koperasi aktif	46.80	48.60	49.32	49.73	50.41

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap

Pada tabel di atas terlihat bahwa perkembangan koperasi aktif tumbuh dari tahun ke tahun, namun persentase koperasi aktif masih sekitar 50,41% masih harus terus ditingkatkan. Dan di masa mendatang indikator persentase koperasi aktif perlu ditingkatkan menjadi indikator persentase koperasi aktif yang melaksanakan rapat anggota tahunan menyesuaikan dengan program pemerintah pusat.



2.3.2.3.2 Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif

Tabel 2.176
Persentase UKM Non BPR/LKM aktif
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah UKM Non BPR/ LKM aktif	4.990	2.571	1.373	935	1.300
2	Jumlah seluruh UKM Non BPR/LKM	5.019	2.642	1.797	1.428	1.015
3	Persentase UKM Non BPR/LKM aktif	99,4	97,3	94,7	96,1	92,1
1	Jumlah BPR/LKM aktif	220	170	100	0	0
2	Jumlah seluruh BPR/LKM	220	220	220	220	220
3	Persentase BPR/LKM aktif	100	77,3	45,4	0	0

Tabel di atas terlihat bahwa UKM sektor riil terus bertumbuh dimana jumlahnya di tahun 2013 sebesar 5.019 meningkat lebih 100% menjadi 11.901. Hal ini membutuhkan dukungan penuh pemerintah daerah agar jumlah tersebut terus bertumbuh dengan kegiatan yang tetap aktif.

Untuk perkembangan LKM/BPR terjadi penurunan jumlah yang sangat signifikan. Hal ini diakibatkan oleh LKM/BPR tersebut tidak dapat menjaga profesionalitas dalam berusaha, baik dari segi manajerial maupun segi regulasi berusaha. Untuk masa mendatang diperlukan perhatian lebih pemerintah daerah untuk lebih intens dalam pembinaan LKM/BPR.

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan penggabungan dari jenis usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang dikategorikan menurut jumlah asset dari usaha yang bersangkutan. Persentase usaha mikro dan kecil dapat dilihat pada tabel berikut.

2.3.2.3.3 Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Tabel 2.177
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah usaha mikro dan kecil	4.990	2.571	1.703	1.373	935
2	Jumlah seluruh UMKM	5.019	2.642	1.797	1.428	1.015



NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,4	97,3	94,8	96,2	92,1

Dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase usaha mikro dan kecil masih sangat besar dibanding usaha menengah. Namun dari tahun ke tahun persentase tersebut menurun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 2,18% usaha kecil yang naik kelas menjadi usaha menengah. Diperlukan upaya-upaya agar semakin banyak lagi usaha mikro dan kecil yang naik kelas.

2.3.2.4 Bidang Urusan Penanaman Modal

2.3.2.4.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Tabel 2.178
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN	Perusahaan	2	1	3	8	7

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2018

Tabel 2.179
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN	Rp. 218.516.400.000,-	Rp. 98.700.000.000,-	Rp. 465.142.131.000,-	Rp. 176.503.270.000,-	Rp. 960.215.000.000,-

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2018

Jumlah investor Berskala Nasional yang masuk di Kabupaten Sidenreng Rappang menggembarakan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 2.180 dan Tabel 2.181 yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2013 sampai 2017 terdapat 21 perusahaan yang menanamkan modalnya di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jumlah nilai investasi sebesar Rp 1,919 triliun. Hal ini disebabkan oleh dukungan pemerintah dalam



memberikan kemudahan kepada investor untuk menanamkan modalnya melalui perbaikan iklim investasi dan jaminan kepastian hukum. dalam kurun waktu 2013 sampai 2017 memperlihatkan hasil yang cukup.

2.3.2.4.2 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Tabel 2.180
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang	0	250	291	Tidak Tersedia Data	

Berdasarkan tabel diatas rasio daya serap tenaga kerja Kabupaten Sidenreng Rappang terdida data pada tahun 2014 dan 2015 yaitu sebanyak 250 orang pada tahun 2014 dan 291 orang pada tahun 2015.

2.3.2.4.3 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Tabel 2.181
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	%		0	64,67	0	0

Berdasarkan tabel diatas Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Kabupaten Sidenreng Rappang data tersedia pada tahun 2015 sebesar 64,67 miliar rupiah.

2.3.2.5 Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

2.3.2.5.1. Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif

Tabel 2.182
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	24	25	25	27	27



No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
2.	Jumlah seluruh organisasi pemuda	28	28	28	30	30
3.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	85,7%	89,3%	89,3%	90%	90%

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang

Berdasarkan tabel di atas persentase organisasi pemuda dalam lima tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan, jumlah organisasi pemuda yang aktif meningkat sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 sedangkan persentase pemuda yang aktif dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun tahun sebelumnya hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya bertambahnya organisasi masyarakat dan makin meningkatnya peran pemerintah dalam dalam pembinaan organisasi pemuda diseluruh kecamatan se Kabupaten Sidenreng Rappang serta dukungan masyarakat.

2.3.2.5.2. Persentase Wirausaha Muda

Tabel 2.183
Persentase Wirausaha Muda
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah wirausaha muda	4	4	15	16	16
2.	Jumlah seluruh wirausaha	17.018	19.660	21.457	22.885	23.900
3.	Persentase wirausaha muda	0,023	0,020	0,069	0,069	0,067

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang

Persentase wirausaha muda dari table diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan disebabkan karena meningkatnya peran serta partisipasi pemuda dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan kewirausahaan serta peran pemerintah daerah dalam pembinaan kewirausahaan di Kabupaten Sidenrang Rappang.



2.3.2.5.3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Tabel 2.184
Cakupan Pembinaan Olahraga
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO.	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah cabang olahraga yang dibina	14	16	15	16	16
2.	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	16	16	17	18	18
3.	Cakupan pembinaan olahraga	87%	100%	88%	89%	89%

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dari tabel di atas menunjukkan cakupan pembinaan olahraga dalam lima tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan hal ini dikarenakan Dinas Kepemudaan dan olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang hanya memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana namun belum melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap para atlet. Sehingga kedepannya pemerintah daerah memberikan pelatihan dan pembinaan secara berkesinambungan pada semua cabang olahraga.

2.3.2.5.4. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat

Tabel 2.185
Cakupan pelatih yang bersertifikat
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO.	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah pelatih yang bersertifikat	4	4	5	7	8
2.	Jumlah seluruh pelatih	32	32	34	36	36
3.	Cakupan pelatih yang bersertifikat	13%	13%	15%	19%	22%

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang

Jumlah cakupan pelatih yang bersertifikasi dari table diatas cenderung meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 jumlah pelatih yang telah memiliki sertifikat sebanyak 8 orang dari 3 cabang olahraga yakni cabang olahraga Bola Volly, Sepak Takrow dan Bola



Basket. hal ini disebabkan karena Pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Dinas Kepemudaan dan olahraga dan Pariwisata melakukan pembinaan dan memberikan wadah dan fasilitasi kepada para pelatih untuk memperoleh sertifikat.

2.3.2.5.5. Cakupan Pembinaan Atlit Muda

Tabel 2.186
Cakupan Pembinaan Atlit Muda
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO.	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah atlit pelajar yang dibina	35	35	38	60	50
2.	Jumlah seluruh atlit pelajar yang dibina	80	80	80	80	80
3.	Cakupan Pembinaan Atlit Muda	44%	44%	48%	75%	63%

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Sidenreng Rappang

Berdasarkan tabel di atas tergambar bahwa cakupan pembinaan atlit muda dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan namun di tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 8% karena berkurangnya pertandingan/event olahraga yang diselenggarakan sehingga jumlah atlit yang dibina juga berkurang. Diharapkan Pemerintah daerah melalui Dinas Kepemudaan pembinaan terhadap atlit tidak hanya dilakukan pada saat adanya acara/event namun dilakukan secara terus menerus.

2.3.2.5.6. Jumlah Atlit Berprestasi

Tabel 2.187
Jumlah Atlit Berprestasi
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah atlit yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	35	43	22	25	25

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Sidenreng Rappang

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah atlit berprestasi dari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan karena dilakukan pembinaan khusus kepada para atlit karena ada beberapa acara/event



nasional yang diselenggarakan sedangkan pada tahun 2015 s.d 2017 cenderung menurun karena kurangnya acara/event nasional sehingga pembinaan terhadap para atlit juga berkurang, diharapkan kedepannya Pemerintah daerah melakukan pencarian bibit-bibit muda yang potensial dan berprestasi, peningkatan pembinaan bagi atlit maupun pelatih dan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

2.3.2.5.7. Jumlah Prestasi Olahraga

Tabel 2.188
Jumlah Prestasi Olahraga
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun	20	27	12	14	14

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Sidenreng Rappang

Jumlah prestasi olahraga dapat dilihat pada table di atas menunjukkan tahun 2013- 2017 mengalami peningkatan prestasi karena bertepatan dengan pelaksanaan PORDA dan POPDA sedangkan pada tahun 2015 terjadi penurunan prestasi karena berkurangnya jumlah acara/event yang diikuti. Lain halnya dengan pada tahun 2016 dan tahun 2017 cenderung meningkat karena ada beberapa acara/event yang diikuti seperti kejurda.

2.3.2.6 Urusan Statistik

2.3.2.6.1 Tersedianya Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi

Buku Kabupaten Sidenreng Rappang dalam angka selama periode 2013-2017 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan dan tenaga kerja, kesejahteraan pertanian, industry serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Sidenreng Rappang serta Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat atau acuan dalam



perencanaan pembangunan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang menurut lapangan usaha, buku PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang menurut pengeluaran, buku Statistik Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan buku indikator ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.189
Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi	Ada	ada	Ada	ada	ada

Tabel 2.190
Buku “Kabupaten Dalam Angka”
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Buku “Kabupaten Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Tabel 2.191
Buku “PDRB” di Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2013-2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Buku “PDRB”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

2.3.2.7 Bidang Urusan Persandian

2.3.2.7.1 Persentase Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Tabel 2.192
Persentase Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan
Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	35	35	35	35	25
2.	Jumlah total perangkat daerah	35	35	35	35	25



No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
3.	Persentase Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas persentase Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2017 adalah 100% dimana semua perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

2.3.2.8 Bidang Urusan Kebudayaan

2.3.2.8.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Dalam upaya melestarikan seni dan budaya, Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahun melaksanakan Festival Seni dan Budaya serta kegiatan pelestarian situs-situs sejarah.

Tabel 2.193
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO.	INDIKATOR	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	0	0	0	1

Sumber : Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan

Dari tabel di atas menunjukkan penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2013 sampai tahun 2016 tidak pernah ada penyelenggaraan festival seni dan budaya. Namun di tahun 2017 data dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada 1 penyelenggaraan festival seni dan budaya.

2.3.2.8.2 Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Tabel 2.194
Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	37	41	41	47	50

Sumber : Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan



Berdasarkan data dari tabel di atas, benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan. Namun dalam hal ini, Pemerintah Daerah juga masih perlu melakukan kerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan pengkajian dalam penetapan situs budaya. Karena Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki perhatian lebih terhadap benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan karena itu merupakan asset daerah yang tak ternilai harganya.

2.3.2.8.3 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Tabel 2.195
Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	1	0	1	1	0

Sumber : Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi di Kabupaten Sidenreng Rappang berfluktuatif dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Maka dibutuhkan banyak partisipasi masyarakat yang peduli tentang pentingnya kearifan lokal budaya daerah untuk pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah.

2.3.2.8.4 Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu

Tabel 2.196
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	23	23	23	23	23

Sumber : Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan

Berdasarkan data dari tabel di atas jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu dari tahun 2013 sampai tahun 2017 adalah 23



cagar budaya. Cagar budaya ini telah dikaji dan dapat dijadikan serta ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya untuk dikelola sebagai asset sejarah dan situs perpustakaan daerah. Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam pelestarian cagar budaya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama.

2.3.2.9 Bidang Urusan Perpustakaan

Perpustakaan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan minat dan budaya gemar membaca di masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan senantiasa terus dilakukan dengan menambah jumlah koleksi buku dengan berbagai macam judul, sehingga pengunjung perpustakaan akan terus meningkat. Namun demikian, Kabupaten Sidenreng Rappang sampai saat ini belum memiliki Perpustakaan Daerah, sehingga koleksi buku bacaan yang ada belum menjadi konsumsi publik.

2.3.2.9.1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah Pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2017, hal ini di karenakan bahwa minat/gemar membaca bagi masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2.197
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	1.980	1.980	2.211	2.332	2.772

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip

2.3.2.9.2 Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2013 sebanyak 198.509 buku hingga tahun 2017 sebanyak 201.635 buku.



Tabel 2.198
Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0	2.868	3.628	4.078	4.428
2	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0	198.509	199.665	200.643	201.635
3	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah (Judul)	4.636	5.736	7.256	8.156	8.856

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2017

2.3.2.9.3 Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk

Rasio jumlah perpustakaan dari tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan, di tahun 2013 jumlah perpustakaan 370 sedangkan di tahun 2017 jumlah perpustakaan 483, maka dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ada peningkatan perpustakaan sebanyak 113 perpustakaan.

Tabel 2.199
Rasio Perpustakaan per Satuan penduduk
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Perpustakaan	370	370	408	445	483
2	Jumlah Penduduk	280.256	283.433	286.610	289.787	292.964
3	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	01 : 11	01 : 11	01 : 11	01 : 11	01 : 11

Sumber: BPS dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2017

2.3.2.9.4 Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun

Tabel 2.200
Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	1.980	1.980	2.211	2.332	2.772

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2017



Berdasarkan tabel diatas jumlah rata rata pengunjung Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan dari 1.980 pengunjung pada tahun 2013 menjadi 2.772 pengunjung pada tahun 2017.

2.3.2.9.5 Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Tabel 2.201
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah koleksi judul buku Perpustakaan	2.318	2.868	3.628	4.078	4.428

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2017

Bedasarkan tabel diatas jumlahkoleksi judul buku Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan setiap tahunnya. pada tahun 2013 sebesar 2.318 judul buku dan pada tahun 2017 sebanyak 4428 judul buku.

2.3.2.9.6 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Tabel 2.202
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki
Sertifikat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang bersertifikat	0	0	0	0	0
Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2017

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pustakawan, teknis daan penilai Kabupaten Sidereng Rappang tahun 2013-2017 ada 2 orang tetapi belum ada yang bersertifikat



2.3.2.10 Bidang Urusan Kearsipan

2.3.2.10.1 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Tabel 2.203
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip Secara Baku
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Perangkat Daerah yg mengelola arsip secara baku	OPD/Unit Kerja/Desa/ Kelurahan		9	9	9	9
Jumlah perangkat daerah	OPD/Unit Kerja/Desa/ Kelurahan		42	42	42	36
Persentase Perangkat Daerah yg mengelola arsip secara baku	%	4	21,4	21,4	21,4	25

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2017

Berdasarkan tabel diatas jumlah perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2017 yang mengelola arsip secara baku tidak mengalami perubahan yaitu 9 perangkat daerah meski ada perubahan jumlah perangkat daerah.

2.3.2.10.2 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Tabel 2.204
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2017

Berdasarkan tabel diatas tidak ada Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017.



2.3.2.11 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.11.1 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Tabel 2.205
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0.24	0.25	0.36	2.22	2.5

Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Persentase perempuan di posisi pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan telah mengalami peningkatan dari tahun 2013 (0,24%) hingga tahun 2017 (2,5%), hal ini disebabkan karena para pemimpin lembaga pemerintah sebagian sudah memahami pentingnya peran perempuan di lembaga pemerintah untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender.

2.3.2.11.2 Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa parpol harus meyertakan 30 persen keterwakilan perempuan dalam politik terutama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan sebuah akses positif bagi seluruh perempuan untuk terlibat dalam dunia politik dan legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki dalam berpolitik sehingga peran perempuan dalam dunia politik perlu untuk mendapat dukungan oleh semua pihak.

Tabel 2.206
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kursi DPRD yang diduduki Perempuan		1	1	1	2
2	Jumlah Total Kursi di Keanggotaan DPRD		35	35	35	35
3	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD (%)	-	2,86	2,86	2,86	2,86



Di Kabupaten Sidenreng Rappang persentase keterwakilan perempuan di parlemen di tahun 2014-2017 hanya 2,86 persen, artinya pencapaian perempuan dalam bidang politik masih tertinggal dibandingkan laki-laki.

2.3.2.11.3 Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta

Tabel 2.207
Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	5,38	99,7	99,6	97,7	62,38

Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Kaum perempuan tidak hanya memilih profesi yang duduk di lembaga pemerintah tapi sebagian juga memilih bekerja di lembaga swasta, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga swasta dari tahun 2013 yaitu 5,38 % meningkat menjadi 62,38% pada tahun 2017, hal ini disebabkan karena akses yang dibuka untuk perempuan bekerja seperti di perusahaan atau pabrik sudah terbuka untuk perempuan, meskipun posisi perempuan di perusahaan atau pabrik kebanyakan bukan menempati posisi strategis atau posisi pengambil keputusan melainkan sebagai karyawan seperti sekretaris dan administrasi atau buruh pada pabrik.

2.3.2.11.4 Rasio KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).



Tabel 2.208
Rasio KDRT Kabupaten Sidenreng Rappang 2017

INDIKATOR	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah KDRT	2	2	15	3	51
Jumlah Rumah Tangga	67.387	67.387	67.700	68.373	68.373
Rasio KDRT (%)	25,23	25,23	23,22	20,72	18,75

Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Rasio KDRT di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 0,0746 atau 51 kasus dari 68.373 rumah tangga sehingga membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah daerah.

2.3.2.11.5 Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur

Persentase tenaga kerja dibawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur selama 5 tahun terakhir (2013-2017) di Kabupaten Sidenreng Rappang cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 tercatat 42,2% jumlah tenaga kerja dibawah umur, pada tahun 2016 menunjukkan kenaikan 79,37%, kemudian menurun menjadi 6,29% pada tahun 2017.

Tabel 2.209
Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur	%	42,2	17,45	23,7	79,37	6,29

Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Hasil survey BPS bersama Internasional Labour Organization (2009) menemukan fakta bahwa 65,5% pekerja anak Indonesia merupakan pekerja keluarga tidak dibayar (unpaid family worker). Fakta tersebut menggambarkan dua hal. Pertama, sebagian besar pekerja anak merupakan “korban” eksploitasi keluarga. Kedua, keberhasilan pemerintah



dalam menekan jumlah pekerja anak atau menghentikan eksploitasi terhadap anak sangat ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi kepala keluarga. Dalam konteks ini perlu adanya sinergi antara pemerintah dengan para orang tua dalam menanamkan pemahaman bahwa anak dibawah umur tidak bisa dianggap memiliki nilai ekonomi.

2.3.2.11.6 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan digunakan untuk mengungkap seberapa besar partisipasi perempuan ikut aktif dalam kegiatan yang bersifat ekonomis atau dapat juga dikatakan sebagai cerminan tinggi rendahnya geliat angkatan kerja perempuan untuk masuk dalam pasar kerja.

Tabel 2.210
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	53.769	24.685	74.570	1.662	28.989
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	57.811	142.485	36.338	31.365	109.161
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	93,01	17,45	43,7	5,29	26,50

Sumber :Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa data partisipasi angkatan kerja perempuan yang sangat fluktuatif.

2.3.2.11.7 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan

Perlindungan perempuan dan anak merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perlindungan yang dimaksudkan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya sementara maupun berdasarkan penetapan



pengadilan. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Sidenreng Rappang, seperti terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.211
Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Kabupaten Sidenreng Rappang 2017

INDIKATOR	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (Orang)	25,00	0,00	23,00	20,00	18,00

Sumber : Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

2.3.2.11.8 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT Di Rumah Sakit

Tabel 2.212
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT Di Rumah Sakit Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana Ktp/A dan PPT/PKT Di Rumah Sakit	Orang	25,00	25,00	23,00	20,00	18,00

Tabel tersebut menunjukkan bahwa cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit menurun di tahun 2014-2017, di mana semua kasus korban kekerasan akan mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan baik di tingkat Puskesmas maupun Rumah Sakit. Hal ini menunjukkan bahwa



setiap pasien/klien di fasilitas kesehatan akan terlayani berdasarkan tingkat keterpaparannya/diagnose hasil pemeriksaan.

2.3.2.11.9 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

Tabel 2.213
Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

URAIAN	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	Orang	25,00	15,00	10,00	15,00	10,00

Berdasarkan tabel diatas bahwa cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu sejak tahun 2013-2017 fluktuatif, sebab tidak semua korban menginginkan untuk Rehab Sosial. Diharapkan semua kasus yang terlapor melalui unit layanan terpadu akan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih.Rehab sosial bertujuan melakukan pendampingan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan klien yang mengalami disfungsi sosial/traumatik sehingga klien/korban dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar (seperti semula). Pada dasarnya seluruh korban yang sudah tercatat, lembaga/petugas akan melakukan identifikasi korban dalam rangka menindak lanjuti kasus klien.



2.3.2.11.10 Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Tabel 2.214
Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Orang	25,00	25,00	23,00	20,00	18,00

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 2014-2017 mengalami penurunan, seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik kasus ringan dan berat oleh Penyidik seluruhnya terproses dan dikawal oleh pendamping dari P2TP2A Maupun Unit PPA Polres ketingkat pengadilan, demikian pula tingkat kejaksaan tetap terproses dengan baik hingga putusan.

2.3.2.11.11 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Tabel 2.215
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Orang	25,00	25,00	23,00	20,00	18,00



Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum dari tahun 2014-2017 mengalami penurunan. Korban/Klien yang melaporkan diri di tempat pengaduan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak maupun di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak tetap diberikan layanan hukum, namun pada kondisi tertentu beberapa klien (pelapor) mencabut laporan dan ditempuh dengan jalan damai.

2.3.2.11.12 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Kekerasan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Tabel 2.216
Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Kekerasan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Kekerasan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Orang	25,00	2,00	1,00	2,00	1,00

Persentase klien/korban yang dipulangkan ke keluarga yang ditangani oleh Layanan P2TP2A kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 sebanyak 25 orang sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan sampai tahun 2017 yang hanya sebanyak 1 orang yang dipulangkan ke keluarganya.

2.3.2.11.13 Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Tabel 2.217
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Orang	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial. Layanan reintegrasi sosial, merupakan upaya untuk menyatukan kembali korban/klien kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan. Pelayanan lembaga P2TP2A dalam reintegrasi terhadap korban /klien adalah melakukan layanan terapi oleh konselor selama dalam penanganan, sebagai wujud perlindungan kepada klien disiapkan rumah aman kemudian diberikan pelatihan keterampilan termasuk pemenuhan spiritual klien. Reintegrasi akan dilakukan jika kondisi klien sudah siap untuk pulang dan keluarga mau menerima korban.

2.3.2.11.14 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD

Tabel 2.218
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio APM Perempuan/ Laki-Laki di SD	%	Tidak Tersedia Data				

Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2017 tidak tersedia data.

2.3.2.11.15 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP

Tabel 2.219
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio APM Perempuan/ Laki-Laki di SMP	%	2,9	0,92	1,0	1,002	1,15

Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan jenjang pendidikan perempuan di tingkat SMP mengalami penurunan.



2.3.2.11.16 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA

Tabel 2.220
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA	%	3	1,21	1,15	1,05	0,94

Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Berdasarkan tabel diatas Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan jenjang pendidikan perempuan di tingkat SMA mengalami penurunan..

2.3.2.11.17 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi

Tabel 2.221
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi	%	1,98	2,13	2,24	1,29	0,96

Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat perguruan tinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan jenjang pendidikan yang di tempuh perempuan semakin meningkat sama seperti laki-laki, meskipun pada tahun 2016-2017 rasionya mengalami penurunan.

2.3.2.11.18 Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Tabel 2.222
Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki
pada Kelompok Usia 15-24 Tahun
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	%	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3



Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

2.3.2.11.19 Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di sektor Non pertanian

Tabel 2.223
Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan Di sektor Nonpertanian	%	0,04	0,43	0.42	0,42	17,53

Sumber: Dinas PMDPPA Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Berdasarkan tabel diatas kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahun yang semula 0,04% di tahun 2013 menjadi 17,53% pada tahun 2017.

2.3.2.12 Bidang Urusan Pangan

2.3.2.12.1 Ketersediaan Pangan Utama

Tabel 2.224
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ketersediaan Pangan Utama	Kg	778,26	776,26	889,46	1.126,60	1.126,60

Berdasarkan tabel diatas ketersediaan pangan utama kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 sebesar 778,26 kg dan pada tahun 2017 sebesar 1.126,60 kg.



2.3.2.12.2 Ketersediaan Energi dan Protein perkapita

Tabel 2.225

Ketersediaan Energi dan Protein perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ketersediaan Energi dan Protein perkapita	Gram	2.698	2.698	2.760	3.024	3.024

Berdasarkan Tabel diatas Ketersediaan Energi dan Protein perkapita di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 sebesar 2.698 gram dan tahun 2017 sebesar 3.024 gram

2.3.2.12.3 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Tabel 2.226

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	Tidak Tersedia Data				

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak tersedia data.

2.3.2.13 Bidang Urusan Pertanahan

2.3.2.13.1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Tabel 2.227

Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Keamanan Pangan	%	Tidak Tersedia Data				

Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak tersedia data.



2.3.2.13.2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Tabel 2.228
Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	Tidak Tersedia Data				

Penyelesaian Kasus Tanah Negara Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak tersedia data.

2.3.2.13.3. Penyelesaian Izin Lokasi

Tabel 2.229
Penyelesaian Izin Lokasi
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penyelesaian Izin Lokasi	%	Tidak Tersedia Data				

Penyelesaian Izin Lokasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak tersedia data.

2.3.2.14 Urusan Lingkungan Hidup

2.3.2.14.1 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota

Tabel 2.230
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Tidak Tersedia Data				

Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak tersedia data.



2.3.2.14.2 Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Kabupaten/Kota

Tabel 2.231
Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana RPPLH Kabupaten/Kota
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Tidak Tersedia Data				

Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana RPPLH Kabupaten/Kota Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak tersedia data.

2.3.2.14.3 Terselenggaranya RPPLH Untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi

Tabel 2.232
Penyelenggaraan KLHS Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Terselenggaranya RPPLH Untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	Tidak Tersedia Data				

Penyelenggaraan KLHS Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak tersedia data.

2.3.2.14.4 Peningkatan Indeks Kualitas Air

Tabel 2.233
Indeks Kualitas Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Peningkatan Indeks Kualitas Air	Tidak Tersedia Data				

Indeks Kualitas Air Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak tersedia data.



2.3.2.14.5 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tabel 2.234
Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Tidak Tersedia Data				

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak tersedia data.

2.3.2.14.6 Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Tabel 2.235
Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Di Kabupaten
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Di Kabupaten	Tidak Tersedia Data				

Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Di Kabupaten Rappang tahun 2013-2017 tidak tersedia data.

2.3.2.14.7 Terfasilitasi Pendampingan Pangakuan MHA

Tabel 2.236
Fasilitas Pendampingan Pangakuan MHA
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Fasilitas Pendampingan Pangakuan MHA	Tidak Tersedia Data				

Fasilitas pendampingan pangakuan MHA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak tersedia data.



2.3.2.14.8 Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional

Tabel 2.237
Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional	Tidak Tersedia Data				

Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak tersedia data.

2.3.2.14.9 Terverifikasinya Hak Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional

Tabel 2.238
Terverifikasinya Hak Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Terverifikasinya Hak dan Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional	Tidak Tersedia Data				

Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak tersedia data.

2.3.2.14.10 Penetapan Hak MHA

Tabel 2.239
Penetapan Hak MHA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Penetapan hak MHA	Tidak Teridentifikasi				

Penetapan Hak MHA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.



2.3.2.14.11 Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan

Tabel 2.240
Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan (%)	Tidak teridentifikasi				

Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.

2.3.2.14.12 Terfasilitasinya Penyediaan Sarana dan Prasarana

Tabel 2.241
Terfasilitasinya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Terfasilitasinya Penyediaan Sarana dan Prasarana (%)	Tidak teridentifikasi				

Terfasilitasinya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.

2.3.2.14.13 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.242
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan (kegiatan)	-	11	11	0	0

Berdasarkan tabel diatas terlaksananya pendidikan dan pelatihan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 tidak ada data sedangkan tahun 2017 tidak ada kegiatan.



2.3.2.14.14 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Tabel 2.243
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Tidak teridentifikasi				

Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.

2.3.2.14.15 Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten

Tabel 2.244
Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan
PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten,
Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten (%)	Tidak teridentifikasi				

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin pplh dan puu lh yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.



2.3.2.14.16 Timbulan Sampah Yang Ditangani

Tabel 2.245
Timbulan Sampah Yang Ditangani
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Timbulan Sampah Yang Ditangani	Tidak teridentifikasi				2.448.515

Berdasarkan tabel diatas timbulan sampah yang ditangani Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016 tidak teridentifikasi dan pada tahun 2017 yang ditangani berjumlah 2.448.515 timbulan.

2.3.2.14.17 Persentase Jumlah Sampah Yang Berkurang Melalui 3R

Tabel 2.246
Persentase Jumlah Sampah Yang Berkurang Melalui 3R
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Jumlah Sampah Yang Berkurang Melalui 3R	Data kinerja yg disampaikan tdk tepat	Tidak teridentifikasi			542.025

Bedasarkan tabel diatas persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016 tidak teridentifikasi sedangkan tahun 2017 adalah 542.025 sampah.'

2.3.2.14.18 Persentase Cakupan Area Pelayanan

Tabel 2.247
Persentase Cakupan Area Pelayanan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Cakupan Area Pelayanan	Data kinerja yg disampaikan tdk tepat	Tidak teridentifikasi			

Persentase cakupan area pelayanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi



2.3.2.14.19 Persentase Jumlah Sampah yang tertangani

Tabel 2.248
Persentase Jumlah Sampah yang tertangani
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Jumlah Sampah yang tertangani (%)	Tidak Teridentifikasi				2.448.515

Berdasarkan tabel diatas persentase jumlah sampah yang tertangani Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016 tidak teridentifikasi sedangkang pada tahun 2017 sejumlah 2.448.515 sampah.

2.3.2.14.20 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten

Tabel 2.249
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA
di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Operasionalisasi TPA/TPST/ SPA di Kabupaten	Tidak Teridentifikasi				

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.

2.3.2.14.21 Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Diterbitkan

Tabel 2.250
Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Diterbitkan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Diterbitkan (%)	Tidak Teridentifikasi				

Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.



2.3.2.14.22 Persentase Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 2.251
Persentase Izin Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pengelolaan Sampah Oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (%)	Tidak Teridentifikasi				

Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.

2.3.2.15 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

2.3.2.15.1 Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk

Tabel 2.252
Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber-KTP	182,745	187,005	191,081	194,994	198,512
2	Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	167,203	168,734	169,405	170,888	171,652
3	Rasio penduduk ber-KTP per-satuan penduduk (penduduk)	54	60	60	60	60

Berdasarkan tabel diatas rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 yaitu 54% sedangkan pada tahun 2014-2017 sebanyak 60%.

2.3.2.15.2 Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Tabel 2.253
Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah bayi berakte kelahiran	30,823	29,509	28,534	27,509	26,509
2	Jumlah bayi					



NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
3	Rasio bayi ber akte kelahiran (lembar)		23.549	23.588	23.197	22.973

Berdasarkan tabel diatas rasio bayi berakte kelahiran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 mengalami penurunan dimana yang paada tahun 2014 sebesar 23.549 menjadi 22.973 lembar pada tahun 2017.

2.3.2.15.3 Rasio Pasangan Berakte Nikah

Tabel 2.254
Rasio Pasangan Berakte Nikah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	4,075	5,808	7,575	9,228	10,800
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	4,746	6,595	8,465	10,220	11,872
3	Rasio pasangan ber akte nikah	0.86	0.88	0.89	0.90	0.91

Berdasarkan tabel diatas rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun kenaikan setiap tahun sering dengan bertambahnya jumlah pasangan nikah.

2.3.2.15.4 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Tabel 2.255
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan	182,749	187,005	191,081	194,994	198,512
2	Jumlah penduduk wajib KTP	202,815	206,965	215,480	216,141	221,653
3	Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	90.11	90.36	88.68	90.22	89.56

Bedasarkan tabel diatas cakupan penerbitan kartu tanda penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 mengalami perubahan yang tidak pasti tetapi jumlah KTP ber NIK dan jumlah penduduk wajib KTP mengalami kenaikan setiap tahun.



2.3.2.15.5 Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran

Tabel 2.256
Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	5,715	5,430	5,502	5,054	4,984
2	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	5,728	5,444	5,517	5,090	5,061
3	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	99.77	99.74	99.73	99.29	98.48

Berdasarkan cakupan penerbitan akte kelahiran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 mengalami penurunan setiap tahun yang semula 99,77% tahun 2013 menjadi 98,84% pada tahun 2017.

2.3.2.16 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

2.3.2.16.1 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Pemberdayaan masyarakat desa adalah proses pengembangan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial sebagai upaya memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat bisa terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi. Beberapa lembaga-lembaga yang ada di masyarakat desa/kelurahan yang telah terbentuk dan terbina berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan LKMD yang tersebar pada seluruh desa/kelurahan. Demikian pula dengan jumlah kelompok binaan PKK yang telah tersebar pada 106 desa/kelurahan dan pada 11 kecamatan di kabupaten Sidenreng Rappang, hal ini dapat dikatakan bahwa binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga mencapai 100%.

Tabel 2.257
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa
Yang Baik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik (%)	100	100	100	100	98,53



2.3.2.16.2 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Tabel 2.258
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kelompok Binaan LPM	Kelompok	0	0	0	0	1
Jumlah LPM	Lembaga	106	106	106	106	106
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88

Berdasarkan tabel diatas jumlah LPM Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2017 tidak mengalami perubahan yaitu 106 lembaga dan hanya 1 kelompok binaan di tahun 2017 sedangkan tahun 2013-2016 tidak ada kelompok binaan LPM.

2.3.2.16.3 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Tabel 2.259
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	106	106	106	106	106
Jumlah PKK	Lembaga	106	106	106	106	106
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Kelompok	1	1	1	1	1

Berdasarkan tabel diatas Jumlah PKK Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2017 yang berjumlah 106 lembaga dan tidak mengalami perubahan setiap tahun sama dengan jumlah kelompok binaan PKK.



2.3.2.16.4 Persentase LSM Aktif

Tabel 2.260
Persentase LSM Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah LSM Aktif	Lembaga	Tidak Teridentifikasi				
Jumlah LSM	Lembaga	106	106	106	106	106
Persentase LSM Aktif	%	Tidak Teridentifikasi				

Persentase LSM aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.

2.3.2.16.5 Persentase LPM Berprestasi

Tabel 2.261
Persentase LPM Berprestasi
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah LPM berprestasi	Lembaga	Tidak Teridentifikasi				
Jumlah LPM	Lembaga	106	106	106	106	106
Persentase LPM Berprestasi	%	Tidak Teridentifikasi				

Persentase LPM berprestasi kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.

2.3.2.16.6 Persentase PKK Aktif

Tabel 2.262
Persentase PKK Aktif
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah PKK Aktif	Kelompok	67	70	69	59	55
Jumlah PKK	Lembaga	106	106	106	106	106
Persentase PKK aktif	%	71,60	75,30	74,72	63,49	59,74

Berdasarkan tabel diatas persentase PKK aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun mengalami penurunan yang semula tahun 2013 sebesar 71,60% menjadi 59,74% pada tahun 2017.



2.3.2.16.7 Persentase Posyandu Aktif

Tabel 2.263
Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah posyandu aktif	Unit	-	-	-	-	90
Jumlah Posyandu	Unit	106	106	106	106	106
Persentase Posyandu aktif	%	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00

Berdasarkan tabel diatas persentase posyandu Aktif Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2016 tidak teridentifikasi sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 95% posyandu aktif dari jumlah posyandu yang ada.

2.3.2.16.8 Swadaya Masyarakat Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 2.264
Swadaya Masyarakat Mendukung Program Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat	Unit	0	0	0	0	0
Total program pemberdayaan masyarakat	Unit	0	0	0	0	0
Swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat	%	Tidak Teridentifikasi				

Swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.

2.3.2.16.9 Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 2.265
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0
Total program pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	0



Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat	Tidak Teridentifikasi				

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.

2.3.2.17 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

2.3.2.17.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan penduduk adalah prosentase pertambahan jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka menurunkan dan menekan laju pertumbuhan penduduk dengan melaksanakan Program Nasional Keluarga Berencana (KB). Pada tahun 2014 jumlah akseptor KB aktif di Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak sebanyak 63.500 orang, sedangkan jumlah akseptor baru sebanyak 7.404 orang. Capaian jumlah akseptor KB aktif maupun akseptor KB baru telah memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian masing-masing sebesar 139,76 persen dan 58,92 persen.

Tabel 2.266
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	Tidak Teridentifikasi				

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.

2.3.2.17.2 Total Fertility Rate (TFR)

Tabel 2.267
Total Fertility Rate (TFR)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Total Fertility Rate (TFR)	%	2,44	2,43	2,39	2,34	2,34



Berdasarkan tabel diatas Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun menurun dari yang semula 2,44% pada tahun 2013 menjadi 2,34% pada tahun 2017.

2.3.2.17.3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Tabel 2.268
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Melalui Kampung KB Daerah Melalui Kampung KB	%	Tidak Teridentifikasi				

Persentase perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.

2.3.2.17.4 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Tabel 2.269
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun Dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	Tidak Teridentifikasi				



Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.

2.3.2.17.5 Jumlah Kebijakan (Peraturan Perundang-undangan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk

Tabel 2.270
Jumlah Kebijakan (Peraturan Perundang-undangan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kebijakan (Peraturan Perundang-undangan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	%	Tidak Teridentifikasi				

Jumlah kebijakan (peraturan perundang-undangan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.

2.3.2.17.6 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Tabel 2.271
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	Anak/ keluarga	2	2	2	2	2

Berdasarkan tabel diatas rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengalami perubahan. Rata-rata setiap tahun perkeluarga memiliki 2 anak.



2.3.2.17.7 Ratio Akseptor KB

Tabel 2.272
Ratio Akseptor KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ratio Akseptor KB	%	67,09	67,09	72	72	72

Berdasarkan tabel diatas ratio akseptor KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun pada tahun 2013 dan tahun 2014 sebesar 67,09% sedangkan pada tahun 2015-2017 sebesar 72 %.

2.3.2.17.8 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49

Tabel 2.273
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	Jiwa	41.008	41.538	41.852	42.008	42.225

Berdasarkan tabel angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan setiap tahunnya yang semula pada yang semula 41.008 jiwa pada tahun 2013 menjadi 42.225 jiwa pada tahun 2017.

2.3.2.17.9 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-49)

Tabel 2.274
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-49) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-49) (ASFR 15-49)	Orang/ 1.000 Penduduk	Tidak Teridentifikasi				



Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-49) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.

2.3.2.17.10 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Di Bawah 20 Tahun

Tabel 2.275
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Di Bawah 20 Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Di Bawah 20 Tahun	PUS	23.800	23.812	23.835	23.908	24.104

Berdasarkan tabel diatas Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Di Bawah 20 Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan **setiap tahunnya yang semula 23.800 PUS pada tahun 2013 menjadi 24.104 PUS pada tahun 2017.**

2.3.2.17.11 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet need)

Tabel 2.276
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet need) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet need)	%	Tidak Teridentifikasi				

Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-kb tidak terpenuhi (unmet need) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.



2.3.2.17.12 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Tabel 2.277
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jiwa	5.340	5.370	5.367	5.393	5.478

Berdasarkan tabel diatas persentase penggunaan kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan setiap tahun yang semula 5.340 jiwa pada tahun 2013 menjadi 5.478 jiwa pada tahun 2017.

2.3.2.17.13 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Tabel 2.278
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	Tidak Teridentifikasi				

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.

2.3.2.17.14 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber -KB

Tabel 2.279
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber -KB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber -KB	%	47	0	0	0	0



Berdasarkan tabel diatas cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber -KB Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 sebesar 47% sedangkan pada tahun 2014-2017 tidak ada.

2.3.2.17.15 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber -KB

Tabel 2.280
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber -KB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber -KB	Jiwa	9.940	9.958	9.973	10.011	10.032

Berdasarkan tabel diatas cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber -KB Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan setiap tahun ang semula 9.940 jiwa menjadi 10.032 jiwa pada tahun 2017.

2.3.2.17.16 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber -KB

Tabel 2.281
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber -KB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber -KB	Jiwa	4.342	4.358	4.384	4.397	4.475

Berdasarkan tabel diatas cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber -KB mengalami kenaikan setiap tahun yang semula 4.342 jiwa pada tahun 2013 menjadi 4.475 jiwa pada tahun 2017.



2.3.2.17.17 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan

Tabel 2.282
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan	tempat	1	1	1	1	1

Berdasarkan tabel diatas pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 hanya memiliki satu tempat di setiap kecamatan.

2.3.2.17.18 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Tabel 2.283
Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	Jiwa	60	63	60	67	69

Berdasarkan tabel diatas cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/ mahasiswa pada tahun 2013 sebanyak 60 jiwa dan pada tahun 2017 sebanyak 69 jiwa .



2.3.2.17.19 Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Tabel 2.284
Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	Jiwa	30	30	30	30	30

Berdasarkan tabel diatas cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah kb untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2017 tidak mengalami perubahan setipa tahun yaitu sebanyak 30 jiwa setiap tahun.

2.3.2.17.20 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber- KB Mandiri

Tabel 2.285
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber- KB Mandiri Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber- KB Mandiri	Jiwa	5.650	5.655	5.685	5.700	5.750

Berdasarkan tabel diatas cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang Ber- KB



mandiri Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan setiap tahun yang semula pada tahun 2013 sejumlah 5.650 jiwa menjadi 5.750 jiwa pada tahun 2017.

2.3.2.17.21 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Tabel 2.286
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	Jiwa	70	87	98	100	110

Berdasarkan tabel diatas rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami kenaikan setiap tahun yang semula 70 jiwa pada tahun 2013 menjadi 110 jiwa pada tahun 2017.

2.3.2.17.22 Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Tabel 2.287
Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	alat	4	5	6	6	7

Berdasarkan tabel diatas cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 terdapat 4 alat dan pada tahun 2017 terdapat 7 alat.



2.3.2.17.23 Persentase Fakses dan Jaringannya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi pelayanan

Tabel 2.288
Persentase Fakses dan Jaringannya (Diseluruh Tingkatan Wialayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi pelayanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Fakses dan Jaringannya (Diseluruh Tingkatan Wialayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi pelayanan	%	14	14	14	14	14

Berdasarkan tabel diatas persentase fakses dan jaringannya yang bekerjasama dengan BPJS Dan memberikan pelayanan kbkr sesuai dengan standarisasi pelayanan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2017 tidak mengalami perubahan yaitu 14% setiaap tahun.

2.3.2.17.24 Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di Setiap Desa

Tabel 2.289
Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di Setiap Desa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Penyediaan Informasi Data Makro Keluarga Di Setiap Desa	%	Tidak Teridentifikasi				

Cakupan penyediaan informasi data makro keluarga di setiap desa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.



2.3.2.17.25 Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

Tabel 2.290
Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Remaja Yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	Tidak Teridentifikasi				

Persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.

2.3.2.17.26 Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga

Tabel 2.291
Cakupan Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan
Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	Klp	331	335	335	340	349

Berdasarkan tabel diatas cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 sebanyak 331 kelompok dan pada tahun 2017 sebanyak 349 kelompok.

2.3.2.17.27 Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Tabel 2.292
Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang
Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang	%	Tidak Teridentifikasi				



Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak						

Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.

2.3.2.17.28 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Tabel 2.293
Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita	%	Tidak Teridentifikasi				

Rata-rata usia kawin pertama wanita Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.

2.3.2.17.29 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes

Tabel 2.294
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	%	Tidak Teridentifikasi				

Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui apbd dan apbdes kabupaten sidenreng rappang tahun 2013-2017 tidak teridentifikasi.



2.3.2.18 Urusan Perhubungan

2.3.2.18.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Urusan perhubungan sangat penting dalam hal perpindahan manusia, barang, dan informasi, antar daerah atau antar wilayah. Ketersediaan fasilitas dan kelancaran arus perpindahan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu keselamatan dalam berlalu lintas juga sangat penting dalam pengaturan jalur-jalur yang dilewati kendaraan. Untuk kinerja urusan perhubungan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.295
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2018

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah	667.440	8.547	7.942	853	775

2.3.2.18.2 Rasio Ijin Trayek Per Jumlah Penduduk

Fasilitas angkutan umum merupakan indikator yang penting di dalam urusan perhubungan. Di Kabupaten Sidenreng Rappang Moda angkutan umum yang beroperasi yaitu mulai Bus AKAP (Antar Kota Antar Propinsi), AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi), Minibus, angkutan perkotaan (Angkot), dan angkutan perdesaan (Angkudes).

Disamping itu terdapat juga moda angkutan yang mendukung pelayanan sebagian kawasan perkotaan yaitu bentor. Dalam rangka melegalisasi mobil angkutan umum, baik angkutan orang maupun angkutan barang diperlukan adanya Ijin Trayek. Untuk ijin trayek yang dikeluarkan di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.296
Rasio Ijin Trayek Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2018

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	2.547	2.528	2.496	1.985	632



NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
2	Jumlah penduduk	283.307	286.610	289.787	292.985	296.125
3	Rasio Izin Trayek	0,90	0,88	0,86	0,68	0,21

2.3.2.18.3 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Tabel 2.297
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2018

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	3.626	3.967	4.462	4.427	4.310

Berdasarkan tabel diatas Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 sebesar 3.626 dan 4.310 pada tahun 2017.

2.3.2.18.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Tabel 2.298
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	1	1	1	1	1

Berdasarkan tabel diatas Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 tidak mengalami perubahan yaitu hanya 1 terminal bis.

2.3.2.18.5 Persentase Layanan Angkutan Darat

Secara garis besar, manajemen armada angkutan darat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Merawat dan menjaga kondisi dari semua aset/kendaraan dalam kondisi baik untuk menjamin keamanan dan keselamatan barang yang akan diangkut dan personil yang akan memakainya.
- b. Membuat sistem dan prosedur yang efektif untuk penggunaan dan perawatan semua asset/kendaraan. Termasuk didalamnya antara lain jadwal perawatan, manajemen pengaturan untuk pengemudi/sopir, manajemen untuk pemakain bahan bakar, sistem untuk melacak



keberadaan kendaraan serta manajemen keamanan termasuk manajemen kesehatan dan keselamatan.

- c. Memantau dan mengukur biaya, pemanfaatan dan kinerja dari kendaraan yang bersangkutan. Efektivitas biaya armada tidak hanya untuk pengendalian biaya operasi kendaraan, tetapi juga untuk pemeliharaan dan perbaikan, persediaan suku cadang dan juga penggantian kendaraan pada masa optimal dalam pemakaiannya.
- d. Memastikan jumlah dan komposisi armada seimbang dengan aktivitas yang diperlukan.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mempersiapkan jenis kendaraan yang dibutuhkan. Yang perlu diketahui dan dipahami terlebih dahulu adalah berapa besar volume pekerjaan dan di lingkungan atau daerah mana kendaraan tersebut akan dipakai. Setelah itu kita akan memutuskan jenis kendaraan apa yang akan dipakai dan membuat manajemen armadanya untuk mengelola, mengukur, memantau dan mengendalikan kinerjanya.

Kondisi fisik jalan serta lingkungan daerah dimana armada akan digunakan sangat mempengaruhi komposisi jumlah dan jenis armada. Dalam hal-hal tertentu, terkadang pengaruh legislatif atau peraturan juga dapat mempengaruhi, misalnya ada jalan-jalan tertentu tidak bisa dilalui oleh truk besar sehingga terkadang beberapa perusahaan memilih untuk menyewa kendaraan yang lebih kecil untuk mengirimkan barang. Lebih jelas mengenai persentase layanan angkutan darat di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.299
Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah angkutan darat	1.639	1.680	1.220	1.063	1.012
2	jumlah penumpang angkutan darat		42.735	39.710	39.265	28.875
3	Persentase Layanan Angkutan Darat		3,93	3.07	2,71	3,50



2.3.2.18.6 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Tabel 2.300
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun n	619	459	437	522	241
2	Jumlah Angkutan umum pada Tahun n					
3	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	619	459	437	522	241

Kepemilikan KIR pada angkutan umum didefinisikan sebagai persentase jumlah angkutan umum yang tidak memiliki kir terhadap jumlah seluruh angkutan umum. Jumlah angkutan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 tercatat 9.405 unit kendaraan dengan jumlah kepemilikan uji kir sebanyak 4.684, dengan keterbandingan antara jumlah angkutan umum dan jumlah kir sebesar 1,00 dibanding 1,05. Artinya masih belum seluruhnya angkutan umum di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 mengujikan kendaraannya secara berkala dua kali dalam setahun.

2.3.2.18.7 Pemasangan Rambu-Rambu

Tabel 2.301
Persentase Pemasangan Rambu-rambu
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2018

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n	116	-	60	100	-
2	Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia					
3	Persentase pemasangan rambu-rambu					

2.3.2.18.8 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan



kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan disini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor.

Tabel 2.302
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jalan Kabupaten	1,028.86	1,028.86	1,290.04	1,290.04	1,290.04
2	Jumlah Kendaraan	67.928	69.077	74.756	78.234	78.181
3	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1,51	1,49	1,73	1,65	1,65

2.3.2.18.9 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Tabel 2.303
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum	-	42.735	39.710	39.265	28.875

Berdasarkan Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan setiap tahunnya yang semula pada tahun 2014 sejumlah 42.735 orang menjadi 28.875 orang pada tahun 2017.

2.3.2.18.10 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun

Tabel 2.304
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal per tahun
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal per tahun	42.735	39.710	39.265	28.875	17.735



Berdasarkan tabel diatas jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan setiap tahun yang semula berjumlah 42.735 orang pada tahun 2013 menjadi 17.735 orang pada tahun 2017.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Bidang Urusan Pariwisata Kunjungan Wisata

2.3.3.1.1 Kunjungan Wisata

Tabel 2.305
Kunjungan Wisata Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kunjungan wisata :	322.621	355.745	374.676	546.000	430.138
Puncak Bila	131.115	152.225	165.354	144.431	124.948
Trans Park				112.602	8.062
Bungge Tjitta Allakuang	15.103	18.255	19.876	100.812	103.523
Maddenra	100	500	310	280	376
Monumen Ganggawa	175.231	183.242	186.939	180.872	188.745
Danau Sidenreng	587	975	1.567	2.103	2.157
Bila Ranch	109	123	127	131	145
Bendungan Bila	120	145	176	153	104
Monumen Andi Cammi	65	75	82	91	103
Gua Parinding	191	214	245	265	283

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Sidenreng Rappang

Dari table di atas menunjukkan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan namun ditahun 2016 mengalami penunurun di karenakan beberapa faktor diantaranya factor cuaca dan sarana dan prasarana belum memadai.

2.3.3.1.2 Lama Kunjungan Wisata

Tabel 2.306
Lama Kunjungan Wisata
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Lama Kunjungan Wisata	Hari	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Sidenreng Rappang



Dari data di atas menunjukkan bahwa lama kunjungan wisata di Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata 1 hari selama lima tahun di mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 , secara umum lama kunjungan wisata dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai , ketersediaan informasi yang cukup tentang destinasi suatu tempat wisata. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah daerah dan dinas yang terkait dengan sector pariwisata untuk lebih maksimal mempromosikan dan informasikan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.3.3.1.3 PAD Sektor Pariwisata

Tabel 2.307
PAD Sektor Pariwisata
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	19,164,000	6,200,000	9,100,000	10,150,000	2,100,000
PAD Sektor Pariwisata	%	0.04	0.01	0.01	0.01	0.00

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Sidenreng Rappang

Dari tabel di atas Pandapatian asli daerah dari sector Pariwisata kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami capaian yang berfluktuasi hal ini dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisata dan faktor cuaca serta sarana prasarana yang belum memadai untuk itu diharapkan pemerintah daerah lebih mempromosikan obyek-obyak wisata dan lebih mengoptimalkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan khususnya pendapatan masyarakat yang ada di sekitar objek wisata.



2.3.3.2. Bidang Urusan Pertanian

2.3.3.2.1 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB

Tabel 2.308
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	%	34,06	34,06	33,33	34,74	34,46

Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB pada tahun 2013 sebesar 34,06 persen sama dengan tahun 2014 tetapi di tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 33,33 persen kemudian di tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 34,74 persen dan kembali mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 34,46 persen. Fluktuasi Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditi dan produksi pertanian/perkebunan.

2.3.3.2.2 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB

Tabel 2.309
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	%	Tidak teridentifikasi				

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang 2013-2017 tidak teridentifikasi.

2.3.3.2.3 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB

Tabel 2.310
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	Tidak teridentifikasi				

Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017 tidak teridentifikasi.



2.3.3.2.4 Kontribusi Produksi kelompok Petani terhadap PDRB

Tabel 2.311
Kontribusi Produksi kelompok Petani terhadap PDRB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Produksi kelompok Petani terhadap PDRB	%	Tidak teridentifikasi				

Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017 tidak teridentifikasi.

2.3.3.2.5 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Tabel 2.312
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per
Hektar Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	%	55,16	56,61	64,23	56,76	62,49

Produktivitas Padi per hektar pada tahun 2013 mencapai 55,16 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 56,61 persen dan terus mengalami peningkatan di tahun 2015 sebesar 64,23 persen selanjutnya mengalami penurunan di tahun 2016 sebesar 56,76 persen dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 62,49 persen. Produktivitas tertinggi di capai pada tahun 2015 sebesar 64,23 persen.

2.3.3.2.6 Cakupan Bina Kelompok Petani

Tabel 2.313
Cakupan Bina Kelompok Petani
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Bina Kelompok Petani	%	Tidak teridentifikasi				



Cakupan bina kelompok petani Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017 tidak teridentifikasi.

2.3.3.3. Bidang Urusan Kehutanan

2.3.3.3.1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Tabel 2.314
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	Ha					
Luas Total Hutan dan Lahan Kritis	Ha					
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Ha	6,85	6,85	6,85	6,85	1

Rehabilitasi Hutan dan Lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem keidupan tetap terjaga. Aktifitas rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang telah dilakukan selama kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017 menunjukkan luasan areal yang sama sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 yaitu sekitar 6,85 hektar setiap tahunnya. Sedangkan kerusakan kawasan hutan menurut data tahun 2013 hingga tahun 2017 luasannya juga sama dari tahun ke tahun yaitu seluas 0,51 hektar per tahun.

2.3.3.3.2 Kerusakan Kawasan Hutan

Tabel 2.315
Kerusakan Kawasan Hutan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Luas Kerusakan Hutan	Ha					
Luas Kawasan Hutan	Ha					
Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	0,51	0,51	0,51	0,51	1

Berdasarkan tabel diatas luas kerusakan hutan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2014 setengah dari luas Kawasan yang



ada sedangkang pada tahun 2017 meningkat menjadi 1 ha kerusakan kawasan hutan.

2.3.3.3.3 Rasio Luas Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan

Tabel 2.316
Rasio Luas Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Luas Kawasan Lindung	Ha					
Total Luas Kawasan Lindung	Ha					
Rasio Luas Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Ha	Tidak teridentifikasi				

Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017 tidak teridentifikasi.

2.3.3.4. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

2.3.3.4.1 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Tabel 2.317
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	93	Tidak teridentifikasi			

Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017 tidak teridentifikasi.



2.3.3.4.2 Ratio Ketersediaan Daya Listrik

Tabel 2.318
Ratio Ketersediaan Daya Listrik
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ratio Ketersediaan Daya Listrik	%	Tidak teridentifikasi				

Ratio Ketersediaan Daya Listrik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017 tidak teridentifikasi.

2.3.3.4.3 Persentase Pertambangan Tanpa Ijin

Tabel 2.319
Persentase Pertambangan Tanpa Ijin
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pertambangan Tanpa Ijin	%	0	100	0	100	0

Berdasarkan tabel diatas persentase pertambangan tanpa ijin Kabupaten Sidenreng Rappang tahun hanya ada di tahun 2014 dan 2016 yaitu sebesar 100%.

2.3.3.5. Bidang Urusan Perdagangan

2.3.3.5.1 Ekspor Bersih Perdagangan

Tabel 2.320
Ekspor Bersih Perdagangan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ekspor Bersih Perdagangan	Juta US\$	Tidak teridentifikasi				

Ekspor bersih perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017 tidak teridentifikasi.



2.3.3.5.2 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Tabel 2.321
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	%	Tidak ada kelompok perdagangan/usaha informal yang pernah mendapat pembinaan dari pemerintah daerah				

Tidak ada kelompok perdagangan/usaha informal yang pernah mendapat pembinaan dari pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013-2017.

2.3.3.6. Bidang Urusan Perindustrian

2.3.3.6.1 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Tabel 2.322
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Kelompok	1.225	1.225	1.228	1.250	1.255

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap

Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan tingkat jangkauan, baik berupa bantuan, pembinaan atau monitoring yang dilakukan terhadap keseluruhan kelompok pengrajin. Untuk mendapatkan hasil dari indikator ini maka rumus yang digunakan adalah jumlah kelompok pengrajin yang dibina sampai dengan tahun n dibagi jumlah keseluruhan kelompok pengrajin dikalikan 100%. Pada tahun 2013, jumlah kelompok pengrajin adalah sebanyak 1.225 kelompok atau sentra. Jumlah tersebut terus bertambah dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2017 tercatat sudah sebanyak 1.255 kelompok.



2.3.3.7. Bidang Urusan Transmigrasi

2.3.3.7.1 Persentase Transmigrasi Swakarsa

Tabel 2.323
Persentase Transmigrasi Swakarsa
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Transmigrasi Swakarsa	KK	0	0	0	0	25
Jumlah Transmigrasi	KK	1.595	1.595	1.595	1.595	1.620
Persentase Transmigrasi Swakarsa	%	0	0	0	0	1,54

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap

Transmigrasi merupakan sebutan untuk perpindahan penduduk dari suatu daerah menuju ke daerah lainnya. Biasanya transmigrasi ini dilakukan dari daerah yang memiliki penduduk yang padat menuju ke daerah yang jarang penduduknya, karena di Indonesia biasanya transmigrasi dilakukan sebagai upaya pemerataan penduduk. Di Kabupaten Sidenreng Rappang, jumlah transmigran sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 tercatat sebanyak 1.595 KK per tahun. Jumlah tersebut bertambah di tahun 2017 yaitu sebanyak 1.620 KK.

2.3.3.8. Bidang Urusan Kelautan Dan Perikanan

2.3.3.8.1 Produksi Perikanan

Tabel 2.324
Produksi Perikanan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Produksi Ikan	Ton	3,422.84	3,706.97	2,961.84	3,928.89	3,999.84
Target Daerah	Ton	3,500.00	3,593.98	3,773.66	3,962.30	4,155.39
Produksi Perikanan	%	97,80	103,14	78,49	99,16	96,26

Berdasarkan tabel diatas produksi perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang menurun di tahun 2015 yaitu 2,961.84 ton atau 78,849 dari



target daerah kemudian naik di tahun 2016 dan 2017 dimana pada tahun 2017 sebanyak 3,999.84 ton atau 96,62% dari target daerah.

2.3.3.8.2 Konsumsi Ikan

Tabel 2.325
Konsumsi Ikan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Konsumsi Ikan	Kg	40,32	40,15	40,08	40,08	40,08
Target Daerah	Kg	40,00	41,13	41,94	42,77	43,62
Konsumsi Ikan	%	100,80	97,62	95,57	93,52	91,88

Berdasarkan tabel di atas Konsumsi ikan Kabupaten Sidenreng Rappang menurun setiap tahunnya dari target daerah. pada tahun 2013 jumlah konsumsi 40,32 kg atau 100,80% dari target daerah 40 kg. sedangkan pada tahun 2017 40,08 kg atau 91,88% dari target daerah 43,62 kg.

2.3.3.8.3 Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Tabel 2.326
Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapatkan Bantuan Pemda Tahun n	Klp	9	15	29	17	2
Jumlah Kelompok Nelayan	Klp	22	25	26	25	27
Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	40,91	60,00	112,00	68,00	7,41

Berdasarkan tabel di atas jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menurun setiap tahunnya dan jumlah kelompok nelayan semakin bertambah setiap tahunnya sehingga cakupan bina kelompok nelayan menurun setiap tahunnya.



2.3.3.8.4 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Tabel 2.327
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Kelompok Nelayan	Ton	2.790,66	3.065,90	2.320,40	3.219,90	3.275,90
Jumlah Produksi Ikan di Daerah	Ton	3.422,84	3.706,97	2.961,84	3.928,89	3.999,84
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	81,53	82,71	78,34	81,95	81,90

Berdasarkan tabel diatas jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan mengalami kenaikan setiap tahunnya sedangkan jumlah produksi ikan di daerah mengalami penurunan pada tahun 2015 kembali naik pada tahun 2016-2017.

2.3.3.8.5 Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Tabel 2.328
Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Tangkapan Ikan	Ton	2.790,66	3.065,90	2.320,40	3.219,90	3.275,90
80% dari Tangkapan Maksimum Lestari	Ton	2.232,53	2.452,72	1.856,32	2.575,92	2.620,72
Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	%	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Berdasarkan tabel diatas proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2017 tidak mengalami perubahan setiap tahun karena stabilnya perbandingan jumlah tangkapan ikan dengan 80% dari tangkapan maksimum lestari.



2.3.3.8.6 Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial

Tabel 2.329
Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kawasan Lindung Perairan	Ha	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Total Luas Perairan Teritorial	Km	2.896	2.896	2.896	2.896	2.896
Rasio Kawasan Lindung Perairan terhadap Total Luas Perairan Teritorial	%	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Berdasarkan tabel diatas rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mengalami perubahan setipa tahunnya yaitu 0,35% setiap tahun.

2.3.3.8.7 Nilai Tukar Nelayan

Tabel 2.330
Nilai Tukar Nelayan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks yang Diterima Nelayan	4.327.000	4.797.000	3.525.000	4.802.000	6.806.000
Indeks yang Dibayar Nelayan	4.300.500	4.745.500	3.506.000	4.684.500	6.700.000
Nilai Tukar Nelayan	Tidak teridentifikasi				

Berdasarkan tabel diatas nilai tukar nelayan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah indeks yang diterima nelayan lebih besar dari indeks yang dibayar nelayan.



2.3.4. Fokus Penunjang Urusan

2.3.4.1. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

2.3.4.1.1. Ketersediaan Dokumen RPJPD

**Tabel 2.331
Ketersediaan Dokumen RPJPD
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihatbahwa pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah memiliki dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025.

2.3.4.1.2. Ketersediaan Dokumen RPJMD

**Tabel 2.332
Ketersediaan Dokumen RPJMD
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017**

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Berdasarkan table diatas dapat dilihatbahwa pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah memiliki dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 - 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah.



2.3.4.1.3. Ketersediaan Dokumen RKPD

Tabel 2.333
Ketersediaan Dokumen RKPD
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati setiap tahunnya. Namun dokumen perencanaan tahunan daerah masih perlu ditingkatkan kualitasnya dengan menaati jadwal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah dan mengoptimalkan proses evaluasi perencanaan pembangunan daerah, sehingga dokumen tersebut dapat menjadi acuan pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang berkualitas.

2.3.4.1.4. Ketersediaan Dokumen RTRW

Tabel 2.334
Ketersediaan Dokumen RTRW
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Berdasarkan tabel diatas Ketersediaan Dokumen RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017 selalu ada.



2.3.4.1.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD

Tabel 2.335
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD dan RKPD
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	176	198	197	200	200

Berdasarkan tabel diatas Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang melebihi 100% setiap tahunnya.

2.3.4.1.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD dan APBD

Tabel 2.336
Penjabaran Konsistensi Program RKPD dan APBD
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	176	198	200	200	198

Berdasarkan tabel diatas Penjabaran Konsistensi Program RKPD dan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang melebihi 100% setiap tahunnya.

2.3.4.1.7. Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

Tabel 2.337
Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	24	18	17	17	17

Berdasarkan Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan yang semula 2013 sebesar 24% dan tahun 2014 sebesar 18% sedangkan tahun 2015-2017 sebesar 17%.



2.3.4.2. Bidang urusan Keuangan

2.3.4.2.1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Tabel 2.338
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini BPK RI	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa hasil audit atas laporan keuangan tahun 2013 – 2017, dimana opini BPK RI sebagai hasil audit yang dilakukan pada tahun 2013 sampai 2015 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Adalah wajar dengan pengecualian (WDP) sedangkan dengan tahun 2016 dan 2017 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini merupakan capaian tertinggi yang di raih pertama kalinya dan dapat di pertahankan dua tahun berturut-turut dalam lima tahun terakhir terkait pencapaian kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2.3.4.2.2. Persentase SILPA

Tabel 2.339
Persentase SILPA
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase SILPA	%	0,15	0,87	2,77	0,67	0,82

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat proporsi SILPA dalam APBD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara persentase masih berfluktuatif dimana pada tahun 2013 mencapai 0,15% dan SILPA tertinggi tercatat 2,77 % pada tahun 2015, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 0,82 %. Dari tren tersebut menunjukkan bahwa SILPA APBD Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata masih dikategorikan sangat rendah yaitu 1,61 %.



2.3.4.2.3. Persentase Belanja Pendidikan

Tabel 2.340
Persentase Belanja Pendidikan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	20	38,66	38,66	35,05	35,05

Berdasarkan tabel diatas perkembangan persentase belanja pendidikan pada APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 sudah memenuhi amanat undang undang yaitu sebesar 20 persen dari APBD, hal ini terlihat dari tahun 2013 yang mencapai 20 % meningkat menjadi 38,66 % pada tahun 2014 dan 2015, hal ini dikarenakan adanya alokasi anggaran dari pemerintah pusat cukup besar yang disebar di Dana Alokasi Khusus Pendidikan, BOS dan belanja Sertifikasi. Namun pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan hingga 35,05 % dikarenakan anggaran DAK pendidikan yang mengalami penurunan, namun secara Nasional anggaran tersebut masih di atas persentase yang diamanatkan dalam undang undang terhadap persentase belanja pendidikan.

2.3.4.2.4. Persentase Belanja Kesehatan

Tabel 2.341
Persentase Belanja Kesehatan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	10	14,13	14,13	12,39	12,39

Berdasarkan tabel diatas perkembangan persentase belanja kesehatan pada APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 sudah memenuhi amanat undang undang yaitu sebesar 10 persen dari APBD. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan salah satu upayanya adalah



pengintegrasian program nasional dengan prioritas daerah sehingga anggaran kesehatan melebihi target nasional. Namun jika dilihat pada tabel, capain pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan 1,74 % dari capain tahun sebelumnya yakni 2014 dan 2015, hal ini disebabkan karena anggaran DAK kesehatan mengalami penurunan.

2.3.4.2.5. Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung

Tabel 2.342
Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	%	BTL : 62,28	BTL : 57,12	BTL : 49,13	BTL : 45,76	BTL : 42,37
		BL : 37,72	BL : 42,88	BL : 50,87	BL : 52,24	BL : 57,63

Proporsi belanja daerah sebagaimana pada tabel atas menunjukkan bahwa, pada tahun 2013 dan 2014 belanja tidak langsung lebih dominan dibanding belanja langsung. Namun mengalami perubahan tren pada tahun 2015 sampai dengan 2017 penggunaan terbesar dari belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat pada belanja langsung yaitu sebesar 50.87% pada tahun 2015, 54.24% pada tahun 2016, dan 57.63% pada tahun 2017.

2.3.4.2.6. Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa

Tabel 2.343
Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Bagi Hasil Kabupaten/ Kota dan Desa	%	1,11	1,85	0	0,22	0,22

Belanja bagi hasil Kabupaten/kota dan desa dalam lima tahun terakhir mengalami perubahan-perubahan dikarenakan adanya kebijakan pusat yang berubah ubah terhadap Pemerintah Daerah (Kabupaten).



Dana bagi hasil pada tahun 2013 mengalami kenaikan hingga tahun 2014, namun mengalami penurunan pada tahun 2015 sampai 2017 sebesar 0,22 %.

2.3.4.2.7. Penetapan APBD

Tabel 2.344
Penetapan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penetapan APBD	No Perda dan Tanggal	Tepat waktu				

Idealnya suatu penetapan APBD ditetapkan lebih awal sebelum tahun anggaran berakhir. Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2013 sampai 2017 pelaksanaan Penyusunan dan Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dilaksanakan dengan sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif sehingga penetapan anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tepat waktu sebelum 31 Desember.

2.3.4.3. Bidang Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan

2.3.4.3.1. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.345
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam Belajar	18 JP	18 JP	18 JP 78 JP	18 JP 887 JP 827 JP	18 JP

Dalam lima tahun terakhir, persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural di Kabupaten Sidenreng Rappang fluktuatif. Pada tahun 2013, tercatat 44,03 % ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan structural, namun kemudian mengalami penurunan hingga 42,52 % ditahun 2014. Adapun capain pada



tahun 2015 sampai 2017, angka persentasenya perlahan naik kembali dari 43,64 % tahun 2015 menjadi 47,94 % tahun 2016, dan 49,64 % tahun 2017.

2.3.4.3.2. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Tabel 2.346
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	44,03	42,52	43,64	47,94	49,64

Berdasarkan tabel diatas persentase ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan structural Kabupaten Sidenreng Rappang dalam 5 tahun terakhir masih dibawah 50%. pada tahun 2013 sebesar 44,03% dan pada tahun 2017 sebesar 49,64%.

2.3.4.3.3. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Tabel 2.347
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Kabupaten sidenreng rappang tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	29	32	32	32	27

Pada tabel di atas terlihat jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang banyak mengalami perubahan. periode tahun 2013 yakni berjumlah 29 jabatan kemudian pada tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan berjumlah 32 jabatan sebagaimana amanat PP nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yang mengatur tentang pembentukan dan susunan serta tipologi perangkat daerah. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami perubahan sesuai dengan amanat PP 18 tahun 2016 tentang perangkat



daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 yang mengakibatkan adanya perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya yang berjumlah 27 jabatan.

2.3.4.3.4. Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Tabel 2.348
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Orang	875	904	880	842	817

Jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penabahan dari 875 jabatan ditahun 2013 menjadi 904 jabatan pada tahun 2014. Pada tahun 2015, jumlah orang yang menjabat jabatan administrasi berkurang dari tahun sebelumnya menjadi 880 orang, terus kemudian menurun lagi pada tahun 2016 menjadi 842 jabatan dan terjadi penurunan yang cukup signifikan ASN yang menjabat jabatan administrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang hingga mencapai 817 jabatan.

2.3.4.3.5. Jumlah Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerintah

Tabel 2.349
Jumlah Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerintah	Orang	3.866	3.792	3.905	3.212	3.154



Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung berkurang. Hanya pada tahun 2015 mengalami kenaikan dengan Jumlah pemangku jabatan fungsional mencapai 3.792 orang, kemudian perlahan turun ke 3.212 orang tahun 2016 dan terus berlanjut mengalami penurunan di tahun 2017 sebanyak 3.154 orang.

2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

2.3.4.4.1. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Tabel 2.350
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	7	7	8	5	7

Berdasarkan tabel diatas persentase implementasi rencana kelitbangan Kabupaten Sidenreng Rappang masih rendah. Dalam lima tahun terakhir paling besar yaitu pada tahun 2015 sebesar 8%.

2.3.4.4.2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Tabel 2.351
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	5	5	4	10	5

Berdasarkan Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Sidenreng Rappang masih rendah. Dalam lima tahun terakhir yang paling besar pemaamfaatannya pada tahun 2016 yaaitu 10%.



2.3.4.4.3. Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah

Tabel 2.352
Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	7	2	3	4	4

Berdasarkan tabel diatas Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 sebesar 7% dan pada 2017 sebesar 4%.

2.3.4.4.4. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Tabel 2.353
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	2	3	2	3	4

Berdasarkan tabel diatas Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013 sebesar 2% dan paada tahun 2017 sebesar 4%.

2.3.5. Pengawasan

2.3.5.1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Tabel 2.354
Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	65	70	80	89	93



Capaian kinerja persentase tindak lanjut temuan berdasarkan jumlah rekomendasi temuan mulai tahun 2013 sampai 2017 menunjukkan tren meningkat dari 65 % menjadi 93 % , namun belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan masih lemahnya komitmen Perangkat Daerah untuk menindak lanjuti temuan hasil pemeriksaan, sehingga kedepan kinerja penyelesaian tindak lanjut ini ditingkatkan melalui pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik oleh Inspektorat daerah maupun tim tindaklanjut kabupaten.

2.3.5.2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Tabel 2.355
Persentase Pelanggaran Pegawai
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Pelanggaran Pegawai	%	2,21	2,21	0,05	6,02	0,65

Berdasarkan persentase pelanggaran pegawai Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir masih rendah. Pada tahun 2016 adalah persentasi paling besar yaitu hanya 6,02% pelanggaran.

2.3.5.3. Jumlah Temuan BPK

Tabel 2.356
Jumlah Temuan BPK
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Temuan BPK	%	88	73	61	124	28

Berdasarkan tabel diatas jumlah temuan bpk di Kabupaten Sidenreng Rappang paling banyak pada tahun 2016 yaitu 124% sedangkang pada tahun 2017 hanya 28%.



2.3.6. Sekretariat Dewan

2.3.6.1. Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Tabel 2.357
Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan DPRD Provinsi/Kab/Kota
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ketersediaan Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada

Berdasarkan tabel diatas ketersediaan rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Kabupaten Sidenreng Rappang selalu ada setiap tahun.

2.3.6.2. Integrasi Program-Program Kerja DPRD pada RPJMD dan RKPD

Tabel 2.358
Integrasi Program-Program Kerja DPRD pada RPJMD dan RKPD
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan RPJMD maupun Dokumen Rencana RKPD	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada

Berdasarkan tabel diatas Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan RPJMD maupun Dokumen Rencana RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang selalu ada setiap tahun.



2.3.6.3. Integrasi Program-Program pada Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran

Tabel 2.359
Integrasi Program-Program pada Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen Perencanaan dan Dokumen anggaran Setwan DPRD	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada

Berdasarkan tabel diatas Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan **fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen Perencanaan dan Dokumen anggaran Setwan DPRD** Kabupaten Sidenreng Rappang selalu ada setiap tahun.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator variabel aspekdaya saing daerah terdiri atas: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita, Nilai Tukar Petani, Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan Perkapita, Produktivitas Total Daerah, Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa, Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi), Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum, Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR, Angka Kriminalitas Yang Tertangani, dan Rasio Ketergantungan.



2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita di Kabupaten Sidenreng Rappang terus mengalami peningkatan secara progresif. Pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2015 sebanyak Rp. 500.000 perkapita dan pada tahun 2017 pengeluaran konsumsi telah mencapai Rp. 840.741 perkapita. Pengeluaran konsumsi ini dapat terjadi akibat meningkatnya pemenuhan berbagai jenis kebutuhan rumah tangga. Selain itu peningkatan tersebut juga dapat disebabkan oleh meningkatnya harga berbagai jenis kebutuhan barang konsumsi rumah tangga.

Tabel 360
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita
Di Kabupaten Sidenreng Rappang 2015-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Di Kabupaten Sidenreng Rappang	Rupiah	-	-	500.000	450.000	840.000

2.4.1.2 Pengeluaran Perkapita/Tahun

2.4.1.2.1. Nilai Tukar Petani

Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Sejak tiga tahun terakhir, persentase pengeluaran konsumsi non pangan rumahtangga telah mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi dari tahun 2015 sebanyak 52,23% dan tahun 2017 sebanyak 54,3% namun pada tahun 2016 terjadi penurunan sebanyak 48,63%. Data dalam waktu 3 tahun terakhir proporsi pengeluaran non pangan meningkat dari 48.63 % menjadi 54,3 %. Data tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.



Tabel 361
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita
Di Kabupaten Sidenreng Rappang 2015-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	%	-	-	52,23	48,63	54,3

2.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.5.1. Bidang Pendidikan

Untuk bidang pendidikan, ada 3 (tiga) indikator pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu : (1) Jumlah warga Negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs), dimana kondisi kinerja periode awal RPJMD atau Tahun 2017/2018 sudah cukup tinggi yakni sebesar 92,41% tetapi belum mencapai target SPM yaitu 100%, atau masih ada selisih sebesar 7,59%. (2) Jumlah warga Negara usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan untuk kabupaten Sidenreng Rappang masih terbilang rendah yakni baru sebesar 32,10% atau masih tertinggal sebesar 67,9% untuk mencapai target SPM 100%, serta (3) Jumlah warga Negara usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD sudah sebesar 61,19% namun belum mencapai target SPM 100%.

Tabel 2.362
Indikator Pencapaian Bidang Pendidikan

NO.	INDIKATOR PENCAPAIAN	KONDISI PERIODE AWAL RPJMD (%)	TARGET CAPAIAN (%)
1	Jumlah warga Negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	92,41	100
2	Jumlah warga Negara usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	32,10	100
3	Jumlah warga Negara usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	61,19	100



2.5.2. Bidang Kesehatan

Indikator pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan ada 12 indikator, tetapi dari ke 12 indikator ini belum ada satu pun indikator pada priode awal RPJMD ini yang sudah memenuhi target SPM yakni 100%. Indikator yang paling rendah capaiannya yaitu Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan dimana kondisi untuk tahun 2017/2018 baru sekitar 27,61% dan yang tertinggi adalah indikator Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 88,83%. Pencapaian target untuk 12 indikator bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.363
Indiaktor Pencapaian Bidang Kesehatan

No.	Indikator Pencapaian	Kondisi Periode Awal RPJMD (%)	Target Capaian (%)
1	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	62,49	100
2	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	79,57	100
3	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	81,83	100
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	66,96	100
5	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	88,83	100
6	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	57,98	100
7	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	62,09	100
8	Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	27,61	100
9	Jumlah warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	40,40	100



No.	Indikator Pencapaian	Kondisi Periode Awal RPJMD (%)	Target Capaian (%)
10	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	80	100
11	Jumlah warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	52,78	100
12	Jumlah warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	72,45	100

2.5.3. Bidang Pekerjaan Umum

Untuk bidang Pekerjaan Umum, ada 2 indikator pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu : (1) Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari dimana kondisi awal RPJMD untuk Kabupaten Sidenreng Rappang sudah mencapai 85,36% atau masih ada sekitar 14,64% dari total jumlah penduduk yang belum memperoleh akses kebutuhan air minum sehari-hari. (2) Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, untuk indikator ini kondisi awal RPJMD sudah cukup tinggi yakni sebesar 93,14% atau tersisa 6,86% dari target SPM yaitu 100%.

Tabel 2.364
Indikator Pencapaian Bidang Pekerjaan Umum

NO.	INDIKATOR PENCAPAIAN	KONDISI PERIODE AWAL RPJMD (%)	TARGET CAPAIAN (%)
1	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	85,36	100
2	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	93,14	100

2.5.4. Bidang Perumahan Rakyat

Ada 2 indikator pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Bidang Perumahan Rakyat :



- a. Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- b. Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (**tidak tersedia data kondisi awal RPJMD**).

Tabel 2.365
Indikator Pencapaian Bidang Perumahan Rakyat

NO.	INDIKATOR PENCAPAIAN	KONDISI PERIODE AWAL RPJMD (%)	TARGET CAPAIAN (%)
1	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	100
2	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	-	100

2.5.5. Bidang TRANTIBUMLINMAS

Dari 5 Indikator pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang TRANTIBUMLINMAS, ada 2 indikator yang sudah mencapai target pemenuhan SPM 100% yaitu Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dan Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran.

Sedangkan untuk indikator Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana masih sangat rendah yakni 0,06% jauh dari target pencapaian SPM sebesar 100%. Dan Untuk indikator Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada serta indikator jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran **tidak tersedia data**.



Tabel 2.366
Indikator Pencapaian Bidang Trantibumlinmas

NO.	INDIKATOR PENCAPAIAN	KONDISI PERIODE AWAL RPJMD (%)	TARGET CAPAIAN (%)
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	-	100
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,06	100
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	-	100

2.5.6. Bidang Sosial

Untuk bidang sosial ada 5 indikator pencapaian target Standar Pelayanan Minimal dan ke 5 indikator tersebut tidak tersedia data :

- a. Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti.
- b. Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti
- c. Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti
- d. Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social diluar panti
- e. Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.



Tabel 2.367
Indikator Pencapaian Bidang Perumahan Rakyat

NO.	INDIKATOR PENCAPAIAN	KONDISI PERIODE AWAL RPJMD (%)	TARGET CAPAIAN (%)
1	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti.	-	100
2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti	-	100
3	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	-	100
4	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social diluar panti	-	100
5	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social.	-	100

2.6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals (MDGs)*. SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Adapun 17 tujuan global dimaksud adalah :



- a. Tanpa Kemiskinan;
- b. Tanpa Kelaparan;
- c. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan berkualitas;
- e. Kesetaraan Gender;
- f. Air bersih dan sanitasi;
- g. Energy bersih dan terjangkau;
- h. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak;
- i. Industry, inovasi dan infrastruktur;
- j. Pengurangan kesenjangan;
- k. Keberlanjutan kota dan komunitas;
- l. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
- m. Aksi terhadap iklim;
- n. Kehidupan bawah laut;
- o. Kehidupan di darat;
- p. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian; dan
- q. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dari ke 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), ada 15 Tujuan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jumlah indikator sebanyak 199 indikator. Capaian indicator TPB secara keseluruhan di Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan hasil analisis data terbagi atas 3 (tiga) kategori yaitu :

- a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 52 Indikator seperti tergambar pada tabel di bawah ini :





Tabel 2.368
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Sudah
Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA NASIONAL
1.	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	5,32	7,8 %
		2. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	347	90 %
		3. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	95,8	70 %
		4. Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	92,7	63 %
		5. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		65 %
		6. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		Menurun
2.	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	7. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	8,3	17 %
		8. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	15,83	Menurun
		9. Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	1,79	Menurun
		10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	65,2	50 %
		11. Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sector pertanian (rupiah per tenaga kerja).	87,23	
3.	Menjamin	12. Angka Kematian Ibu (AKI).	2	306



NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA NASIONAL		
	kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	13. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	95,8	95 %		
		14. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	0	Menurun		
		15. Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	17	Menurun		
		16. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	6	Menurun		
		17. Persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	100	95 %		
		18. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	249	245		
		19. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	1	300 kab/kota		
		20. Persentase kabupaten /kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	100	-		
		21. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	0,6	Menurun		
		22. Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	1,7	5,4 %		
		23. Prevalensi tekanan darah tinggi.	23,9	24,3 %		
		24. Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		65 %		
		4.	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar	25. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	100,06	91,63 %
				26. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	94	Meningkat
27. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan	100					



NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA NASIONAL
	sepanjang hayat untuk semua	komprehensif.		
5.	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	28. Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	40	
		29. Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).		
		30. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	90	
6.	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan	31. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	55	
		32. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	0,84	
7.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	33. PDB per kapita.	40,37	50 juta
		34. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	29,8	
		35. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.		
8.	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	36. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	14,35	
		37. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	8,18	Meningkat
		38. Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	63	
		39. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	90	
		40. Proporsi individu yang	75	



NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA NASIONAL
		menggunakan internet		
9.	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	41. Koefisien Gini.	0,3587	0,36
		42. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	347	
10.	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	43. Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.		
		44. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	85	
		45. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.		Meningkat
		46. Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	100	
		47. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	87,94	
11.	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	48. Total pendapatan terhadap PDB menurut sumbernya pemerintah sebagai proporsi		Meningkat
		49. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	100	
		50. Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	63	
		51. Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	63	
		52. Proporsi individu yang menggunakan internet.	75	

b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 39 Indikator seperti tergambar pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.369
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Sudah
Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA NASIONAL
1.	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	4.641	2,8 Juta RT
		2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	85,36	100 %
		3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	93,14	100 %
		4. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	86,59	
		5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	58,52	
		6. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	72,7	77,4 %
		7. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.		
2.	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	8. Prevalensi anemia pada ibu hamil.	28,6	28 %
3.	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh	9. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	79,6	95 %



NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA NASIONAL
	penduduk semua usia	10. Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,9	< 0,5 %
		11. Kejadian Malaria per 1000 orang.	0,07	Menurun
		12. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	4,4	15,4 %
		13. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.		66 %
		14. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.		23,5 %
		15. Total Fertility Rate (TFR).		
4.	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	16. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	101,81	
		17. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	7,32	8,8 Tahun
		18. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	58,47	
		19. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	94	96,1 %
		20. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	57,69	
5.	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	21. Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.		
6.	Menjamin	22. Persentase rumah	85,36	100 %



NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA NASIONAL	
	ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan	tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.			
23.		Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	21		
24.		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	85,36	100 %	
25.		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	93,14	100 %	
7.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	26.	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	9,82	Meningkat
		27.	Tingkat setengah pengangguran.	103.628	Menurun
		28.	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	133.016	Meningkat
8.	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	29.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	56,63	80 %
9.	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	30.	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	4,6	150 Juta Ton (Skala Nasional)
		31.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	10,6	20 Ton/ Hari (Skala Nasional)





NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA NASIONAL
10.	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	32. Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	1	
		33. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.		
		34. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		
		35. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	80	
		36. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	85	
		37. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	25	Meningkat
		38. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	25	



NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA NASIONAL
11.	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	39. Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	63	

c. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 108 Indikator seperti tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.370
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA NASIONAL
1.	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	1. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	-	90 %
		2. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	-	17,12 %
		3. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	-	39 Daerah
		4. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	-	-
		5. Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	-	
		6. Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	-	
		7. Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	-	



NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA NASIONAL
		8. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	-	
		9. Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	-	
		10. Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	-	
2.	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	11. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	-	
		12. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	-	
		13. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	-	
		14. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	-	
		15. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	-	
3.	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	16. Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	-	Menurun
		17. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	-	280 Kab/Kota
		18. Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	-	-
		19. Konsumsi alkohol (liter per	-	0,02 %



NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA NASIONAL
		kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.		
		20. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	-	-
		21. Unmet need pelayanan kesehatan.	-	
		22. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	-	Meningkat
		23. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	-	95 %
		24. Proporsi kematian akibat keracunan.	-	
		25. Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	-	
		26. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	-	Meningkat
		27. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	-	Meningkat
4.	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	28. Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	-	
		29. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	-	
		30. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	-	
		31. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	-	
		32. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat;	-	



NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA NASIONAL
		(2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.		
		33. Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	-	
5.	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	34. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	-	16 Kebijakan
		35. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	-	
		36. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	-	
		37. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	-	
		38. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	-	





NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA NASIONAL
		39. Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	-	
		40. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	-	
		41. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	-	16,6 %
		42. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	-	
6.	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan	43. Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	-	
		44. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	-	
		45. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	-	
		46. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	-	
		47. Kualitas air danau.	-	Meningkat
		48. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	-	Meningkat
		49. Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	-	
		50. Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	-	
		51. Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	-	
7.	Meningkatkan pertumbuhan	52. Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk	-	



NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA NASIONAL
	ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	dewasa		
		53. Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	-	
		54. Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	-	
		55. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	-	
		56. Persentase tenaga kerja formal.	-	
		57. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	-	Meningkat
		58. Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	-	25 %
		59. Upah rata-rata per jam pekerja.	-	
		60. Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	-	
		61. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	-	
		62. Jumlah wisatawan mancanegara.	-	Meningkat
		63. Jumlah devisa sektor pariwisata.	-	
		64. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	-	Meningkat
8.		Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	65. Panjang jalur kereta api.	-
	66. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.		-	Meningkat
	67. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		-	Meningkat
	68. Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.		-	
	69. Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.		-	



NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA NASIONAL
9.	Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara	70. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	-	7-8 %
		71. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	-	
		72. Jumlah desa tertinggal.	-	
		73. Jumlah Desa Mandiri.	-	
		74. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	-	Meningkat
		75. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	-	14 %
		76. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	-	
		77. Indeks Kebebasan Sipil.	-	
		78. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	-	
10.	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	79. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	-	
		80. Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	-	
		81. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	-	Menurun
		82. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	-	30 %
		83. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	-	Ada
		84. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	-	
		85. Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	-	



NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA NASIONAL
		metropolitan dan kota sedang.		
		86. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	-	Ada
11.	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	87. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	-	
		88. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	-	
		89. Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	-	
12.	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	90. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	-	Ada
		91. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	-	Menurun
13.	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	92. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	-	Meningkat
		93. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	-	
		94. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	-	
14.	Menguatkan masyarakat yang inklusif	95. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat	-	



NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA NASIONAL
	dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	tinggalnya.		
		96. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	-	
		97. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	-	
		98. Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	-	80 %
		99. Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kemen Pterian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	-	
		100. Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	-	
		101. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	-	
		102. Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	-	
		103. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	-	
15.		Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan	104. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	-
	105. Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan		-	



NO.	TUJUAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA NASIONAL
	global untuk pembangunan berkelanjutan	Badan Usaha (KPBU).		
106.		Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	-	
107.		Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	-	
108.		Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	-	

GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

BAB 3



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan pada semua tingkatan, termasuk dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu unsur penting dalam kebijakan pembangunan dan kebijakan ekonomi sebuah daerah. Kebijakan keuangan daerah ini merupakan salah satu instrumen pokok yang dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan guna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan. Kebijakan keuangan daerah ini diwujudkan dalam bentuk kerangka operasional Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Artinya, APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya kebutuhan pendanaan (*fiscal needs*) atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Penyusunan Gambaran Keuangan Daerah dilakukan untuk menganalisis capaian, untuk selanjutnya dapat menjadi referensi utama untuk melakukan proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Olehnya itu, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu dianalisis kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja maupun kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu selama satu periode kepemimpinan daerah yang telah berjalan terakhir. Pada saat yang sama diperlukan analisis yang relevan pada kondisi dan



kecenderungan faktor determinan keuangan daerah lainnya, seperti kebijakan keuangan negara, serta asumsi dan kecenderungan capaian makro ekonomi nasional dan daerah. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan pada masa yang akan datang.

3.1. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Analisis keuangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berupa analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun terakhir periode 2013-2017, dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kinerja kapasitas atau kemampuan keuangan daerah yang riil dalam mendanai penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu periode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah berjalan. APBD terdiri dari komponen pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah, dilakukan pada semua jenis objek dan komponen pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir, periode 2013-2017 menunjukkan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran yang cukup baik. Baik ditunjukkan pada rata-rata pendapatan, maupun pada rata-rata pertumbuhan belanja dan pembiayaan daerahnya. Selama periode



tersebut, pendapatan daerah rata-rata bertumbuh sebesar 15,31 persen. Sedikit lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan belanja daerah yang mencapai 15,42 persen pada periode waktu yang sama. Secara kasat mata, rata-rata pertumbuhan belanja daerah yang lebih besar dari rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mengindikasikan peningkatan pembiayaan defisit daerah (defisit yang semakin membesar) atau sebaliknya, mengindikasikan pembiayaan surplus daerah yang semakin mengecil. Selengkapnya disajikan pada tabel 3.1. berikut ini.





Tabel 3.1.
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013 s/d Tahun 2017

NO.	Uraian	Tahun (Rp)					Rerata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	745,706,400,450.20	820,880,887,909.21	1,064,876,798,940.66	1,184,966,741,717.92	1,305,178,148,774.43	15.31
1.1	Pendapatan Asli Daerah	37,920,943,980.29	64,628,526,309.80	76,076,376,303.64	98,400,923,153.52	146,316,853,172.43	41.55
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8,303,004,976.00	16,679,705,196.00	21,125,803,135.00	21,806,810,527.00	24,915,001,643.00	36.26
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	21,227,956,226.50	33,184,946,772.20	34,549,479,482.55	28,598,806,071.00	11,447,595,763.00	(4.19)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	3,699,111,152.00	3,885,895,413.00	4,538,586,580.12	5,051,864,996.00	5,746,046,556.89	11.72
1.1.4	Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,690,871,625.79	10,877,978,928.60	15,862,507,105.97	42,943,441,559.52	104,208,209,209.54	122.78
1.2	Dana Perimbangan	578,000,237,211.00	609,321,207,844.00	772,746,112,784.00	974,121,056,622.00	996,482,766,059.00	15.15
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36,469,154,211.00	23,910,047,844.00	20,227,355,784.00	24,640,632,334.00	18,572,136,319.00	(13.16)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	499,699,753,000.00	533,655,220,000.00	574,364,767,000.00	618,402,978,000.00	608,140,939,000.00	5.11
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	41,831,330,000.00	51,755,940,000.00	58,180,090,000.00	146,996,402,541.00	123,136,956,500.00	43.14
1.2.4	Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah	-	-	-	36,592,249,227.00	-	(25.00)
1.2.5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	-	-	82,619,636,520.00	101,784,564,240.00	5.80





NO.	Uraian	Tahun (Rp)					Rerata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.6	Dana Alokasi Khusus Penugasan	-	-	-	-	144,848,170,000.00	-
1.2.7	Dana Alokasi Khusus Program Prioritas Kabinet Kerja	-	-	119,973,900,000.00	-	-	(25.00)
1.2.8	Dana Alokasi Khusus Tambahan	-	-	-	64,869,158,000.00	-	(25.00)
1.3	Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah	129,785,219,258.91	146,931,153,755.41	216,054,309,853.02	112,444,761,942.40	162,378,529,543.00	14.18
1.3.1	Pendapatan Hibah	179,640,000.00	-	16,047,848,000.00	2,701,244,350.00	2,689,203,450.00	(45.90)
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27,206,210,658.91	37,397,840,875.41	45,224,479,253.02	51,042,523,750.40	54,262,663,493.00	19.39
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	81,102,451,000.00	95,364,599,000.00	138,187,381,000.00	48,814,223,000.00	98,402,561,000.00	24.85
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintahan Daerah Lainnya	21,296,917,600.00	14,168,713,880.00	16,594,601,600.00	9,886,770,842.00	7,024,101,600.00	(21.43)
2	BELANJA	738,651,821,492.00	812,668,038,096.00	1,044,498,205,909.92	1,200,899,695,872.00	1,298,748,117,451.00	15.42
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	460,053,698,813.00	464,176,423,051.00	513,151,817,450.00	549,507,937,545.00	550,341,798,660.00	4.67
2.1.1	Belanja Pegawai	408,388,438,897.00	437,988,120,889.00	476,527,635,191.00	486,191,159,461.00	448,640,789,048.00	2.59
2.1.2	Belanja Bunga Utang Pinjaman	2,395,751,706.00	2,207,839,516.00	2,019,927,327.00	1,861,284,527.00	1,664,275,992.00	(8.70)





NO.	Uraian	Tahun (Rp)					Rerata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	1,966,848,000.00	-
2.1.4	Belanja Hibah	22,957,644,199.00	3,923,433,713.00	-	4,046,800,000.00	11,835,600,000.00	2.39
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	16,267,650,000.00	836,659,755.00	-	-	-	(48.71)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	8,306,851,507.00	15,216,191,751.00	-	2,624,841,515.00	2,898,624,474.00	(1.60)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	467,641,512.00	-	34,259,604,932.00	53,711,052,592.00	81,574,530,346.00	2.16
2.1.8	Belanja Tidak terduga	1,269,720,992.00	4,004,177,427.00	344,650,000.00	1,072,799,450.00	1,761,130,800.00	99.85
2.2	BELANJA LANGSUNG	278,598,122,679.00	348,491,615,045.00	531,346,388,459.92	651,391,758,327.00	748,406,318,791.00	28.76
2.2.1	Belanja Pegawai	33,173,964,512.00	43,755,516,170.00	53,764,985,236.14	40,929,925,166.00	45,593,117,297.00	10.57
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118,373,927,466	115,829,872,746.00	150,608,675,623.78	190,734,473,461.00	268,177,339,853.00	23.78
2.2.3	Belanja Modal	127,050,230,701	188,906,226,129.00	326,972,727,600.00	419,727,359,700.00	434,635,861,641.00	38.42
	SURPLUS/ DEFISIT	7,054,578,958.20	8,212,849,813.21	20,378,593,030.74	(15,932,954,154.08)	6,430,031,323.43	(38.50)
3	PEMBIAYAAN	6,128,266,689	2,274,086,500.00	8,059,467,173.00	33,928,992,708.43	11,921,463,366.00	111.91
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	4,785,380,674.00	28,953,661,865.43	8,045,376,868.00	108.21
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	-	4,785,380,674.00	28,953,661,865.43	8,045,376,868.00	108.21
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6,128,266,689	2,274,086,500.00	3,274,086,499.00	4,975,330,843.00	3,876,086,498.00	2.74





NO.	Uraian	Tahun (Rp)					Rerata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	1,000,000,000.00	2,701,244,350.00	1,602,000,000.00	32.36
3.2.2	Pembayaran Pokok utang	6,128,266,689	2,274,086,500.00	2,274,086,499.00	2,274,086,493.00	2,274,086,498.00	(15.72)
	PEMBIAYAAN NETTO	(6,128,266,689.00)	(2,274,086,500.00)	1,511,294,175.00	23,978,331,022.43	4,169,290,370.00	293.66
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	926,312,269.20	5,938,763,313.21	21,889,887,205.74	8,045,376,868.35	10,599,321,693.43	194.55

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017 (diolah)

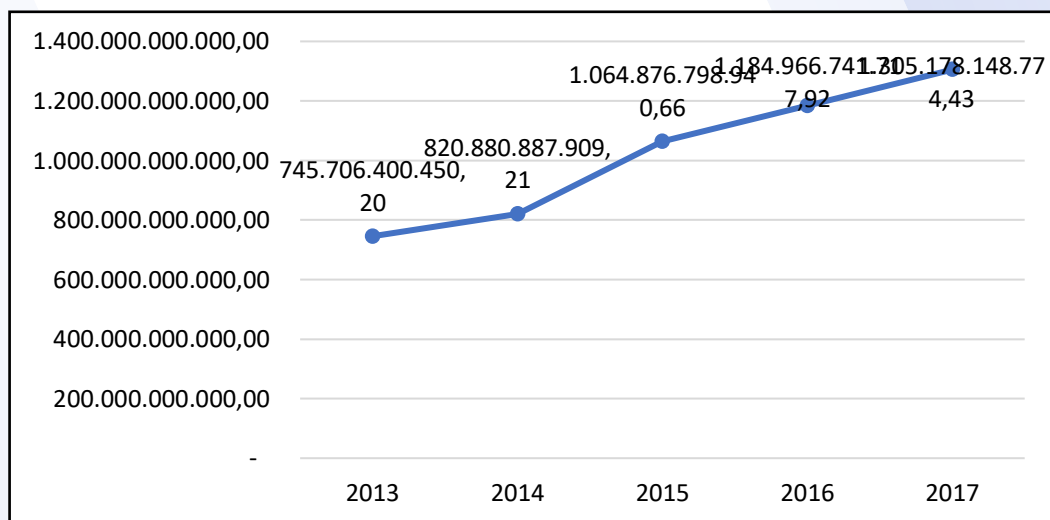




3.1.2. Kinerja Pendapatan Daerah

Kinerja pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan peningkatan selama tahun 2013-2017, meningkat sebesar 41,55 persen atau meningkat dari hanya sebesar Rp 745.706.400.450 pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 1.305.178.148.774 pada tahun 2017. Rata-rata meningkat 15,31 persen setiap tahunnya dalam lima tahun berjalan.

Gambar 3.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (Rp)



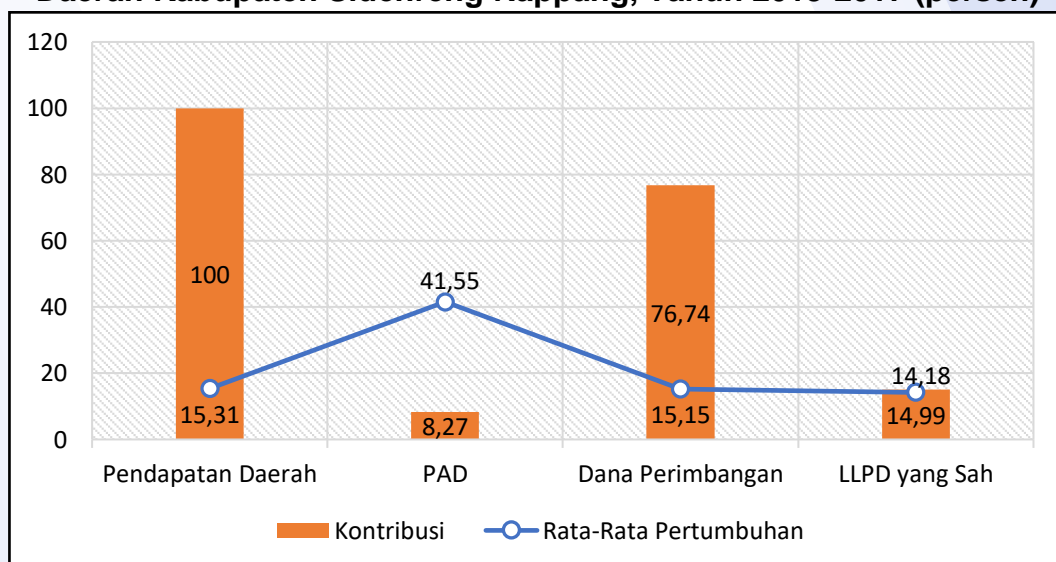
Sumber: Buku APBD dan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap, series.

Dari sisi pertumbuhan, komponen PAD merupakan faktor pendorong terbesar terhadap pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah selama periode ini. Komponen PAD menunjukkan rata-rata pertumbuhan 41,55 persen setiap tahun. Meskipun demikian, sebagai sumber pertumbuhan pendapatan daerah, komponen PAD ini masih berperan sangat kecil. Hal ini ditunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang masih sangat kecil, yakni hanya sebesar 8,27 persen. Berbeda dengan komponen pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan, meskipun menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang relatif kecil dari rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, tetapi



menunjukkan kontribusi terhadap pendapatan daerah sangat besar, yakni mencapai 76,74 persen dari total pendapatan daerah. Hal ini mengindikasikan sumber pertumbuhan pendapatan daerah masih didominasi oleh Dana Perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN). Meskipun dengan proporsi yang lebih kecil, hal sama ditunjukkan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPD yang Sah). Mencatat pertumbuhan yang lebih rendah, hanya sebesar 14,18 persen, tetapi mampu berkontribusi sebesar 14,99 persen lebih besar dari kontribusi PAD, seperti nampak pada gambar 3.2. berikut ini.

Gambar 3.2.
Rata-rata Pertumbuhan dan Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (persen)



Sumber: Buku APBD dan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap, series.

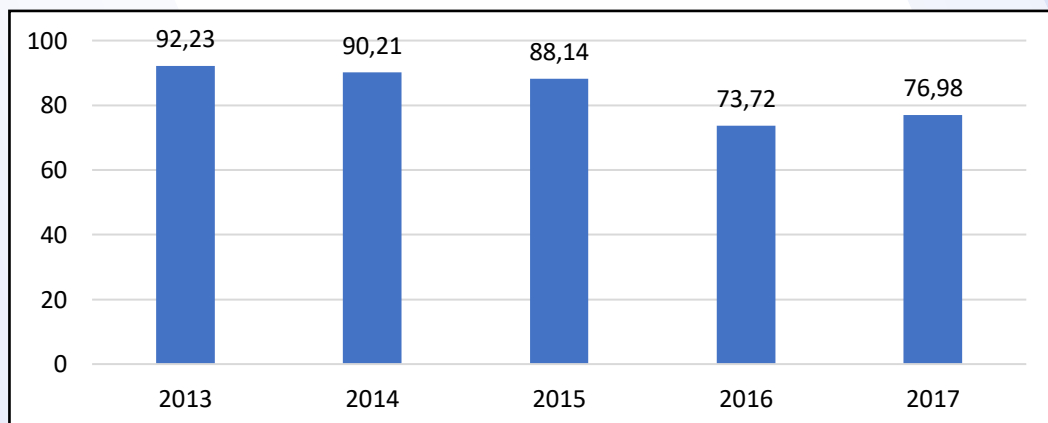
Fakta ini mengindikasikan masih besarnya ketergantungan fiskal daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Hingga tahun 2017, nampak bahwa ketergantungan terhadap sumber pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan masih mencapai 76,74 persen. Jauh melampaui kemampuan pendapatan daerah yang berasal dari PAD dan LLPD yang Sah. Hingga tahun yang sama baru mampu berkontribusi sebesar 23,26 persen, bahkan PAD belum mampu berkontribusi 10 persen terhadap total pendapatan daerah. Hal ini akan menjadi catatan tersendiri bagi



penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sidenrenf Rappang ke depan, khususnya yang menangani urusan pendapatan daerah ini.

Salah satu faktor masih tingginya ketergantungan fiskal yang tinggi atau tingkat kemandirian fiskal daerah yang rendah ini adalah menurunnya capaian relisasi pendapatan daerah terhadap target yang telah ditetapkan/disepakati bersama. Bila dicermati pada tingkat realisasi pendapatan terhadap target anggaran, kinerja pendapatan daerah ini justeru memperlihatkan pencapaian yang semakin menurun. Menurun dari capaian 92,23 persen pada tahun 2013 menurun menjadi hanya mencapai realisasi 76,98 persen pada tahun 2017. Fakta ini mengindikasikan menurunnya kinerja instansi yang menangani pendapatan daerah terhadap pencapaian target-target pendapatan daerah yang ditetapkan/disepakati setiap tahunnya.

Gambar 3.3.
Persentase Tingkat Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (persen)



Sumber: Buku APBD dan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap, series.

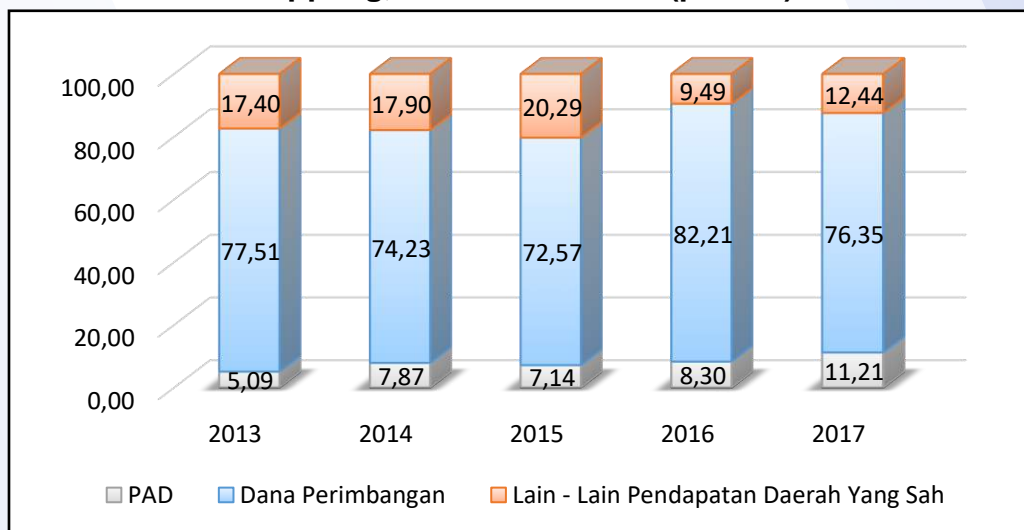
Diperlukan strategi peningkatan pendapatan daerah yang tepat, terutama dalam mendorong peningkatan pendapatan yang bersumber dari kemampuan perekonomian daerah yang mampu mendorong peningkatan PAD dan LLPD yang Sah ini. Target pendapatan daerah setiap tahunnya harus mampu memperhitungkan segenap potensi pendapatan asli daerah tersebut, diperlukan tax base atau basis pajak daerah yang akurat



sehingga mampu meningkatkan capaian realisasi pendapatan yang semakin membaik.

Hal ini menarik dicermati, mengingat perkembangan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah setiap tahunnya terus menunjukkan peran yang semakin membaik. Meningkat dari hanya 5,09 persen pada tahun 2013 menjadi sebesar 11,21 persen pada tahun 2017, meningkat dua kali lipat dalam lima tahun. Meskipun secara keseluruhan selama periode tersebut hanya berkontribusi 8,27 persen. Perkembangan kontribusi komponen-komponen pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2013-2017, nampak pada grafik berikut ini.

Gambar 3.4.
Persentase Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (persen)



Sumber: Buku APBD dan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap, series.

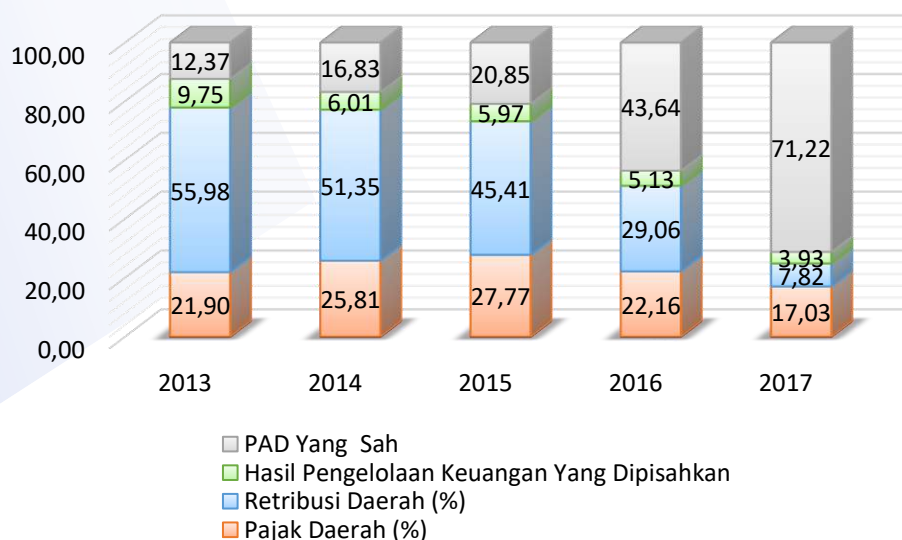
Meskipun masih tergolong kecil, komponen PAD menunjukkan pola peningkatan kontribusi yang paling konsisten. Bahkan terhadap dana perimbangan, komponen PAD masih lebih baik khususnya dalam tiga terakhir (2015-2017). Artinya, selama periode ini, upaya pemerintah daerah mengurangi ketergantungan fiskal yang bersumber dari pemerintah pusat nampak menunjukkan kinerja yang semakin membaik.



Ketergantungan keuangan daerah pada dana perimbangan menurun dari 82,21 persen pada tahun 2016 menjadi hanya 76,35 persen pada tahun 2017. Sebaliknya kemandirian fiskal daerah yang bersumber dari PAD dan LLPD yang Sah meningkat dari hanya 17,79 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 23,65 persen pada tahun 2017, sebuah gambaran kinerja kemampuan fiskal daerah yang meningkat tajam dalam setahun.

Kinerja pendapatan asli daerah (PAD), dari proporsi komponen pembentuk PAD, terlihat bahwa setiap komponen menunjukkan angka fluktuatif. Kecuali pada Retribusi Daerah yang terus mengalami penurunan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) yang Sah yang terus mengalami peningkatan. Sementara untuk Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Keuangan yang Dipisahkan menunjukkan angka fluktuatif. Peningkatan pada LLPAD yang Sah terlihat meningkat dari hanya 13,27 persen pada tahun 2013, meningkat menjadi sebesar 71,22 persen pada tahun 2017. Sebaliknya, terjadi penurunan pada Retribusi Daerah, dari sebesar 55,98 persen pada tahun 2013, menurun tajam menjadi hanya 7,82 persen di tahun 2017. Selengkapnya pada gambar 3.5. berikut ini.

Gambar 3.5.
Perkembangan Kontribusi Komponen-komponen PAD Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (persen)



Sumber: Buku APBD dan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap, series.



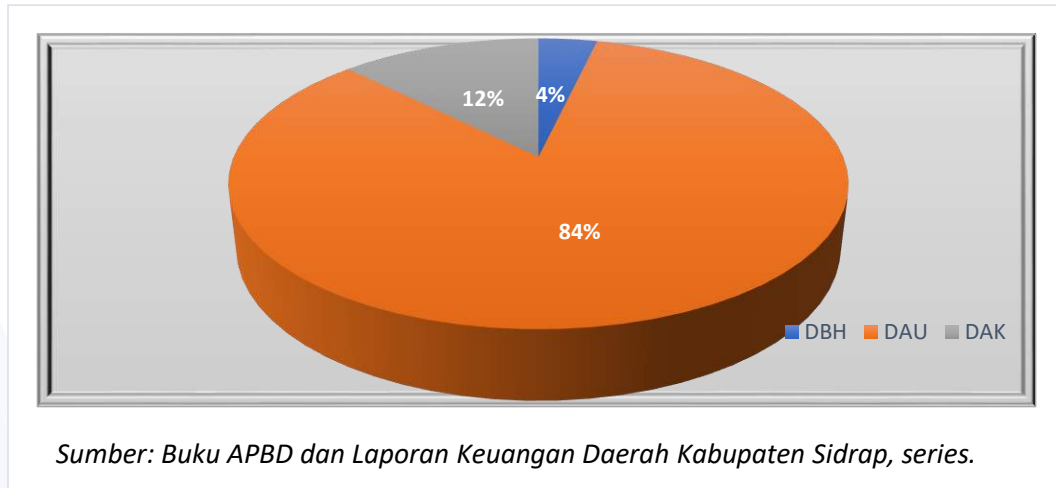
Pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan terdiri atas tiga komponen, yakni dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Selama periode 2013-2017, komponen terbesar dana perimbangan berasal dari DAU yang mencapai 84 persen dalam lima tahun anggaran. Selebihnya, 12 persen dari DAK dan hanya 4 persen dari DBH, baik bagi hasil pajak maupun bagi hasil bukan pajak.

Kontribusi dana bagi hasil mengalami penurunan dari sebesar 6,31 persen pada tahun 2013 menurun menjadi hanya 1,86 persen pada tahun 2017. Penurunan ini mengindikasikan menurunnya kemampuan perekonomian daerah dalam mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah. Karena sejatinya sumber pendapatan daerah dari dana bagi hasil ini juga merupakan gambaran pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri, yakni berasal dari kemampuan daerah dalam pengelolaan sumberdaya alamnya yang masuk kategori bagi hasil pemerintah, serta bagi hasil daerah dari obyek-obyek pajak pemerintah yang dibagihasilkan dengan pemerintah daerah Kabupaten Sidrap.

Hal yang sama terjadi pada sumber pendapatan dana perimbangan yang bersumber dari DAU. Meskipun selama lima tahun tersebut memberi kontribusi terbesar, mencapai 84 persen, tetapi selama periode ini perannya dalam mendorong peningkatan dana perimbangan cenderung menunjukkan penurunan tajam. Berkurang dari sebesar 86,45 persen pada tahun 2013 menjadi hanya sebesar 61,03 persen pada tahun 2017. Selengkapnya pada gambar berikut ini.



Gambar 3.6.
Kontribusi Komponen-komponen Dana Perimbangan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (persen)

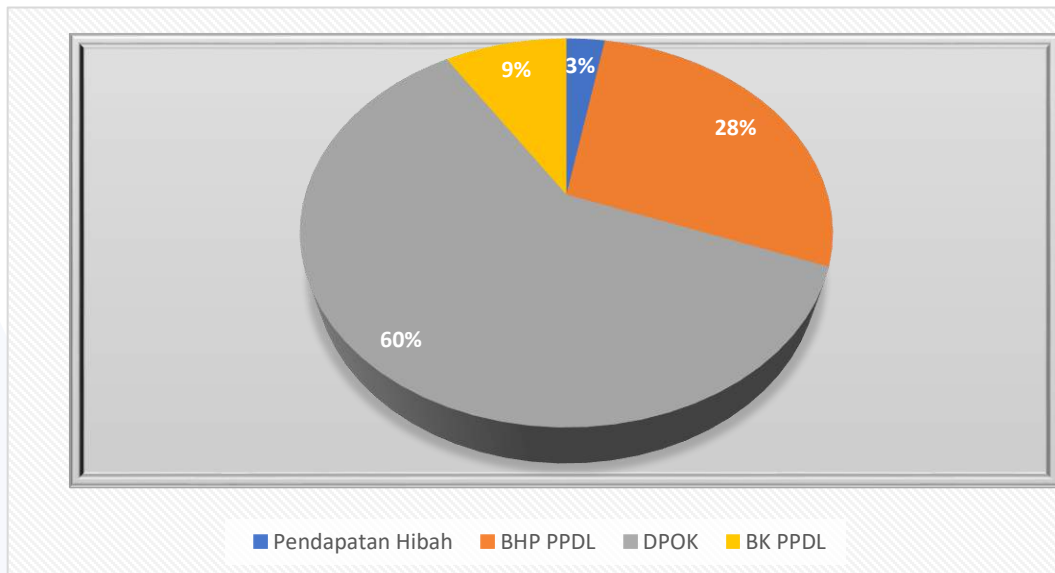


Sebaliknya pada komponen DAK, meskipun kontribusinya dalam lima tahun masih lebih kecil dari komponen DAU, tetapi kecenderungannya menunjukkan kinerja peningkatan peran yang semakin membaik. Meningkat dari hanya 7,24 persen pada tahun 2013 menjadi sebesar 37,11 persen pada tahun 2017. Peningkatan tajam tersebut terutama didorong oleh adanya tambahan alokasi komponen DAK yang selama periode ini meliputi empat komponen. Berupa DAK infrastruktur publik daerah, DAK non fisik, DAK penugasan, serta adanya DAK tambahan. Secara berturut-turut Kabupaten Sidrap memperoleh alokasi DAK ini pada tahun 2016 dan 2017.

Sumber pendapatan daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPD yang Sah) yang selama periode lima tahun terakhir memberi kontribusi sebesar 14,99 persen menunjukkan kinerja keuangan daerah yang fluktuatif dan cenderung bersifat insidental dan tidak permanen dalam menjamin kepastian pendapatan daerah dalam jangka panjang. Berikut gambaran kontribusi empat komponen LLPD yang Sah Kabupaten Sidrap selama periode 2013-2017, seperti gambar berikut ini.



Gambar 3.7.
Kontribusi Komponen LLPD yang Sah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (persen)



Sumber: Buku APBD dan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap, series.

Ketergantungan LLPD yang Sah terhadap dana penyesuaian dan otonomi khusus (DPOK) masih sangat besar. Selama lima tahun berkontribusi sebesar 60 persen, meskipun kecenderungannya menurun dari 62,49 persen pada tahun 2013 menjadi hanya 60,60 persen pada tahun 2017. Kontributor LLPD yang Sah terbesar kedua adalah bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya (BHP PPDL) sebesar 28 persen selama lima tahun, bahkan cenderung meningkat selama periode ini. Meningkat dari hanya 20,96 persen pada tahun 2013 menjadi sebesar 33,42 persen pada tahun 2017.

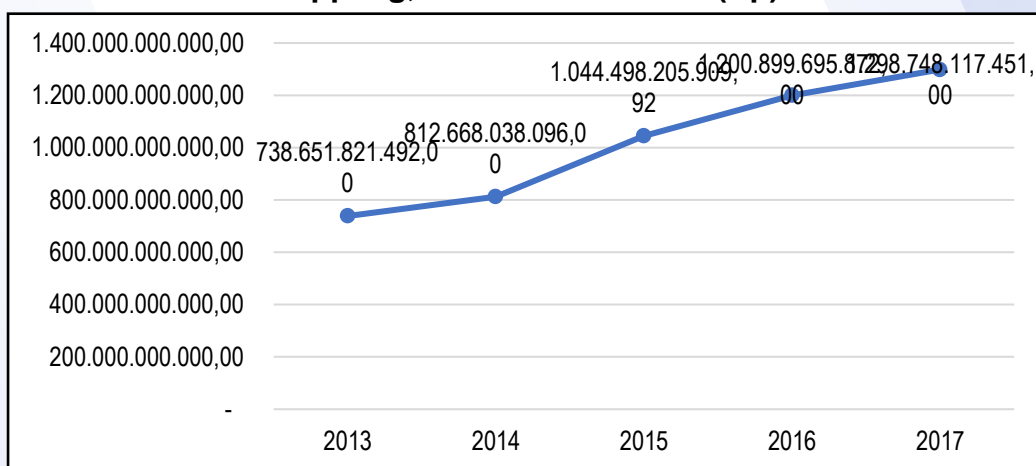
Dua komponen yang lain hanya menunjukkan kontribusi yang kecil. Komponen bantuan keuangan provinsi dan pemerintah daerah lainnya (BK PPDL) selama lima tahun hanya berkontribusi sebesar 9 persen, sedangkan dari pendapatan hibah hanya sebesar 3 persen dari total LLPD yang Sah. Bahkan BK PPDL perannya menurun dari 16,41 persen pada tahun 2013 menjadi hanya 4,32 persen pada tahun 2017.



3.1.3. Kinerja Belanja Daerah

Secara umum belanja daerah terdiri dari atas belanja tidak langsung dan langsung dalam tabel 3.2 dijelaskan bahwa presentase rata rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 15,42 persen. Dengan kapasitas fiskal yang dimiliki, realisasi anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013-2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari Rp 738.651.821.492 pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 1.298.748.117.451 pada tahun 2017, seperti disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 3.8.
Perkembangan Nilai Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013 – 2017 (Rp)



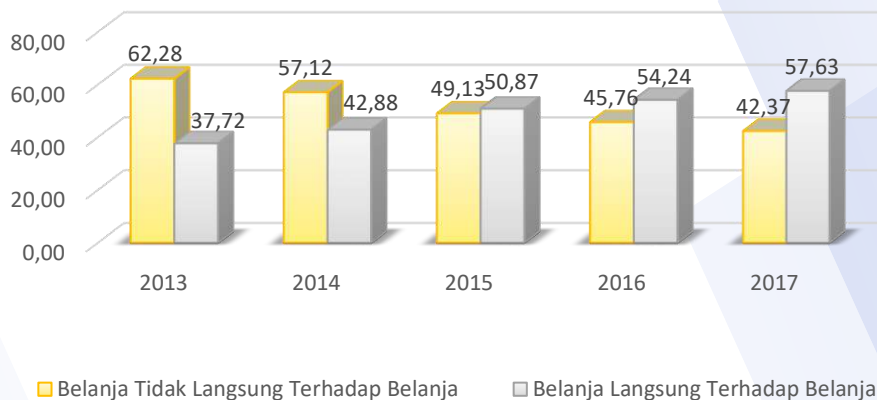
Sumber: Buku APBD dan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap, series.

Perkembangan penggunaan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan angka fluktuatif yakni pada tahun 2013 dan 2014 penggunaan terbesar dari belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat pada belanja tidak langsung yaitu sebesar 62,28 persen pada tahun 2013 dan 57,12 persen pada tahun 2014, namun mengalami perubahan tren pada tahun 2015 sampai dengan 2017. Penggunaan terbesar dari belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat pada belanja langsung yaitu sebesar 50,87 persen pada tahun 2015, meningkat



menjadi 54.24 persen pada tahun 2016, dan menjadi 57.63 persen pada tahun 2017. Selengkapnya diilustrasikan pada grafik berikut ini.

Gambar 3.9.
Proporsi Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (persen)



Sumber: Buku APBD dan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap, series.

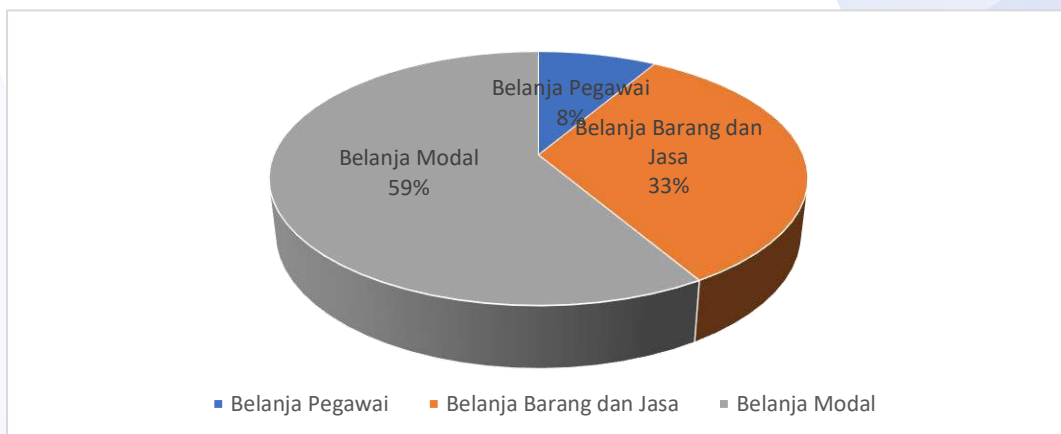
Secara keseluruhan dalam lima tahun anggaran, tahun 2013-2017, belanja daerah yang teralokasi ke belanja langsung lebih besar daripada alokasi belanja tidak langsung. Selama lima tahun tersebut alokasi belanja langsung mencapai 50,21 persen, selebihnya alokasi belanja tidak langsung sebesar 49,79 persen dari total Rp 5,095 triliun belanja daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Alokasi belanja langsung yang semakin meningkat ini tergambar pada perubahan proporsi setiap tahunnya. Alokasi belanja tidak langsung menunjukkan penurunan dari sebesar 62,28 persen pada tahun 2013 menurun menjadi hanya 42,37 persen pada tahun 2017. Sebaliknya, alokasi belanja langsung meningkat dari hanya 37,72 persen pada tahun 2013 menjadi sebesar 57,63 persen pada tahun 2017.

Fakta ini mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap pemenuhan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah untuk menjamin terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja langsung menjadi fokus pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat



secara langsung dari setiap keuangan daerah yang dibelanjakan pemerintah daerah. Hal ini semakin dipertegas dengan proporsi alokasi belanja langsung tersebut yang lebih dominan ditujukan untuk alokasi belanja modal. Seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Gambar 3.10.
Proporsi Alokasi Belanja Langsung Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (persen)



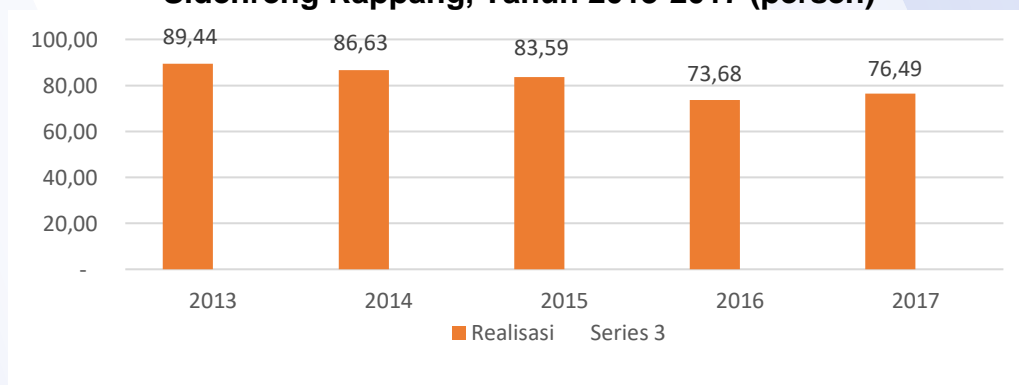
Sumber: Buku APBD dan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap, series.

Alokasi belanja modal daerah mencapai 59 persen, jauh melampaui alokasi belanja barang dan jasa yang hanya 33 persen dan alokasi belanja pegawai yang hanya 8 persen dari total Rp 2,56 triliun alokasi belanja langsung selama lima tahun implementasi APBD Kabupaten Sidenreng Rappang. Upaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan pembangunan daerah ini tergambar pada kecenderungan meningkatnya proporsi alokasi belanja modal, dan sebaliknya menurunnya alokasi belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa. Alokasi belanja modal meningkat dari hanya 45,60 persen pada tahun 2013 menjadi sebesar 58,08 persen pada tahun 2017. Sebaliknya, alokasi belanja pegawai untuk alokasi belanja langsung ini menurun dari 11,91 persen pada tahun 2013 menjadi hanya sebesar 6,09 persen pada tahun 2017. Kinerja yang sama terjadi pada alokasi belanja barang dan jasa, menurun dari 42,49 persen pada tahun 2013 menjadi hanya 35,83 persen pada tahun 2017.



Secara keseluruhan alokasi belanja daerah ini memberikan gambaran tentang tingkat serapan anggaran daerah. Capaian kinerja realisasi belanja daerah selama periode tahun 2013-2017 yang meningkat dari hanya Rp 738,65 milyar pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 1,3 trilyun pada tahun 2017, meskipun menggambarkan peningkatan belanja daerah yang cukup tajam dalam lima tahun terakhir, tetapi faktanya menunjukkan kecenderungan serapan anggaran yang menurun setiap tahunnya. Secara umum digambarkan pada grafik berikut ini.

Gambar 3.11.
Tingkat Realisasi Serapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (persen)



Sumber: Buku APBD dan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap, series.

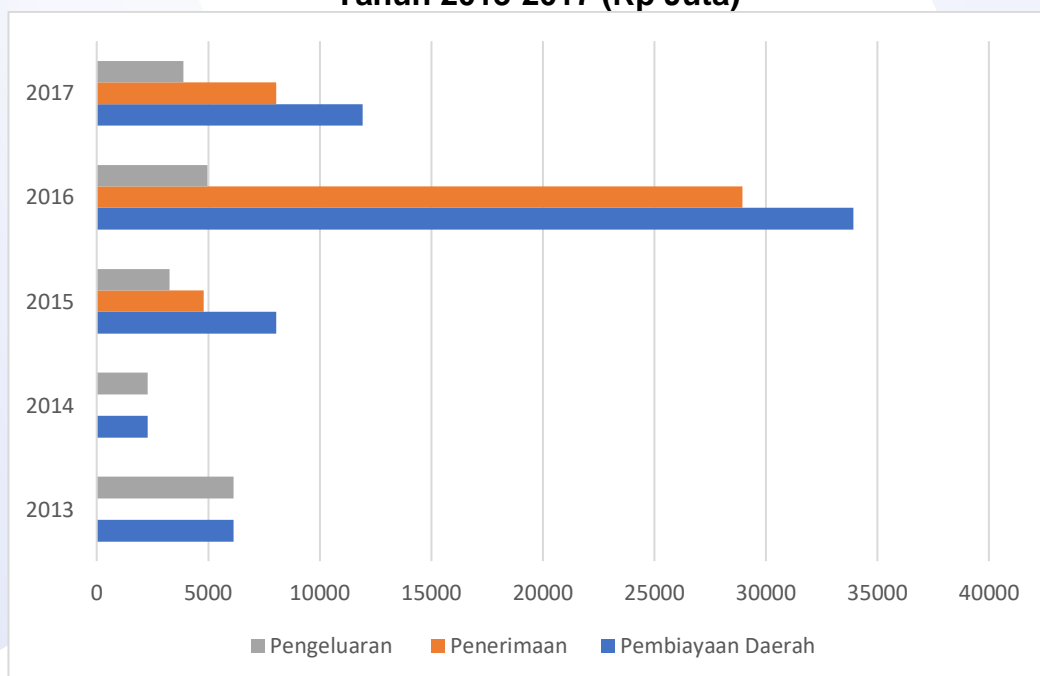
Tingkat realisasi serapan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan selama periode 2013-2016, dan kembali meningkat pada tahun 2017. Menurun dari serapan belanja daerah sebesar 89,44 persen pada tahun 2013 menjadi hanya 73,68 persen pada tahun 2017. Kembali meningkat, meskipun tidak mengalami peningkatan tajam pada tahun 2017, yakni hanya sebesar 76,49 persen. Tingkat serapan belanja daerah ini terutama dipengaruhi adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan penyerapan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat. Selain itu, realisasi belanja daerah juga terkendala kemampuan kinerja realisasi pendapatan daerah yang berlangsung sangat dinamis sepanjang tahun, terutama pada obyek-obyek pendapatan daerah yang tidak bersifat permanen dan cenderung bersifat insidental.



3.1.4. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan daerah, terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang daerah. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan daerah terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemeberian Pinjaman Daerah. Selama periode 2013-2017, pembiayaan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berfluktuasi setiap tahunnya, seperti nampak pada ilustrasi grafik berikut ini.

Gambar 3.12.
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2013-2017 (Rp Juta)



Sumber: Buku APBD dan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap, series.



Pembiayaan daerah terbesar direalisasikan pada tahun 2016, mencapai lebih dari Rp 33,9 milyar. Kebijakan pembiayaan defisit ditempuh daerah selama periode 2015-2017, setelah sebelumnya selama dua tahun berturut-turut tahun 2013-2014 menempuh kebijakan pembiayaan surplus. Kebijakan pembiayaan defisit selama periode 2015-2017 semuanya mengandalkan sumber penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sedangkan untuk alokasi pengeluaran pembiayaan lebih dominan ditujukan untuk pembayaran pokok utang dan penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah. Total investasi pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal selama tiga tahun tersebut mencapai lebih dari Rp 5,3 milyar selama periode 2015-2017. Lebih dari Rp 6,8 milyar alokasi pengeluaran lainnya ditujukan untuk pembayaran pokok utang.

3.1.5. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap elemen utama Neraca Pemerintah Daerah diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya



ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana. Secara keseluruhan unsur-unsur yang dicakup dalam neraca daerah dan perkembangan nilai seluruh komponen-komponennya di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2013-2017, digambarkan dalam tabel berikut ini.





Tabel 3.2.
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013 (audit)	2014 (audit)	2015 (audit)	2016(audit)	2017 (an audit)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
A	ASET						
1	ASET LANCAR	7,599,385,387.34	16,455,049,765.69	43,329,053,992.65	33,872,864,422.67	39,851,338,740.45	68.92
	Kas	1,382,655,108.48	7,070,876,852.69	29,500,353,787.43	8,520,218,334.35	14,498,692,652.13	181.91
	Investasi jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
	Piutang	808,274,143.00	3,138,362,583.00	5,094,945,748.00	6,991,305,001.00	6,991,305,001.00	96.96
	Piutang Lain-lain	1,190,592,783.50	963,397,747.50	1,880,683,784.50	8,836,342,128.50	8,836,342,128.50	111.49
	Persediaan	5,303,843,140.86	6,630,598,634.00	9,020,860,040.00	12,606,362,170.00	12,606,362,170.00	25.20
	Penyisihan Piutang tak Tertagih	(1,085,979,788.50)	(1,348,186,051.50)	(2,167,789,367.28)	(3,081,363,211.18)	(3,081,363,211.18)	31.77
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	34,355,578,001.72	33,455,536,380.72	32,497,573,997.72	34,214,182,198.72	34,214,182,198.72	(0.05)
	Investasi Non Permanen	-	5,001,376,988.00	4,753,361,301.00	4,656,581,370.00	4,656,581,370.00	(1.75)
	Investasi Permanen	34,355,578,001.72	33,455,536,380.72	32,497,573,997.72	34,214,182,198.72	34,214,182,198.72	0.60
	Penyisihan Dana Bergulir tidak dapat ditagih	-	(5,001,376,988.00)	(4,753,361,301.00)	(4,656,581,370.00)	(4,656,581,370.00)	(1.75)
3	ASET TETAP	2,235,586,939,486.00	2,188,390,507,434.99	1,840,889,906,422.24	2,371,836,715,629.69	2,806,472,577,270.69	7.82
	Tanah	403,348,077,330.00	407,887,624,335.00	420,635,697,612.21	709,860,648,443.02	715,143,632,443.02	18.16
	Peralatan dan Mesin	208,937,521,250.00	237,803,611,689.54	203,126,767,819.96	242,500,541,477.96	263,073,426,350.96	3.32
	Gedung dan Bangunan	527,853,793,061.00	558,105,024,952.00	630,715,611,448.49	716,045,271,508.13	787,055,263,496.13	9.11
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,076,485,652,568.00	827,928,604,909.60	1,106,994,266,602.44	1,473,423,482,887.53	1,809,051,620,618.53	22.40
	Aset Tetap Lainnya	11,513,440,579.00	19,219,900,628.00	90,301,116,612.90	32,188,675,756.26	34,330,538,805.26	78.03
	Konstruksi dalam Pengerjaan	7,448,454,698.00	137,445,740,920.85	91,554,608,581.24	60,193,238,571.50	60,193,238,571.50	(16.91)





No	Uraian	2013 (audit)	2014 (audit)	2015 (audit)	2016(audit)	2017 (an audit)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	(702,438,162,255.00)	(862,375,143,014.71)	(862,375,143,014.71)	5.69
4	DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
5	ASET LAINNYA	-	23,221,737,056.46	28,791,339,901.00	66,542,565,768.33	66,542,565,768.33	38.78
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-	-
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
	Aset Tak Berwujud	-	183,250,000.00	260,250,000.00	794,641,000.00	794,641,000.00	61.84
	Aset Lain-lain	-	23,038,487,056.46	28,599,014,901.00	65,848,970,135.00	65,848,970,135.00	38.60
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	(67,925,000.00)	(101,045,366.67)	(101,045,366.67)	12.19
	JUMLAH ASET	2,277,541,902,875.06	2,261,522,830,637.86	1,945,507,874,313.61	2,506,466,328,019.41	2,947,080,663,978.19	11.60
B	KEWAJIBAN	81,974,245,251.60	101,458,123,323.33	158,236,416,760.48	353,509,047,580.48	353,600,179,357.48	30.86
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	48,994,501,686.00	70,752,466,261.33	129,804,846,202.08	327,351,563,525.68	327,442,695,302.68	38.05
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	51,481,016.00	6,402,193.00	20,806,088.00	19,122,191.00	110,253,968.00	117.12
	Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
	Utang Pajak	-	-	-	-	-	-
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	3,344,841,503.60	3,422,341,500.93	3,422,341,503.60	3,422,341,503.60	3,422,341,503.60	0.58





No	Uraian	2013 (audit)	2014 (audit)	2015 (audit)	2016(audit)	2017 (an audit)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	587,436,064.67	416,709,319.17	416,709,319.17	(7.27)
	Utang Jangka Pendek Lainnya	45,598,179,166.40	67,323,722,567.40	115,297,533,499.81	251,491,310,351.21	251,491,310,351.21	29.53
	Utang Beban			10,476,729,046.00	72,002,080,160.70	72,002,080,160.70	146.81
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	32,979,743,565.60	30,705,657,062.00	28,431,570,558.40	26,157,484,054.80	26,157,484,054.80	(2.00)
	Utang Dalam Negeri	32,979,743,565.60	30,705,657,062.00	28,431,570,558.40	26,157,484,054.80	26,157,484,054.80	(3.85)
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-				-
C	EKUITAS DANA	2,195,567,657,623.46	2,160,064,707,314.53	1,787,271,457,553.13	2,152,957,280,438.93	2,593,480,484,620.71	5.92
1	Ekuitas Dana Lancar	(41,395,116,298.66)	(54,297,416,495.64)	(86,475,792,210.43)	(287,505,813,846.70)	(276,906,492,152.92)	72.01
	Sisa lebih Perhitungan Anggaran	1,125,011,346.48	6,600,186,005.69	29,479,247,699.43	8,501,096,143.35	19,100,417,837.13	100.04
	Cadangan Piutang	912,887,138.00	2,753,574,279.00	4,807,840,165.22	12,746,283,918.32	12,746,283,918.32	59.93
	Cadangan Persediaan	5,303,843,140.86	6,630,598,634.00	9,020,860,040.00	12,606,362,170.00	12,606,362,170.00	18.95
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka pendek	(48,943,020,670.00)	(70,746,064,068.33)	(129,784,040,115.08)	(321,359,556,078.37)	(321,359,556,078.37)	57.77
	Pendapatan Piutang yang Ditanggungkan	206,162,746.00	464,288,654.00	300,000.00	-	-	(49.98)
2	Ekuitas Dana Investasi	2,236,962,773,922.12	2,214,362,123,810.17	1,873,747,249,763.56	2,440,156,959,548.63	2,874,792,821,189.63	3.71
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	34,355,578,001.72	33,455,536,380.72	32,497,573,997.72	48,486,709,940.87	48,486,709,940.87	11.58
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2,235,586,939,486.00	2,188,390,507,434.99	1,840,889,906,423.24	2,358,461,201,589.50	2,793,097,063,230.50	3.06
	Dininvestasikan dalam Aset Lainnya	-	23,221,737,056.46	28,791,339,901.00	66,302,681,031.33	66,302,681,031.33	38.57





No	Uraian	2013 (audit)	2014 (audit)	2015 (audit)	2016(audit)	2017 (an audit)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(32,979,743,565.60)	(30,705,657,062.00)	(28,431,570,558.40)	(33,093,633,013.07)	(33,093,633,013.07)	2.25
3	Ekuitas Dana Cadangan	-	-	-	306,134,737.00	306,134,737.00	-
	Diiinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	306,134,737.00	306,134,737.00	0
4	Koreksi Ekuitas	-	-	-	-	(4,711,979,153.00)	-
	Koreksi Ekuitas	-	-	-	-	(4,711,979,153.00)	0
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2,277,541,902,875.06	2,261,522,830,637.86	1,945,507,874,313.61	2,506,466,328,019.41	2,947,080,663,978.19	3.71

Sumber: BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017, diolah





3.1.5.1. Aset Daerah

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam lima komponen, yang terdiri dari; i) aset lancar, ii) investasi jangka panjang, iii) aset tetap, iv) dana cadangan dan v) aset lainnya. Hingga pada tahun 2017, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki aset senilai Rp 2,947 Triliun lebih dengan nilai aset terbesar berasal dari aset tetap sebesar Rp 2,806 Triliun lebih dengan rata-rata pertumbuhan Aset Kabupaten Sidenreng Rappang untuk kurun waktu tahun 2013-2017 sekitar 11,60 persen, hal ini diakibatkan dari tahun 2013-2015 mengalami penurunan dan pada tahun 2016 dan 2017 kondisi Aset Kabupaten Sidenreng Rappang memperlihatkan pertumbuhan yang positif dan pada tahun 2017 juga Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3.1.5.2. Kewajiban Daerah

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena peningkatan pegawai yang bekerja pada pemerintahan atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat



dipaksakan menurut hukum atau sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban di kelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan sejak tanggal pelaporan, kewajiban yang penyelesaiannya baru wajib dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Pada Tahun 2017, total kewajiban dalam neraca daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp 353 Milyar lebih dengan rincian kewajiban jangka pendek Rp 327 Milyar lebih dan kewajiban jangka panjang Rp 26 Milyar lebih. Dengan rata-rata pertumbuhan kewajiban lima tahun terakhir sebesar 38,05 persen.

3.1.5.3. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Ekuitas Dana lancar, yaitu selisih antara asset lancar dan dana cadangan atas kewajiban jangka pendek.
- b. Ekuitas Dana Investasi, yaitu selisih antara asset nonlancar dan dana cadangan atas kewajiban jangka panjang.
- c. Ekuitas Dana Cadangan, yaitu dana yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Nilai Ekuitas Dana Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai Rp 2,593 Triliyun lebih pada tahun 2017. Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu 2013-2017 mengalami trend pertumbuhan rata-rata 5,92 persen setiap tahunnya. Ekuitas dana lancar rata-rata bertumbuh 72,01 persen, ekuitas dana investasi bertumbuh rata-rata 3,71 persen, sedangkan ekuitas dana lainnya rata-rata pertumbuhannya tidak terdefiniskan.



3.1.5.4. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang digunakan yaitu rasio cair (Quick Ratio). Rasio Cair dihitung dengan mengurangi persediaan dari aset lancar, dan hasilnya dibagi dengan hutang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri dari kas di kas daerah, kas di pemegang kas bagian lancar tagihan penjualan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar TPTGR, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Secara umum angka di atas 100% menunjukkan hasil yang baik, artinya Pemerintah Daerah dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar non persediaan yang ada. Sementara itu angka di bawah 100 persen menunjukkan hasil yang kurang baik.

Dari tabel 3.4 menggambarkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2017. Secara keseluruhan kinerja keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang berada berada di bawah 100 persen sehingga masih dalam kategori masih kurang baik.

Sementara Rasio cair (*quick ratio*) lebih akurat dibanding rasio lancar (*current rasio*) karena mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Namun berdasarkan perhitungan quick ratio pada tabel 3.3. menunjukkan bahwa capaian rasio tertinggi berada pada tahun 2015 sebesar 26,43 persen, sementara pada tahun 2017 kembali menurun dengan nilai 6,50 persen dan kembali meningkat sebesar 8,32 persen. Hal ini menggambarkan kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang setelah dikurangi persediaan mempunyai kemampuan keuangan yang masih sangat rendah sehingga sangat sulit untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya (utang lancar).



Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Analisis Rasio Keuangan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

No	URAIAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
A.	Rasio Likuiditas					
1	Rasio Lancar	15.51	23.26	33.38	10.35	12.17
2	Rasio Quick (Quick Ratio)	4.69	13.89	26.43	6.50	8.32
B.	Rasio Solvabilitas					
1	Rasio Total Hutang Terhadap Aset	3.60	4.49	8.13	14.10	12.00
2	Rasio Total Hutang Terhadap Ekuitas/Modal	3.73	4.70	8.85	16.42	13.63
C	Rasio Aktivitas					
1	Rata-rata Umur Piutang (hari)		1	1	2	2
2	Rata-rata Umur Persediaan (hari)		3	3	3	4

Sumber: BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017, diolah

3.1.5.5. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio yang digunakan yaitu: (1) Rasio Hutang Terhadap Aset (Debt Ratio); dan (2) Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset. Rasio hutang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Kewajiban tersebut terdiri dari Hutang pada pihak ketiga, Hutang Luar Negeri, Hutang pada Pemerintah Pusat dan Hutang Bunga. Analisis ini bertujuan mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/donatur/pihak ketiga dalam membiayai pembangunan. Berdasarkan perhitungan rasio solvabilitas pada tabel 3.3. diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset pada tahun 2013-2017 rata-rata 8,46 persen dan masih berada pada kategori rendah karena masih di bawah 100 persen.



Sementara Rasio ekuitas dana terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dana dengan total Aset yang dikuasai Pemerintah. Ekuitas dana tersebut terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan dan Ekuitas Dana Cadangan. Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio hutang terhadap total Aset, sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri dalam membiayai pembangunan. Dari tabel 3.4 diperoleh perhitungan rasio total kewajiban terhadap ekuitas selama kurun waktu lima tahun (2013-2017) rata-rata masih di bawah 100 persen.

Hasil perhitungan rasio ekuitas dana terhadap aset pada kurun waktu tahun 2013 - 2017 juga menunjukkan besaran nilai yang seluruhnya berada jauh di bawah 100 persen. Angka ini menunjukkan kinerja keuangan yang baik karena mengindikasikan besarnya kemampuan daerah untuk membayar hutang dari aset yang cukup tinggi.

3.1.5.6. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio aktivitas daerah terdiri dari, rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Rata-rata umur piutang adalah rasio untuk berapa lama (hari) yang dibutuhkan merubah piutang menjadi kas. Dari tabel 3.3. di atas menunjukkan bahwa rata-rata umur piutang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam satu tahun dibutuhkan waktu merubah dari piutang menjadi kas rata-rata 1 (satu) hari selama periode 2013-2017. Begitupun rata-rata umur persediaan yang merupakan rasio untuk menghitung berapa lama dana tertanam menggunakan persediaan memberikan waktu pelayanan publik rata-rata selama tiga hari.



3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berdasarkan pada anggaran kinerja (*performance budget*), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Kebijakan pengelolaan anggaran daerah untuk alokasi pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2014-2017, ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2017

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Presentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	2015	675,305,474,541.14	1,047,772,292,408.92	64
2	2016	748,482,617,569.00	1,205,875,026,715.00	62
3	2017	728,128,940,173.00	1,302,624,203,949.00	56

Sumber: BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah

Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur nampak masih cukup besar, tetapi menunjukkan kecenderungan penurunan setiap tahunnya. Menurun dari alokasi anggaran sebesar 87 persen tahun 2014 menjadi hanya 56 persen dari total alokasi belanja daerah dan pembiayaan pengeluaran daerah pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Sidenreng Rappang belum cukup



ideal, tetapi menunjukkan kecenderungan proporsi penggunaan anggaran yang semakin membaik, ke arah alokasi belanja aparatur yang tidak mendominasi alokasi belanja daerah dalam APBD.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Sejatinya pembiayaan daerah dalam struktur APBD merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah pada tahun berkenaan. Dalam konteks tersebut, pembiayaan daerah bisa surplus atau bisa defisit. Surplus pada saat pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, sebaliknya akan defisit bila pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah. Artinya, bila keuangan daerah mencapai surplus maka pembiayaan akan berupa pengeluaran pembiayaan. Surplus keuangan tersebut dialokasikan untuk pengeluaran apa saja?, dan sebaliknya bila defisit maka pemerintah daerah harus mencari sumber-sumber penerimaan daerah untuk menutupi defisit tersebut, baik dari dalam maupun dari luar daerah itu sendiri. Bahkan bila diperlukan pemerintah daerah harus dapat mengakses sumber penerimaan untuk pembiayaan daerah dari luar negeri.

Hanya dalam prakteknya, komponen pembiayaan melingkupi dua sisi, yakni sisi penerimaan dan sisi pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, baik ketika terjadi surplus maupun ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan ketika anggaran mengalami defisit, dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman, obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan asset yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal atau penyertaan modal dan transfer ke dana cadangan atau bahkan bila diminta dapat dialokasikan kepada piutang untuk daerah lain yang membutuhkan. Dalam konteks analisis pembiayaan ini, analisis akan difokuskan pada tiga aspek dalam analisis pembiayaan, yakni analisis



defisit riil anggaran, komposisi penutup defisit riil, dan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).

3.2.3. Defisit Riil Anggaran

Struktur APBD Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2015-2017, menggambarkan komposisi defisit dan surplus anggaran. Realisasi pendapatan daerah yang lebih besar daripada realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah ditunjukkan pada 2015 dan 2017. Sedangkan tahun 2016 menggambarkan keadaan yang sebaliknya, realisasi pendapatan daerah lebih kecil bila dibandingkan alokasi belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Artinya, surplus anggaran dicapai pada tahun 2015 dan 2017, sehingga dalam struktur pembiayaan daerah harus dapat tergambar alokasi pengeluaran pembiayaan yang tepat agar surplus tersebut tetap bermanfaat untuk kepentingan kemajuan dan pembangunan daerah. Sementara pada tahun 2016, anggaran mengalami defisit sehingga Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang harus mencari sumber-sumber penerimaan daerah untuk menutup besaran defisit anggaran tersebut. Selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5.
Surplus atau Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	2	3	4	5
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,064,876,798,940.66	1,184,966,741,717.92	1,305,178,148,774.43
	Dikurangi Realisasi:			
2	Belanja Daerah	1,044,498,205,909.92	1,200,899,695,872.00	1,298,748,117,451.00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3,274,086,499.00	4,975,330,843.00	3,876,086,498.00
	Surplus/Defisit Riil	17,104,506,531.74	(20,908,284,997.08)	2,553,944,825.43

Sumber: BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah

Pada tahun 2015 dan 2017, APBD Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai surplus anggaran, dimana realisasi pendapatan



daerah tercatat lebih besar daripada realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Tahun 2015 mencatat surplus sebesar Rp 17,1 milyar dan menurun menjadi hanya Rp 2,5 milyar pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2016, APBD mengalami defisit anggaran sebesar lebih dari Rp 20,9 milyar. Mencermati surplus/defisit pembiayaan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam periode tiga tahun tersebut, nampaknya faktor utama yang mendorong pencapaian surplus atau mengalami defisit terletak pada pertumbuhan kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) daerah. Pada dasarnya realisasi pendapatan daerah menggambarkan kinerja yang sangat baik, bertumbuh secara konsisten. Hanya saja, konsistensi pertumbuhan pendapatan daerah tidak dibarengi dengan konsistensi pertumbuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Hal ini berkaitan dengan analisis pada perencanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang semestinya memiliki arahan capaian yang jelas, konsisten dan berkelanjutan dari tahun ke tahun.

3.2.4. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Secara umum kemampuan pemerintah daerah dalam menutup defisit riil masih tergolong sangat terbatas. Hal ini tergambar pada kenyataan bahwa pembiayaan daerah masih bertumpuh pada SiLPA. Belum ada kreativitas daerah dalam mendesain pembiayaan yang tepat untuk orientasi kebijakan pembangunan daerah yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk menutup defisit riil diilustrasikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.6.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2015-2017

No	URAIAN	Proporsi dari Total Surplus/Defisit Riil (%)		
		2015	2016	2017
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	0.00	100	0.00
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	100	0.00	100

Sumber: BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang, diolah

SiLPA tahun sebelumnya akan menjadi sumber penerimaan utama dari kebijakan penganggaran yang mengalami defisit. Sebaliknya, SiLPA tahun berkenaan akan menjadi komponen pengeluaran pembiayaan yang utama bagi penganggaran surplus.

3.2.5. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Komponen-komponen pembentuk SiLPA berasal dari dua sisi, sisi pendapatan dan penerimaan daerah, serta sisi belanja dan pengeluaran daerah. Pada sisi pendapatan dan penerimaan daerah, faktor penentu SiLPA antara lain berasal dari (1) pelampauan penerimaan PAD, (2) pelampauan penerimaan dana perimbangan, dan (3) pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiga faktor determinan SiLPA dari sisi pendapatan dan penerimaan daerah ini prinsipnya berupa pelampauan capaian terhadap target-target pendapatan dan penerimaan daerah. Hal ini bisa dicapai dari kebijakan pengelolaan



pendapatan daerah yang tepat, efisien dan efektif, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga pendapatan daerah mampu melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Sedangkan dari sisi belanja dan pengeluaran daerah, faktor determinan SiLPA antara lain berasal dari (1) sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, (2) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun tidak terselesaikan, dan (3) kegiatan lanjutan (*multi years*). Komponen pembentuk SiLPA dari sisi belanja dan pengeluaran daerah, mencakup tiga aspek yang berbeda. Pertama, terkait dengan kemampuan pengelolaan belanja daerah yang efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga mampu mencapai target-target indikator pembangunan daerah tanpa alokasi belanja dan pengeluaran daerah yang besar. Kedua, kewajiban daerah yang tertunda sehingga masih dapat dipergunakan untuk tahun selanjutnya, misalnya penjadwalan ulang pembayaran utang. Ketiga, perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat *multi years*, harus diselesaikan dan berlanjut pada tahun berikutnya.

Secara keseluruhan gambaran perolehan SiLPA Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2015-2017 menunjukkan bahwa komponen pembentuk SiLPA selama periode tersebut bersumber dari sisi belanja dan pengeluaran daerah. Sebagian besar diperoleh dari hasil penghematan belanja atau akibat lainnya, serta dari penundaan penyelesaian kewajiban daerah terhadap pihak ketiga. Selengkapnya diilustrasikan pada tabel berikut ini.



Tabel 3.7.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	2015		2016		2017	
		Rp	% Dari SiLPA	Rp	% Dari SiLPA	Rp	% Dari SiLPA
	Jumlah SiLPA	22,365,716,425.74	100.00	8,102,704,488.35	100.00	11,145,200,693.78	100.00
1	Pelampauan Penerimaan PAD	-		-		-	
2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-		-		-	
3	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	415,043,905.97	1.86	-		-	
4	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	205,021,845,090.08	9.17	429,007,001,128.00	52.95	399,073,232,549.00	35.81
5	Kewajiban kepada Pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	101,470,343,253.33	4.54	158,292,776,082.48	19.54	353,600,179,357.48	31.73
6	Kegiatan Lanjutan	-		-		-	

Sumber: BPKD Kabupaten Sidenreng Rappang, (diolah)





PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan Pembangunan Daerah
Analisis Isu Strategis

BAB 4



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam bab IV ini diuraikan permasalahan yang dihadapi dan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya untuk jangka waktu 2018-2023. Bahasan dalam bab IV ini tidak berdiri sendiri karena sangat erat kaitannya dengan gambaran umum kondisi daerah yang tersaji pada bab sebelumnya. Sebagaimana data-data tersebut, menunjukkan fakta bahwa masih adanya permasalahan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Terjadinya masalah diakibatkan karena adanya perbedaan atau kesenjangan yang terjadi antara cita-cita dan harapan. Capaian pembangunan yang telah dicapai dengan apa yang direncanakan dimasa lampau serta antara apa yang ingin dicapai di masa depan dengan kondisi saat ini. Kesenjangan (*gap*) itulah yang menjadi masalah untuk segera diselesaikan dan dicarikan solusi pemecahannya, setidaknya hingga akhir periode RPJMD yaitu tahun 2023.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah ini dibagi dalam dua kelompok yakni permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1 Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dalam kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah.



Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah.

Implementasi dari permasalahan adalah jika rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan. Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan, maka diidentifikasi sejumlah permasalahan pokok Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

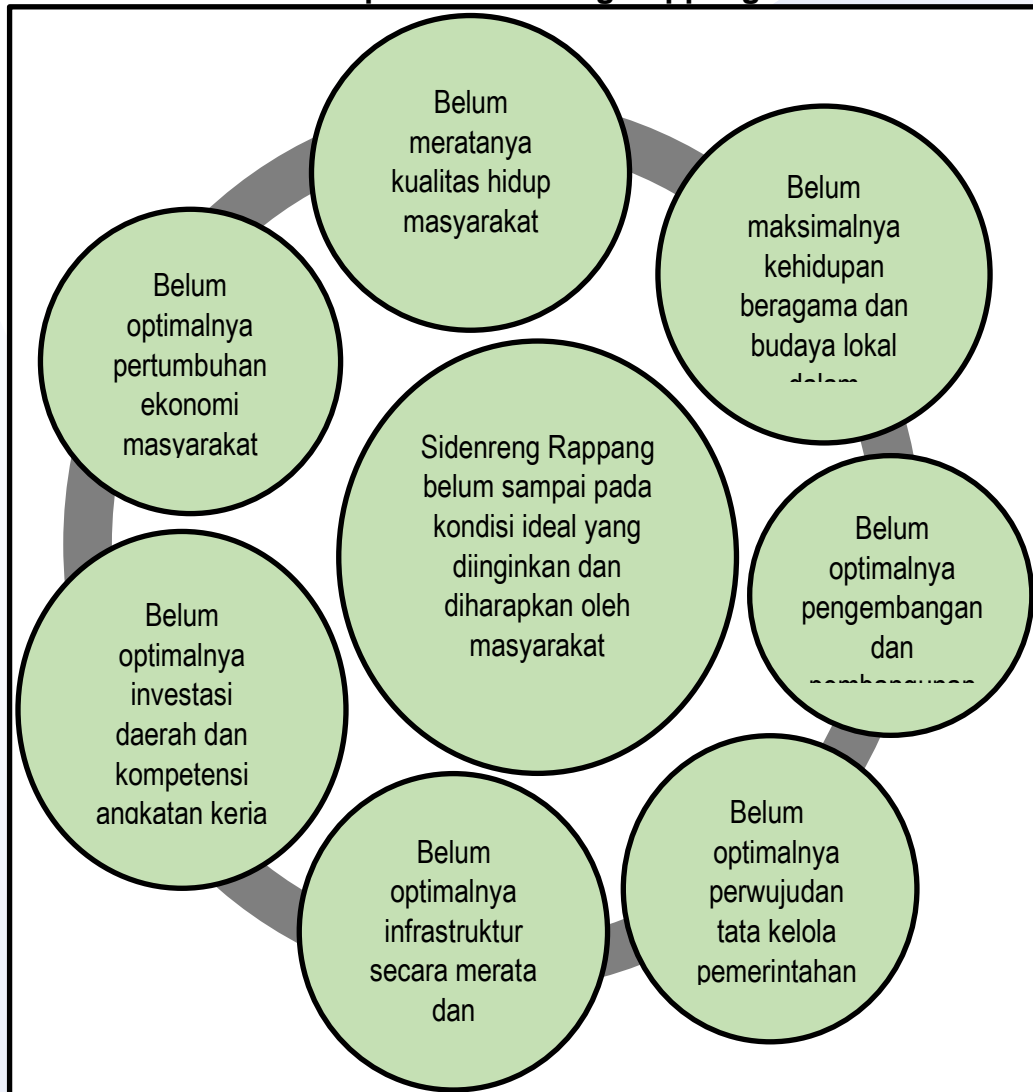
- a. Belum meratanya kualitas hidup masyarakat;
- b. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis pertanian serta usaha industri pengolahan hasil usaha pertanian;
- c. Belum optimalnya investasi daerah dan kompetensi angkatan kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Belum optimalnya infrastruktur secara merata dan pembangunan berwawasan lingkungan;
- e. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
- f. Belum optimalnya pengembangan dan pembangunan desa;
- g. Belum maksimalnya kehidupan beragama dan budaya lokal dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan religius.

Dengan ketujuh permasalahan pokok di atas, setiap hambatan-hambatan dalam mengembangkan potensi sumber daya harus diminimalisir dengan mengetahui permasalahan yang lebih spesifik (akar masalah) yang membebani pencapaian pembangunan daerah. Diharapkan rangkaian permasalahan tersebut akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan kedepan yang disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode sebelumnya beserta



kajian pembangunan nasional maupun regional. Berikut ini pemetaan permasalahan utama Kabupaten Sidenreng Rappang dalam merealisasikan terwujudnya visi pembangunan daerah.

Gambar 4.1
Mata Rantai Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber Data : Bappelitbangda tahun 2018

Penjelasan lebih lanjut atas permasalahan pokok pembangunan daerah tersebut di atas, dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan daerah dan akar permasalahannya, sebagai berikut :



4.1.1.1 Belum meratanya kualitas hidup masyarakat

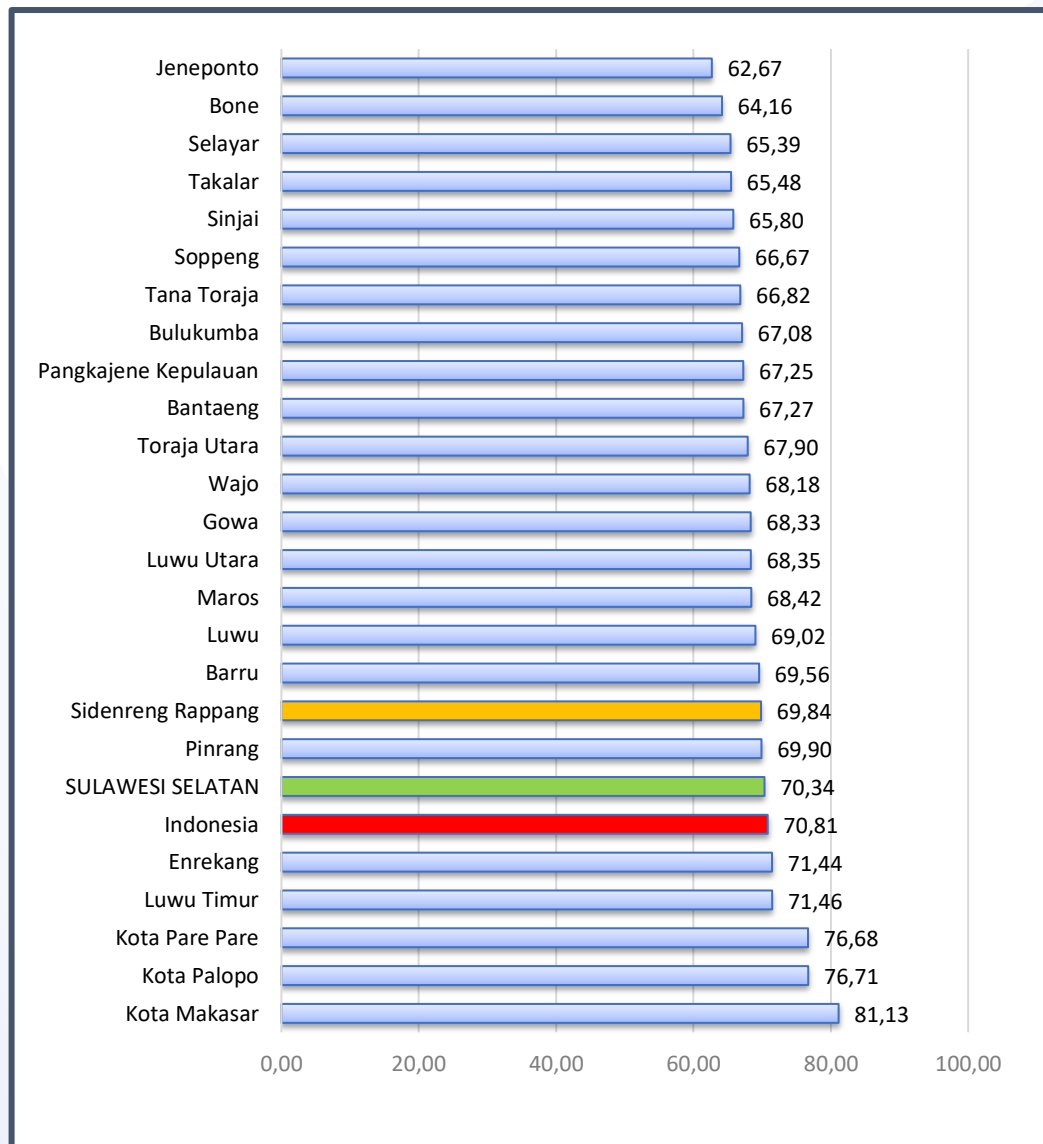
Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan daerah yang mempunyai topografi dengan keunikan dan keistimewaan yang berpotensi dalam mendukung pembangunan daerah yaitu posisi jalur strategis di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah tiga dimensi dapat dikembangkan dengan daya dukung sumber daya manusia unggul dan berkualitas. Ditunjang dengan penyediaan infrastruktur yang cukup memadai menjadi potensi yang harus dikembangkan agar Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi kabupaten yang tumbuh mandiri dan berkembang yang sejajar dengan daerah-daerah terkemuka di Indonesia.

Menindaklanjuti pernyataan di atas dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi kabupaten yang tumbuh mandiri dan berkembang yang sejajar dengan daerah terkemuka di Indonesia ini dimulai dengan pembangunan manusia sebagai subyek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu untuk meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada berbagai aspek kehidupan. Terkait dengan hal itu, kualitas hidup manusia memiliki hubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang berperan di berbagai sektor penting dalam meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat Sidenreng Rappang.

Jika dilihat dari indikator *impact* dalam melihat kualitas manusia yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka angka IPM Kabupaten Sidenreng Rappang masih berada peringkat ke-7 se-Provinsi Sulawesi Selatan dengan besaran 69,84. Angka IPM Sidenreng Rappang berada di bawah angka IPM tiga kabupaten/ kota disekitarnya yaitu Parepare (76,68), Enrekang (71,44) dan Pinrang (69,90), termasuk masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan (70,34) dan IPM Nasional (70,81). Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah mengingat angka IPM yang belum optimal pada cakupan provinsi.



Gambar 4.2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017



Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018

Berdasarkan bahasan di atas, permasalahan rendahnya daya saing dan kualitas manusia memiliki hubungan bahwa sumber daya manusia yang tidak berkualitas akan berdampak pada kualitas daya saing sumber daya manusia tersebut. Dari masalah pokok “belum maksimalnya kinerja pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang”, terdapat beberapa permasalahan yang memicu permasalahan pokok tersebut, antara lain:



4.1.1.2 Belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan strategis yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat. Dalam penentuan sasaran dan isu strategis dijabarkan jika belum terjaminnya semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif. Penjabaran isu tersebut adalah permasalahan pendidikan yang merupakan salah satu hak bagi seluruh masyarakat dan pelayanan pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dengan ini dapat dikatakan bahwa pendidikan yang berkualitas merupakan hasil dari kerjasama antara masyarakat dan Pemerintah Daerah (KLHS RPJMD Sidrap 2019-2023).

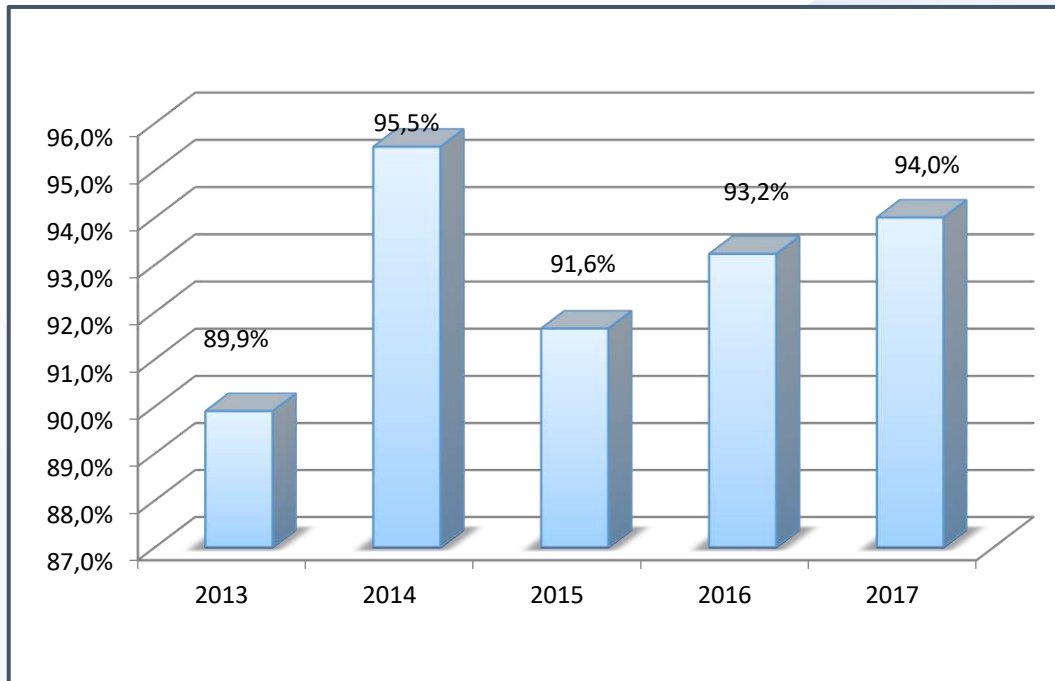
Di Kabupaten Sidenreng Rappang kualitas pendidikan masih relatif rendah, masih banyak yang perlu diperbaiki dalam mencapai pendidikan yang berkualitas yang diharapkan akan mencetak Sumber Daya Manusia daerah yang berdaya saing tinggi. Salah satu rangkaian dalam pelayanan pendidikan adalah mengenai sarana dan prasarana pendidikan sebagai pendukung dalam proses belajar mengajar. Melihat kondisi saat ini, sarana dan prasarana pendidikan masih belum merata tersedia pada seluruh sekolah. Hal ini mengakibatkan proses belajar mengajar menjadi tidak optimal.

Selain itu kualitas tenaga pendidik dan pendistribusian yang tepat merupakan salah satu hal penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kualitas manajemen pendidikan pada sekolah untuk mampu membentuk sistem pendidikan yang sesuai dan tepat dalam menerapkan pembelajaran pada siswa. Sehingga proses pendidikan yang berlangsung dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Spesifik pada elemen pengetahuan dan angka melek huruf menjadi salah satu indikator kunci dasar. Selain menjadi gambaran kasar terhadap akses pendidikan, indikator angka melek huruf



juga menjadi dasar bagi seseorang dalam meningkatkan kualitas hidupnya terkait pengembangan pembelajaran berkelanjutan dalam hal mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi, serta penggalian potensi.

Gambar 4.3
Angka Melek Huruf Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

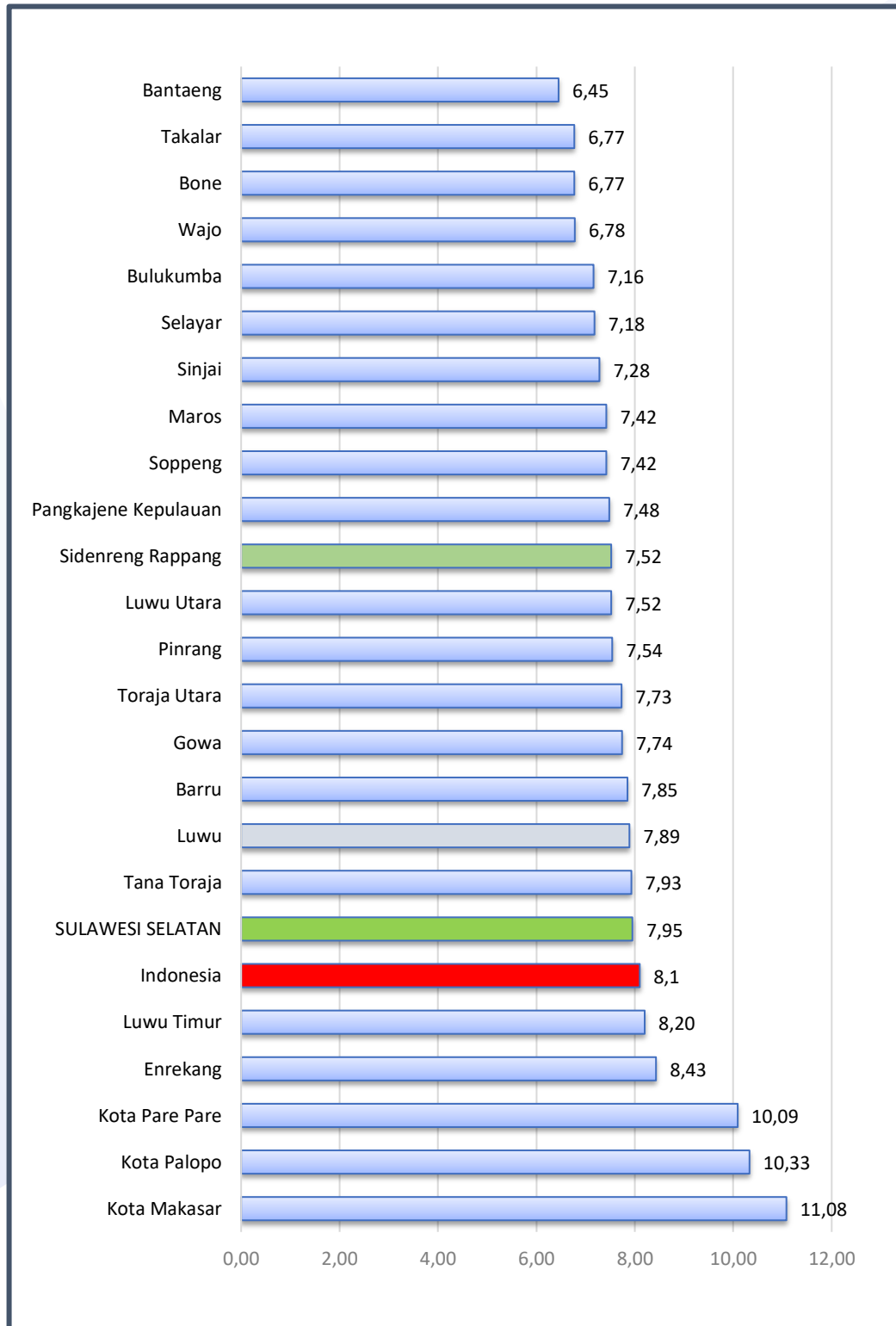


Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017

Angka melek huruf di Kabupaten Sidenreng Rappang cukup fluktuatif dimana pada tahun 2014 sempat mengalami puncak tertinggi angka melek huruf sebesar 95,5 persen. Namun pada tahun 2015 menurun tajam hingga 91,6 persen. Pada tahun 2017, angka melek huruf meningkat tetapi belum optimal di angka 94 persen. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Sidenreng Rappang selama 7,52 tahun. Hal ini mengindikasikan penduduk Sidenreng Rappang hanya mengenyam pendidikan selama 7-8 tahun atau menduduki kelas 2 (dua) SMP semester 1 (satu).



Gambar 4.4
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018



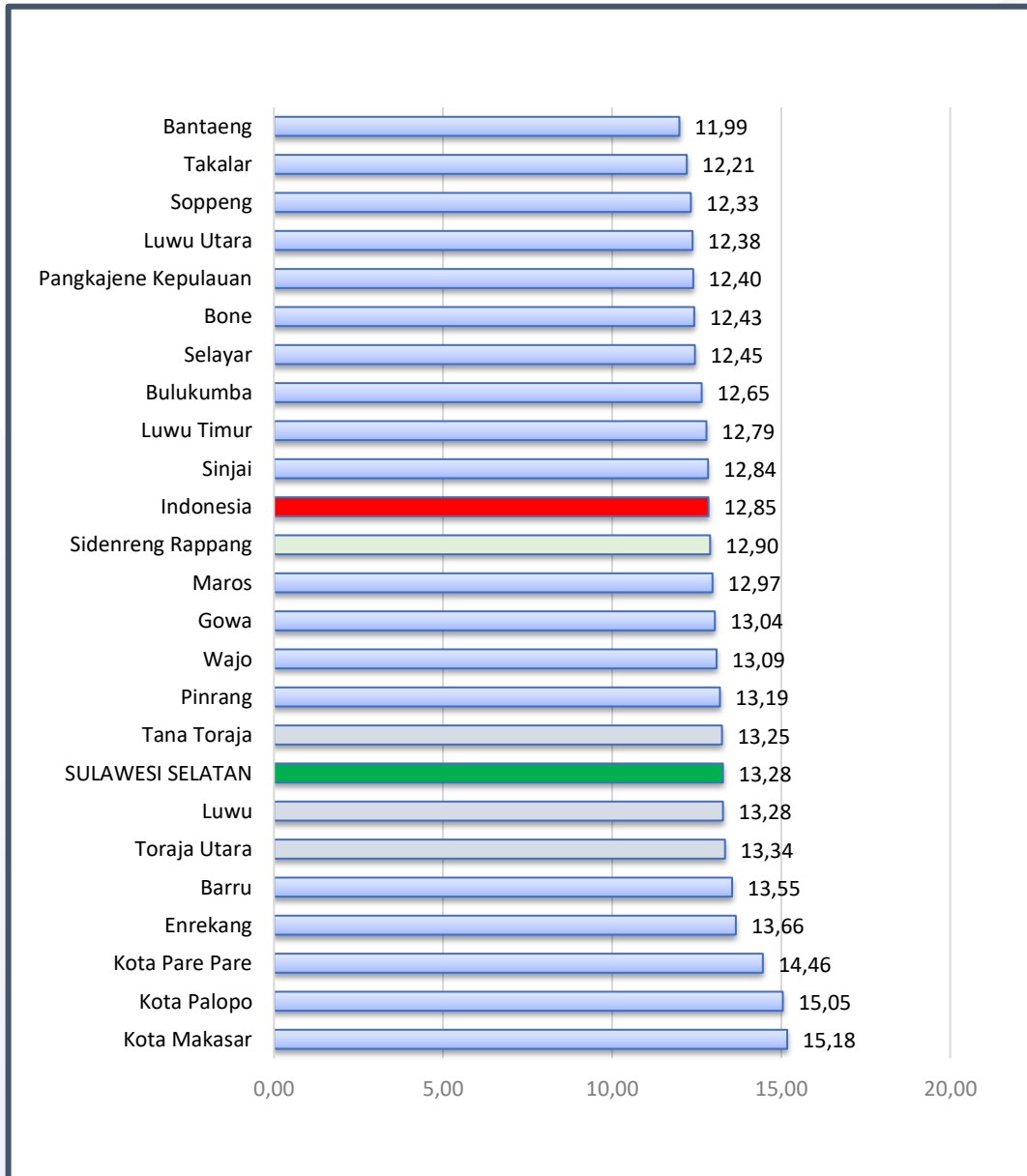
Rata-rata lama sekolah Sidenreng Rappang masih rendah jika dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,52 tahun ini berada pada peringkat ke-13 untuk seluruh kabupaten/ kota, begitupun jika dibandingkan dengan tingkat Sulawesi Selatan sebesar 7,95 dan Nasional sebesar 8,10. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Harapan lama sekolah penduduk Sidenreng Rappang juga masih berada di bawah wilayah sekitar Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, penduduk Sidenreng Rappang memiliki harapan sekolah hingga 12,90 tahun atau dapat menyelesaikan pendidikan SMA. Angka HLS di bawah rata-rata angka provinsi bahkan berada pada peringkat ke-13, ini menunjukkan masih belum optimalnya sarana prasarana maupun infrastruktur penunjang pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga perlu adanya perhatian lebih dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses dan kesempatan masyarakat dalam mengenyam pendidikan yang lebih baik.

Harapan lama sekolah penduduk Sidenreng Rappang juga masih berada di bawah wilayah sekitar Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, penduduk Sidenreng Rappang memiliki harapan sekolah hingga 12,90 tahun atau dapat menyelesaikan Pendidikan SMA. Angka HLS di bawah rata-rata angka provinsi bahkan berada pada peringkat ke-13, ini menunjukkan masih belum optimalnya sarana prasarana maupun infrastruktur penunjang pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga perlu adanya perhatian lebih dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses dan kesempatan masyarakat dalam mengenyam pendidikan yang lebih baik.



Gambar 4.5
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota
se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017



Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018

4.1.1.3 Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat

Pada sasaran pembangunan berkelanjutan strategis disebutkan jika Masih terjadinya kasus kekurangan gizi, dan belum terpenuhinya kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula, Belum berkurangnya rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per



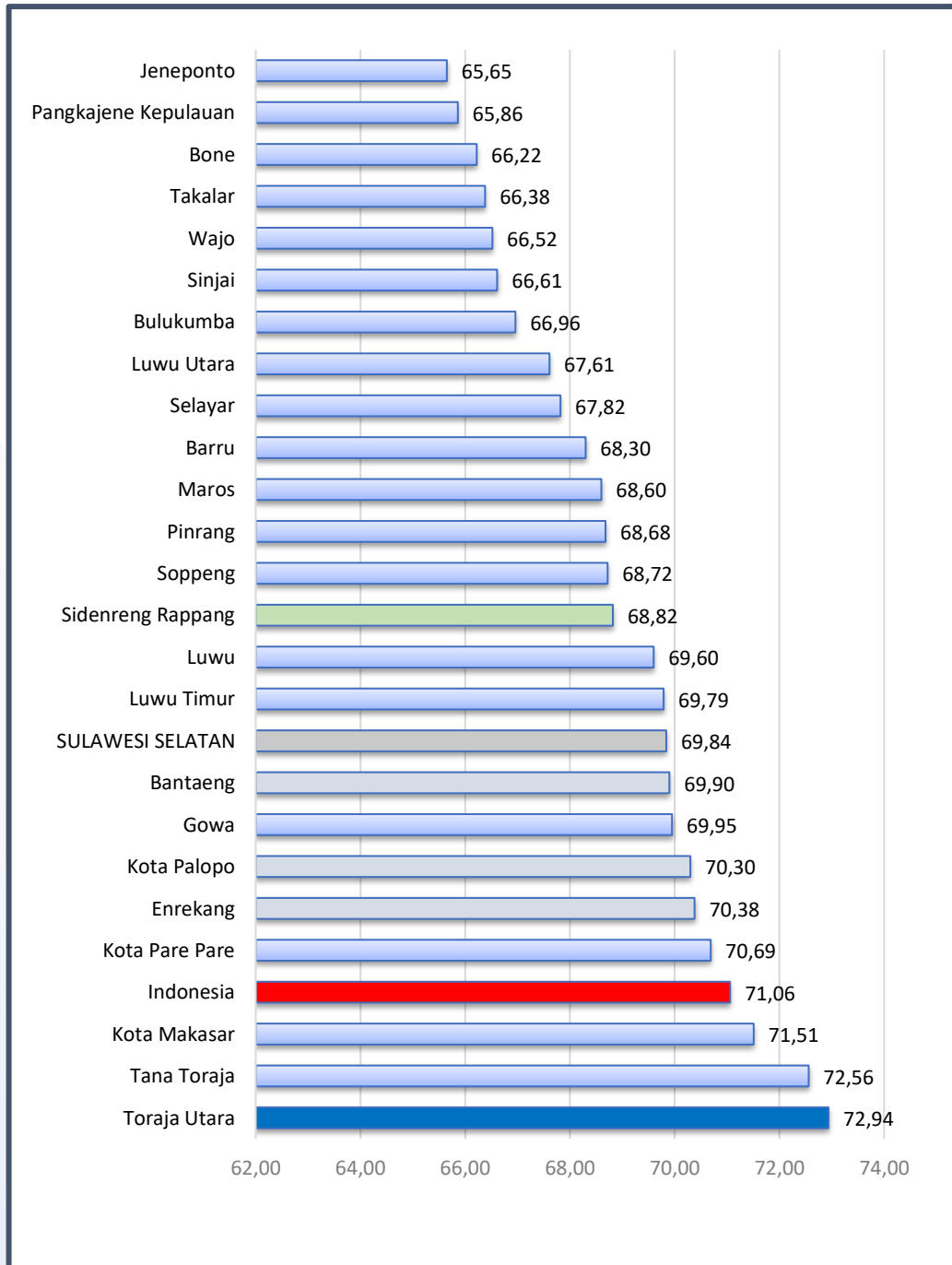
100.000 kelahiran hidup, masih terjadinya epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya, belum berkurangnya hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta belum meningkatnya kesehatan mental dan kesejahteraan serta belum terjaminnya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional (KLHS RPJMD Sidrap 2019-2023).

Sasaran tersebut menunjukkan jika kesehatan merupakan salah satu faktor yang utama dalam kehidupan manusia, dengan tubuh yang sehat maka manusia dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari tugas Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat yang sakit. Melihat kondisi saat ini pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat masih belum optimal, hal ini disebabkan pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, selain itu keterbatasan akses menambah kendala dalam melakukan pelayanan kesehatan. Selain itu pendistribusian tenaga kesehatan belum mampu merata pada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, hal ini berpengaruh dalam pemberian pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat.

Angka harapan hidup merupakan peluang penduduk yang baru lahir pada tahun tertentu untuk mengalami masa kehidupannya. Angka harapan hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang berada di peringkat ke-11 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan pada angka 68,82. Masih dibawah angka harapan hidup secara nasional 71,06, terlebih jauh di bawah Kabupaten Toraja Utara 72,94. Oleh karena itu, perlu peningkatan dan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan di Sidenreng Rappang untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.



Gambar 4.6
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota
se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018

Dengan berbagai rumusan permasalahan diatas maka beberapa akar masalah yang memicu permasalahan dijabarkan pada tabel sebagai berikut:



Tabel 4.1
Rumusan Permasalahan
“Belum Meratanya Kualitas Hidup Masyarakat ”

Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Belum optimalnya akses kualitas sarana dan prasarana pendidikan di beberapa wilayah
	2. Rendahnya kualitas SDM tenaga pendidik belum sepenuhnya terqualifikasi baik dan pemerataan tenaga pendidik
	3. Belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, ilmu pengetahuan dan keterampilan
	4. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam bidang pendidikan
Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	1. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan
	2. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan
	3. Belum optimalnya pelayanan rumah sakit sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan
	4. Rendahnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

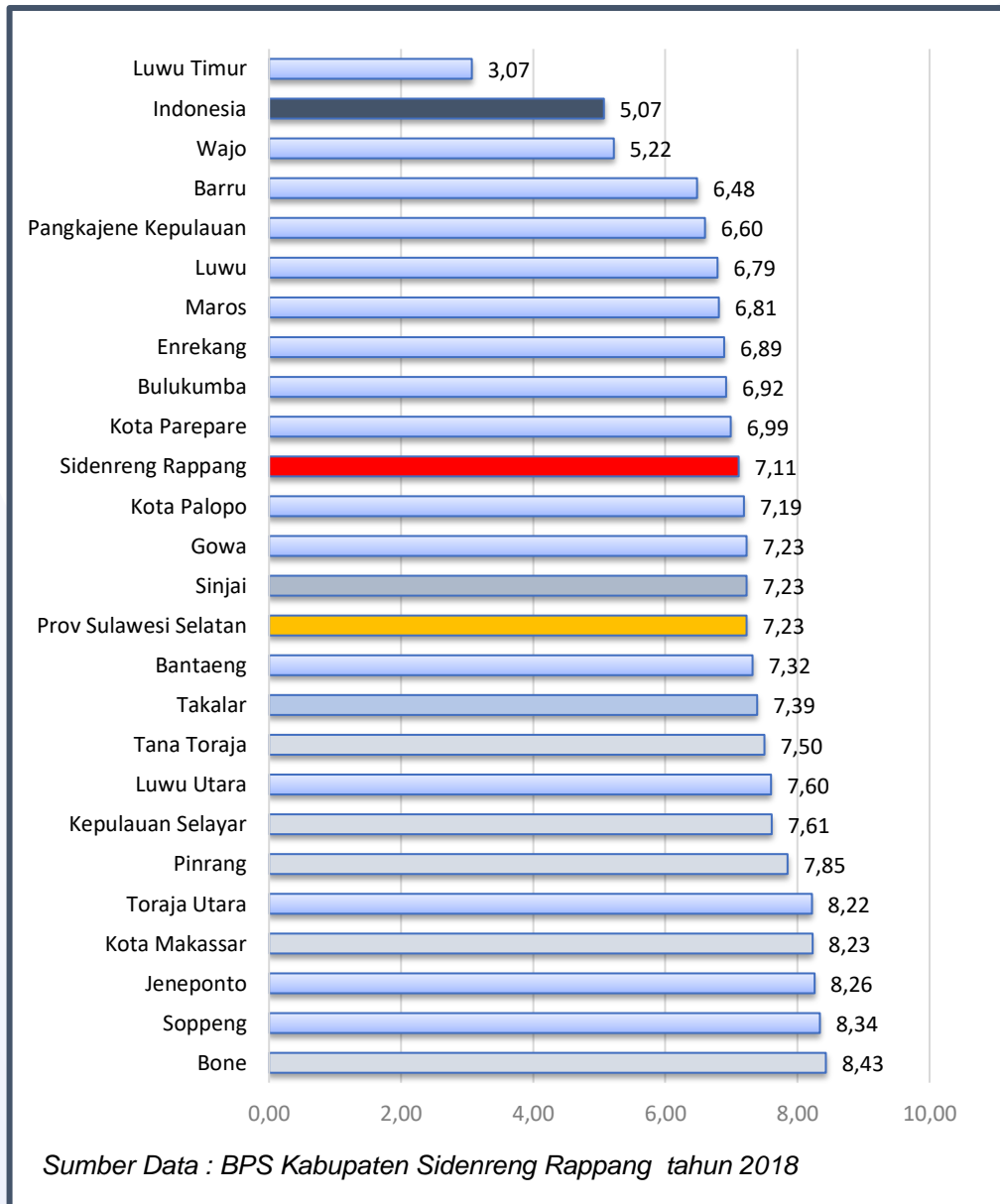
4.1.1.4 Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis pertanian serta usaha industri pengolahan hasil usaha pertanian

Dalam proses pembangunan ekonomi, perubahan struktur ekonomi merupakan hal yang penting. Kontribusi masing-masing sektor pembentuk PDRB mungkin saja akan bervariasi dari waktu ke waktu. Untuk melaksanakan pembangunan dengan sumber daya yang terbatas sebagai konsekuensinya harus difokuskan kepada pembangunan sektor-sektor yang memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap sektor-sektor lainnya atau perekonomian secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat pergerakan perekonomian daerah. Oleh karena itu, indikator pertumbuhan ekonomi selalu menjadi acuan awal dalam memetakan kebijakan-kebijakan strategis terkait peningkatan kualitas perekonomian daerah, tak terkecuali Kabupaten Sidenreng Rappang.



Gambar 4.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota
se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017



Jika melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki pertumbuhan ekonomi pada kategori rendah dengan capaian 7,11 persen dengan peringkat ke-16 dalam lingkup provinsi. Angka ini berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai 7,23 persen pada tahun 2017 ini. Sebaiknya, potensi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat



meningkatkan posisi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, permasalahan perekonomian harus diupayakan untuk melihat sektor-sektor strategis dan potensial untuk mendorong roda perekonomian daerah. Pada negara berkembang, kontribusi sektor industri harus memegang peranan yang penting, karena sektor industri sampai saat ini mampu memberikan dampak pengganda terhadap perekonomian. Kegiatan perekonomian daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dominan pada sektor pertanian. Selain aspek perekonomian yang perlu dikembangkan, pembangunan daerah perlu juga memperhatikan aspek sosial dan budaya untuk menyeimbangkan kehidupan yang berbudi dan pekerti yang luhur serta mulia. Permasalahan pokok ini dipicu oleh beberapa permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut:

4.1.1.5 Belum optimalnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan dan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan, berkelanjutan dan bertahap ketingkat yang lebih maju dan lebih baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan harus dilakukan secara bertahap di segala bidang/sektor maupun sub sektor secara terencana dan terprogram. Salah satu cara mencapai keberhasilan pembangunan adalah dengan adanya pembangunan ekonomi. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil strategis terutama yang menyangkut komoditas pangan. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil produk pertanian ini diharapkan dapat dilakukan secara lebih terencana dengan pemanfaatan yang optimum serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Indikator pembangunan ekonomi daerah tercermin dalam perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Perkembangan PDRB tersebut akan bermanfaat dalam perencanaan pembangunan. Sektor pertanian sendiri merupakan sektor



yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan perekonomian. Perkembangan dan Pertumbuhan Atas Sektor PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017.

Tabel 4.2
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	%	34,06	34,06	33,33	34,74	34,46

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2018

Sektor pertanian terhadap PDRB berkontribusi cukup signifikan mengingat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah daerah agraris yang mata pencaharian penduduknya paling besar di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peranan penting di Indonesia karena sektor pertanian mampu menyediakan lapangan kerja, mampu mendukung sektor industri baik industri hulu maupun industri hilir, mampu menyediakan keragaman menu pangan dan karenanya sektor pertanian sangat mempengaruhi konsumsi dan gizi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bonus geografi dan demografi yang dimiliki oleh Kabupaten Sidenreng Rappang tidak serta merta meniadakan persoalan-persoalan dibidang perekonomian khususnya pertanian.

4.1.1.6 Rendahnya kinerja kelembagaan usaha dan belum maksimalnya penanggulangan kemiskinan

Setiap daerah mempunyai potensi kekhasan dan karakteristik tersendiri terhadap sumberdaya lokal daerah. Dengan adanya potensi sumber daya lokal daerah yang dikelola dengan optimal maka akan memberikan dampak peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal Kabupaten Sidenreng Rappang dikarenakan adanya keterbatasan



kompetensi koperasi dan UMKM dalam memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produk lokal daerah. Selain itu kemampuan dan kualitas manajemen kelembagaan Koperasi dan UMKM relatif masih rendah. Sehingga dalam hal ini koperasi sebagai penunjang perekonomian mikro merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Kegiatan koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi bertujuan sosial untuk melayani dengan baik keperluan anggotanya. Saat ini koperasi di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menunjukkan eksistensinya dalam meningkatkan pergerakan perekonomian mikro daerah. Perkembangan koperasi sebagai wadah perekonomian mikro masyarakat maka hal ini dapat mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat masih berjalan dengan cukup baik. Namun hal ini tetap harus menjadi perhatian bagi Pemerintah terutama jika ada koperasi yang non aktif, agar koperasi tetap mampu tumbuh dan berkembang untuk menjadi pendukung perekonomian mikro masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dinilai sangat mendukung untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. UMKM dijadikan sebagai pilar pertama perekonomian di Indonesia. Pemerintah akan terus memperjuangkan dan mendukung terus program andalan Indonesia demi kemakmuran masyarakat. Pemerintah harus bisa memajukan perekonomian bangsa melalui UMKM. Kita semua berharap kemiskinan secara perlahan akan hilang apabila selalu didorong dengan kegigihan dan mau membawa masyarakat kita ke zona kemakmuran yang sangat diharapkan oleh setiap masyarakat. Para pelaku UMKM yakin pemerintah bisa menjaga serta membangun masyarakat untuk terus bisa berwirausaha dan tidak memandang sebelah mata untuk melakukan sesuatu yang berharga buat kemakmuran masyarakatnya. Penyerapan tenaga kerja meningkat pada setiap tahunnya dan ini menyatakan UMKM mampu menciptakan peluang dan pasar baru, meningkatkan system



perdagangan, pengelolaan sumber daya alam, pembinaan sumber daya manusia dan yang paling terpenting mengurangi kemiskinan.

Tabel 4.3
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah usaha mikro dan kecil	4.990	2.571	1.703	1.373	935
2	Jumlah seluruh UMKM	5.019	2.642	1.797	1.428	1.015
3	Persentase Usaha Mikro dan kecil	99,4	97,3	94,8	96,2	92,1

Dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase usaha mikro dan kecil masih sangat besar dibanding usaha menengah. Namun dari tahun ke tahun persentase tersebut menurun. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 2,18 % usaha kecil yang naik kelas menjadi usaha menengah. Diperlukan upaya-upaya agar semakin banyak lagi usaha mikro dan kecil yang naik kelas. Namun demikian, ternyata terdapat beberapa factor yang mempengaruhi kontribusi UMKM terhadap upaya mengurangi angka kemiskinan diantaranya adalah persoalan permodalan, daya saing produk, pemasaran, brand identity, dan permasalahan produktifitas. Inilah tugas pemerintah untuk menemukan solusi pemecahannya agar UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang juga mampu berkontribusi besar dalam menekan angka kemiskinan melalui penciptaan UMKM yang lebih mandiri dan produktif salah satunya dengan cara melalui pengembangan inovasi dan kemitraan usaha.

Tabel 4.4
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis pertanian serta usaha industri pengolahan hasil usaha pertanian”

Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya produktivitas sektor-sektor	1. Kontribusi dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang cenderung menurun
	2. Masih rendahnya diversifikasi produk hasil pertanian



Permasalahan	Akar Masalah
perekonomian daerah	3. Kurangnya Industri Kecil Mikro yang berorientasi ekspor
	4. Masih relatif terbatasnya sumber daya permodalan pelaku industri rumah tangga dan industri kecil
	5. Belum efektifnya pemanfaatan potensi sektor pertanian
	6. Masih rendahnya SDM pertanian
	7. Jaringan irigasi masih terbatas
Rendahnya kinerja kelembagaan usaha	1. Sistem Distribusi dan Tata Niaga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting belum tertata dengan baik
	2. Masih lemahnya koordinasi antar instansi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM
	3. Kurangnya akses kemitraan dan jaringan usaha serta perizinan
	4. Belum optimalnya kemampuan dan kualitas manajemen kelembagaan Koperasi dan UMKM
Belum maksimalnya penanggulangan kemiskinan	1. Belum optimalnya keterampilan sumber daya masyarakat miskin
	2. Belum optimalnya koordinasi lintas perangkat daerah untuk saling bersinergi dalam penanggulangan kemiskinan
	3. Belum optimalnya kualitas SDM Usia Produktif dalam peningkatan keterampilan dan kemampuan berwirausaha
	4. Ketimpangan pendapatan masyarakat masih cukup tinggi
	5. Belum tersedianya single database kemiskinan yang dapat dijadikan rujukan

4.1.1.7 Belum optimalnya investasi daerah dan kompetensi angkatan kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

4.1.1.7.1. Rendahnya perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang

Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain faktor Sumber Daya Alam, faktor Sumber Daya Manusia, faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna



menjamin kepastian dalam berusaha, faktor kebijakan pemerintah, faktor kemudahan dalam perizinan.

Berbagai potensi sumber daya yang merupakan keanekaragaman dan kekayaan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Namun dalam pengelolaannya, pemerintah daerah membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya sekaligus mempercepat laju roda perekonomian daerah.

Tabel 4.5
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN	Perusahaan	0	2	4	0	0

Tabel 4.6
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN	Milyar Rupiah	209,16	140,20	428,42	1.888	112,65

Tabel 4.7
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Orang	0	250	291	-	-

Dalam kurun waktu 2013-2017, jumlah investasi hanya ada pada tahun 2014 dan 2015 saja. Sedangkan tahun 2013, 2016 dan 2017 tidak terdapat investor berskala nasional. Adapun nilai investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu tersebut mengalami fluktuasi. Realisasi nilai investasi tertinggi yaitu pada tahun 2016 yaitu senilai 1.888



trilyun selanjutnya pada tahun berikutnya (2017) mengalami penurunan hanya sekitar 112,65 milyar. Mengingat cukup banyaknya potensi sumber daya alam, seharusnya investasi yang direalisasikan untuk meningkatkan perekonomian dapat lebih dioptimalkan melalui berbagai kebijakan yang mendukung kemudahan penanaman modal.

4.1.1.7.2. Kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang kurang optimal

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kekayaan alam yang sangat potensial yang apabila dikelola dengan baik, hasilnya bisa sangat menjanjikan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan bahkan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi destinasi pariwisata dunia. Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai obyek wisata yang memiliki daya tarik tetapi masih belum dikelola secara optimal padahal memiliki prospek pasar skala nasional dan internasional. Perlu adanya terobosan-terobosan yang baru dan efektif terkait pemasaran, pengelolaan resort, hingga peningkatan aksesibilitas menuju tempat wisata. Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Sidenreng Rappang terbentuk secara alamiah dari kondisi geografis, sejarah dan budaya. Potensi wisata yang berasal dari kondisi geografis meliputi danau, pegunungan, dan agro. Potensi wisata yang berasal dari budaya meliputi kearifan lokal dimana di Kabupaten Sidenreng Rappang ini terdapat sebuah komunitas Towani yang memiliki adat istiadat serta ritual yang apabila mampu disosialisasikan dengan baik, bisa menjadi daya tarik tersendiri sebagaimana yang selama ini menjadi daya tarik di Kabupaten Toraja dan Toraja Utara.

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki tiga kawasan peruntukan pariwisata yaitu kawasan peruntukan pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.



Tabel 4.8
PAD Sektor Pariwisata
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
PAD Sektor Pariwisata	Rupiah	19.164.000	6.200.000	9.100.000	10.150.000	2.100.000
PAD Sektor Pariwisata	%	58,97	19,08	19,89	22,19	4,59

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari sektor pariwisata dari tahun 2013 hingga 2017 berfluktuasi namun cenderung menurun. Data tahun 2017 menunjukkan besaran PAD dari sektor ini hanya sebesar Rp. 2.100.000 atau sekitar 4.50 % dari total penerimaan PAD. Jika pariwisata dikelola secara optimal maka potensi wisatawan lokal maupun mancanegara bisa meningkat mencapai angka 100 persen sehingga secara langsung akan meningkatkan daya saing pariwisata hingga level internasional. Oleh karena itu, agar potensi pariwisata bisa meningkatkan perekonomian wilayah dan menjadi sumber pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan pengembangan pariwisata yang berkesinambungan dan terarah.

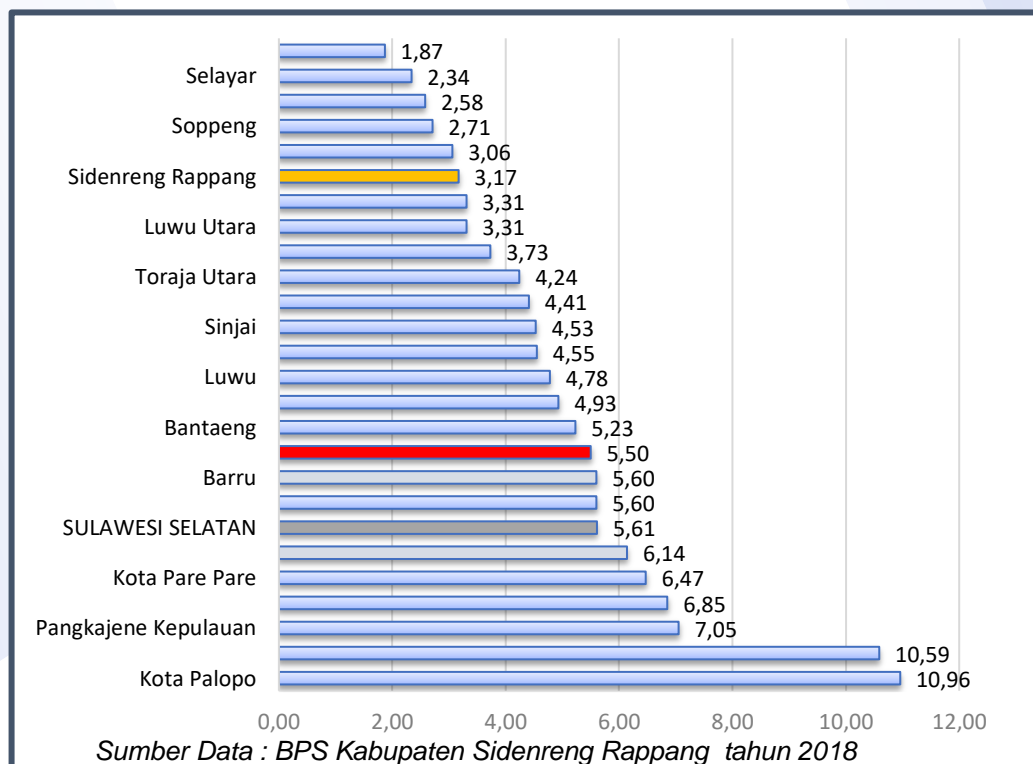
4.1.1.7.3. Belum optimalnya kompetensi angkatan kerja

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki tren fluktuatif naik turun dalam setiap periodenya. Angka pengangguran di Kabupaten Sidenreng Rappang diakibatkan karena meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain itu, permasalahan ini juga dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang maupun beberapa masalah lain seperti masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja, masih rendahnya kreativitas dan produktivitas angkatan kerja dalam menciptakan lapangan usaha baru, maupun masih terbatasnya peluang dan kesempatan kerja bagi tenaga terdidik dan terampil.



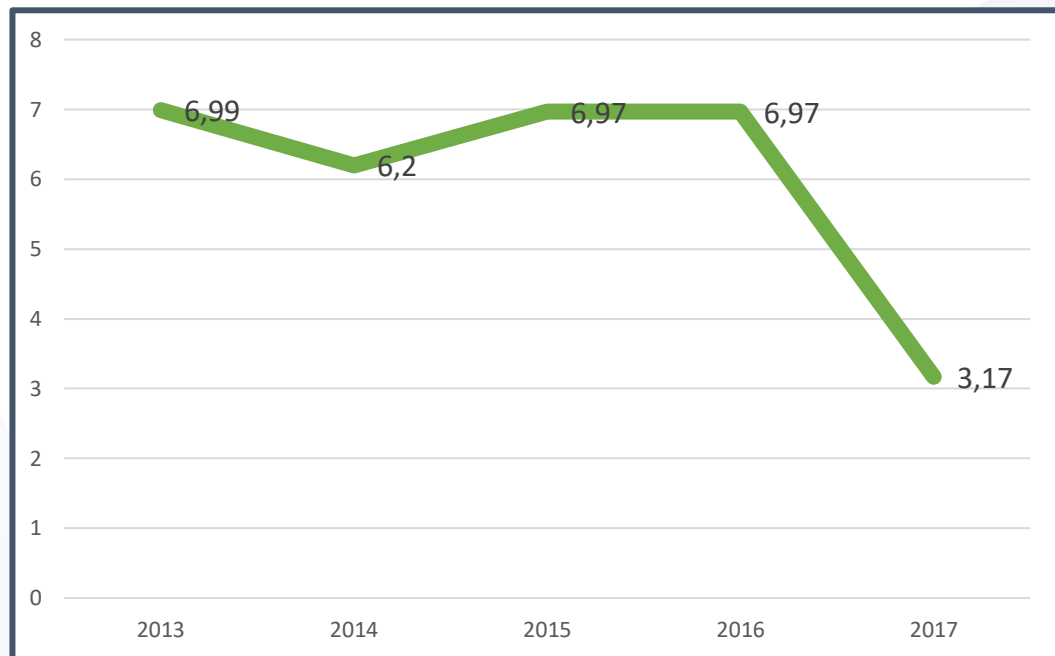
Salah satu indikator dalam melihat permasalahan ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka yang sering dikenal dengan istilah angka pengangguran. Angka pengangguran di Kabupaten Sidenreng Rappang cukup tinggi sehingga perlu kebijakan pembangunan yang memiliki dampak stabilitas dan konsistensi. Fenomena angka pengangguran ini tentu saja salah satunya disebabkan tingginya sektor lapangan usaha yang rentan dalam penyerapan tenaga kerja seperti pertanian ataupun perdagangan serta industri. Jika melihat perbandingan angka pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan maka terlihat angka pengangguran sidenreng Rappang berada pada posisi ke-6 dari seluruh kabupaten/ kota se Sulawesi Selatan di angka 3,17. Masih di bawah kabupaten Enrekang 1,87, Soppeng 2,71 serta Wajo 3,06 yang masih sama sebagai daerah pertanian dan perkebunan.

Gambar 4.8
Tingkat Pengangguran Terbuka
Se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017





Gambar 4.9
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017



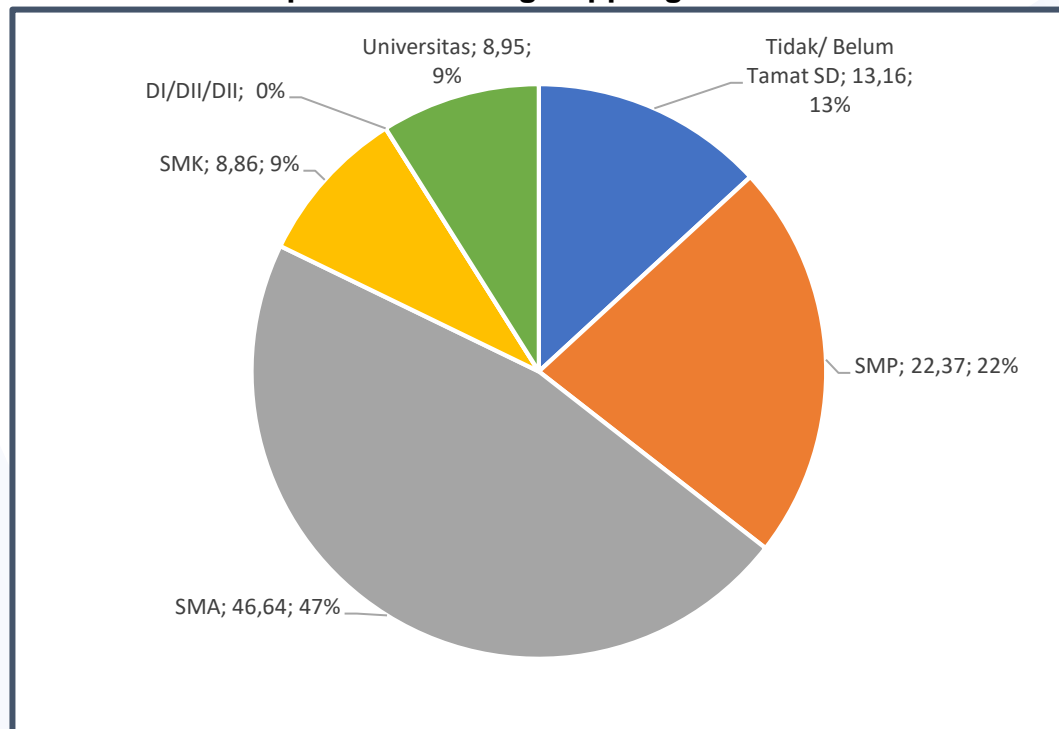
Sumber Data : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018

Jika dilihat secara series, maka secara umum terjadi penurunan angka pengangguran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yang sifatnya fluktuatif. Pada tahun 2017, angka pengangguran menurun drastis dari tahun sebelumnya mencapai 6,2 persen. Angka tersebut terus meningkat di setiap tahunnya hingga pada tahun 2017 menjadi sebesar 3,17 persen.

Terlihat bahwa angkatan kerja di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki pendidikan yang masih cukup rendah dimana sebagian besar angkatan kerja hanya menempuh pendidikan Sekolah Dasar, bahkan ada sebagian yang tidak sekolah atau belum tamat Sekolah Dasar. Minimnya angkatan kerja berpendidikan ini menjadi salah satu permasalahan penting bagi Pemerintah Daerah mengingat modal utama peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pendidikan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.



Gambar 4.10
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017



Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018

Di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagian besar pencari kerja bila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-rata lulusan Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Lanjutan Pertama. Tingginya pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah menengah Pertama dan universitas perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan lulusan tersebut merupakan lulusan yang siap kerja. Rata-rata penduduk menganggur tahun 2017 didominasi oleh penduduk dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas sebesar 46,64 persen. Hal ini mengindikasikan semakin tingginya angka pengangguran pada level pendidikan menengah atas dimana lulusan pendidikan tersebut diyakini sudah layak menjadi tenaga kerja. Beberapa hal yang menjadi pemicu cukup tingginya pengangguran pada lulusan siap kerja ini dikarenakan masih terbatasnya peluang dan kesempatan kerja bagi tenaga terdidik



dan terampil, terbatasnya lapangan pekerjaan yang mampu menampung jumlah pencari kerja dan kurang tertariknya masyarakat terhadap pekerjaan informal. Hal tersebut menyebabkan para pencari kerja kurang memanfaatkan sumber daya yang ada untuk lebih produktif, sehingga dapat dikatakan sebagian besar hanya mengandalkan dan menginginkan bekerja sebagai pegawai (pegawai kantor swasta ataupun negeri (PNS). Dengan adanya permasalahan ini Pemerintah harus mampu memberikan wawasan dan menggiring masyarakat untuk lebih produktif agar dapat meningkatkan derajat kehidupan.

Dengan berbagai rumusan permasalahan diatas maka beberapa akar masalah yang memicu permasalahan dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.9
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya investasi daerah dan kompetensi angkatan kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat”

Permasalahan	Akar Masalah
Rendahnya perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sidenreng Rappang	1. Kurangnya informasi bagi investor/pelaku usaha untuk mengenal potensi komoditi andalan
	2. Belum optimalnya promosi investasi daerah
	3. Minimnya daya dukung daerah dalam menciptakan peluang investasi (iklim investasi)
Kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang kurang optimal	1. Sektor pariwisata belum terintegrasi Dengan kebudayaan daerah
	2. Rendahnya PAD dari sektor pariwisata
	3. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata
	4. Belum terbinanya usaha ekonomi kreatif dari berbagai sektor usaha
	5. Belum terpetakan Pengembangan bakat dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) kreatif khususnya pada generasi muda, serta kreativitas konten sebagai substansi dasar pengembangan produk kreatif;
Belum optimalnya kompetensi angkatan kerja	1. Belum optimalnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja
	2. Belum optimalnya kreativitas dan produktivitas angkatan kerja dalam menciptakan lapangan usaha baru
	3. Masih terbatasnya peluang dan kesempatan kerja bagi tenaga terdidik dan terampil



4.1.1.7.4. Belum optimalnya infrastruktur secara merata dan pembangunan berwawasan lingkungan

Infrastruktur utama dalam mendorong perekonomian suatu daerah tersedianya aksesibilitas wilayah yang memadai yang ditunjukkan dengan jalan dan jembatan yang mampu diakses dan dilalui dengan nyaman pada tiap pengguna jalan. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Untuk mendukung transportasi darat di Kabupaten Sidenreng Rappang, sampai dengan data pembangunan jalan sampai dengan tahun terakhir pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Jika melihat kondisi jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka masih terdapat jalanan yang rusak hingga mencapai 48,82 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian bagi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan sekaligus meningkatkan pengawasan penggunaan jalan agar kondisi jalanan yang rusak dapat diminimalisir.

Salah satu infrastruktur dasar yang penting untuk dirasakan seluruh masyarakat Sidenreng Rappang adalah rumah layak huni. Rumah merupakan salah satu sarana tempat tinggal masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa perumahan rakyat dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan manusia. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat permasalahan masih banyaknya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni.

Selain itu kebutuhan dasar lainnya dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah mengenai kebutuhan air bersih dan air minum yang cukup bagi masyarakat. Dalam perkembangannya, pelayanan air bersih dan air minum belum optimal. Hal ini terlihat sebanyak 17,68 persen rumah tangga belum sepenuhnya merasakan pelayanan air bersih terutama pada masyarakat yang kurang mampu dan berada di pinggiran. Beberapa kajian juga menunjukkan masih adanya



2,97 persen pada lima kelompok masyarakat belum memiliki akses terhadap air minum bersih dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Begitu pula dengan fasilitas kelistrikan, hanya 83,00 persen masyarakat Sidenreng Rappang yang mendapatkan akses listrik sehingga sebanyak 17,00 persen rumah tangga belum menggunakan fasilitas listrik.

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi makro seharusnya memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek multiplier. Sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada, untuk menyerap makin besarnya aliran barang dan orang yang beredar atau bersirkulasi di seluruh perekonomian. Namun, kalau infrastrukturnya tidak dapat menyerap peningkatan kegiatan ekonomi (dan tidak cukup banyak infrastruktur baru yang dikembangkan) maka akan terjadi masalah. Infrastruktur yang kurang memadai juga mempengaruhi daya tarik iklim investasi. Untuk mewujudkan pelayanan yang prima, pemerintah daerah harus merumuskan program-program kegiatan yang mengoptimalkan berbagai sarana prasarana penunjang pembangunan daerah. Berkaitan dengan infrastruktur wilayah diantaranya jalan, jembatan, irigasi, termasuk juga pusat aktifitas perekonomian masyarakat (pasar).

Dari masalah utama infrastruktur wilayah yang masih belum merata dan berkualitas, terdapat beberapa permasalahan yang memicu masalah utama, antara lain :

a. Kualitas infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya baik

Permasalahan terkait infrastruktur jalan merupakan hal yang mendasar yang kerap terjadi di setiap daerah kabupaten, propinsi, hingga pusat. Demikian pula Kabupaten Sidenreng Rappang, persoalan aksesibilitas wilayah ini menjadi salah satu permasalahan yang masih terus dilakukan upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut oleh pemerintah daerah. Aksesibilitas wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau secara mudah mengakibatkan sulitnya



proses distribusi barang maupun jasa. Peningkatan aksesibilitas akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar seperti pendidikan maupun kesehatan. Tabel berikut menunjukkan gambaran tentang kondisi jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 4.10
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	780.27	835.12	889.76	919.79	927.32
2	Panjang Jalan Seluruhnya	1,028.86	1,028.86	1,290.04	1,290.04	1,290.04
3	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	75.84	81.17	68.97	71.30	71.88

Sumber : Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Sidenreng Rappang 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa panjang jalan dalam kondisi baik dari tahun 2013-2017 selalu meningkat dari 780,27 km menjadi 927,32 km terhadap panjang jalan seluruhnya yaitu 1.290,04 km. Namun, jika melihat proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik nilainya berfluktuasi dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa infrastruktur jalan di Kabupaten Sidenreng Rappang masih sangat memerlukan perhatian untuk dilakukan upaya peningkatan kualitas.

b. Kurang optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi

Selain infrastruktur jalan, hal lain yang juga patut untuk mendapatkan perhatian adalah kualitas jaringan irigasi. Hal ini mengingat bahwa kondisi geografis Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan daerah agraris dan merupakan salah satu lumping pangan nasional, sehingga perhatian terhadap perbaikan sarana dan prasarana pertanian termasuk jaringan irigasi juga perlu mendapatkan perhatian serius untuk meningkatkan produktifitas lahan pertanian.



Berikut data yang menunjukkan kondisi saluran irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 4.11
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi baik	6.779,00	7.447,00	8.020,00	9.651,00	10.000,00
2	Luas irigasi kabupaten	11.299,00	11.457,60	11.457,00	12.867,60	12.867,60
3	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)	60,00	65,00	70,00	75,00	77,71

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Tabel 4.12
Rasio Jaringan Irigasi
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Panjang Saluran Irigasi	65,468.00	65,468.00	65,468.00	71,168.00	75,104.00
2	Panjang Lahan Budidaya Pertanian	11,299.50	11,457.60	11,457.60	12,867.60	12,867.60
3	Rasio Jaringan Irigasi	5.79	5.71	5.71	5.53	5.84

Sumber: Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, 2017

Data di atas menunjukkan bahwa saluran irigasi yang dalam kondisi baik dari tahun 2013-2017 cenderung naik. Pada tahun 2017 menunjukkan persentase sebesar 77.71 %. Namun capaian tersebut masih perlu untuk ditingkatkan agar hasil pertanian yang sangat tergantung dari suplay air, dapat dimaksimalkan. Selain dari aspek kualitas, yang tak kalah pentingnya juga adalah dari aspek kuantitas. Dimana data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rasio antara jaringan irigasi dan panjang lahan budidaya pertanian berada pada angka 5.84 persen di tahun 2017. Untuk rasio jaringan irigasi ini, angkanya juga menunjukkan trend yang fluskuatif dari tahun ke tahun. Kedepan, diharapkan rasio jaringan irigasi ini terus



menunjukkan trend positif yang ditandai dengan besaran persentase yang terus bertambah dari tahun ke tahun.

c. Masih terdapat daerah yang rawan bencana dan pembangunan berwawasan lingkungan

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023, di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 3 (tiga) jenis bencana yang sering terjadi yaitu Banjir, terdapat titik rawan banjir yang tersebar pada beberapa kecamatan diantaranya di Kecamatan Tellu Limpoe, Panca Lautang, dan Kecamatan Watang Sidenreng yang berada di sekitar Danau Sidenreng, Kecamatan Watang Pulu dan di Kecamatan Dua PituE. Berikutnya Longsor, berdasarkan hasil survey dan pengumpulan data instansi yang diperkuat oleh hasil wawancara terhadap masyarakat yang ada di sekitar kawasan rawan longsor, terdapat potensi rawan longsor pada beberapa lokasi diantaranya di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa dan beberapa desa yang ada di Kecamatan Pitu Riase yaitu Desa Lembangeng, Desa Tana Toro dan Desa Belawae. Terakhir Angin Puting Beliung, untuk kawasan rawan bencana rawan angin terdapat beberapa titik yang sering terkena dampak yaitu di Kecamatan Kulo, Kecamatan Watang Sidenreng, Kecamatan MaritengngaE, Kecamatan Tellu Limpoe serta Kecamatan Panca Lautang.

Selain peta rawan bencana, juga terdapat beberapa isu-isu dari Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Sidrap yang berhubungan lingkungan yang perlu menjadi perhatian, sebagaimana data dari dokumen KLHS RPJMD 2018-2023 Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 4.13
Daftar Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan dari Pelaksanaan Pembangunan

No	Permasalahan Pembangunan	Lokasi	Fokus Isu Pembangunan	Keterangan
1	Permasalahan Penataan Ruang	Kec. Panca Rijang	Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai perencanaan	Sawah dijadikan kandang ayam, dan rumah



No	Permasalahan Pembangunan	Lokasi	Fokus Isu Pembangunan	Keterangan
2	Izin Tambang C	Kec. Pittu Riase	Penambangan Galian Golongan C	Banyak terdapat kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin.
3	Distribusi air irigasi	Kec. Pitu Riase dan Pitu Riawa	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air.	pengambilan air dari saluran irigasi dengan pompanisasi.
4	Pemukiman berada daerah pertanian.	Kec. Watang Sidenreng	Degradasi lahan pertanian akibat pengembangan pemukiman	Pertumbuhan kawasan perkotaan menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman
5	Penggunaan ruang yang tidak sesuai fungsi	Seluruh Kecamatan di Kab Sidrap	Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai perencanaan	Pemanfaatan ruang banyak terjadi tidak sesuai dengan tata ruang baik itu RTRW maupun RDTR. Hal ini disebabkan lemahnya upaya pengendalian tata ruang.
6	Kawasan industri tidak berfungsi	Kawasan Industri Mattirotasi, Kec. Watang Pulu	Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai perencanaan	Dikarenakan jauh dari lokasi kegiatan. Sementara dibutuhkan industri pengolahan padi.
7	Infrastruktur jalan rusak berat	Anabanak	Rendahnya kualitas infrastruktur jalan	Kerusakan infrastruktur jalan disebabkan kendaraan yang melintasi melewati kelas jalan.
8	Banyak kegiatan pembangunan tanpa IMB	Seluruh Kecamatan di Kab Sidrap	Pembangunan tanpa izin	Banyak kegiatan pembangunan di Kabupaten Sidrap yang tanpa disertai izin mendirikan bangunan.



No	Permasalahan Pembangunan	Lokasi	Fokus Isu Pembangunan	Keterangan
9	Komitmen menjalankan regulasi	Seluruh Kecamatan di Kab Sidrap	Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai perencanaan	Lemahnya penegakan aturan pada pelanggaran peraturan daerah khususnya yang terkait tata ruang
10	Kemiskinan dan pengangguran	Di Desa Mojong	Kemiskinan	Jumlah anggota keluarga yang bekerja sangat kecil, hal ini dikarenakan kualitas pendidikan yang rendah.
11	Pengembangan infrastruktur sampah, dan energi listrik	Dusun Bukere, Desa Cenrana, Kecamatan Panca Lautang	Terbatas sarana dan Prasarana Lingkungan	Jalan rusak parah dan tidak tersedia jaringan listrik

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023

Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.14
Rumusan Permasalahan
“Infrastruktur yang belum merata dan berkualitas”

Permasalahan	Akar Masalah
Kualitas infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya baik	1. Masih adanya daerah terpencil yang sulit terjangkau
	2. Faktor kondisi alam
	3. Akses jalan yang sulit terjangkau
Kurang optimalnya pemanfaatan jaringan irigasi	1. Ketersediaan air yang fluktuatif
	2. Permasalahan topografi
	3. Minimnya pemahaman masyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran irigasi
Masih terdapat daerah yang rawan bencana dan pembangunan berwawasan lingkungan	1. Belum terintegrasi pembangunan dengan peta bencana
	2. Belum maksimalnya upaya antisipasi dan mitigasi bencana
	3. Belum terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan sesuai RTRW



4.1.1.7.5. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik

Tata kelola pemerintahan berkaitan erat dengan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Urusan ini diselenggarakan dalam cakupan yang cukup luas dan kompleks, meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi Pemerintah Daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan Perundang-Undangan.

Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagai bentuk dari reformasi birokrasi belum sepenuhnya dapat dielaborasi dalam perencanaan dan program yang nyata. Pemerintah sendiri nampaknya sulit menentukan bentuk dari keberhasilan penyelenggaraan reformasi birokrasi, sehingga sulit juga menentukan target-target kinerja. Komponen yang terdapat dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi perlu diterjemahkan menjadi bentuk konkrit yang dapat diimplementasikan dan dicapai. Dari permasalahan pokok “Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)”, terdapat beberapa permasalahan yang memicunya, antara lain:

a. Masih kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik

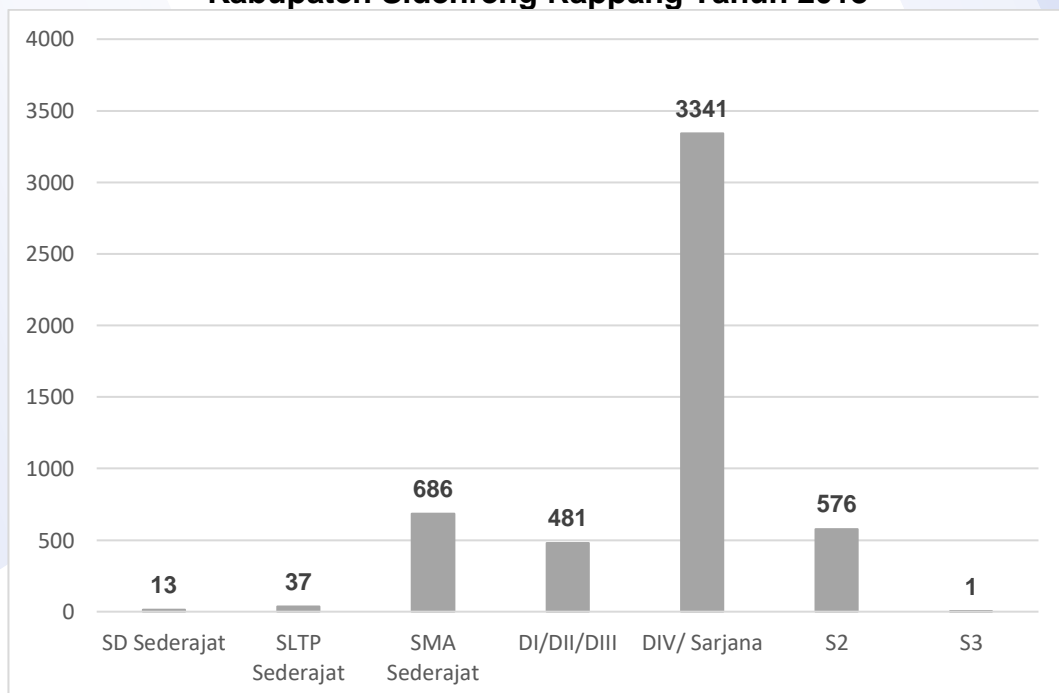
Kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan modal dasar dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah. Kapasitas aparatur yang kompeten dan profesional menjadi akselerator pencapaian tujuan pembangunan jika ditempatkan pada tugas dan fungsi yang sesuai, begitu pula akuntabilitas kinerja juga memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan capaian target pembangunan daerah. Poin penting pada permasalahan optimalisasi



kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah koordinasi antar Perangkat Daerah dan kualitas Sumber Daya Manusia dari Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah. Masih kurangnya kompetensi sebagian besar Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi salah satu poin penting dari permasalahan ini.

Masih kurangnya kompetensi sebagian besar Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi salah satu poin penting dari permasalahan ini. Hanya sebanyak 577 Aparatur Sipil Negara yang mengenyam pendidikan hingga pasca sarjana dengan rincian 576 Aparatur Sipil Negara berpendidikan S2 dan 1 (satu) Aparatur Sipil Negara berpendidikan S3. Namun yang perlu dicermati juga adalah masih banyaknya Aparatur Sipil Negara yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas Sederajat sebanyak 686 Aparatur Sipil Negara atau sebesar 35,22 persen.

Gambar 4.11
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018



Sumber : BKD Kabupaten Sidrap



b. Belum berkembangnya inovasi daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Pada tahun 2017, Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah baru mencapai 4% dan Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Kabupaten Sidenreng Rappang baru mencapai 4%.

c. Rendahnya kualitas pelayanan publik

Belum berkembangnya inovasi daerah serta berbagai kepentingan masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan sesuai dengan haknya merupakan tugas bagi instansi pemerintahan untuk menyediakan kepentingan publik (masyarakat). Pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik harus diupayakan mudah untuk diakses. Beberapa pelayanan publik di Kabupaten Sidenreng Rappang dinilai belum optimal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan data KLHS RPJMD 2018-2023 Kabupaten Sidenreng Rappang tentang capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dominan indikator tersebut sangat bersentuhan dengan pelayanan publik dasar menunjukkan capaian yang belum optimal. Belum lagi selama ini pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang belum pernah melakukan pengukuran secara ilmiah tentang kepuasan publik terhadap pelayanan yang di berikan oleh Organisasi Pemerintah Daerah kabupaten Sidenreng Rappang.



Tabel 15
Capaian Indikator TPB Kabupaten Sidrap Terhadap Target Nasional

No	Kriteria	Jumlah Indikator	Persentase (%)
1	Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target nasional	52	26,13
2	Indikator yang SUDAH dilaksanakan tetapi BELUM mencapai target nasional	39	19,60
3	Indikator yang BELUM dilaksanakan dan BELUM mencapai target nasional	108	54,27
Total Indikator yang menjadi Urusan dan Kewenangan Kabupaten Sidrap		199 Indikator	100

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023

Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.16
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik”

Permasalahan	Akar Masalah
Masih kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	1. Belum optimalnya perbaikan kinerja dari para aparatur terutama pada birokrasi Pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang
	2. Distribusi dan penataan pegawai belum sesuai dengan kompetensi dan analisis kebutuhan jabatan
	3. Belum optimalnya kerjasama antar lembaga/instansi Pemerintah
Belum berkembangnya inovasi daerah	1. Belum ada Perda/Perkada tentang Inovasi Daerah
	2. Kurangnya pemahaman OPD terkait dengan inovasi daerah
	3. Profesionalisme aparatur masih rendah dengan beban yang ada;
Rendahnya kualitas pelayanan publik	1. Belum adanya pelayanan publik yang terintegrasi dan nyaman
	2. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
	3. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintahan sebagai pelayan masyarakat
	4. Belum dilakukannya pengukuran secara berkala tentang kepuasan layanan publik pemerintah daerah kabupaten Sidenreng Rappang
	5. Prosedur kerja sesuai standar pelayanan yang baik masih belum tersedia;



4.1.1.7.6. Belum optimalnya pengembangan dan pembangunan desa

a. Belum berkembangnya perekonomian di desa

Di sebelas kecamatan pada kabupaten Sidenreng Rappang terbagi menjadi 68 desa dan 38 kelurahan. Seluruh desa dan kelurahan memiliki kantor desa/lurah di masing-masing wilayah administrasinya. Semua desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD), namun tidak semua kelurahan memiliki Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK). Terdapat lima kelurahan yang tidak memiliki Lembaga Musyawarah Kelurahan. Sebagian besar desa dan kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang berada di topografi wilayah dataran. Terdapat 6 desa/kelurahan yang berada di topografi wilayah lereng/ puncak dan 2 desa/kelurahan di topografi wilayah lembah dan sisanya berada di topografi wilayah daratan. Terdapat delapan desa/kelurahan yang berada di tepi/sekitar hutan, dan sisanya sebanyak 98 desa/kelurahan berada di luar hutan. Sementara itu berdasarkan sumber penghasilan di setiap desa/ kelurahan masih di dominasi oleh sektor pertanian.

Tabel 4.17
Banyaknya desa/ kelurahan menurut sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk

Kecamatan	Pertanian	Pertambangan dan penggalian	Industri Pengolahan	Perdagangan Besar/ Eceran	Angkutan, pergudangan, komunikasi	Jasa	Lainnya	Jumlah
Panca lautang	10	-	-	-	-	-	-	10
Tellu Limpoe	7	-	2	-	-	-	-	9
Watang Pulu	10	-	-	-	-	-	-	10
Baranti	9	-	-	-	-	-	-	9
Panca Rijang	6	-	-	2	-	-	-	8
Kulo	6	-	-	-	-	-	-	6
Maritengngae	10	-	-	2	-	-	-	12
Watang Sidenreng	8	-	-	-	-	-	-	8
Pitu Riawa	12	-	-	-	-	-	-	12
Dua Pitue	10	-	-	-	-	-	-	10



Kecamatan	Pertanian	Pertambangan dan penggalian	Industri Pengolahan	Perdagangan Besar/ Eceran	Angkutan, pergudangan, komunikasi	Jasa	Lainnya	Jumlah
Pitu Riase	12	-	-	-	-	-	-	12
Jumlah	100	-	2	4	-	-	-	106

Sumber : Statistik potensi Desa Sidrap 2018 (BPS)

Salah satu penunjang kesejahteraan rakyat adalah dengan tersedianya pusat-pusat perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, seperti minimarket, pasar, pusat pertokoan, dan lain-lain. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki pasar dengan bangunan baik yang permanen maupun semi permanen yang tersebar di 21 desa/kelurahan yang berada di seluruh kecamatan dan 4 desa/kelurahan yang memiliki pasar tanpa bangunan. Selain pasar, ada pula kelompok pertokoan di 12 desa/kelurahan. Adapun kios sarana produksi pertanian yang terdapat di beberapa desa, sebagian besar kios merupakan bukan milik KUD/BUM Desa yaitu yang terdapat di 42 desa/kelurahan, dan 25 desa/ kelurahan merupakan milik BUM Desa. Selain berasal dari lapangan usaha pertanian, penghasilan penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang berasal dari industri. Industri yang mendominasi di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah industri dari kayu yang berada di 74 desa/kelurahan, kemudian industri makanan dan minuman berada di 60 desa/kelurahan, industri gerabah/keramik/batu dan industri dari kain/tenun berada di 23 desa/kelurahan, sisanya yaitu industri logam mulia, industri anyaman, dan industri dari kulit masing-masing berada di 21, 9, dan 1 desa/kelurahan.

b. Belum mandiri dan berdayanya masyarakat desa

Dana desa dialokasikan dari APBN untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dari 68 desa di Kabupaten Sidenreng Rappang, hampir seluruhnya yaitu 66 desa menggunakan dana desanya untuk pembangunan dan 65 desa untuk pemberdayaan



masyarakat. Sedangkan desa yang menggunakan untuk pembinaan masyarakat ada sebanyak 19 desa dan penyelenggaraan pemerintah ada sebanyak 6 desa. Tidak efektifnya penggunaan dana desa menurut aparat desa adalah dikarenakan beberapa hal yaitu seperti penyaluran tidak tepat waktu yang terjadi di 29 desa, pendampingan tidak optimal yang terjadi di 8 desa, proses pencairan dana sulit terjadi di 18 desa, tidak memahami peraturan terjadi di 10 desa, dan kesulitan mencari tenaga kerja yang sesuai terjadi di 8 desa. Selain yang disebutkan di atas, satu desa di Kecamatan Duapitue memaparkan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah karena masalah administrasi, sedangkan dua desa di Kecamatan Pitu Riawa mengatakan bahwa masalah yang dihadapi adalah karena juknis yang berubah-ubah.

Program/kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan selain dari dana desa juga dilakukan di hampir seluruh desa/kelurahan. Terdapat 96 desa/kelurahan yang melakukan pembangunan sarana dan prasarana dan 84 desa/kelurahan yang melakukan pemberdayaan dengan dana yang berasal buka dari dana desa.

Tabel 4.18
Banyaknya desa menurut keberadaan sistem informasi desa dan sistem keuangan desa Tahun 2018

Kecamatan	Sistem Informasi Desa			Sistem Keuangan Desa		
	Ada, diperbaharui	Ada, tidak diperbaharui	Tidak ada	Ada, diperbaharui	Ada, tidak diperbaharui	Tidak ada
Panca Lautang	1	-	6	7	-	-
Tellu Limpoe	2	-	1	2	1	-
Watang Pulu	4	1	-	4	1	-
Baranti	4	-	-	4	-	-
Panca Rijang	4	-	-	4	-	-
Kulo	3	2	1	4	1	-
Maritenggae	3	2	1	4	2	-
Watang Sidenreng	3	2	-	3	2	-
Pitu Riawa	4	5	1	7	2	-
Dua Pitue	7	-	1	7	1	-
Pitu Riase	10	1	-	11	-	-
Jumlah	45	13	10	57	10	1

Sumber : Statistik potensi Desa Sidrap 2018 (BPS)



Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.19
Rumusan Permasalahan
“Belum optimalnya pengembangan dan pembangunan desa”

Permasalahan	Akar Masalah
Belum berkembangnya perekonomian di desa	1. Belum adanya desa yang memiliki kemandirian, baik dari segi kesehatan, pendidikan ataupun dalam wujud lain (smart village)
	2. Belum optimalnya Unit usaha (BUMDES)
	3. Belum optimalnya produk unggulan desa yang menjadi identitas desa
Belum mandiri dan berdayanya masyarakat desa	1. Rendahnya SDM pengelola keuangan desa
	2. Pengelolaan sistem pemerintahan desa tidak dikelola secara profesional
	3. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa
	4. Minimnya keberdayaan masyarakat pedesaan;

4.1.1.7.7. Belum maksimalnya kehidupan beragama dan budaya lokal dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan religius.

Banyaknya tuduhan yang dilekatkan kepada Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lumbung narkoba menghilangkan nama besar Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai “lumbung beras”. Meningkatnya jumlah kejahatan narkoba, pencurian dan ketertiban adalah 3 kasus terbanyak yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang dan pada umumnya terlihat bahwa kasus kejahatan banyak terjadi di daerah perkotaan. Angka tersebut digambarkan berdasarkan data dari Rumah Tahanan kelas IIB Sidenreng Rappang yang ditampilkan pada Sidrap dalam angka 2018 BPS.

Tabel 4.20
Banyaknya Narapidana Menurut Jenis Kejahatan dan Golongan Pelanggaran di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	Ketertiban	19



No.	Jenis Kejahatan	Jumlah
2	Perjudian	9
3	Pembunuhan	9
4	Penganiayaan	49
5	Kelalaian	5
6	Pencurian	32
7	Penipuan	20
8	Penadahan	5
9	Kesusilaan	5
10	korupsi	1
11	Narkotika	191
12	Perlindungan Anak	12
13	KDRT	4
14	Informasi dan Transaksi Elektronik	3
Jumlah		361

Sumber : Badan Pusat Statistik Sidrap 2018 (BPS)

Tingginya angka kriminalitas penggunaan narkoba bukan hanya isapan jempol belaka, terbukti menjadi jenis kejahatan peringkat pertama penghuni rumah tahanan dengan angka 191 atau 68 % dari total jumlah kejahatan pada tahun 2017. terdapat beberapa permasalahan yang memicunya, antara lain:

a. Nilai agama dan budaya lokal belum diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari

Banyaknya sarana peribadatan menjadi salah satu indikator mengukur sejauh mana kepedulian masyarakat terhadap aspek spiritual. Banyaknya tempat ibadah khususnya umat Islam berupa Masjid dan Mushallah pada tahun 2017 sebanyak 495 unit. Sedangkan tempat ibadah untuk agama lain seperti Kristen, Hindu dan Budha tidak memiliki tempat Ibadah.

Dalam kehidupan agama menjadi salah satu unsur kehidupan sebagai bentuk hukum normatif dalam masyarakat. Kehidupan yang beragama menjadikan masyarakat sebagai insan yang taat, tertib, berperilaku baik, bertoleransi tinggi. Dengan ini, secara tidak langsung agama merupakan alat pengendali dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dengan unsur normatif agama diharapkan mampu untuk



meredam tindakan-tindakan kriminalitas pada masyarakat. Dengan kehidupan masyarakat yang beragama diharapkan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai kehidupan yang harmonis, rukun dan bahagia.

Pada hakekatnya agama dan budaya menjadi satu kesatuan unsur norma-norma yang ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang kebudayaan menjadi salah satu unsur yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan ini salah satu aset daerah untuk dikembangkan dan dilestarikan. Kebudayaan dapat dikembangkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga mampu menjadi salah satu pendukung dalam meningkatkan PAD, tentunya diiringi pengelolaan dan pengembangan yang maksimal.

Jika nilai agama dan budaya telah hadir menjadi spirit dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari maka angka kriminalitas terutama penyalahgunaan narkoba dapat terminimalisir.

b. Belum optimalnya kegiatan olahraga dan kepemudaan

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan jika selain faktor ekonomi dan agama, maka penyaluran bakat dan minat pemuda terhadap kegiatan keolahragaan dianggap sebagai hipotesa dalam meminimalisir angka kriminalitas. Ketika para pemuda menyalurkan bakat dan minatnya yang dapat membuahkan prestasi di kegiatan olah raga dianggap dapat menekan tindak kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba. Perlunya pembinaan, pengembangan kelembagaan serta tersedianya sarana prasarana olahraga bagi pemuda menjadi langkah dalam meningkatkan budaya serta pelestarian seni budaya.



Tabel 4.21
Jumlah Prestasi Olahraga
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun	Medali	20	27	12	14	14

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2018

Tabel 4.22
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penyelenggaraan Festival seni budaya	Kali	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan jika rendahnya prestasi cabang olah raga pada tahun 2017 hanya 14 di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Begitupun Penyelenggaraan festival seni budaya dalam kurun lima waktu terakhir bahkan tidak pernah terlaksana sebagai muara kreatifitas pemuda dalam pengembangan seni dan budaya.

Tabel 4.23
Rumusan Permasalahan “Maksimalnya Kehidupan Beragama Dan Budaya Lokal Dalam Menciptakan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Aman Dan Religius”

Permasalahan	Akar Masalah
Nilai agama dan budaya lokal belum diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari	1. Belum terlaksananya nilai agama dalam kehidupan sehari-hari
	2. Rendahnya pemahaman nilai-nilai agama masyarakat sebagai suatu norma dan aturan
	3. Belum optimalnya penghargaan dan pelestarian terhadap nilai budaya di masyarakat
Belum optimalnya kegiatan olahraga dan kepemudaan	4. Kurangnya sarana maupun prasarana olahraga
	5. Kurang optimalnya pembinaan terhadap cabang olahraga
	6. Masih terbatasnya pelaksanaan even



Permasalahan	Akar Masalah
	olahraga, budaya dan seni
	7. Kurangnya pemuda yang berwirausaha

4.1.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintahan untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap capaian indikator pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2013-2018 serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada KLHS RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023, maka berikut ini permasalahan yang teridentifikasi berdasarkan urusan adalah:

4.1.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

4.1.2.1.1. Urusan Pendidikan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pendidikan adalah sebaga berikut :

- a. Masih rendahnya capaian APK dan APM (masih di bawah standar Nasional dan Provinsi);
- b. Kurangnya dan tidak meratanya sarana dan prasarana PAUD;
- c. Belum maksimalnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan;
- d. Masih tingginya Rasio Guru dan Siswa SD/SMP (belum memenuhi SPM Pendidikan);
- e. Kurangnya dorongan masyarakat untuk mengikuti Program Paket C;
- f. Kurangnya dukungan untuk mendorong gerakan pemberantasan buta aksara;
- g. Masih rendahnya kualitas ruang kelas TK/SD/SMP.



4.1.2.1.2. Urusan Kesehatan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai di RS, Puskesmas dan Jaringannya;
- b. Belum dilakukan secara menyeluruh Pelayanan Kesehatan Masyarakat baik dari aspek jenis pelayanan (Pelayanan Kesehatan Dasar / Puskesmas, Rujukan, Tradisional dll), aspek peralatan kesehatan maupun dari aspek lain;
- c. Masih kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan dalam hal pemeliharaan, inventarisasi dan kalibrasi alat kesehatan;
- d. Masih sering terjadi bencana alam seperti banjir dll;
- e. Masih perlu pengawasan intensif terhadap pengedaran obat dan makanan terhadap masyarakat;
- f. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- g. Cakupan TTU dan TPM yang memenuhi standar belum mencapai target;
- h. Belum semua kecamatan, desa dan kelurahan melakukan proses kawasan sehat secara standar;
- i. Masih ditemukan angka kejadian penyakit menular, penemuan kasus masih rendah dan pengobatan yang belum sesuai standar;
- j. Belum semua desa/kelurahan berstatus UCI;
- k. Masih adanya bayi yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap;
- l. Masih ada puskesmas dan rumah sakit yang belum terakreditasi;
- m. Masih ada beberapa Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang dalam kondisi rusak serta ketersediaan alat kesehatan yang masih sangat terbatas;
- n. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana RSUD;
- o. Masih ada masyarakat miskin yang belum menjadi peserta BPJS;
- p. Belum memadainya program peningkatan keselamatan lansia;
- q. Kurangnya pengawasan terhadap pengolahan makanan dan minuman pada industri - industri rumah tangga;
- r. Meningkatnya kasus penyakit tidak menular (PTM);
- s. Terjadinya pergeseran pola penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (PTM);
- t. Seringnya terjadi keterlambatan penemuan kasus kanker serviks dan payudara;



- u. Masih tingginya kebiasaan merokok yang merupakan faktor risiko penyakit tidak menular, termasuk belum adanya Perda kawasan tanpa rokok
- v. Meningkatnya kasus Hipertensi;
- w. Meningkatnya kasus diabetes melitus;
- x. Masih rendahnya mutu pelayanan RSUD (harus reakreditasi setiap 3 tahun)
- y. Terbatasnya jumlah SDM RSUD (belum memenuhi Standar RS type B);
- z. Belum terintegrasinya SIM RSUD

4.1.2.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah :

- a. Masih ada jalan yang rusak yang belum pernah ditangani dengan lapis permukaan aspal ataupun beton;
- b. Masih ada jembatan yang mengalami rusak;
- c. Masih ada jalan status kabupaten yang rusak ringan dan sedang belum ditangani;
- d. Masih ada jembatan status kabupaten yang rusak ringan dan sedang belum ditangani;
- e. Belum memadainya aksesibilitas daerah perbatasan, kawasan wisata dan industri;
- f. Tidak jelasnya pembagian kewenangan jalan yang mengakibatkan penanganan jalan tidak efektif;
- g. Masih banyak bangunan tidak memiliki Izin kelayakan dan Rendahnya kepatuhan terhadap fungsi ruang;
- h. Masih terjadinya alih fungsi lahan;
- i. Belum terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan undang-undang penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- j. Masih adanya daerah irigasi baru (irigasi permukaan dan irigasi tambak) yang sudah didata namun belum terbangun jaringan irigasinya;
- k. Adanya kerusakan-kerusakan jaringan irigasi yang terjadi pada daerah-daerah irigasi permukaan yang sudah terbangun (eksisting) yang berpotensi mengganggu fungsi dan kinerja jaringan irigasi di daerah irigasi tersebut;



- l. Masih adanya daerah-daerah irigasi yang sudah terdaftar tapi belum memiliki Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan belum pernah dilakukan pembinaan dan pemberdayaan;
- m. Masih adanya jaringan sungai (termasuk di dalamnya saluran pembuang) yang butuh untuk direhabilitasi/dinormalisasi (pengerukan, pasangan talud dan bronjong) yang jika dilaksanakan akan berpotensi mengganggu kinerja dan fungsi aset-aset pengairan yang ada di sekitarnya;
- n. Adanya sumber-sumber air yang perlu dijaga kelestariannya dalam rangka menjaga kelangsungan ketersediaan sumber-sumber air (konservasi) untuk keperluan pertanian;
- o. Adanya kawasan-kawasan pemukiman di sekitar danau di beberapa daerah danau yang membutuhkan fasilitas pengaman danau (tanggul) untuk melindungi kawasan tersebut dari banjir yang diakibatkan kenaikan air (pasang).
- p. Kurangnya fasilitas pengaman danau/sungai (tanggul) dalam menanggulangi luapan dan banjir rob yang terjadi baik di daerah-daerah permukiman maupun di kawasan-kawasan produktif yang ada di daerah-daerah danau/ sungai tersebut akibat adanya fluktuasi luapan air
- q. Banyaknya bantaran dan atau tanggul sungai yang rawan longsor akibat pengaruh erosi banjir dan ketidak stabilan lereng yang berpotensi mengganggu keseimbangan pengaliran sungai maupun dapat membahayakan fasilitas-fasilitas sumber daya air yang ada disekitarnya.
- r. Adanya sungai utama yang mengalami laju degradasi (pendangkalan dasar sungai oleh sedimen) yang mengurangi kapasitas pengaliran sungai yang berpotensi menyebabkan banjir.
- s. Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam program-program atau kegiatan-kegiatan pencegahan dan pengendalian banjir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- t. Masih kurangnya fasilitas-fasilitas penangkaran sumber-sumber air untuk keperluan irigasi.
- u. Adanya fasilitas-fasilitas penangkaran sumber-sumber air yang sudah terbangun yang mengalami kerusakan.
- v. Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam program-program atau kegiatan-kegiatan pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.



- w. Masih kurangnya bangunan/fasilitas penangkaran/konservasi air tanah yang terbangun.
- x. Banyak bangunan-bangunan utama (pengambilan, pembagi, penguras) yang belum dilengkapi dengan pintu air.
- y. Masih adanya jaringan irigasi yang sudah terbangun yang mengalami kerusakan dengan kondisi rusak berat.
- z. Adanya bangunan pintu air yang mengalami kerusakan.
- aa. Masih kurangnya pengalokasian anggaran Operasi dan Pemeliharaan (O dan P) jaringan irigasi yang sudah terbangun.
- bb. Masih kurangnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas petani pemakai air yang responsif gender.
- cc. Masih banyak potensi daerah irigasi baru yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Sidrap yang belum dibangun dan atau butuh untuk dikembangkan.
- dd. Belum tersedianya database irigasi dan sungai
- ee. Masih kurangnya sarana dan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku dalam rangka memenuhi ketersediaan air baku untuk masyarakat.
- ff. Masih kurangnya sumur-sumur air tanah yang terbangun dalam rangka memenuhi ketersediaan air baku masyarakat.

4.1.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah:

- a. Masih adanya sejumlah rumah penduduk yang tidak layak huni;
- b. Belum memadainya ketersediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) di kawasan permukiman;
- c. Tidak memadainya sarana dan prasarana jalan di kawasan perumahan dan permukiman;
- d. Masih adanya kawasan permukiman kumuh
- e. Masih terdapatnya warga yang belum terlayani akses air bersih dan sanitasi air limbah.

4.1.2.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:

- a. Meningkatnya kasus pelanggaran perda dan perkara



- b. Masih terjadinya kasus tindak kriminal dan cenderung meningkat.
- c. Masih seringnya terjadi gangguan keamanan dan ketertiban umum

4.1.2.1.6. Sosial

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- b. Masih adanya keluarga miskin yang belum menerima bantuan RASTRA
- c. Masih ada anak-anak dari keluarga miskin yang tidak bisa melanjutkan pendidikan tinggi yang salah satu faktor penyebabnya adalah masalah biaya
- d. Masih rendahnya penanganan fakir miskin melalui bantuan usaha KUBE.
- e. Belum optimalnya penyaluran bantuan pangan non tunai, bantuan sosial bencana dan bantuan serta jaminan sosial lainnya berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- f. Belum tersedianya database tentang anak terlantar (putus sekolah) dan sarana prasarana pendukung serta peningkatan keterampilan dan kemandirian anak terlantar dan putus sekolah.
- g. Belum tersedianya database tentang penyandang disabilitas dan sarana prasarana pendukung serta peningkatan keterampilan dan kemandirian para penyandang disabilitas;
- h. Tidak adanya sarana pembinaan dan kurangnya prasarana pendukung bagi pembinaan dan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial dan tuna sosial lainnya;
- i. Kurangnya jumlah organisasi sosial (lembaga sosial) yang mendapatkan pemberdayaan sosial dan rendahnya peran aktif masyarakat dan dunia usaha terhadap pemberdayaan masyarakat/organisasi sosial.

4.1.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

4.1.2.2.1. Tenaga Kerja

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya besaran pencari kerja yang ditempatkan
- b. Rendahnya persentase keselamatan dan perlindungan tenaga kerja



- c. Masih kurangnya SDM tenaga kerja dan tenaga kerja terlatih di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja;
- d. Tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan persediaan lapangan kerja;
- e. Masih tingginya angka pengangguran
- f. Masih kurangnya SDM tenaga kerja dan tenaga kerja terlatih di bidang kewirausahaan;

4.1.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, adalah:

- a. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG dan IDG;
- b. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Masih adanya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak
- d. berhadapan dengan hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah, perkawinan anak dan penelantaran;
- e. Masih tingginya angkatan kerja perempuan yang belum terserap dalam pasar tenaga kerja;
- f. Rendahnya keterlibatan perempuan dilembaga legislatif, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen;
- g. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak;
- h. Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, dan pengasuhan yang aman;
- i. Belum tersedia lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- j. Sulitnya mendapatkan data terpilah gender dan anak dari OPD dan instansi terkait.

4.1.2.2.3. Pangan

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pembangunan pada urusan Pangan, adalah:

- a. Kurangnya regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah;
- b. Tidak meratanya ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah;
- c. Masih tingginya ketergantungan bahan pokok beras;
- d. Masih rendahnya ketersediaan protein hewani;
- e. Masih rendahnya penanganan daerah rawan pangan;



- f. Belum optimalnya pelaporan SKPG;
- g. Belum seimbang pola konsumsi masyarakat dimana masih didominasi oleh karbohidrat, ketimbang protein hewani maupun nabati;
- h. Belum memadainya informasi distribusi bahan pangan antar wilayah;
- i. Tidak stabilnya harga pangan (berfluktuasi);
- j. Belum memadainya sarana dan pasarana distribusi pangan;
- k. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;
- l. Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait tentang keamanan pangan;
- m. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- n. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan;
- o. Masih rendahnya promosi pangan lokal;
- p. Belum optimalnya lembaga petani dalam menyediakan cadangan pangan;
- q. Masih rendahnya anggaran operasional dalam mengelola cadangan pangan.

4.1.2.2.4. Pertanahan

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pembangunan pada urusan Pertanahan, adalah:

- a. Masih adanya lahan/aset pemerintah yang belum tersertifikasi;
- b. Masih banyaknya bangunan Negara yang membutuhkan penanganan;
- c. Masih banyaknya sarana dan prasarana daerah yang membutuhkan penanganan.

4.1.2.2.5. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan lingkungan hidup, adalah:

- a. Belum optimalnya pengelolaan persampahan di semua kecamatan, dirumah sakit arifin nu'mang dan tumpukan sampah di jalan poros di kec. Tellu Limpoe
- b. Masih terjadinya kerusakan lingkungan akibat penambangan (Penambangan galian C di sepanjang sungai menyebabkan kerusakan DAS)
- c. Polusi Udara akibat penggilingan padi.
- d. Kerusakan sungai Bila, gunung Lawawoi
- e. Sampah pada daerah irigasi
- f. Alih fungsi lahan pertanian



- g. Penggunaan pestisida yang mencemari lingkungan
- h. Sarang burung walet
- i. Penggundulan Hutan Lawawoi
- j. Pembakaran batu merah mencemari udara sekitar.
- k. Dampak Perubahan Iklim (Pemanasan Global).

4.1.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Capil

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil, adalah:

- a. Belum maksimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil karena jaringan koneksi internet yang lambat dan jumlah aparatur yang terbatas;
- b. Tidak adanya peraturan mengenai sanksi terhadap masyarakat yang tidak memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan;
- d. Tidak memadainya ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan;
- e. Masih adanya penduduk yang belum memiliki dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya mutasi penduduk;
- f. Belum maksimalnya kerja sama dengan lintas sektor untuk meningkatkan kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4.1.2.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, adalah:

- a. Belum adanya desa di kabupaten Sidrap yang memiliki kemandirian, baik dari segi kesehatan, pendidikan ataupun dalam wujud lain (smart village)
- b. Minimnya keberdayaan masyarakat pedesaan;
- c. Unit usaha (BUMDES) tidak berfungsi optimal;
- d. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- e. Pengelolaan sistem pemerintahan desa tidak dikelola secara profesional;
- f. Masih perlunya peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam membangun desa;
- g. Rendahnya SDM pengelola keuangan desa;



- h. Pengelolaan keuangan desa masih banyak yang tidak memenuhi asas transparansi, akuntabel, partisipatif dan demokratisasi.

4.1.2.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, adalah:

- a. Belum sinergisnya kebijakan pengendalian jumlah penduduk dan pelaksanaan program KB;
- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB, masih kurangnya partisipasi PUS untuk ber KB terutama laki-laki, dan masih rendahnya kesadaran penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
- c. Masih kurangnya pembinaan terhadap kelompok bina ketahanan keluarga;
- d. Kurangnya pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

4.1.2.2.9. Perhubungan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perhubungan, adalah:

- a. Belum terpenuhinya aksesibilitas jalan untuk semua wilayah, terutama pada wilayah pedesaan yang terjauhr;
- b. Belum optimalnya fungsi dan kinerja sarana dan prasarana transportasi, seperti terminal.
- c. Lemahnya sistem registrasi kepemilikan kendaraan.

4.1.2.2.10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan komunikasi dan informatika, adalah:

- a. Belum optimalnya pemamfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- b. Pengelolaan informasi dan komunikasi yang belum optimal
- c. Masih belum meratanya kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam pemamfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- d. Seringnya bocor informasi ke pihak yang tidak berkepentingan
- e. Diambil alihnya beberapa acount milik pemerintah oleh hacker
- f. Sulitnya mengetahui dan mengidentifikasi insiden



4.1.2.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan koperasi, usaha kecil menengah, adalah:

- a. Masih tingginya persentase UMK terhadap seluruh UMKM
- b. Rendahnya persentase koperasi aktif

4.1.2.2.12. Penanaman Modal

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan penanaman modal, adalah

- a. Masih kurangnya investor yang ingin menanamkan modal di kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Belum optimalnya promosi bidang penanaman modal
- c. Belum lengkapnya Sarana dan prasarana pengaduan layanan perizinan
- d. Masih belum optimal serta rendahnya kualitas SDM di bidang pelayanan perizinan PTSP
- e. Belum maksimalnya masyarakat yang mengadu atas layanan perizinan
- f. Tidak maksimalnya pelayanan pengaduan

4.1.2.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kepemudaan dan olahraga, adalah:

- a. Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya legalisasi organisasi kepemudaan;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga;
- c. Kurangnya keterlibatan berbagai instansi terkait dalam pembinaan pemuda;
- d. Masih Kurangnya festival kepemudaan;
- e. Rendahnya kompetensi pemuda usia produktif;
- f. Kurang pengetahuan pemuda tentang penyalagunaan narkoba;
- g. Kurang optimalnya kegiatan pelatihan tenaga keolahragaan berbasis IPTEK;
- h. Terbatasnya Sumberdaya Manusia dan alat pengukuran talent scouting olahraga, serta tindak lanjut hasil pengukuran;
- i. Rendahnya Frekuensi kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat luas;
- j. Kurang Optimalnya pengembangan sentra olahraga pelajar;
- k. Masih kurangnya kegiatan kompetisi Olahraga;



- l. Masih terbatasnya pembibitan atlet potensial;
- m. Kurangnya sarana dan Prasarana olahraga.

4.1.2.2.14. Statistik

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan statistik adalah sebagai berikut :

- a. Relatif Rendahnya kualitas sumberdaya manusia pengumpul, pengolah dan penyaji laporan data dilihat dari kualifikasi formal dan kemampuan teknis perencanaan;
- b. Kurangnya peralatan komunikasi berbasis teknologi Informasi;
- c. Belum tersedianya Prosedur Operasi standar Operating Procedure (SOP) untuk seluruh unit kerja;
- d. Masih kurangnya sinergisnya koordinasi antar bidang pada lembaga Bappeda dan statistik dan masih kurang sinergisnya koordinasi eksternal dengan OPD;
- e. Belum adanya data yang akurat, valid dan relevant serta up-to-date yang dapat mendukung terwujudnya kualitas produk perencanaan yang baik.

4.1.2.2.15. Kebudayaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kebudayaan, adalah:

- a. Masih kurangnya kepedulian terhadap seni budaya daerah yang perlu dilestirikan;
- b. Belum memadainya inventarisasi jumlah situs dan kawasan cagar budaya karena belum adanya kerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan pengkajian andalan penetapan situs;
- c. Masih minimnya data yang akurat dan inventarisasi karya budaya;

4.1.2.2.16. Perpustakaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perpustakaan, adalah:

- a. Rendahnya minat baca masyarakat;
- b. Terbatasnya jumlah koleksi bahan pustaka;
- c. Belum berkembangnya berbagai jenis perpustakaan yang ada;
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan dalam hal ini gedung perpustakaan yang representatif
- e. Koleksi buku yang tidak kekinian



4.1.2.2.17. Kearsipan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kearsipan adalah sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya administrasi kearsipan berbasis elektronik
- b. Masih terdapat dokumen/ arsip daerah yang tidak dilestraikan
- c. Pengelolaan arsip di OPD/ SKPD belum maksimal
- d. Naskah sumber arsip belum ada

4.1.2.3. Urusan Pilihan

4.1.2.3.1. Perikanan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kelautan dan perikanan, adalah:

- a. Lemahnya Kemampuan Pelaku Usaha di Bidang Kenelayanan, dalam Kemandirian Berwirausaha;
- b. Masih Rendahnya Kemampuan Kemandirian berwirausaha Bagi Pembudidaya Ikan secara berkelanjutan;
- c. Rendahnya Legalitas Berusaha bagi Pelaku Usaha Perikanan.

4.1.2.3.2. Pariwisata

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya Pelaksanaan Festival, Event/ Pameran Pariwisata;
- b. Belum Optimal Peran Kelompok Sadar Wisata;
- c. Belum memadainya ketersediaan infrastruktur pendukung sarana dan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata;
- d. Belum memadainya Daerah Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini RIPARDA

4.1.2.3.3. Pertanian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Belum maksimalnya pengelolaan usaha tani yang bebas agribisnis;
- b. Kurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani;
- c. Rendahnya akses petani terhadap permodalan;
- d. Masih terbatasnya kompetensi petani dalam hal peningkatan teknologi pertanian;
- e. Makin besarnya tuntutan standarisasi produk hasil pertanian;
- f. Terus berlangsungnya alih fungsi lahan;



- g. Masih adanya pertanaman hambur yang dilakukan oleh petani;
- h. Tidak adanya jaminan harga terutama untuk komoditi tertentu sehingga pada saat panen raya harga di tingkat petani sangat rendah;
- i. Belum optimalnya pengembangan teknologi spesifik lokasi dengan usaha tani yang ramah lingkungan;
- j. Penanganan pasca panen yang masih rendah;
- k. Masih rendahnya kualitas SDM aparat dan kemampuan petani sebagai pelaku agribisnis;
- l. Masih rendahnya produksi tanaman perkebunan;
- m. Kurangnya kelompok tani yang melakukan pengolahan limbah ternak;
- n. Jumlah Akseptor IB masih rendah;
- o. Ternak bibit sapi belum bersertifikat;
- p. Keterbatasan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (Kontainer);
- q. Kurangnya tempat pemasaran hewan;
- r. Perlunya penanggulangan penyakit ternak Antrax dan Rabies.

4.1.2.3.4. Kehutanan

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Secara ekonomi kontribusi sektor kehutanan masih rendah namun kontribusi intangiblenya tidak dihitung Perlu menghitung kontribusi intangible dari sektor kehutanan untuk menjadi pertimbangan ekonomi lingkungan, lain halnya tentang Kerusakan Kawasan Hutan yang luasnya mencapai 350 Ha dan Masih banyak lahan kritis yang belum direhabilitasi yang di sebabkan Besarnya laju deforestasi dan degradasi hutan serta tersedianya data dan informasi laju degradasi kawasan hutan, maka untuk mengatasinya maka perlu penyelesaian tata batas kawasan hutan, batas luar, dan batas fungsi kawasan hutan serta penguatan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan melalui peningkatan kapasitas polisi hutan.

4.1.2.3.5. Energi dan Sumberdaya Mineral

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan energi dan sumberdaya mineral, adalah:

- a. Terjadinya aktivitas pertambangan tanpa izin yang berada diluar wilayah yang disebutkan di dalam RT RW pertambangan;
- b. Masih lambatnya proses penerbitan rekomendasi usaha pertambangan sehingga menghambat penerbitan rekomendasi usaha pertambangan oleh Dinas Perindustrian Kab. Sidenreng Rappang



- c. Rendahnya Kesadaran para Pengusaha di Sektor Pertambangan dalam memenuhi kewajibannya;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan penanganan pertambangan tanpa izin;
- e. Besarnya nilai konfensasi lahan untuk pengembangan sektor pertambangan;
- f. Belum Optimalnya pendataan rumah tangga yang belum menikmati jaringan listrik PLN;
- g. Masih Terbatasnya data Potensi pengembangan energi baru terbarukan;
- h. Belum optimalnya kegiatan pengawasan dan pembinaan teknis kepada para pelaku usaha disektor Migas;
- i. Masih terbatasnya tenaga teknis untuk bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; Masih Terbatasnya data Potensi sumber daya mineral, air tanah dan mata air.

4.1.2.3.6. Perdagangan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perdagangan, adalah:

- a. Kurangnya pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan
- b. Penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target
- c. Kualitas infrastruktur pasar yang masih sangat rendah dan kurang

4.1.2.3.7. Perindustrian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perindustrian, adalah:

- a. Pertumbuhan industri kerajinan tidak berjalan sesuai yang diharapkan
- b. Belum tersusunnya perda tentang RPIK
- c. Belum tersedianya fasilitasi peralatan/tempat bagi pelaku IKM

4.1.2.3.8. Transmigrasi

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan transmigrasi, adalah:

- a. Masih adanya infrastruktur yang belum dibangun dilokasi sehingga membutuhkan dukungan dana untuk perencanaan dilokasi transmigrasi
- b. Perlunya pengembangan usaha bagi warga transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan warga transmigrasi



4.1.2.4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

4.1.2.4.1. Administrasi Pemerintahan

Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik belum maksimal.

4.1.2.4.2. Pengawasan

Masih terbatasnya penyelenggaraan bimtek/pelatihan yang berkaitan dengan pengawasan.

4.1.2.4.3. Perencanaan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan perencanaan pembangunan, adalah:

- a. Masih Rendahnya Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan;
- b. Belum Optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah sehingga perumusan kebijakan kurang berkualitas;
- c. Kurangnya Data yang Akurat, Valid, dan Relevan serta Up to Date (kekinian) yang dapat mendukung terwujudnya kualitas produk Perencanaan yang Baik;
- d. Lemahnya Kapasitas Aparat Perencana dilihat dari kualifikasi Pendidikan dan Kemampuan Teknis Perencana, dalam hal ini tenaga fungsional perencana;
- e. Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana Perencanaan.

4.1.2.4.4. Keuangan

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Tidak tercapainya target penerimaan PAD
- b. Pengelolaan keuangan belum memadai
- c. Penyajian laporan keuangan belum akuntabel
- d. Kurang tersajinya APBD secara lengkap
- e. Tidak tertibnya dalam pembagian anggaran KAS SKPD
- f. Laporan keuangan SKPD tidak disajikan tepat waktu
- g. Pemahaman yang kurang terhadap pengelolaan keuangan daerah dan akurat dalam penyajian data
- h. Kewajiban menyusun laporan semester, Perda, perbup, LKPD dan keterlambatan penyampaian laporan SKPD



- i. Terbitnya LHP dalam pelaksanaan program/ kegiatan di SKPD yang diakibatkan karena adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- j. Masih banyaknya barang milik daerah (BMD) dalam kondisi rusak berat (RB)
- k. Persoalan pengamanan dan pengendalian barang milik daerah (BMD) merupakan kegiatan yang bersifat berkesinambungan
- l. Aturan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berkembang dan terkadang mengalami perubahan
- m. Diperlukan biaya Appraisal (penilaian) BMD untuk kegiatan pemindahtanganan dan pemamfaatan BMD akibat belum adanya penilai daerah
- n. Tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang tugas pokok dan fungsi ASN
- o. Laporan standarisasi pengadaan, harga satuan dan tata tertib administrasi aset yang masih beragam
- p. Masih banyak objek pendapatan yang bermasalah

4.1.2.4.5. Kepegawaian

Permasalahan yang teridentifikasi pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, adalah:

- a. Masih rendahnya jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan (Diklat PIM);
- b. Kurangnya pegawai yang dikirim mengikuti tugas belajar dan mengajukan izin belajar untuk peningkatan jenjang pendidikan;
- c. Pengadaan PNS belum sepenuhnya bisa mengakomodir pada kebutuhan riil;
- d. Belum terlaksananya secara optimal pengembangan pegawai berdasarkan pola karier;
- e. Penerapan peraturan disiplin pegawai belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen;
- f. Penempatan PNS belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi jabatan;
- g. Belum obyektifnya sistem penilaian kinerja pegawai.

4.2 Analisis Isu Strategis

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan isu strategis sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan



daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan, baik internasional, nasional, hingga regional, karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Diharapkan dengan memerhatikan setiap isu strategis yang muncul, dalam waktu lima tahun ke depan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang lebih signifikan dan memiliki keterkaitan dengan perwujudan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan lima tahun kedepan. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan.

4.2.1. Isu Strategis Global

Isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan selama (5) lima tahun masa perencanaan jangka menengah Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain: pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDG's (*Sustainable Development Goals*),



ancaman krisis ekonomi global, penerapan *Green Economic Global* (ekonomi ramah lingkungan), penerapan sumber energi alternatif sebagai antisipasi sumber energi tak terbarukan, antisipasi perubahan iklim global (*Global Warming/Climate Change*), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Revolusi Industri 4.0.

4.2.1.1. Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

SDGs atau sustainable development goals, yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MGDs sekarang diganti SDGs. Jadi, negara-negara di dunia menyepakati sebuah platform baru dengan terminologi baru, yakni SDGs. Baik SDGs maupun MDGs pada dasarnya memiliki persamaan cita-cita. Salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan di dunia. Namun, ada hal yang lebih progresif yang dicantumkan di dalam SDGs yang ingin dicapai pada tahun 2030 mendatang. Adapun 17 poin penting di dalam SDGs, yakni terciptanya dunia dengan :

- a. Tanpa kemiskinan;
- b. Tanpa kelaparan;
- c. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan berkualitas;
- e. Kesetaraan gender;
- f. Air bersih dan sanitasi;
- g. Energi bersih dan terjangkau;
- h. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak;
- i. Industri, inovasi, dan infrastruktur;
- j. Pengurangan kesenjangan;



- k. Keberlanjutan kota dan komunitas;
- l. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
- m. Aksi terhadap iklim;
- n. Kehidupan bawah laut;
- o. Kehidupan di darat;
- p. Institusi peradilan yang kuat dan kedamaian; dan
- q. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Capaian pembangunan SDGs di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Indikator-indikator yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan sudah mencapai target nasional sesuai dengan RPJMD Tahun 2019. Jumlah indikator dijabarkan pada gambar berikut ini

Tabel 4.24
Kategori A Berdasarkan Tujuan TPB

NO. TPB	TUJUAN TPB	KATEGORI INDIKATOR
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	6
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	5
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	13
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	2
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	4
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan	2
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	0
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	3
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	5
10	Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara	2
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	0
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	0
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim	0



NO. TPB	TUJUAN TPB	KATEGORI INDIKATOR
	dan dampaknya	
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	0
15	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	0
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	5
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	5
Total		52

Jumlah tujuan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan sudah mencapai target nasional yaitu sebanyak 11 tujuan dengan jumlah indikator sebanyak 52 indikator dari total keseluruhan indikator yang merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebanyak 199 indikator.

- Berdasarkan hasil telaah yang dilakukan indikator yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target yaitu dengan jumlah indikator pada setiap tujuan ditunjukkan pada table berikut :

Tabel 4.25
Kategori B Berdasarkan Tujuan TPB

NO. TPB	TUJUAN TPB	KATEGORI INDIKATOR
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	7
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	1
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	7
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	5
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	1
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan	4



NO. TPB	TUJUAN TPB	KATEGORI INDIKATOR
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	0
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	3
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	0
10	Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara	0
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	1
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	2
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	0
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	0
15	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	0
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	7
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	1
Total		39

Jumlah tujuan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang namun belum mencapai target nasional yaitu sebanyak 11 tujuan dengan jumlah indikator sebanyak 39 indikator dari total keseluruhan indikator yang merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu sebanyak 199 indikator.

- Adapun indikator yang belum dilaksanakan program dan kegiatan daerah dengan jumlah indikator pada setiap tujuan ditunjukkan pada tabel berikut:



Tabel 4.26
Kategori C Berdasarkan Tujuan TPB

NO. TPB	TUJUAN TPB	KATEGORI INDIKATOR
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	10
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	5
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	12
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	6
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	9
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan	9
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	0
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	13
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	5
10	Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara	9
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	8
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	3
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	2
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	0
15	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	3
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	9
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	5
Total		108

Jadi secara keseluruhan indikator yang merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 199 indikator dengan berbagai kriteria adalah sebagai berikut :



Tabel 4.27

Indikator Wewenang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	KRITERIA	JUMLAH PENCAPAIAN INDIKATOR (%)	
1	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target	52	26.13
2	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target	39	19.60
3	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target	108	54.27

Berdasarkan hasil proyeksi dan kajian enam muatan daya dukung, maka terdapat sebelas (11) tujuan yang menjadi sasaran prioritas dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam merumuskan arah kebijakan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebelas (11) isu prioritas tersebut antara lain :

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.
- 2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
- 4) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
- 6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.
- 7) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- 8) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
- 9) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- 10) Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- 11) Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



4.2.1.2. Ancaman krisis ekonomi global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang nantinya akan berdampak pada perekonomian beberapa negara termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Negara Indonesia karena Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam pertemuan para pemimpin 20 (dua puluh) Negara di Los Cabos, Meksiko, memaparkan bahwa sejak 2008, negara-negara industri Barat dihempaskan oleh krisis ekonomi. Dalam menghadapi resesi global, sepertinya program penanggulangan krisis ekonomi tidak banyak memberikan harapan. Negara Amerika Serikat sebagai Negara Adidaya belum sepenuhnya dapat keluar dari krisis ekonomi, termasuk negara-negara zona euro.

Ancaman ini bermula dari tingginya tumpukan hutang, baik oleh rakyat maupun negaranya, sehingga berimbas pada krisis ekonomi. Begitu juga Indonesia yang memiliki cukup banyak hutang, dikhawatirkan akan terjadi krisis yang sebentar lagi menghempaskan perekonomian Negara Indonesia. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed States Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Negara Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 (enam puluh tiga) dari 178 (saratus tujuh puluh delapan) negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi sebuah negara, dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

4.2.1.3. Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Telah diselenggarakan konferensi tingkat internasional mengenai *Green Economic Global* yang dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur mengusung tema *The Role of Local Government on Blue Economy*. Pemrakarsa konferensi internasional ini adalah Universitas 17 Agustus



1945 (Untag) Surabaya, Universitas Khon Kaen Thailand, dan Yayasan Damandiri dengan didukung oleh Pemerintah Daerah Surabaya.

Sekitar 400 peserta termasuk para tokoh dari berbagai negara hadir dalam konferensi itu, antara lain dari Afrika Selatan dan beberapa negara di Afrika, Asia, Australia, dan Selandia Baru. Dalam forum berskala internasional tersebut, sejumlah pakar terkait, baik dari kalangan akademisi maupun Pemerintah telah menyajikan berbagai persoalan berkaitan dengan pengembangan ekonomi bersifat ramah lingkungan yang dapat diterapkan di beberapa wilayah di Tanah Air. Hal ini dilakukan sebagai penerapan *Green Economy* yang telah menjadi pembicaraan hangat di sejumlah negara di dunia karena degradasi lingkungan semakin lama semakin meluas dengan tingkat keparahan yang semakin tinggi.

Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan internasional ke pola pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, ketersediaan air bersih, dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi kerusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US\$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

4.2.1.4. Penerapan sumber energi alternatif sebagai antisipasi sumber energi tak terbarukan

Keberlanjutan sumber energi di masa depan semakin menipis, selain khawatir akan kapasitasnya yang semakin berkurang, masyarakat



dunia juga khawatir akan isu *global warming* yang diakibatkan oleh hasil pembakaran energi fosil sehingga membuat lapisan ozon semakin tipis. Indonesia sendiri masih sangat tergantung dengan pasokan energi yang berasal dari energi fosil untuk digunakan sebagai Bahan Bakar Minyak (BBM).

Tingginya konsumsi BBM di Indonesia cukup memprihatinkan sehingga perlu adanya pembaharuan dalam menyikapi krisis energi dengan penggunaan energi alternatif. Energi alternatif ini sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan kondisi geografis Indonesia yang beriklim tropis dan kesuburan tanah yang berpotensi. Sumber energi alternatif dapat berasal dari sampah yang kita hasilkan baik organik maupun anorganik serta berasal dari sumber energi terbarukan seperti biomassa, matahari, angin, dan sebagainya. Diharapkan ke depannya, Indonesia memiliki sumber energi yang akan mencukupi kebutuhan energi dalam negeri tanpa khawatir dengan peningkatan pemanasan global.

4.2.1.5. Antisipasi perubahan iklim global (*Global Warming/Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari Pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian



alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

4.2.1.6. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Revolusi Industri 4.0

Pada era globalisasi sekarang ini, ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat, yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan.

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

4.2.1.7. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Terdapat empat hal yang akan menjadi fokus MEA yang dapat dijadikan suatu momentum yang baik untuk Indonesia. Pertama, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besardan skilled labour menjadi tidak ada



hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-Commerce. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem Double Taxation, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online. Ketiga, MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi. Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktivitas sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.

4.2.1.8. Perubahan Iklim

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar



fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya musim, pendeknya musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta dampak lainnya.

Dalam skala nasional Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus terhadap perubahan iklim dengan berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Pertemuan UNFCCC COP-21 menghasilkan dokumen Peretujuan Paris (Paris Agreement) yang diratifikasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution-NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan hingga 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional.

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Provinsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 59 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Selatan disumbang oleh beberapa sektor/bidang antara lain pertanian, kehutanan, energi dan transportasi serta bidang limbah. Secara total hasil pengkajian ulang terhadap target penurunan emisi gas rumah kaca di



Provinsi Sulawesi Selatan adalah 5,6% atau setara dengan 300.000 ton CO₂eq setiap tahun yang akan dicapai hingga tahun 2030 dengan menggunakan anggaran pemerintah provinsi. Sejalan dengan itu, dari sisi adaptasi perlu pula dilakukan penguatan kapasitas kepada masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada daerah-daerah yang rentan. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh pemerintah provinsi oleh karena itu diperlukan pelibatan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), mitra pembangunan dan pemerintah kabupaten/kota sesuai perannya masing-masing.

Pada level nasional, terdapat beberapa prioritas nasional yang menjadi mandat bagi daerah yang tertuang dalam Nawa Cita RPJMN 2015-2019. Prioritas nasional tersebut mencakup: (1) dimensi pembangunan manusia yakni revolusi mental, pendidikan, kesehatan dan perumahan; (2) dimensi pembangunan sektor unggulan yakni kedaulatan pangan, kedaulatan energy dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan yakni pemerataan antar kelompok pendapatan dan pemerataan antar wilayah mencakup pembangunan desa, pembangunan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal dan pembangunan perkotaan. Selain itu terdapat sejumlah prioritas yang merupakan prakondisi bagi berjalannya pembangunan yakni kepatuhan dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

4.2.2. Penelaahan Isu Strategis Nasional

4.2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2015-2019

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang



terpilih pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kerja. Kekuatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat selalu bahu-membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur Pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi



kebutuhan pokok.

Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam



kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pembangunan Indonesia sebagaimana termuat pada RPJMN periode 2015-2019 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun dari pinggiran berarti mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan oleh Pemerintah salah satunya wilayah perbatasan.

Pengembangan wilayah didasarkan pada potensi keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif Pulau Sulawesi. Adapun tema



pengembangan wilayah Pulau Sulawesi yaitu i) Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia, ii) Pengembangan industri berbasis logistik, iii) Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung; iv) Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi dan gas bumi; v) Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari.

Adapun sasaran pengembangan Wilayah Sulawesi pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Sulawesi, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 2 (dua) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 4 (empat) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET);
2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Sulawesi, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 15 (lima belas) kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran *outcome*: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 9,2 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 11,7 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72,77;
3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Sulawesi, maka akan dipercepat pembangunan 1 (satu) Kawasan Perkotaan Metropolitan, peningkatan efisiensi pengelolaan 1 (satu) Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada saat ini, serta mewujudkan optimalisasi peran 6 (enam) kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (*buffer*) urbanisasi;



4. Sesuai dengan amanat UU 6/2014 tentang Desa, maka akan dilakukan pembangunan perdesaan dengan sasaran berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 640 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 260 desa;
5. Untuk meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat 9 (sembilan) pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
6. Untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 2 (dua) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya;
7. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sasaran untuk wilayah Sulawesi adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 25% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 30% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 27% pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian(WTP) sebanyak 6 (enam) provinsi dan 20 (dua puluh) kabupaten/kota di wilayah Sulawesi; (6) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 70% dan S2-S3 sebesar 10%; (7) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Sulawesi sebesar 90 angkatan; (9) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 100%; Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 70%; (13) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil



Pemerintah; (14) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line di wilayah Sulawesi;

8. Untuk Penanggulangan Bencana di Wilayah Sulawesi adalah kawasan pengembangan wilayah berisiko tinggi yaitu: KAPET Palapas, KAPET Manado-Bitung, KAPET Bangsejahtera, KEK Palu, KEK Bitung; 4 (empat) PKN terdiri dari Gorontalo, Palu, Makassar, Sungguminasa; serta kelompok PKW yang terkait dengan pengembangan perkotaan minapolitan/agropolitan.

4.2.2.2. Rancangan Teknokrat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam masa penyusunan Rancangan Teknokrat RPJMN 2020-2024 dimana memiliki tema **“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”**. Tema ini mengarah pada arahan RPJPN tahap terakhir yakni tahapan keempat yakni **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing”**.

Dalam perwujudan Indonesia pada tahun 2024, maka dirumuskan 5 (lima) arah kebijakan rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia

a. Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial

Pada pelayanan dasar dan perlindungan sosial memiliki arah kebijakan

- Memperluas pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah;
- Memperkuat intervensi spesifik dan sensitife penurunan stunting terintegrasi pada lokus prioritas ;



- Memperkuat pelayanan kesehatan dasar dan upaya promotif dan preventif;
 - Mempercepat wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan memberikan keberpihakan terhadap anak dari keluarga kurang mampu dan penanganan anak tidak sekolah;
 - Memperkuat penerapan kurikulum berbasis pembelajaran keterampilan abad-21 (*higher-order thinking skills*);
 - Memperkuat sistem layanan air minum dan sanitasi berkelanjutan untuk menuntaskan akses universal dan pencapaian akses aman;
 - Memperbaiki skema pendanaan, pelaksanaan, dan kelembagaan SJSN;
 - Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing
- Pada Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
- Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan pelatihan vokasi selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/industri (kurikulum, tenaga pendidik, dan sarana prasarana);
 - Memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas melalui peningkatan mutu pembelajaran dan sumber daya pendidikan tinggi;
 - Meningkatkan akses dan keterampilan kaum muda dalam berwirausaha;
 - Memperluas akses dan skema pembiayaan bagi wirausaha;
 - Mengembangkan kewirausahaan berbasis teknologi dan sosial;
 - Meningkatkan kemudahan berusaha (perijinan, investasi, insentif, dll) melalui OSS (*Online Single Submission*);
 - Memperkokoh ketahanan budaya melalui pengembangan seni, nilai tradisi, pendidikan karakter, bahasa, dan perfilman;
 - Memperkuat peran Iptek dan Inovasi sebagai pengungkit produktivitas melalui pengembangan bidang riset strategis, penyediaan infrastruktur dan SDM iptek, serta pembinaan *technopreneur*;
 - Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade;



- Menyediakan fasilitas dan regulasi kerja yang ramah perempuan;
- Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor formal.

2. Pembangunan Ekonomi

c. Pangan dan Pertanian

Pada pangan dan pertanian ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri;
- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input, sarana prasana dan IPTEK pertanian dan perikanan;
- Mengembangkan nilai tambah dan keterpaduan aktifitas hulu-hilir pangan, pertanian dan perikanan;
- Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
- Meningkatkan kualitas SDM pertanian, perikanan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, & pembudidaya ikan;
- Penguatan logistik distribusi dari sentra produksi ke industri pengolahan/konsumen;
- Optimalisasi fungsi waduk terbangun untuk keperluan irigasi, air baku dan energi;
- Penerapan modernisasi secara bertahap dalam rangka efisiensi air irigasi;
- Pemantapan infrastruktur pada sentra produksi tanaman pangan; dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi; perkebunan, hortikultura, peternakan, termasuk optimalisasi pemanfaatan waduk yang terbangun.

d. Energi, Mineral dan Pertambangan

Pada energi, mineral dan pertambangan ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Peningkatan produksi, cadangan migas dan batubara;
- Akselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- Pemanfaatan batubara dalam negeri yang stagnan di bawah 30 persen dari total produksi;
- Penyediaan energi dan ketenagalistrikan masih kurang memadai baik kualitas maupun kuantitas;
- Optimalisasi distribusi dan pemanfaatan minyak dan gas dalam negeri;



- Peningkatan efisiensi dan konservasi energi;
 - Akselerasi peningkatan nilai tambah migas, batubara dan mineral dalam negeri;
 - Pertambangan berkelanjutan ;
 - Meningkatkan kapasitas kilang dan pembangkit listrik ;
 - Peningkatan dan pengembangan listrik.
- c. Kelautan dan Kemaritiman
- Pada kelautan dan kemaritiman ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
- Penyelarasan tata ruang darat dan laut;
 - Pengembangan cluster industri perikanan;
 - Pemantapan sarpras perikanan termasuk pengembangan sistem rantai dingin;
 - Penguatan aksesibilitas dan daya saing destinasi unggulan pariwisata bahari di 24 (dua puluh empat) lokasi;
 - Optimalisasi pemanfaatan produk kelautan: bioteknologi (*marine bioproduct*);
 - Pengembangan konektivitas laut;
 - Pengembangan *Sustainable Fisheries*;
 - Pengembangan kawasan konservasi perairan;
 - Penanggulangan pencemaran dan sampah laut.
- d. Pariwisata
- Pada pariwisata, arah kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut:
- Inovasi produk pariwisata (atraksi, kuliner, akomodasi, dan transportasi) untuk meningkatkan rerata pengeluaran harian wisatawan, terutama wisatawan mancanegara;
 - Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan pariwisata terutama di destinasi unggulan;
 - Peningkatan pengelolaan destinasi dan layanan pariwisata yang didukung penerapan standar pariwisata berkelanjutan;
 - Peningkatan investasi pariwisata dan penguatan rantai pasok industri pariwisata yang didukung optimalisasi sumber daya lokal;
 - Peningkatan jumlah tenaga kerja pariwisata yang terampil dan kompeten dengan didukung perbaikan pendidikan dan pelatihan pariwisata serta sertifikasi kompetensi;
 - Penguatan citra pariwisata dan perluasan/diversifikasi pemasaran;



- *Meeting, Incentives, Conference, Exhibition (MICE)*, wisata minat khusus (adventure, cruise, heritage, halal), dan *cross border tourism*.
- e. **Ekonomi Kreatif dan Digital**
Pada ekonomi kreatif dan digital ini dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:
- Pengembangan bakat dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) kreatif khususnya pada generasi muda, yang didukung penguatan seni dan budaya, serta kreativitas konten sebagai substansi dasar pengembangan produk kreatif;
 - Pengembangan infrastruktur dan ruang kreatif yang didukung kemudahan berusaha dan penyediaan insentif bagi inovasi dan diklat vokasi;
 - Peningkatan akses pembiayaan dan investasi yang sesuai, mudah diakses dan kompetitif;
 - Peningkatan dukungan riset dan akses informasi melalui kerjasama triple helix (Pemerintah, akademisi, dan swasta) yang didukung peningkatan penerapan HKI;
 - Peningkatan kualitas tata kelola usaha kreatif;
 - Perluasan akses pasar, jaringan dan kemitraan di dalam dan luar negeri;
 - Pengarusutamaan teknologi informasi dalam peningkatan efisiensi di berbagai sektor layanan publik;
 - Penguatan industri film, animasi, games, dan musik, yang didukung peningkatan daya saing kuliner, fashion dan kriya.
- f. **Industri Manufaktur**
Pada industri manufaktur ini dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:
- Peningkatan Keterampilan+Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola usaha;
 - Inovasi melalui kerja sama Triple Helix;
 - Investasi yang berorientasi GPN, teknologi dan ekspor;
 - Peningkatan produktivitas dan kualitas produksi sektor primer;
 - Ketersediaan Infrastruktur, energi dan logistik;
 - Peningkatan manfaat FTA dan promosi ekspor;
 - Peningkatan *Manuservice* dan Industri daur ulang;



- Pemanfaatan pengungkit keunggulan kompetitif: Industri 4.0, ekonomi kreatif dan digital;
- Optimasi permintaan: pasar domestik, Industri *Halal, Healthy and Leisure Lifestyle*;
- Perkuatan industri hulu dan antara terutama di subsektor kimia dan logam;
- Peningkatan ekspor subsektor unggulan antara lain :
 - Sub-sektor berbasis teknologi: otomotif , mesin dan peralatan elektronik;
 - Sub-sektor padat karya: tekstil dan produk tekstil, dan alas kaki;
 - Sub-sektor berbasis SDA: makanan minuman, pengolahan ikan,CPO dan turunannya.

3. Pembangunan Infrastruktur

Pada pembangunan infrastruktur ini dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

- Peningkatan akses perumahan dan permukiman yang layak;
- Optimalisasi tampungan terbangun untuk akselerasi penyediaan air baku dan air minum;
- Peningkatan akses sanitasi aman;
- Penanganan terpadu keselamatan transportasi;
- Pengelolaan banjir terpadu di lokasi pusat pertumbuhan ekonomi;
- Integrasi pelabuhan dan kawasan industri (termasuk *logistic center*);
- Konektivitas laut melalui integrasi pengelolaan pelabuhan, efisiensi jaringan pelayaran, dan pengembangan platform e-logistik;
- Konektivitas transportasi multimoda pada hinterland pelabuhan;
- Pengembangan konektivitas transportasi udara;
- Peningkatan peran transportasi masal;
- Pengelolaan air baku, air tanah, air minum, dan sanitasi terpadu;
- Penataan kota berkelanjutan;
- Pemanfaatan TIK dalam pengembangan infrastruktur perkotaan;
- Pemerataan dan peningkatan akses dan infrastruktur TIK;
- Pemanfaatan TIK untuk layanan publik (bantuan sosial, kesehatan [*telemedicine*], pendidikan [*e-learning*], pertanian dan perikanan);
- Pemanfaatan TIK untuk sektor industri dan perdagangan;



- Penerapan syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) perangkat TIK untuk mendukung industri manufaktur lokal.

4. **Pembangunan Politik, Hukum, serta Pertahanan dan Keamanan**

Pada pembangunan politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan Implementasi Doktrin Poros Maritim Dunia yang lebih berorientasi keluar, seperti aktif dalam kerjasama negara-negara pesisir Samudera Hindia (IORA);
- Penguatan Kepemimpinan pada forum internasional dan regional;
- Mengoptimalkan Peran Indonesia di Dewan HAM PBB dan di Dewan Keamanan PBB;
- Penguatan kapasitas mengantisipasi ancaman perang terbuka, narkoba, terorisme, dan bencana alam;
- Memperkuat aktualisasi ideologi negara;
- Penguatan kapasitas keamanan dalam negeri, termasuk pengamanan perbatasan antar negara;
- Penguatan lembaga demokrasi, mengurangi biaya politik, dan penguatan desentralisasi;
- Penguatan peran serta stakeholders dalam kebijakan, perluasan kemitraan pembangunan (Prinsip *No One Left Behind*), dan peningkatan profesionalitas dan netralitas ASN;
- Penguatan penegakan hukum dengan mengoptimalkan *restorative justice*;
- Penguatan kapasitas pencegahan korupsi melalui penguatan pelaksanaan Stranas Pencegahan Korupsi.

5. **Pembangunan Kewilayahan**

Pada pembangunan kewilayahan ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Pengembangan perdesaan, wilayah terdepan, terluar dan tertinggal;
- Peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI dan daerah tertinggal lainnya;
- Peningkatan konektivitas antar-wilayah;
- Optimalisasi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, KSPN);
- Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemda dan Pemdes (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur);
- Percepatan pemenuhan SPM terutama di daerah tertinggal;



- Peningkatan inovasi pemerintahan daerah;
- Peningkatan kemudahan perizinan;
- Pengembangan kerja sama antar-daerah, kolaborasi multipihak serta meningkatkan kualitas SDM;
- Penataan pola hubungan Pusat dan Daerah;
- Peningkatan peran kota kecil-menengah dan pengendalian kota besar metropolitan;
- Penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan dan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah.

Pada Rancangan Teknokrat RPJMN Tahun 2020-2024 terdapat arah kebijakan kewilayahan Sulawesi 2020-2024. Pada perencanaan pembangunan wilayah Sulawesi, terdapat sektor utama pendukung pembangunan Wilayah Sulawesi 2020-2024 yaitu:

- a. Pertanian, kehutanan, perikanan;
 - Sub sektor perikanan;
 - Sub sektor tanaman pangan.
- b. Industri Manufaktur;
 - Sub sektor industri barang galian bukan logam.

Dari sektor utama pendukung pembangunan tersebut, dirumuskan tema pembangunan wilayah Sulawesi adalah “Pusat Lumbung pangan (padi, jagung) nasional, perkebunan kakao, serta pengembangan industri pengolahan”. Dari tema tersebut maka ditetapkan pusat-pusat pertumbuhan yang utama, diarahkan untuk:

- a. Pengembangankawasan metropolitan Mamminasata dan rencana pengembangan kawasan metropolitan Bimindo;
- b. Operasionalisasi dan peningkatan investasi KEK Bitung;
- c. Peningkatan investasi di KEK Palu, KI Bantaeng, KI Morowali, dan KI Konawe;
- d. Pengembangan Kawasan Pariwisata Bunaken dan Wakatobi serta Tana Toraja diharapkan dapat mendorong peningkatan sektor jasa.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah berusaha meningkatkan performa dan efisiensi kinerja dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam Rancangan Teknokrat RPJMN 2020-2024 terdapat *exercise* strategi tata kelola pemerintahan daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Mendorong kerja sama antar daerah dan kelembagaan regional pada kawasan metropolitan (Mamminasata dan Bimindo), KSPN



Wakatobi, KSPN Bunaken, dan KSPN Tana Toraja, KEK/KI (a.l. KEK Palu, KEK Bitung, KI Konawe, KI Bantaeng), serta pusat pertumbuhan lainnya;

2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar melalui peningkatan koordinasi perencanaan dan prioritas anggaran pada: SPM bidang pendidikan (peningkatan APM SMP) dan SPM bidang kesehatan (peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan penurunan *stunting*) serta meningkatkan layanan kesehatan anak, terutama di provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat;
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui ekstensifikasi dan intensifikasi;
4. Optimasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belanja modal produktif (infrastruktur strategis);
5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kompetensi bidang perikanan, pertanian, pariwisata, dan industri;
6. Memperbaiki distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang pelayanan dasar kesehatan (tenaga medis) dan pendidikan (tenaga guru dan pendidik);
7. Mendorong kolaborasi multipihak (Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan komunitas);
8. Meningkatkan iklim investasi melalui deregulasi aturan daerah serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan PTSP dan OSS;
9. Meningkatkan pelaksanaan *Good Governance* di level pemda (a.l. opini keuangan BPK);
10. Meningkatkan sinergi pusat dan daerah terutama dalam aspek perencanaan dan penganggaran;
11. Mendorong tercipta dan dilaksanakannya inovasi daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah.

Berikut penjabaran kawasan strategis dan sektor unggulan pada perencanaan pembangunan wilayah Sulawesi:

4.2.2.2.1. Penelaahan Isu Strategis Provinsi

4.2.2.2.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028

Dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur dan mandiri maka disusun kebijakan pembangunan jangka panjang yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008-2028. Dalam rumusan perencanaan pembangunan jangka panjang tersebut memiliki visi pembangunan yang mencerminkan kesuksesan pembangunan jangka panjang serta misi pembangunan yang merupakan upaya untuk mewujudkan visi tersebut.

Visi Pembangunan Sulawesi Selatan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan memperhatikan hasil analisis dinamika lingkungan strategis serta aspirasi seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Sulawesi Selatan. Visi pembangunan berfungsi untuk mengarahkan aktivitas dari semua tatanan internal pada satu sasaran yang disepakati bersama. Visi pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan adalah **“Wilayah Terkemuka di Indonesia Melalui Pendekatan Kemandirian Lokal yang Bernafaskan Keagamaan”**.

Dalam upaya perwujudan visi pembangunan tersebut, maka misi yang sesuai untuk pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 adalah:

- a. **Meningkatkan kualitas manusia Sulawesi Selatan** dalam arti memiliki tingkat kualitas hidup yang memadai serta memiliki jatidiri dan wawasan yang luas sehingga, selain mampu mengaktualisasikan dirinya secara mandiri, juga mampu ber sikap dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota dari tatanan pada berbagai strata. Sebagai anggota komunitas lokal, setiap manusia dewasa semestinya mampu berpartisipasi membantu komunitasnya melaksanakan fungsi spesifiknya; sebagai warga negara senantiasa berupaya mengisi dan meningkatkan kualitas ketahanan nasional yang berbasis pada falsafah Pancasila; sebagai warga dunia yang bertugas menjaga kelestarian planet bumi serta perdamaian dunia yang berdasarkan kepada pluralisme dan keadilan; dan sebagai makhluk menyadari bahwa ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu keniscayaan;
- b. **Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai komunitas pembelajar** (*evolutionary learning community*) yang memiliki kemampuan adaptasi kreatif yang prima karena memiliki identitas yang kuat dan didukung oleh keberadaan tatanan internal berupa lembaga masyarakat yang tangguh dan mandiri di semua bidang kehidupan dan daerah kabupaten / kota yang telah menjadi komunitas mandiri yang memiliki keunggulan lokal. Tatanan internal pada satu sisi memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai alternatif untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat (*choice*) dalam semua aspek kehidupan,



sedangkan pada sisi lain juga mampu meningkatkan kemampuan memilih dan menyalurkan aspirasi (*voice*) dari seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali;

- c. **Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai wilayah yang kondusif dan atraktif** bagi terselenggaranya aktivitas sosial ekonomi, politik dan budaya serta peluang bagi setiap individu dan setiap tatanan internal untuk melakukan aktualisasi diri; melalui penataan kelembagaan Pemerintah agar menjadi lebih bersih, tangguh dan berwibawa; pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, memihak rakyat kecil; serta membantu memantapkan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas;
- d. **Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan, asri dan lestari** melalui penataan ruang yang mengedepankan pertimbangan kepentingan sosial ekonomi, kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam perspektif masa kini dan masa depan, pemanfaatan teknologi, serta pemerataan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk keberpihakan kepada kelompok, kelas dan komunitas masyarakat yang relatif masih lemah. Penataan struktur tata ruang diarahkan untuk meningkatkan kualitas keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan. Sedangkan alokasi pemanfaatan ruang difokuskan kepada upaya untuk menumbuhkan kawasan pengembangan ekonomi yang memiliki keunggulan lokal sehingga membuka peluang bagi terciptanya lapangan kerja baru yang menjamin distribusi pendapatan yang proporsional/berkeadilan;
- e. **Meningkatkan kualitas peran Sulawesi Selatan dalam memelihara Ketahanan Nasional dan mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dan kuat** melalui peningkatan kualitas keterkaitan dan pelayanan sosial ekonomi antar wilayah dan antarkawasan di Indonesia, serta keterpaduan sosial budaya melalui reinterpretasi, revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai budaya bahari sebagai upaya untuk membangun dan memperkuat identitas ke-Indonesia-an.

Tujuan pembangunan jangka panjang Sulawesi Selatan tahun 2008-2028 adalah mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai wilayah terkemuka di Indonesia dilihat dari sisi kemajuan, kemandirian, keadilan dan kemakmuran. Tujuan ini perlu diwujudkan agar dapat digunakan



sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian 5 (lima) sasaran pokok, sebagai berikut:

1. **Meningkatnya kualitas manusia Sulawesi Selatan** yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Memiliki kualitas hidup yang tinggi, antara lain tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas rata-rata nasional;
 - Memiliki karakter yang tangguh, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila, serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Memiliki wawasan yang luas yang berbasis pada identitas diri yang prima yang bersumber pada budaya lokal / bahari dan keagamaan;
 - Memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap pengembangan diri dan tatanannya (nasionalisme yang tinggi), serta memahami dan menghargai keberagaman;
 - Memiliki kemampuan adaptif-kreatif sehingga senantiasa mampu mengaktualisasikan diri secara mandiri.
2. **Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai komunitas pembelajar** yang memiliki kapasitas *swatata (self-organizing capacity)* yang tinggi sehingga senantiasa sanggup beradaptasi-kreatif terhadap dinamika lingkungan demi untuk menjaga atau bahkan meningkatkan kualitas keberadaannya sehingga mampu menyelenggarakan misinya secara lebih baik, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Menguatnya nilai-nilai budaya lokal yang berbasis pada nilai-nilai budaya bahari dan keagamaan yang teraktualisasi dengan nilai-nilai yang dibawa oleh spirit zaman;
 - Tumbuh kembangnya kelembagaan masyarakat yang tangguh dan mandiri pada seluruh aspek kehidupan yang mampu mendukung terselenggaranya pembangunan berbasis komunitas (*Community-Based Development*); menyediakan dan menciptakan pilihan-pilihan (*choices*) kepada masyarakat; mendorong dan meningkatkan kemampuan untuk memilih dan menyalurkan aspirasi (*voice*) dari anggota masyarakat pada segenap lapisan; dan secara aktif mendorong terwujudnya daerah kabupaten dan kota sebagai komunitas yang maju dan mandiri;



- Terbentuknya daerah kabupaten dan kota sebagai komunitas yang berbasis pada keunggulan lokal yang spesifik.
3. **Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai wilayah yang kondusif dan atraktif** yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
- Terciptanya lingkungan kondusif bagi terselenggaranya aktivitas sosial ekonomi, politik dan budaya serta peluang bagi setiap individu dan setiap tatanan internal untuk melakukan aktualisasi diri akibat adanya tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang menjamin kepastian hukum, keamanan dan ketenteraman, serta akses yang proporsional terhadap kegiatan dan pelayanan ekonomi, sosial, dan budaya bagi segenap lapisan masyarakat tanpa kecuali;
 - Meningkatnya daya tarik Sulawesi Selatan sebagai daerah tujuan investasi, pariwisata, pelayanan regional dan kota-kota di Sulawesi Selatan telah mampu berkembang sebagai kota hunian / tempat tinggal (*dormitory town*) yang nyaman.
4. **Terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan, asri dan lestari** yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2028 berada di atas rata-rata nasional dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 (lima) persen;
 - Meningkatnya sinergi antardaerah yang dilakukan melalui penataan ruang wilayah yang mengedepankan pertimbangan kelestarian lingkungan hidup; pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, keunggulan lokal, serta pemanfaatan teknologi;
 - Tumbuh dan berkembang daerah kabupaten dan kota serta berbagai kawasan pengembangan dengan bertumpu kepada keunggulan lokal yang dimiliki yang mampu menyediakan berbagai fasilitas pelayanan sosial, ekonomi dan budaya kepada segenap kelompok dan lapisan masyarakat secara proporsional;
 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
5. **Meningkatnya kualitas peran Sulawesi Selatan dalam memelihara Ketahanan Nasional dan mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dan kuat** yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:
- Berkembangnya beberapa kota di Sulawesi Selatan sebagai simpul (*main hubs*) transportasi nasional maupun regional serta



sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan sosial budaya lainnya yang bertaraf nasional dan internasional;

- Berkembangnya industri dan jasa yang memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) yang besar dengan industri yang ada di wilayah lain di Indonesia;
- Meningkatkan peran Sulawesi Selatan dalam upaya pemanfaatan secara berkelanjutan Selat Makassar sebagai sumber daya ekonomi yang besar (perikanan, minyak bumi, dan lalu lintas pelayaran internasional) untuk memberikan kontribusi bagi terbangunnya ekonomi kelautan secara terpadu;
- Meningkatnya kualitas peran Sulawesi Selatan dalam pengembangan budaya nasional melalui reaktualisasi budaya bahari.

4.2.2.2.1.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan kebijakan Provinsi yang selaras dan bisa menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga dapat memberikan sumbangsih positif pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan.

Visi Gubernur Sulawesi Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2018-2023. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sulawesi Selatan yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2023 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah bersama Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Misi Gubernur Sulawesi Selatan pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. visi dan misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2018-2023. Dengan penjabaran tersebut maka visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:



“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”

Berdasarkan visi diatas, dijabarkan dengan misi pembangunan sebagai berikut:

Misi :

1. Mewujudkan Pemerintah yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel;
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif;
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.

Berdasarkan telaahan permasalahan dan isu strategis atau kebijakan regional Sulawesi Selatan yang dijabarkan dalam Rancangan Awal RPJMD tahun 2018-2023, hal-hal yang menjadi permasalahan dan isu strategis dalam pembangunan Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan**
 - Kemudahan dalam berinvestasi dan mendapatkan izin;
 - Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani dan kaku membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha.
- 2. Kualitas Infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian**
 - Interkoneksi antar daerah yang ditunjukkan oleh infrastruktur yang mumpuni;
 - Keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan.
- 3. Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan**
 - Memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Indonesia;
 - Jumlah masyarakat miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi.
- 4. Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas**
 - Nilai IPM Sulawesi Selatan Masih berada di bawah rata-rata nilai Nasional;
 - Rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas.
- 5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berlimpah**



- Sumber daya alam yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan belum dimanfaatkan dengan baik;
- Hasil Sumber Daya alam dikirim dalam kondisi tidak diolah;
- Menjaga Kelestarian Alam.

Sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Adapun janji kampanye Gubernur Provisni Sulawesi Selatan dalam Program-Program Unggulan Tahun 2018 – 2023 (5 Program Nyata) yaitu:

- (1) Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui Hilirisasi Komoditas Sulawesi Selatan (Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan);
- (2) Pembangunan Infrastruktur yang menjangkau masyarakat Desa Terpencil (Bidang Infrastruktur);
- (3) Rumah Sakit Regional di 6 wilayah dan Ambulans Siaga (Bidang Kesehatan);
- (4) Birokrasi anti korupsi dan pendidikan masyarakat madani (Bidang Pemerintahan, Pendidikan, Kepemudaan);
- (5) Destinasi wisata andalan berkualitas internasional (Bidang Pariwisata dan Ekowisata).

Sementara telaahan isu strategis berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 antara lain:

a. Mendekatkan Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat berkesinambungan (continously). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud disini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting. Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan RS Regional sehingga menjangkau pelayanan kesehatan antar wilayah Kabupate/Kota, Ibu Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan.



b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian terus bertumbuh secara cepat. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Indonesia Timur menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain, namun hal tersebut tidaklah cukup. Kemudahan dalam berinvestasi, mendapatkan izin, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi prasyarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku hal ini membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Dalam survey tahun 2017 yang dibuat oleh lembaga penelitian Asia Competitiveness Institute, Sulawesi Selatan berada di Posisi ke-9 terkait kemudahan berbisnis, tertinggal dari Provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

c. Kualitas Infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian.

Sulawesi Selatan memiliki luas 46.000 KM persegi, dengan daratan yang luas dan gugusan pulau-pulau. Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkoneksi antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 62 Pelabuhan Laut dan 13 Bandara, namun karena kualitas yang kurang baik di daerah lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi Provinsi yang rawan terdampak bencana banjir.

Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimana jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2017 baru mencapai 37,07% dari panjang jalan 2.009,35 Km. Sedangkan pada kondisi jalan rusak cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2016 yakni 25,58 dan meningkat tahun 27,86 persen. kondisi jalan rusak berat pada tahun 2013 adalah 7,35 persen turun pada tahun 2014 yakni 7,15 persen hingga tahun 2015 sebesar 4,85. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak parah yang berakibat menurunnya capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi. Masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik antara lain dikarenakan masih terdapat jalan provinsi dengan perkerasan berupa kerikil sepanjang 152,6 Km (7,59%) dan perkerasan berupa tanah sepanjang 211,52 Km (10,53%). Kondisi jalan ini terdapat di



Kabupaten Pinrang, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, Barru, Soppeng, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Tentunya dengan hal ini perlunya adanya penanganan terhadap jalan yang rusak ini dapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan.

- d. **Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan.**
Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan perkapota maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Pendapatan per kapita warga Sulawesi Selatan saat ini memang sudah meningkat mencapai 44 juta per tahunnya , tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2017 Sulawesi Selatan menjadi Provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Indonesia (0,429). Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 9,48 % pada tahun 2016, diatas target yang ingin dicapai oleh Pemprov Sulawesi Selatan pada akhir masa periode tiga RPJPD, yaitu 6%.
- e. **Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.**
Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, Sulawesi Selatan, seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dari total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan saat ini berada di angka 69,76 yang artinya Sulawesi Selatan berada diperingkat 14 dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan adalah 7,75 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas.
- f. **Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam.**
Letak geografis yang strategis dan kondisi biofisik wilayah yang mendukung menyebabkan Sulawesi Selatan memiliki sumberdaya alam yang berlimpah. Potensi sumberdaya alam yang menjadi



unggulan di Sulawesi Selatan antara lain; di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan/perikanan, pariwisata, energi dan pertambangan. Untuk sektor pangan, surplus hasil pertanian (padi/beras) selama 2 dekade terakhir memantapkan status Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan penghasil tanaman pangan terbesar di wilayah Indonesia Timur. Potensi sumberdaya alam sektor perikanan/kelautan juga menjadi sektor unggulan Sulawesi Selatan. Komoditi unggulan untuk sektor perikanan/kelautan antara lain; ikan laut, udang tambak dan rumput laut. Produksi rumput laut Sulawesi Selatan mampu memenuhi 30% dari kebutuhan nasional. Sektor pariwisata juga menjadi sektor yang perlu dioptimalkan pengelolaannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, sumberdaya alam yang dimiliki belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumberdaya alam sebagian besar dikirim/dieksport dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah (*added value*) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumberdaya alam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan.

- g. Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)
- Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian "Peningkatan Nilai Tambah Industri Lokal untuk Mendongkrak Daya Saing Ekonomi, yang seharusnya lebih meningkat. Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama. Yang pertama yaitu hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri. Kedua, mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri. Ketiga, mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur. Keempat, percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (Debottlenecking),



serta kelima adalah meningkatkan integrasi pasar domestik. "Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. hilirisasi Komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sector pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan. Dengan program hilirisasi ini diharapkan akan dapat mengembalikan kejayaan Sulawesi selatan dalam hal produksi, industry pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil baik dalam negeri maupun ekspor.

4.2.3. Isu Strategis Daerah

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu global, isu dan kebijakan nasional, serta isu dan kebijakan daerah, maka dirumuskan isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2018-2013. Selain itu, penentuan isu strategis juga didasarkan pada beberapa kriteria antara lain: 1) berpengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang; 3) berpotensi mendukung pembangunan daerah Sidenreng Rappang; dan 4) prioritas untuk memenuhi janji politik KDH yang perlu diwujudkan.

4.2.3.1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), Pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada Pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel.

Partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya. Birokrasi yang diharapkan



adalah Pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Dengan ini diharapkan kinerja Pemerintah dapat lebih optimal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih optimal.

Implikasi dari perwujudan reformasi birokrasi akan memberikan suasana kemasyarakatan yang sejahtera, adil dan merata, berkualitas berkesinambungan, serta harmonis, aman dan tentram. Impian dari seluruh Pemerintah Daerah, tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang ini perlu diupayakan melalui berbagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat seperti peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, perwujudan infrastruktur kehidupan yang layak hingga penciptaan kondisi keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.

4.2.3.2. Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pelestarian Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan serta menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Manusia sebagai penghuni lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan yang dilaksanakan oleh manusia memiliki dampak yang cukup signifikan bagi degradasi lingkungan hidup. Oleh karena itu, beberapa negara dan daerah sudah melaksanakan pembangunan berkelanjutan melalui gerakan ekonomi



hijau. Pada dasarnya ekonomi hijau adalah perekonomian yang tidak merugikan lingkungan hidup. Program lingkungan PBB (*UNEP; United Nations Environment Programme*) dalam laporannya berjudul *Towards Green Economy* menyebutkan, ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Dari definisi yang diberikan UNEP, pengertian ekonomi hijau dalam kalimat sederhana dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi hijau merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan.

4.2.3.3. Perwujudan Kehidupan Beragama dan Pelestarian Budaya Daerah

Dalam kehidupan agama menjadi salah satu unsur kehidupan sebagai bentuk hukum normatif dalam masyarakat. Kehidupan yang beragama menjadikan masyarakat sebagai insan yang taat, tertib, berperilaku baik, bertoleransi tinggi. Dengan ini, secara tidak langsung agama merupakan alat pengendali dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dengan unsur normatif agama diharapkan mampu untuk meredam tindakan-tindakan kriminalitas pada masyarakat. Dengan kehidupan masyarakat yang beragama diharapkan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai kehidupan yang harmonis, rukun dan bahagia. Pada hakekatnya agama dan budaya menjadi satu kesatuan unsur norma-norma yang ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang kebudayaan menjadi salah satu unsur yang sangat melekat dalam



kehidupan masyarakat. Kebudayaan ini salah satu aset daerah untuk dikembangkan dan dilestarikan. Kebudayaan dapat dikembangkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga mampu menjadi salah pendukung dalam meningkatkan PAD, tentunya diiringi pengelolaan dan pengembangan yang maksimal. Selain itu dengan pembangunan bidang pariwisata yang telah dilaksanakan, akan dapat lebih maksimal jika Pemerintah mengintegrasikan antara pariwisata dan budaya daerah. Sehingga tidak hanya pariwisata yang dapat dinikmati oleh masyarakat namun, budaya juga menjadi daya tarik wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan ini diharapkan akan menciptakan peluang-peluang usaha masyarakat, terutama pada masyarakat kecil dan menengah, yang mengakibatkan perekonomian masyarakat semakin menggeliat dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan masyarakat akan lebih sejahtera.

4.2.3.4. Penerapan SDG's (*Sustainable Development Goals*)

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak akan berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan terlihat jelas antara MDGs dan SDGs, dimana permasalahan isu lingkungan global lebih ditekankan dan diprioritaskan. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan kurun waktu selama 15 (lima belas) tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu depletion sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Kerangka Pembangunan Pasca 2015 menjadi salah satu isu yang dibahas



di KTT Rio. Adapun 3 (tiga) pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (*Human Development*), diantaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs pasca MDGs 2015, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, tetapi ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan, di antaranya segala sesuatu itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*, serta juga ditentukan apakah ini difokuskan pada negara berkembang atau negara maju.

4.2.3.5. Penanggulangan Bencana Alam Melalui Mitigasi Bencana

Salah satu upaya dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya adalah dengan meningkatkan mitigasi bencana alam, khususnya pada beberapa periode terakhir dimana mitigasi bencana sudah menjadi isu dan perbincangan nasional maupun internasional. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki beberapa potensi bencana alam yang telah dialami selama ini seperti banjir, kebakaran maupun angin kencang/puting beliung. Kejadian bencana alam tersebut tentu saja berdampak pada berbagai kerugian-kerugian fisik maupun psikis kepada seluruh masyarakat Sidenreng Rappang. Oleh karena itu, mitigasi bencana sangat



perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam hal penanggulangan dan kesiapsiagaan terjadinya bencana alam.

4.2.3.6. Pengembangan kawasan energi terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu

Keberlanjutan sumber energi di masa depan semakin menipis, selain khawatir akan kapasitasnya yang semakin berkurang, masyarakat dunia juga khawatir akan isu *global warming* yang diakibatkan oleh hasil pembakaran energi fosil sehingga membuat lapisan ozon semakin tipis. Indonesia sendiri masih sangat tergantung dengan pasokan energi yang berasal dari energi fosil untuk digunakan sebagai Bahan Bakar Minyak (BBM). Tingginya konsumsi BBM di Indonesia cukup memprihatinkan sehingga perlu adanya pembaharuan dalam menyikapi krisis energi dengan penggunaan energi alternatif. Energi alternatif ini sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan kondisi geografis Indonesia yang beriklim tropis dan kesuburan tanah yang berpotensi. Sumber energi alternatif dapat berasal dari sampah yang kita hasilkan baik organik maupun anorganik serta berasal dari sumber energi terbarukan seperti biomassa, matahari, angin, dan sebagainya. Diharapkan ke depannya, Indonesia memiliki sumber energi yang akan mencukupi kebutuhan energi dalam negeri tanpa khawatir dengan peningkatan pemanasan global, termasuk hadirnya pembangkit listrik tenaga bayu di kabupaten Sidenreng Rappang.

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi

Misi

Keselarasn Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018 - 2023 Dengan Visi Misi RPJPD Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2005 - 2025

Keselarasn Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018 - 2023 Dengan Visi Misi RPJMD Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018 - 2023

Tujuan dan sasaran

BAB 5



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi merupakan kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Dalam perspektif dokumen RPJMD, visi berarti kondisi yang hendak diwujudkan hingga lima tahun yang akan datang. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang diimpikan sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (gap expectation). Sehingga diharapkan mampu menyelaraskan setiap langkah dari para pemangku kepentingan (stakeholder) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mewujudkan mimpi bersama bagi pelaksanaan pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan.

Dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2005-2025 pada **tahapan keempat**, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan sembilan program prioritas pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam RPJM Nasional tahun 2014-2019, serta merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan memperhatikan tingkat kemajuan pembangunan yang telah dicapai hingga saat ini, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Sidenreng Rappang Daerah Agribisnis yang Maju”, dengan masyarakat yang Religius, Aman, Adil dan Sejahtera. Kelima pokok visi tersebut, yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya





dijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Sidenreng Rappang” yang dicita-citakan dan diharapkan kedepan, sebagai berikut:

Tabel 5.1
Pernyataan Visi, Pokok Visi dan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera	Agribisnis yang maju	Pengembangan daerah yang berbasis usaha pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.
	Religius	Masyarakat Sidenreng Rappang adalah insan yang bertaqwa, berperilaku taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter teguh terhadap nilai-nilai agama, bersikap toleran dan menjalin kerukunan hidup dengan pemeluk agama lain, serta kepekaan sosial yang tinggi.
	Aman	Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat Sidenreng Rappang yang tenteram dan kondusif yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.
	Adil	Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa diskriminasi yang ditandai dengan adanya pemberian kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga terwujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
	Sejahtera	Peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang yang ditandai dengan meningkatnya IPM, pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material.

5.2. Misi

Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:





1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan.
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance.
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui penerapan desa cerdas, sehat dan mandiri.
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Rumusan misi tersebut, selanjutnya dirumuskan keterkaitannya dengan setiap pokok visi, dengan maksud untuk menunjukkan langkah-langkah nyata yang hendak dilakukan untuk mencapai impian dan kondisi ideal yang dikehendaki lima tahun ke depan, selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Keterkaitan Rumusan Misi dengan Pokok Visi

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan SDM dan akses kualitas pelayanan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat	Adil dan Sejahtera
2.	Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Mengembangkan potensi pertanian dan daya saing produk yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan dan ketersediaan sarana dan prasarana	Agribisnis Yang Maju dan Sejahtera



No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
3.	Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru	Membangun kerjasama investasi dan usaha melalui peningkatan daya saing dan kualitas SDM dan produk unggulan daerah	Agribisnis Yang Maju dan Sejahtera
4.	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan konektivitas dan pemerataan infrastruktur dasar.	Agribisnis Yang Maju, Adil, Sejahtera
5.	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan <i>good governance</i> dan <i>electronic governance</i> .	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui peningkatan profesionalisme, penataan kelembagaan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang inovatif dalam mewujudkan pelayanan public yang responsif	Agribisnis Yang Maju, Adil, Sejahtera
6.	Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (<i>smart village</i>), sehat dan mandiri.	Menciptakan kemandirian desa melalui pengembangan Bumdes sesuai potensi desa yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana serta aparat desa yang profesional, kreatif dan inovatif.	Agribisnis Yang Maju, Adil, Sejahtera
7.	Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian seni budaya untuk menciptakan tatanan kehidupan yang religius, aman, dan kondusif.	Religius, Aman

5.3. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025

Untuk mencapai kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras, sinergis, dan konsisten. Keselarasan hubungan antara Visi



dan Misi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang harus benar-benar dijaga.

Di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2005-2025, Visi jangka panjang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut :

**“Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai Salah Satu Kabupaten
Terkemuka di Indonesia Tahun 2025 “**

Visi tersebut menempatkan kabupaten terkemuka sebagai kata kunci yang dapat ditransformasikan kedalam tiga perspektif keunggulan yaitu:

- a. Sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis, yang mengandung makna bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimilikinya, menginginkan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pusat pengembangan agribisnis di Sulawesi Selatan. Pusat pengembangan agribisnis dimaksud mencakup empat kegiatan utama yaitu usaha tani, pengolahan, pemasaran dan jasa-jasa. Dengan dukungan posisi geografis yang sangat strategis dukungan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang memadai, tingkat aksesibilitas yang relatif cukup baik dan akar budaya yang kuat memungkinkan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mampu memposisikan diri sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis di Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Sebagai Wilayah Yang Mandiri, yang dapat dimaknakan sebagai kemampuan untuk mengelolah sumberdaya yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Kemandirian dicapai melalui pengembangan interkoneksi inter dan antar wilayah. Dengan adanya interkoneksi maka berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan wilayah seperti sumberdaya manusia, kelembagaan, infrastruktur, pembiayaan pembangunan dan ketahanan pangan akan dapat berkembang lebih cepat kearah yang lebih baik.



- c. Masyarakat Berbudaya dan Religius, yang lebih dimaknakan sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak bersifat sekuler, akan tetapi selalu berlandaskan dan bernafaskan nilai-nilai budaya dan ajaran agama. Konsepsi pembangunan seperti itu diyakini akan mampu membentuk masyarakat yang religius, etis dan bermoral.

Untuk mencapai Visi jangka panjang tersebut, maka dirumuskan Misi jangka Panjang sebagai berikut:

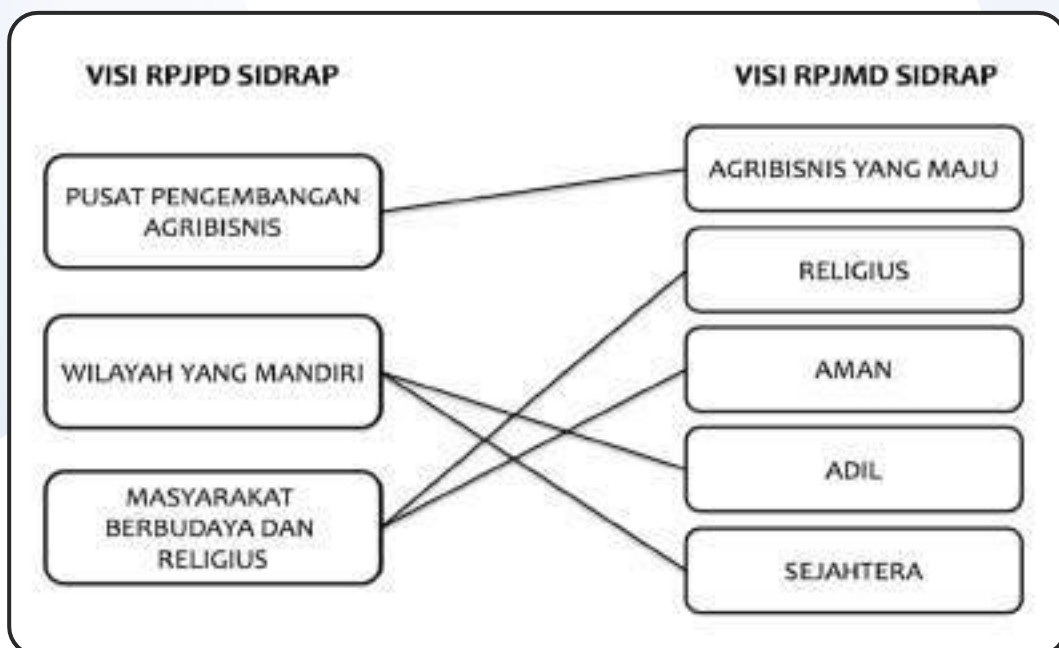
- a. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Sebagai modal dasar sumber daya alam perlu dimanfaatkan secara optimal dan dikelola sesuai dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan mengingat ketersediaan sumberdaya alam yang terbatas.
- b. Mengembangkan system agribisnis. Sistem agribisnis dimaksud mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian (dalam arti luas) dengan pembangunan industri dan jasa terkait dalam suatu kluster industri. Usaha usaha agribisnis yang dikembangkan harus berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralistis.
- c. Membangun Kemandirian Masyarakat. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam aspek kualitas sumberdaya manusia, kelembagaan, akses terhadap sumberdaya dan pasar, finansial dan hubungan sosial. Peningkatan kapasitas tersebut pada gilirannya akan bermuara pada terwujudnya kemandirian masyarakat.
- d. Membangun Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Kepemrintahan yang Bersih (Clean Governance). Membangun Kepemerintahan yang baik meliputi pembangnan aparatur pemerintah dan mengimplementasikan prinsip Good Governance yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, tanggap dalam melayani stakeholder dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, kesempatan memperoleh kesejahteraan dan



- keadilan,efisien dan efektif,memiliki visi kedepan, accountability yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
- e. Membangun Kehidupan Sosial Budaya. Pembangunan social budaya diarahkan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat,efektivitas pranata social. Sedangkan pembangunan budaya diarahkan untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya lokal guna menangkal pengaruh negatif dan melakukan adaptasi terhadap budaya global.
 - f. Mengaktualisasikan nilai nilai agama. Menjadikan nilai agama sebagai landasan moral dan etika dalam setiap penyelenggaraan pembangunan,pemerintahan dan kemasyarakatan. Aktualisasi nilai-nilai aagama dalam kehidupan sehari-hari memungkinkan seluruh elemen masyarakat terhindar dari perilaku-perilaku tidak terpuji.

Berdasarkan pokok visi dan penjelasan visi RPJPD tersebut di atas, maka keselarasan hubungan antara Visi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Visi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.1.
Keselarasan Hubungan Antara Visi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Visi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang





Sedangkan keselarasan hubungan antara Misi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3
Keselarasan Misi RPJPD Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025
dengan Misi RPJMD Kab.Sidenreng Rappang tahun 2018 -2023

No.	MISI RPJMD 2019-2023	MISI RPJPD 2005-2025
1	Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat	Mengoptimalkan kinerja pelayanan publik.
2	Memajukan usaha agribisnis , UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam
3	Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.	Meningkatkan kinerja investasi dan penanaman modal.
4	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan..	Meningkatkan kinerja perekonomian dan kemandirian masyarakat.
5	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan <i>good governance</i> dan <i>electronic governance</i>	Mengembangkan Kepemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)
6	Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (<i>smart village</i>), sehat dan mandiri	Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian Desa
7	Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif	Membangun kehidupan agama dan sosial budaya.

5.4. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan bagian integral dari Provinsi Sulawesi Selatan, harus memastikan bahwa Visi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tetap selaras dengan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Di dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi



Selatan tahun 2023-2028, Visi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 adalah :

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Kelima pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemakan Provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan pokok-pokok visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 sebagai berikut:

- a. Inovatif dimaknakan sebagai kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan men-ciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”.
- b. Kompetitif dimaknakan sebagai Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”.
- c. Produktif dimaksanakan sebagai kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan men-ciptakan gagasan baru, produk baru,dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”.
- d. Inklusif dimaknakan sebagai kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.
- e. Berkarakter dimaknakan sebagai kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-





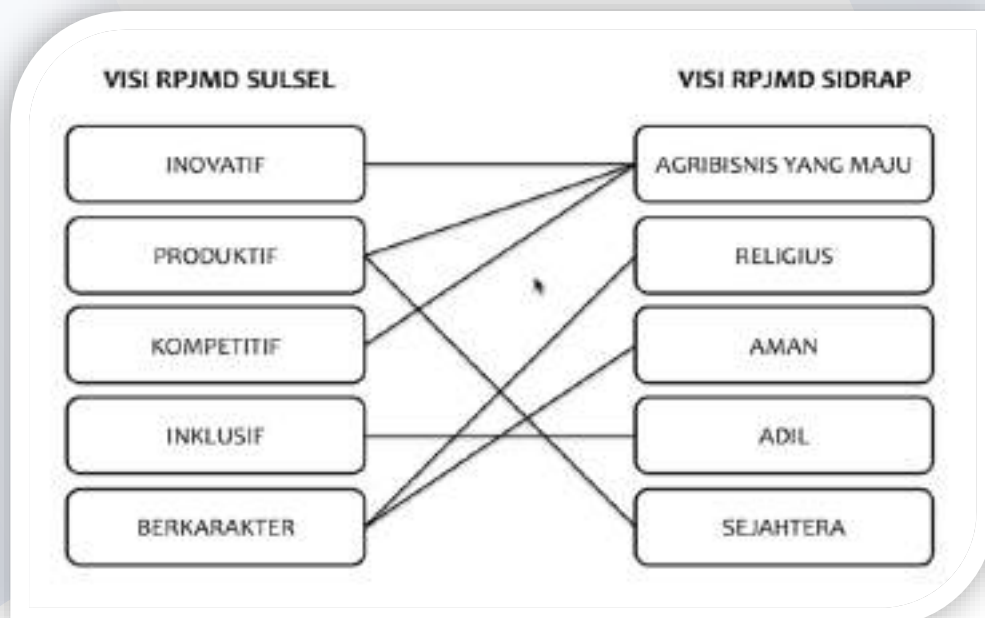
nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

Selanjutnya untuk mencapai Visi tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan mengembangkan sejumlah Misi sebagai berikut:

- a. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter.
- b. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
- c. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
- d. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.
- e. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.

Keselarasan Visi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 dengan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, disajikan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 5.2
Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Visi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023



Sedangkan keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:



Tabel 5.4
Keselarasan Misi RPJMD Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023
dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2023

Misi RPJMD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023
<p><u>Misi 1</u> Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat</p>	<p><u>Misi 4</u> Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter.</p>
<p><u>Misi 2</u> Memajukan usaha agribisnis , UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>	<p><u>Misi 5</u> Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.</p>
<p><u>Misi 3</u> Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.</p>	<p><u>Misi 3</u> Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.</p>
<p><u>Misi 4</u> Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan</p>	<p><u>Misi 2</u> Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.</p>
<p><u>Misi 5</u> Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance</p>	<p><u>Misi 1</u> Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif</p>
<p><u>Misi 6</u> Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri</p>	<p><u>Misi 4</u> Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter</p>
<p><u>Misi 7</u> Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif</p>	<p><u>Misi 4</u> Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter</p>



Tabel 5.5
Keselarasan Misi RPJMD Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023
dengan Misi RPJM Nasional Tahun 2014 -2019

Misi RPJMD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023	Misi RPJMN Indonesia Tahun 2015 – 2019	Agenda Prioritas RPJMN (Nawacita)
<p><u>Misi 1</u> Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.</p>	<p><u>Misi 4</u> Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera</p>	<p><u>Misi 5</u> Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia</p>
<p><u>Misi 2</u> Memajukan usaha agribisnis , UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>	<p><u>Misi 5</u> Mewujudkan bangsa yang berdaya saing</p>	<p><u>Misi 6</u> Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama-sama bangsa asia lainnya</p> <p><u>Misi 7</u> Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic</p>
<p><u>Misi 3</u> Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.</p>	<p><u>Misi 5</u> Mewujudkan bangsa yang berdaya saing</p>	<p><u>Misi 7</u> Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic</p>
<p><u>Misi 4</u> Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan.</p>	<p><u>Misi 5</u> Mewujudkan bangsa yang berdaya saing</p>	<p><u>Misi 7</u> Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik</p>
<p><u>Misi 5</u> Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik</p>	<p><u>Misi 2</u> Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum</p>	<p><u>Misi 2</u> Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, bermartabat, dan terpercaya</p> <p><u>Misi 4</u></p>



Misi RPJMD Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023	Misi RPJMN Indonesia Tahun 2015 – 2019	Agenda Prioritas RPJMN (Nawacita)
melalui penerapan good governance dan electronic governance		Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi
<p><u>Misi 6</u> Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri.</p>	<p><u>Misi 5</u> Mewujudkan bangsa yang berdaya saing</p>	<p><u>Misi 5</u> Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia</p> <p><u>Misi 6</u> Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama-sama bangsa asia lainnya</p> <p><u>Misi 7</u> Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic</p>
<p><u>Misi 7</u> Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.</p>	<p><u>Misi 2</u> Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum</p> <p><u>Misi 7</u> Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan</p>	<p><u>Misi 4</u> Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi</p> <p><u>Misi 8</u> Melakukan revolusi karakter bangsa</p> <p><u>Misi 9</u> Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial</p>

5.5. Tujuan dan Sasaran

Menurut Permendagri 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-

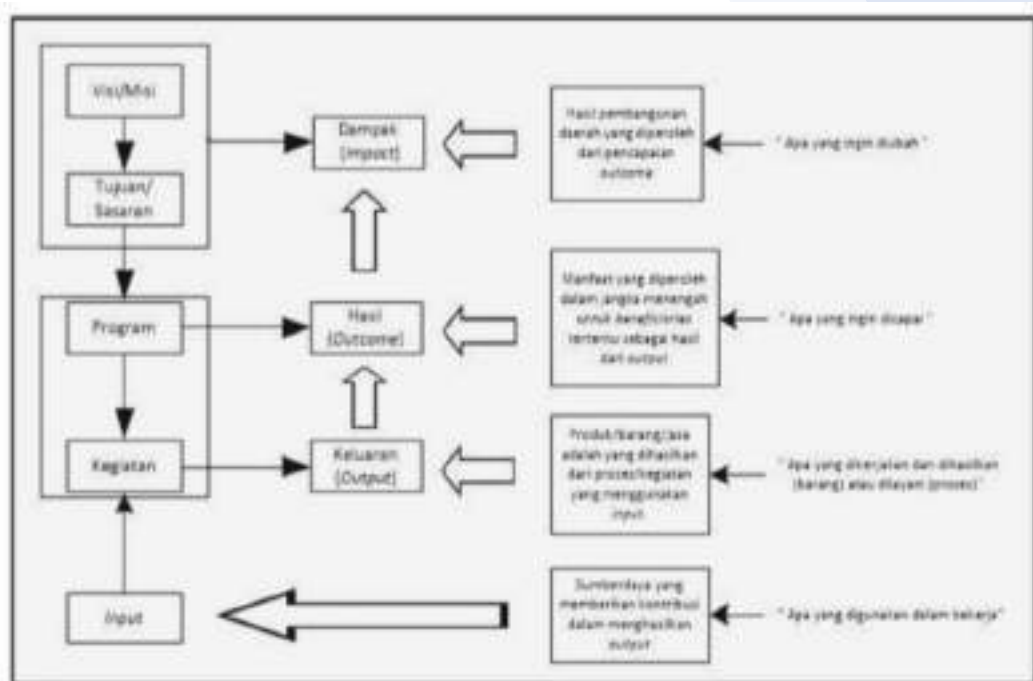




kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar : 5.3
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan-pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka



waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMARTC. Untuk mewujudkan visi pembangunan Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:





Tabel 5.6
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
Visi :											
Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera											
1	Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat	1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (%)	69.84*	70.90	71.30	71.80	72.50	73.20	73.20
			1.1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	60.90*	62.69	63.61	64.53	65.48	66.43	66.43
			1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	75.11*	75.41	75.7	76	76.3	76.6	76.6
2	Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2. Meningkatkan pendapatan masyarakat		PDRB Perkapita (juta rupiah)	40.24*	44.16	46.31	48.85	52.81	55.24	55.24
			2.1. Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB (%)	5.02	5.27	5.53	5.80	6.09	6.39	6.39
			2.2. Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	5.32	5.00	4.90	4.83	4.78	4.73	4.73





No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
			2.3. Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	Gini Ratio	0,340	0.330	0.323	0.316	0.310	0.305	0.305
3	Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru	3. Meningkatkan kesempatan kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.70	4.67	4.62	4.57	4.53	4.50	4.50
			3.1. Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing pariwisata daerah	Nilai Investasi (Juta Rupiah)	156.997	157.002	157.052	157.127	157.227	157,227	157.227
				Jumlah Objek Wisata Baru	11	-	1	1	1	1	15
4	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan	4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi yang berwawasan Lingkungan		Pertumbuhan PDRB Sektor Infrastruktur wilayah (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi,)	8.26	8.34	8.42	8.50	8.58	8.66	8.66
			4.1. Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang berkualitas	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	47	52	54	56	59	61	61
				Persentase Jembatan dalam kondisi baik	76.2	76.9	78	80	82	84	84





No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
				Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik		55	60	65	70	75	75
			4.2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	73.33	73.36	73.4	73.44	73.49	73.49
5	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance	5. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	-	51.32	55.55	60.08	62.87	64.01	64.01
			5.1. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	41.98	51.77	56.75	60.09	64.46	68.78	68.78
				Opini laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			5.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75.10	76.61	77.14	78.32	80.80	80.80
			5.3. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.21*	92.87	93.31	94.04	95.42	96.01	96.01
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	49.02*	50.33		51.50	52.67	53.84	55.01	55.01			





No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
6	Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri	6. Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Indeks Desa Membangun	-	0.6477	0.6583	0.689	0.7027	0.7218	0.7218
			6.1. Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	Indeks Ketahanan Sosial	-	0.7465	0.7480	0.7501	0.7558	0.7598	0.7598
				Indeks Ketahanan Ekonomi	-	0.5576	0.5769	0.6631	0.6879	0.7029	0.7029
				Indeks Ketahanan Lingkungan	-	0.6390	0.6501	0.6537	0.6643	0.7027	0.7027
7	Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif	7. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya		Indeks Ketertiban dan Ketentraman	65.99	68.35	71.78	75.32	79.75	85.77	85.77
			7.1. Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	Persentase Angka Kriminalitas per 10.000	15.27	15.08	14.41	13.62	12.86	12.12	12.12
				7.2. Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Sarana Prasarana Olahraga	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar budaya Yang dilestarikan	50	50	62,5	75	87.5	100
			Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Terpadu		-	2	2	2	2	3	11

* Data Tahun 2017





STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

**Strategi Pembangunan Daerah
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah
Program Pembangunan Daerah**

BAB 6



BAB VI **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM** **PEMBANGUNAN DAERAH**

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan daerah merupakan bagian yang menyajikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberi penegasan operasional, bahwa strategi merupakan langkah atau upaya berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap setiap tujuan dan sasaran maka rumusan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM dan pemerataan tenaga pendidik secara bersinergi dengan perbaikan akses layanan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, akses layanan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas diiringi dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat.
- c. Meningkatkan daya saing produk pertanian terpadu berbasis petik, olah, kemas dan jual secara beriringan dengan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
- d. Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan keberdayaan penduduk miskin secara bersinergi dengan perbaikan akses dalam lapangan kerja dan lapangan usaha secara merata dan tepat sasaran.



- e. Meningkatkan pendapatan kelompok penduduk bawah dengan pembangunan infrastruktur padat karya, dan beragam skema perlindungan dan bantuan social
- f. Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah, membangun jaringan kemitraan, penyederhanaan prosedur perizinan berbasis IT serta meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata
- g. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.
- h. Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana.
- i. Meningkatkan disiplin kerja melalui sistem reward dan punishment , kualitas SDM dan profesionalitas aparatur diiringi dengan penataan kelembagaan dan peningkatan sistem pengawasan dalam berjalannya integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis elektronik.
- j. Meningkatkan kualitas SDM dan penerapan IT dalam pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan publik yang terintegrasi, penyiapan infrastruktur layanan publik serta pengembangan inovasi daerah.
- k. Menguatkan kelembagaan PUG dan forum anak, menyebarluaskan informasi kesetaraan gender serta urgensi perlindungan perempuan dan anak, peningkatan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas serta meningkatkan keberdayaan perempuan dalam perekonomian.
- l. Meningkatkan sistem pelayanan desa yang inovatif dan responsif berbasis teknologi informasi seiring dengan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat desa, pemberdayaan Bumdes, pengembangan produk unggulan desa, TTG, pengembangan pola hidup sehat, sistem informasi potensi desa, penggunaan dana desa yang berbasis visi, transparan dan akuntabel.



- m. Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah.
- n. Meningkatkan partisipasi organisasi dan Lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian seni budaya dan pengembangan olahraga

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 yang terinci pada tabel berikut :

**Tabel 6. 1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi**

Visi: Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi – 1 : Memajukan Dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat			
1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	1.1 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.	Meningkatkan kualitas SDM dan pemerataan tenaga pendidik secara bersinergi dengan perbaikan akses layanan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
		1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, akses layanan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas diiringi dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat.
Misi – 2 : Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM Dan Industri Pengolahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.			



No	Tujuan	Sasaran	Strategi
2	Meningkatkan pendapatan masyarakat	2.1 Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah.	Meningkatkan daya saing produk pertanian terpadu berbasis petik, olah, kemas dan jual secara beriringan dengan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
		2.2 Menurunnya tingkat kemiskinan.	Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan keberdayaan penduduk miskin secara bersinergi dengan perbaikan akses dalam lapangan kerja dan lapangan usaha secara merata dan tepat sasaran.
		2.3 Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan.	Meningkatkan pendapatan kelompok penduduk bawah dengan pembangunan infrastruktur padat karya, dan beragam skema perlindungan dan bantuan sosial.
Misi – 3 : Mengembangkan Kerjasama Investasi Daerah Dan Penyediaan Lapangan Kerja Baru			
3	Meningkatkan kesempatan kerja	3.1 Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing pariwisata daerah	Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah, membangun jaringan kemitraan, penyederhanaan prosedur perizinan berbasis IT serta meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata
Misi – 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Merata Dan Berwawasan Lingkungan.			
4	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi yang berwawasan Lingkungan	4.1 Meningkatnya infrastruktur ekonomi yang berkualitas.	Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.



No	Tujuan	Sasaran	Strategi
		4.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana.
Misi – 5 : Mengoptimalkan Kinerja, Kualitas Dan Profesionalitas Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan <i>Good Governance</i> Dan <i>Electronic Government</i>			
5	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	5.1 Meningkatnya kinerja pemerintah daerah.	Meningkatkan disiplin kerja melalui sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , kualitas SDM dan profesionalitas aparatur diiringi dengan penataan kelembagaan dan peningkatan sistem pengawasan dalam berjalannya integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis elektronik.
		5.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas SDM dan penerapan IT dalam pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan publik yang terintegrasi, penyiapan infrastruktur layanan publik serta pengembangan inovasi daerah.
		5.3 Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	Menguatkan kelembagaan PUG dan forum anak, menyebarluaskan informasi kesetaraan gender serta urgensi perlindungan perempuan dan anak, peningkatan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas serta meningkatkan keberdayaan perempuan dalam perekonomian.
Misi – 6 : Mengembangkan Dan Memajukan Kawasan Pedesaan Melalui Konsep Desa Cerdas (Smart Village), Sehat Dan Mandiri.			
6	Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa	6.1 Terwujudnya desa maju dan mandiri.	Meningkatkan sistem pelayanan desa yang inovatif dan responsif berbasis teknologi informasi seiring dengan penguatan



No	Tujuan	Sasaran	Strategi
			kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat desa, pemberdayaan Bumdes, pengembangan produk unggulan desa, TTG, pengembangan pola hidup sehat, sistem informasi potensi desa, penggunaan dana desa yang berbasis visi, transparan dan akuntabel.
Misi – 7 : Memajukan Dan Menciptakan Kondisi Kehidupan Beragama Serta Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal Sebagai Basis Nilai Dalam Menciptakan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif.			
7	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya	7.1 Meningkatnya kenyamanan kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah.
		7.2 Meningkatnya penerapan nilai-nilai budaya lokal dan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatkan partisipasi organisasi dan Lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian seni budaya dan pengembangan olahraga

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan strategi, selanjutnya dirumuskan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng rappang untuk lima tahun yang akan datang. Permendagri No. 86 tahun 2017 menegaskan bahwa arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Selengkapnya arah kebijakan yang akan ditempuh Kabupaten Sidenreng rappang untuk lima tahun yang akan datang, adalah sebagai berikut :



Tabel 6. 2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Pemenuhan SPM pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan	Peningkatan kualitas pemenuhan SPM pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan	Peningkatan kapasitas sarana-prasarana dalam memelihara kualitas pemenuhan SPM pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam menunjang pemenuhan SPM pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan	Peningkatan kualitas lulusan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan
Pemenuhan SPM pelayanan ibu hamil dan melahirkan, bayi baru lahir dan balita, pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan kualitas pemenuhan SPM pelayanan ibu hamil dan melahirkan, bayi baru lahir dan balita, pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan kapasitas sarana-prasarana dan SDM kesehatan dalam menunjang pemeliharaan kualitas pemenuhan SPM pelayanan ibu hamil dan melahirkan, bayi baru lahir dan balita, pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta pengembangan sistem informasi dan rujukan pada fasilitas kesehatan dasar.	Perbaikan pola hidup sehat dan sistem gizi masyarakat serta modernisasi pelayanan kesehatan pada rumah sakit hingga puskesmas dan jaringannya
Pemenuhan sarana-prasarana produksi serta alat dan mesin pertanian dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian	Pengembangan pertanian terpadu berbasis sistem agribisnis yang mengintegrasikan budidaya tanaman, peternakan dan perikanan darat berbasis potensi spesifik lokal diiringi dengan penguatan	Penguatan dukungan infrastruktur jaringan irigasi dan jalan tani dalam akselerasi pertanian terpadu berbasis sistem agribisnis sesuai potensi spesifik lokal	Penguatan daya saing produk berbasis inovasi pada proses agroindustri disertai penguatan jaringan pasar produk agribisnis dengan melibatkan peran Perusda dan UMKM daerah.	Pemantapan pengelolaan sistem agribisnis berbasis petik, olah, kemas dan jual yang ditunjang dengan Inovasi dan teknologi serta dukungan jaringan kerjasama dalam keseluruhan rantai pasok hingga konsumen





Arah Kebijakan				
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha			
Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan daerah	Pemutahiran data kemiskinan terpadu berbasis IT dan peningkatan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat paling miskin dan rentan	Pemberdayaan masyarakat pada lokasi dengan penduduk miskin terbanyak dan perluasan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat paling miskin dan rentan	Pengembangan akses lapangan kerja dan lapangan usaha bagi rumah tangga miskin dan perluasan pemberdayaan masyarakat pada lokasi dengan penduduk miskin terbanyak.	Pengembangan sinergi multipihak dalam intervensi penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terpadu baik untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan usaha mikro dan kecil bagi orang miskin.
Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan.	Pengumpulan dan pemutahiran data kemiskinan dan peningkatan cakupan perlindungan sosial	Pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat pada lokasi dengan penduduk miskin.	Penyediaan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi rumah tangga miskin dan perluasan pemberdayaan masyarakat pada lokasi dengan penduduk miskin terbanyak.	Perbaikan kualitas kehidupan dan pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan usaha mikro dan kecil bagi orang miskin.
Pemetaan potensi investasi dan pariwisata daerah	Pembangunan sistem layanan investasi dan revitalisasi objek wisata daerah	Pengembangan sistem layanan investasi, sarana dan kelembangan pariwisata daerah	Pemantapan sistem layanan investasi dan promosi wisata daerah	Penguatan sistem investasi dan daya saing industri pariwisata daerah





Arah Kebijakan

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Pemenuhan fasilitas air minum dan penanganan limbah domestik yang terjangkau bagi seluruh masyarakat	Pemantapan keterpenuhan fasilitas air minum dan penanganan limbah domestik serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.	Peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi dan jalan tani dalam mendukung pertanian terpadu berbasis sistem agribisnis	Perluasan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah dalam menekan ketimpangan antar wilayah serta peningkatan akses rumah layak huni perbaikan kawasan permukiman	Penguatan sarana prasarana perhubungan dan moda transportasi antar wilayah kecamatan dengan jalan kondisi mantap
Penguatan kapasitas, kebijakan dan rencana pengelolaan lingkungan hidup serta peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pemeliharaan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta penataan terhadap rekomendasi izin lingkungan dan Amdal bagi aktivitas swasta maupun masyarakat	Pengendalian pencemaran tanah, air dan udara dari limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) serta pemeliharaan kualitas tutupan lahan	Pengembangan sistem penanganan sampah secara terpadu berbasis teknologi reduce, recycle dan reuse (3R) dan pelibatan masyarakat dengan didukung oleh penataan ruang terbuka hijau	Pemantapan kapasitas sistem pengelolaan lingkungan secara terpadu berbasis pelibatan stakeholder dan kesadaran serta partisipasi masyarakat
Penataan kelembagaan dan organisasi serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas sumber daya aparatur	Pengembangan sistem integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan berbasis elektronik	Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja berbasis disiplin aparatur dan tertib administrasi	Peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan urusan berbasis kelitbangan dan inovasi daerah	Pemantapan sistem akuntabilitas kinerja dengan dukungan pembinaan dan pengawasan secara melekat
Penguatan kapasitas teknologi, sarana-prasarana, fasilitas dan SDM untuk sistem pelayanan publik yang prima	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata melalui pemanfaatan SDM berkualitas dan dukungan IT, serta penyederhanaan prosedur pelayanan	Perluasan jangkauan pelayanan publik melalui pendelegasian kewenangan pelayanan pada tingkat Kecamatan dengan dukungan SDM yang cukup	Optimalisasi daya guna SDM dan IT dalam sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan didukung oleh fungsi kelitbangan dan inovasi daerah	Pemantapan kualitas pelayanan public berbasis inovasi daerah secara bersinergi dengan penerapan SPM pada pelayanan dasar





Arah Kebijakan

Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran serta penggunaan data terpilah dalam penyajian indikator kinerja kunci penyelenggaraan urusan	Penguatan poka pengarusutamaangender dalam relasis fungsional dengan perangkat daerah dalam kerangka pelembagaan kerangka gender dalam pembangunan daerah	Pemberdayaan perempuan pada aspek ekonomi, politik dan sosial budaya serta penguatan peran perempuan pada birokrasi dan legislatif	Penguatan sistem perlindungan anak melalui deteksi kekerasan terhadap anak, pemberian bantuan hukum bagi kasus kekerasan terhadap anak, perwujudan desa serta kota layak anak	Perluasan cakupan perlindungan anak dan perempuan melalui layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, bantuan hukum serta pemulangan kepada lingkungan sosial masyarakat
Pemenuhan regulasi dan pem-binaan kewenangan desa, peningkatan akses layanan pemerintah desa dan pemetaan potensi desa	Peningkatan kapasitas SDM aparat desa dan akses layanan pemerintah desa serta pemberdayaan BUMDes berdasarkan potensi desa	Peningkatan kualitas pendampingan pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa, pengelolaan asset dan keuangan desa, serta perbaikan pelayanan publik di desa dan pengembangan BUMDes	Penguatan BUMDes sebagai kelembagaan perekonomian desa dalam mendorong pertumbuhan serta menanggulangi kemiskinan berbasis produk unggulan desa	Pembinaan BUMDes melalui Pengembangan kerjasama antar desa serta kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan potensi desa yang produktif dan berkelanjutan
Pengendalian keamanan dan ketenteraman lingkungan dan kerukunan hidup bermasyarakat	Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat dan tokoh tokoh agama	Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan diantara organisasi masyarakat dan tokoh pemuda	Peningkatan kerukunan umat beragama melalui dialog antara umat beragama, kerja-sama pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga sosial keagamaan dalam menciptakan suasana rukun dan toleran	Peningkatan pelayanan kehidupan beragama melalui peningkatan pengelolaan dan fungsi tempat ibadah secara transparan dan akuntabel.
Pemetaan organisasi pemuda dan lembaga berdasarkan potensi dan tujuan organisasi	Penyediaan sarana prasarana olahraga, pembinaan generasi muda dan pelestarian seni budaya	Pengembangan sarana prasarana olahraga, pembinaan generasi muda dan pelestarian seni budaya	Penyelenggaraan agenda keolahragaan dan festival seni budaya	Pembinaan dan pengembangan cabang olahraga dan seni budaya untuk meningkatkan prestasi ditingkat provinsi dan nasional





Tabel 6. 3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Sidenreng Rappang 2019 – 2023

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
Visi: Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera								
Misi – 1 : Memajukan Dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat								
1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Meningkatkan kualitas SDM dan pemerataan tenaga pendidik secara bersinergi dengan perbaikan akses layanan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.	Pemenuhan SPM pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan	Peningkatan kualitas pemenuhan SPM pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan	Peningkatan kapasitas sarana-prasarana dalam memelihara kualitas pemenuhan SPM pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam menunjang pemenuhan SPM pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan	Peningkatan kualitas lulusan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, akses layanan kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas diiringi dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat	Pemenuhan SPM pelayanan ibu hamil dan melahirkan, bayi baru lahir dan balita, pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan kualitas pemenuhan SPM pelayanan ibu hamil dan melahirkan, bayi baru lahir dan balita, pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan kapasitas sarana-prasarana dan SDM kesehatan dalam menunjang pemeliharaan kualitas pemenuhan SPM pelayanan ibu hamil dan melahirkan, bayi	Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta pengembangan sistem informasi dan rujukan pada fasilitas kesehatan	Perbaikan pola hidup sehat dan sistem gizi masyarakat serta modernisasi pelayanan kesehatan pada rumah sakit hingga puskesmas dan jaringannya





NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
			dalam masyarakat.			baru lahir dan balita, pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	dasar.	
Misi – 2 : Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM Dan Industri Pengolahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.								
2	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Meningkatkan daya saing produk pertanian terpadu secara beriringan dengan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.	Pemenuhan sarana-prasarana produksi serta alat dan mesin pertanian dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian	Pengembangan pertanian terpadu berbasis sistem agribisnis yang mengintegrasikan budidaya tanaman, peternakan dan perikanan darat berbasis potensi spesifik lokal diiringi dengan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha	Penguatan dukungan infrastruktur jaringan irigasi dan jalan tani dalam akselerasi pertanian terpadu berbasis sistem agribisnis sesuai potensi spesifik lokal	Penguatan daya saing produk berbasis inovasi pada proses agroindustri disertai penguatan jaringan pasar produk agribisnis dengan melibatkan peran Perusda dan UMKM daerah.	Pemantapan pengelolaan sistem agribisnis berbasis petik, olah, kemas dan jual yang ditunjang dengan Inovasi dan teknologi serta dukungan jaringan kerjasama dalam keseluruhan rantai pasok hingga konsumen
		Menurunnya tingkat kemiskinan	Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan keberdayaan penduduk miskin	Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan strategi	Pemutahiran data kemiskinan terpadu berbasis IT dan peningkatan cakupan perlindungan sosial	Pemberdayaan masyarakat pada lokasi dengan penduduk miskin terbanyak dan	Pengembangan akses lapangan kerja dan lapangan usaha bagi rumah tangga miskin dan	Pengembangan sinergi multipihak dalam intervensi penanggulangan kemiskinan yang





NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
			secara bersinergi dengan perbaikan akses dalam lapangan kerja dan lapangan usaha secara merata dan tepat sasaran	penanggulangan kemiskinan daerah	bagi masyarakat paling miskin dan rentan	perluasan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat paling miskin dan rentan	perluasan pemberdayaan masyarakat pada lokasi dengan penduduk miskin terbanyak.	komprehensif dan terpadu baik untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan usaha mikro dan kecil bagi orang miskin.
		Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	Meningkatkan pendapatan kelompok penduduk bawah dengan pembangunan infrastruktur padat karya, dan beragam skema perlindungan dan bantuan sosial	Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan.	Pengumpulan dan pemutahiran data kemiskinan dan peningkatan cakupan perlindungan sosial	Pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat pada lokasi dengan penduduk miskin.	Penyediaan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi rumah tangga miskin dan perluasan pemberdayaan masyarakat pada lokasi dengan penduduk miskin terbanyak.	Perbaikan kualitas kehidupan dan pemberdayaan masyarakat maupun pengembangan usaha mikro dan kecil bagi orang miskin.
Misi – 3 : Mengembangkan Kerjasama Investasi Daerah Dan Penyediaan Lapangan Kerja Baru								
3	Meningkatkan kesempatan kerja	Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing pariwisata daerah	Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah, membangun jaringan kemitraan,	Pemetaan potensi investasi dan pariwisata daerah	Pembangunan sistem layanan investasi dan revitalisasi objek wisata daerah	Pengembangan sistem layanan investasi, sarana dan kelembangan pariwisata daerah	Pemantapan sistem layanan investasi dan promosi wisata daerah	Penguatan sistem investasi dan daya saing industri pariwisata daerah





NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
			penyederhanaan prosedur perizinan berbasis IT serta meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata					
Misi – 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Merata Dan Berwawasan Lingkungan.								
4	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi yang berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan	Pemenuhan fasilitas air minum dan penanganan limbah domestic yang terjangkau bagi seluruh masyarakat	Pemantapan keterpenuhan fasilitas air minum dan penanganan limbah domestik serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.	Peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi dan jalan tani dalam mendukung pertanian terpadu berbasis sistem agribisnis	Perluasan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah dalam menekan ketimpangan antar wilayah serta peningkatan akses rumah layak huni perbaikan kawasan permukiman	Penguatan sarana prasarana perhubungan dan moda transportasi antar wilayah kecamatan dengan jalan kondisi mantap
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana	Penguatan kapasitas, kebijakan dan rencana pengelolaan lingkungan hidup serta peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pemeliharaan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta penataan terhadap rekomendasi izin lingkungan dan Amdal bagi aktivitas swasta maupun	Pengendalian pencemaran tanah, air dan udara dari limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) serta pemeliharaan kualitas tutupan lahan	Pengembangan sistem penanganan sampah secara terpadu berbasis teknologi reduce, recycle dan reuse (3R) dan pelibatan masyarakat dengan didukung oleh	Pemantapan kapasitas sistem pengelolaan lingkungan secara terpadu berbasis pelibatan stakeholder dan kesadaran serta partisipasi





NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
					masyarakat		penataan ruang terbuka hijau	masyarakat
Misi – 5 : Mengoptimalkan Kinerja, Kualitas Dan Profesionalitas Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan <i>Good Governance</i> Dan <i>Electronic Governance</i>								
5	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan disiplin kerja, kualitas SDM dan profesionalitas aparatur diiringi dengan penataan kelembagaan dan peningkatan sistem pengawasan dalam berjalannya integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis elektronik.	Penataan kelembagaan dan organisasi serta peningkatan kompetensi dan profesionalitas sumber daya aparatur	Pengembangan sistem integrasi perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan berbasis elektronik	Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja berbasis disiplin aparatur dan tertib administrasi	Peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan urusan berbasis kelitbangan dan inovasi daerah	Pemantapan sistem akuntabilitas kinerja dengan dukungan pembinaan dan pengawasan secara melekat
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas SDM dan penerapan IT dalam pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan publik yang terintegrasi, serta pengembangan inovasi daerah	Penguatan kapasitas teknologi, sarana-prasarana, fasilitas dan SDM untuk sistem pelayanan publik yang prima	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang merata melalui pemanfaatan SDM berkualitas dan dukungan IT, serta penyederhanaan prosedur pelayanan	Perluasan jangkauan pelayanan publik melalui pendelegasian kewenangan pelayanan pada tingkat Kecamatan dengan dukungan SDM yang cukup	Optimalisasi daya guna SDM dan IT dalam sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan didukung oleh fungsi kelitbangan dan inovasi daerah	Pemantapan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi daerah secara bersinergi dengan penerapan SPM pada pelayanan dasar





NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	Menguatkan kelembagaan PUG dan forum anak, menyebarkan informasi kesetaraan gender serta urgensi perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan keberdayaan perempuan dalam perekonomian.	Pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran serta penggunaan data terpilah dalam penyajian indikator kinerja kunci penyelenggaraan urusan	Penguatan pokja pengarusutamaan gender dalam relasi fungsional dengan perangkat daerah dalam kerangka kelembagaan kerangka gender dalam pembangunan daerah	Pemberdayaan perempuan pada aspek ekonomi, politik dan sosial budaya serta penguatan peran perempuan pada birokrasi dan legislatif	Penguatan sistem perlindungan anak melalui deteksi kekerasan terhadap anak, pemberian bantuan hukum bagi kasus kekerasan terhadap anak, perwujudan desa serta kota layak anak	Perluasan cakupan perlindungan anak dan perempuan melalui layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi social, bantuan hukum serta pemulangan kepada lingkungan social masyarakat

Misi – 6 : Mengembangkan Dan Memajukan Kawasan Pedesaan Melalui Konsep Desa Cerdas (*Smart Village*), Sehat Dan Mandiri.

6	Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	Meningkatkan sistem pelayanan desa yang inovatif dan responsif berbasis teknologi informasi seiring dengan penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat desa, pemberdayaan BUMdes, pengembangan	Pemenuhan regulasi dan pem-binaan kewenang-an desa, peningkatan akses layanan pemerintah desa dan pemetaan potensi desa	Peningkatan kapasitas SDM aparat desa dan akses layanan pemerintah desa serta pemberdayaan BUMDes berdasarkan potensi desa	Peningkatan kualitas pendampingan pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana desa, pengelolaan asset dan	Penguatan BUMDes sebagai kelembagaan perekonomian desa dalam mendorong pertumbuhan serta menanggulangi kemiskinan berbasis produk unggulan desa	Pembinaan BUMDes melalui Pengembangan kerjasama antar desa serta kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan potensi desa yang produktif dan berkelanjutan
---	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
			sistem informasi potensi desa, penggunaan dana desa yang berbasis visi, transparan dan akuntabel.			keuangan desa, serta perbaikan pelayanan publik di desa dan pengembangan BUMDes		
Misi – 7 : Memajukan Dan Menciptakan Kondisi Kehidupan Beragama Serta Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal Sebagai Basis Nilai Dalam Menciptakan Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Kondusif.								
7	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta Kualitas Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya	Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah	Pengendalian keamanan dan ketenteraman lingkungan dan kerukunan hidup bermasyarakat	Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat dan tokoh tokoh agama	Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan diantara organisasi masyarakat dan tokoh pemuda	Peningkatan kerukunan umat beragama melalui dialog antara umat beragama, kerjasama pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga social keagamaan dalam menciptakan suasana rukun dan toleran	Peningkatan pelayanan kehidupan beragama melalui peningkatan pengelolaan dan fungsi tempat ibadah secara transparan dan akuntabel.
		Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Sarana Prasarana Olahraga	Meningkatkan partisipasi organisasi dan Lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian seni budaya dan pengembangan olahraga	Pemetaan organisasi pemuda dan lembaga berdasarkan potensi dan tujuan organisasi	Penyediaan sarana prasarana olahraga, pembinaan generasi muda dan pelestarian seni budaya	Pengembangan sarana prasarana olahraga, pembinaan generasi muda dan pelestarian seni budaya	Penyelenggaraan agenda keolahragaan dan festival seni budaya	Pembinaan dan pengembangan cabang olahraga dan seni budaya untuk meningkatkan prestasi ditingkat provinsi dan nasional





6.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan maka prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan
2. Penguatan perekonomian daerah
3. Peningkatan investasi dan daya saing pariwisata daerah
4. Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah
5. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
6. Pengembangan kawasan pedesaan
7. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan aman

6.4. Program Pembangunan Daerah

Selanjutnya, dirumuskan Program Pembangunan Daerah sebagai program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD 2018-2023 yang akan datang. Perumusan Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Program pembangunan merupakan program prioritas sebagai fokus dan penjabaran kebijakan umum yang langsung berhubungan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng rappang Tahun 2018 – 2023, yang dijabarkan berdasarkan misi, adalah sebagai berikut ini:



Tabel 6. 4
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Sidenreng Rappang

KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Misi 1 : Memajukan Dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat																		
1		Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Indeks pembangunan manusia (%)	69.84	70.90		71.30		71.80		72.50		73.20		73.20			
1	1	Sasaran 1.1 : Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan	60.09	62.69		63.61		64.53		65.48		66.43		66.43			
1	1	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD (%)	61.19	100%	3,349,000,0 00	100%	9,573,000,0 00	100%	10,530,300,0 00	100%	11,583,330, 000	100%	12,741,663 ,000	100	12,741,66 3,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	92.41%	100%	89,160,0000 ,000	100%	302,144,000 ,000	100%	332,358,400, 000	100%	354,704,24 0,000	100%	424,780,66 4,000	100	424,780,6 64,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	1	3	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	32.1	100%	1,850,000,000	100%	4,922,000,000	100%	5,491,200,000	100%	6,040,320,000	100%	6,644,352,000	100%	6,644,352,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	4	Program Peningkatan Kualifikasi Dan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	96.95%	-	-	98	7,352,047,350	98.5	8,087,252,085	99	8,895,977,294	99.5	9,785,575,023	99.5	9,785,575,023	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	2		Sasaran 1.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	75.11	75.41	75.7	76	76.3	76.6	76.6							
1	2	1	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Obat Difasilitas Kesehatan	100%	100%	3,609,745,000	100%	3,992,973,000	100%	4,187,500,000	100%	4,431,625,000	100%	4,645,000,000	100%	20,866,843,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Biaya Dan Pemeliharaan Puskesmas	14 PKM	14 PKM	16,450,000,000	14 PKM	16,668,278,600	14 PKM	16,768,278,600	14 PKM	16,868,278,600	14 PKM	16,968,278,600	14 PKM	16,968,278,600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1	2	3	Program Pengawasan Obat Dan Makanan	Cakupan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Apotek Dan Pasar	167 Apotek, Pasar, Warung	167 Apotek, Pasar, Warung	191,500,000	175 Apotek, Pasar, Warung	330,000,000	180 Apotek, Pasar, Warung	335,000,000	190 Apotek, Pasar, Warung	340,000,000	200 Apotek, Pasar, Warung	345,000,000	200s Apotek, Pasar, Warung	45,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1	2	4	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS	37.120 Rumah	37.500 Rumah	95,000,000	37.600 Rumah	232,300,000	37.700 Rumah	276,550,000	37.800 Rumah	303,700,000	37.900 Rumah	351,100,000	37.900 Rumah	1,254,682,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1	2	5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	2 Balita	1 Balita	1,133,475,500	1 Balita	2,110,000,000	0	2,105,000,000	0	2,150,000,000	0	2,202,500,000	0	9,980,975,500	Dinas Kesehatan, Pengendalian





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
																	Penduduk Dan Keluarga Berencana	
1	2 6	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Penemuan Dan Penanganan Penyakit Menular	100%	100%	100%	1,570,319, 000	100%	4,000,000, 000	100%	4,100,000, 000	100%	4,200,000, 000	100%	4,300,000, 000	100%	4,300,00 0,000	Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk Dan Keluarga Berencana
1	2 7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Air Minum Sehat	50	52%	54%	454,475,00 0	56%	1,032,913, 400	58%	1,131,913, 400	60%	1,271,913, 400	60%	1,356,913, 400	60%	4,948,12 8,600	Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk Dan Keluarga Berencana
1	2 8	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Dibangun/Diper baiki	100%	100%	100%	15,000,000 ,000	100%	20,000,000 ,000	100%	27,800,000 ,000	100%	33,900,00 0,000	100%	40,000,00 0,000	100%	40,000,0 00,000	Dinas Kesehatan, Pengendali an Penduduk Dan Keluarga Berencana





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Pembantu Dan Jaringannya															
1	2 9	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang di Bangun	-	100%	3,750,000,000	100%	4,700,000,000	100%	8,750,000,000	100%	15,800,000,000	100%	20,850,000,000	100%	20,850,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1	2 0	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Dengan Kemitraan	100%	100%	37,340,367,000	100%	15,340,367,000	100%	17,340,367,000	100%	19,340,367,000	100%	21,340,367,000	100%	21,340,367,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1	2 1 1	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Persentase Keselamatan Melahirkan	-	100%	850,000,000	100%	900,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,500,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
																	Berencana	
1	2	1 2	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Penemuan Dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	100%	-	-	100	195,000,000	100	250,000,000	100	270,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1	2	1 3	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Yg Berperestasi	3 Tenaga Kesehatan	-	-	5 Tenaga Kesehatan	225,000,000	5 Tenaga Kesehatan	270,000,000	5 Tenaga Kesehatan	300,000,000	6 Tenaga Kesehatan	350,000,000	6 Tenaga Kesehatan	350,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1	2	1 4	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	94.70%	-	-	100%	650,000,000	100%	720,000,000	100%	800,000,000	100%	850,000,000	100%	3,606,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1	2	1 5	Program Pelayanan	Jumlah Anak Balita Yang	79.30%	100%	75,000,000	100%	170,000,000	100%	175,000,000	100%	180,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	Dinas Kesehatan,





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Kesehatan Anak Balita	Mendapatkan Layanan Kesehatan														Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1	2 1 6	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	32.50%	100%	120,000,000	100%	150,000,000	100%	170,000,000	100%	200,000,000	100%	412,000,000	100%	412,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Misi 2 : Memajukan Usaha Agribisnis , UMKM Dan Industri Pengolahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat																	
2		Tujuan 2 : Meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB perkapita (juta rupiah)	40.24	44.16		46.31		48.85		52.81		55.24		55.24		
2	1	Sasaran 2.1 : Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB (%)	5.02	5.27		5.53		5.80		6.09		6.39		6.39		
2	1 1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85	86	2,400,000,000	87.00	2,500,000,000	88.00	2,600,000,000	89.00	2,700,000,000	90	2,800,000,000	90	2,800,000,000	Dinas Tanaman Pangan,





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pangan (Pertanian /Perkebunan)	Nilai Konsumsi Kalori Protein (Gr/Hr)	-	170.00		173.00		177.00		180.00		184		184		Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
2	1	2	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi Padi (Ton)	545,606	-	601,531		631,60 7		663,18 8		696,347		696,34 7	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
			Produksi Jagung (Ton)	67,929	-	72,066	19,442,045 ,000	20,991,761 ,250	74,228	76,455	21,338,46 3,313	78,748	21,417,95 0,478	78,748	21,417,9 50,478	
2	1	3	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi Cabai Besar (Ton)	9,300	-	11,253. 00		12,378. 30		13,616. 13		14,977. 74		14,978	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Cabai Rawit (Ton)	3,778	-	4,406.6 6	587,710,00 0	643,300,00 0	4,759.1 9	5,139.9 3	723,300,0 00	5,551.1 2	828,300,0 00	5,551	
				Produksi Bawang Merah (Ton)	295	-	300.93		303.94		306.98		310.05		310.05	
				Produksi Semangka (Ton)	334	-	1,336.0 0		2,672.0 0		5,344.0 0		10,688. 00		10,688	
				Produksi Durian (Ton)	14,202	-	15,657. 71		16,440. 59		17,616. 13		18,125. 75		18,126	





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	1	4	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi Kakao (Ton)	7,607	-	7,914.15	820,000,000	8,072.43	870,000,000	8,233.88	900,000,000	8,398.55	920,000,000	8,399	920,000,000	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	
				Produksi Cengkeh (Ton)	620	663.70	710.16		759.87		813.06		869.97		869.97			
				Produksi Lada (Ton)	84	87.40	90.90		94.53		98.31		102.25		102.25			
2	1	5	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Ekor Hasil IB		3,708	391,500,000	41,675	1,558,483,000	44,801	4,152,811,600	48,161	4,222,842,760	51,773	51,773	4,222,842,760	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
				Ekor Sapi		110		6,916		7,262		7,625		8,006	8,006			
				Ekor Kambing		500		770,284		831,906		898,459		970,335	970,335			
				Ekor Ayam Buras		2,000		41,675		44,801		48,161		51,773	51,773			
2	1	6	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase transmigrasi swakarsa (%)	1.50%	5.90%	3,470,000	11.10%	1,750,000	23.90%	1,850,000	33.40%	1,500,000	38.50%	1,200,000	38.50%	9,770,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	1	7	Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMK terhadap total UMKM (%)	97.20%	-	-	93%	4,690,000	91%	4,395,000	89%	4,395,000	87%	4,525,000	87%	18,005,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
																	dan Transmigrasi	
2	1	8	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Prosentase Cakupan Pemb. Kelompok & pelaku industri	21 klp	19.36%	2,211,600,000	19.80%	7,352,000,000	20.04%	6,452,000,000	20.28%	1,552,000,000	20.52%	1,802,000,000	100%	19,369,600,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	1	9	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Prosentase Cakupan Pembinaan Usaha Perdagangan/U saha Informal	-	-	-	20%	230,000,000	20%	380,000,000	20%	480,000,000	30%	580,000,000	30%	580,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2	1	10	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya Efisiensi Dan Efektifitas Perdagangan Dalam Negeri	-	100%	3,400,513,000	100%	6,300,000,000	100%	6,400,000,000	100%	6,500,000,000	100%	6,600,000,000	100%	6,600,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2	2		Sasaran 2.2 : Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan (%)	5.32	5.00		4.90		4.83		4.78		4.73		4.73		
2	2	1	Program Pemberdayaan Fakir miskin, komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang	-	75%	72,450,000	77%	75,000,000	80%	75,000,000	83%	75,000,000	85%	75,000,000	80%	75,000,000	Dinas Sosial





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	telah menerima jaminan sosial														
2	2 2	Program Pencapaian SPM	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	-	-	100%	2,150,000,000	100%	2,180,000,000	100%	2,210,000,000	100%	2,240,000,000	100%	2,650,000,000	Dinas Sosial	
2	3	Sasaran 2.3 : Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan	Gini Ratio	0,340	0.330	0.323		0.316		0.310		0.305		0.305			
2	3 1	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Kesesuaian Kinerja Bidang Ekonomi	100%	100%	750,000,000	100%	795,000,000	100%	830,000,000	100%	850,000,000	100%	900,000,000	100%	900,000,000	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan pengembangan Daerah
2	3 2	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Dan Budaya	Persentase Kesesuaian Kinerja Bidang Sosial Dan Budaya	100%	100%	170,000,000	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	300,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
																	Danpengem bangan Daerah	
Misi 3 : Mengembangkan Kerjasama Investasi Daerah Dan Penyediaan Lapangan Kerja Baru																		
3		Tujuan 3 : Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4.70	4.67	4.62	4.57	4.53	4.50	4.50								
3	1	Sasaran 3.1 : Meningkatnya pertumbuhan investasi dan daya saing pariwisata daerah	Nilai investasi (Juta Rupiah)	156.997	157.002	157.052	157.127	157.227	157.227	157.227								
			Jumlah Objek Wisata Baru	11	-	1	1	1	1	1								
3	1	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai investasi PMDN dan PMA (Juta Rupiah)	156,978	157,003	120,000,000	157,053	2,025,000,000	157,128	2,100,000,000	157,228	2,075,000,000	157,229	2,150,000,000	157,229	2,150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	1	2	Program Peningkatan Iklim dan Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Investor Penanaman Modal	192	194	40,000,000	196	475,000,000	198	850,000,000	200	950,000,000	200	1,050,000,000	200	1,050,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	1	3	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase PAD Sektor Pariwisata	-	20%	350,000,000	30%	1,920,000,000	40%	1,950,000,000	50%	1,970,000,000	60%	1,940,000,000	60%	1,940,000,000	Dinas Kepemudaa n, Olahraga Dan





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3	1	4	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Wisata Yang Terbentuk	-	1	100,000,000	5	223,000,000	11	350,000,000	18	365,000,000	26	380,000,000	26	380,000,000	Pariwisata Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
3	1	5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	-	500000	250,000,000	700000	300,000,000	750000	550,000,000	800000	600,000,000	900000	640,000,000	640,000,000	900000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Merata Dan Berwawasan Lingkungan																		
4			Tujuan 4 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi yang berwawasan Lingkungan	Pertumbuhan PDRB Sektor Infrastruktur wilayah (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi,)	8.26	8.34		8.42		8.50		8.58		8.66		8.66		
4	1		Sasaran 4.1 : Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang berkualitas	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	47	52		54		56		59		61		61		
				Persentase Jembatan dalam kondisi baik	76.2	76.9		78		80		82		84		84		





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	-	55		60		65		70		75		75				
4	1	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	51%	52%	42,174,249,000	54%	42,000,000,000	56%	45,000,000,000	59%	50,000,000,000	61%	55,000,000,000	61%	234,174.249,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
4	1	2	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong – Gorong	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	-	3%	100,000,000	5%	300,000,000	7%	600,000,000	8%	800,000,000	10%	1,000,000,000	10%	2,800,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
4	1	3	Program Pembangunan Turap/Talud /Bronjong	Terbangunnya Talud untuk memperkuat Jaringan Jalan	35%	37%	1,369,877,000	39	2,000,000,000	41	2,500,000,000	43	3,000,000,000	45	3,000,000,000	45	11,869.877,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
4	1	4	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya jaringan Jalan dan Jembatan	30%	32%	58,367,015,000	34%	62,847,334,000	35%	18,000,000,000	36%	18,000,000,000	38%	18,000,000,000	38%	126,614.349,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan,





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
																	dan Perumahan Rakyat	
4	1	5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	70%	72%	820,575,000	0.75	4,000,000,000	0.78	1,000,000,000	0.81	1,000,000,000	0.85	1,400,000,000	0.85	8,220,575,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
4	1	6	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Luasan RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/Kawasan perkotaan	5%	-	-	7%	2,000,000,000	9%	3,000,000,000	12%	3,000,000,000	13%	3,000,000,000	11 Kec	11,000,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
4	1	7	Program Air Minum (Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku)	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	85%	100%	5,341,832,000	100%	5,200,000,000	100%	5,000,000,000	100%	4,800,000,000	100%	4,200,000,000	100%	24,541,832,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
4	1	8	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Terbangunnya Infrastruktur Jalan di wilayah Strategis	25%	25%	4,618,749,000	30%	1,500,000,000	32%	1,500,000,000	34%	1,500,000,000	36%	1,500,000,000	36%	10,618,749,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan,





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Khususnya di perdesaan															dan Perumahan Rakyat
4	1 9	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	45%	50%	3,198,336,000	55%	2,500,000,000	60%	2,500,000,000	65%	2,500,000,000	70%	2,500,000,000	70%	13,198,336,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat	
4	1 0	Program Pemanfaatan Ruang	100%	100%	159,200,000	100%	600,000,000	100%	650,000,000	100%	700,000,000	100%	750,000,000	100%	2,859,200,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat	
4	1 1 1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5%	100%	595,916,000	100%	750,000,000	100%	950,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,800,000,000	100%	5,295,916,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat	
4	1 2	Pemb. Sal. Drainase/ Gorong-2	100%	61.32%	5,000,000,000	64.15%	6,000,000,000	67.92%	7,000,000,000	71.69%	8,000,000,000	75.47%	9,000,000,000	75.47%	35,000,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan,	





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																	dan Perumahan Rakyat
4	1 3	Pengem Bangan, Pengelolaan, & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Daya Air Kawasan Program	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan	82.6	86.08%	1,600,000,0 00	89.56%	1,700,000,0 00	93.04	1,800,000,00 0	96.5	1,900,000,0 00	100	2,000,000, 000	100	9,000,000 ,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
4	1 4	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	83.28%	86.08%	10,800,000, 000	89.56%	11,200,000, 000	93.04%	116,000,000, 000	96.50%	12,000,000, 000	100%	12,400,000 ,000	100%	58,000,00 0,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
4	1 5	Perencanaan, Penga Wasan, Pengujian & Pengendalian Mutu	Tersedianya Pelaporan Kesesuaian Program Dan Usulan Secara Tepat Dan Benar	100%	100%	58.587	100%	63.587	100%	68.587	100%	73.587	100%	78.587	100%	342.935	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
4	1 6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan	Persentase Jaringan Irigasi yang baik	50%	55%	44.950.000. 000	60.00%	60.622.000. 000	65.00%	57.903.625.0 00	70.00%	51.947.032. 000	75%	53.813.000 .000	75%	269.236.9 04.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pengairan Lainnya																
4	1 1 7	Program Penyediaan Air Baku	Pesentase Penyediaan Air Baku	-	40%	1.925.000.0 00	40.00%	2.021.250.0 00	45.00%	2.122.313.00 0	50.00%	2.228.428.0 00	55%	2.339.850. 000	60%	10.636.84 0.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
4	1 1 8	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan SDA Lainnya	Persentase Embung Yang Tersedia	-	60%	15.250.000. 000	65%	16.000.000. 000	70%	16.787.500.0 00	75%	17.614.375. 000	80%	18.482.594 .000	80%	84.134.46 9.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
4	1 1 9	Program Pengendali Banjir	Titik Terdampak Banjir dan Kekeringan yang terkendali	-	15%	7.000.000.0 00	15.00%	7.350.000.0 00	15.00%	7.717.50000 0	15.00%	8.103.375.0 00	15%	8.508.544. 000	15%	38.579.41 9.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
4	2	Sasaran 4.2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	73.33		73.36		73.4		73.44		73.49		73.49		
4	2 1	Program PengeLolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan Rth Publi Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	14.54%	15.45%	2,200,000,0 00	16.36%	2,300,000,0 00	17.64%	2,400,000,00 0	18.91%	2,500,000,0 00	20%	2,600,000, 000	200%	12,000,00 0,000	Dinas Lingkungan Hidup
4	2 2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3 R	20%	25%	1,600,000,0 00	30%	1,700,000,0 00	37.50%	1,800,000,00 0	42.50%	1,900,000,0 00	47.50%	2,100,000, 000	47.00%	9,100,000 ,000	Dinas Lingkungan Hidup





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
4	2	3	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Tersedianya Informasi Tentang Lingkungan Hidup	100%	100%	400,000,000	100%	500,000,000	100%	600,000,000	100%	700,000,000	100%	800,000,000	100%	3,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
4	2	4	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	36 Usaha/8s sungai/10 Kasus/1 Penghargaan	36 Usaha/8s sungai/2 Kasus/1 Penghargaan	400,000,000	36 Usaha/8 sungai/3 Kasus/1 Penghargaan	800,000,000	36 Usaha/8 Sungai/4 Kasus/1 Penghargaan	900,000,000	36 Usaha/8 Sungai/5 Kasus/1 Penghargaan	1,000,000,000	36 Usaha/8 Sungai/6 Kasus/1 Penghargaan	1,100,000,000	100%	4,200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Misi 5 : Mengoptimalkan Kinerja, Kualitas Dan Profesionalitas Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan Good Governance Dan Electronic Governance																		
5			Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Indeks Reformasi Birokrasi	-	51.32		55.55		60.08		62.87		64.01		64.01		
5	1		Sasaran 5.1 : Meningkatkan kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	41.98	51.77		56.75		60.09		64.46		68.78		68.78		
				Opini laporan keuangan	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5	1	1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase keterpenuhan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja yang tepat waktu	1	100%	55,350,000	1	47,900,000	1	47,900,000	1	68,815,000	1	68,815,000	1	288,780,000	Inspektorat
5	1	5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase Kesesuaian Program/Kegiatan Yang Direncanakan (RKPD) Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan (APBD)	100%	100%	1,700,000,000	100%	2,079,000,000	100%	2,100,000,000	100%	2,300,000,000	100%	2,500,000,000	1	2,500,000,000	
5	1	7	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Apbd, Perubahan Apbd Dan Pertanggungjawaban Apbd,	Dokumen	Dokumen	5,311,500,000	Dokumen	9,376,860,500	Dokumen	8,778,079,800	Dokumen	10,034,762,950	Dokumen	10,926,009,100		10,926,009,100	Badan Keuangan Dan Aset Daerah





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD			
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Dokumentasi Regulasi Keuangan Daerah Lainnya															
5	2	Sasaran 5.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	-	75.10		76.61		77.14		78.32		80.80		80.80			
5	2	1 Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase wajib KTP yang di layani dalam hal pendataan dan kepemilikan KTP elektrik		2,353,037,0 00	-	5,331,086,0 00	-	5,143,279,0 0	-	5,283,279,0 00	-	4,958,279, 000	-	4,958,279 ,000	Dinas Kependuduk an & Pencatatan Sipil Kab. Sidrap	
5	2	2 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah tenaga dan sarana kesehatan bersertifikat atau reakreditasi	14 PKM	7 PKM	814,568,000	5 PKM	610,568,000	2 PKM	304,568,000	7 PKM	814,568,00 0	5 PKM	610,568,00 0	5 PKM	3,154,840 ,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	2	3 Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD	Persentase Tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan	35,9%	40%	70,000,000, 000	45%	75,000,000, 000	50%	80,000,000,0 00	55%	85,000,000, 000	60%	90,000,000 ,000	60%	400,000,0 00,000	Rumah Sakit Umum Daerah
5	2	4 Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	80	450,000	83	490,000	85	500,000	87	510,000	90	640,000	90	640,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5	2	5	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Persentase Izin yang diterbitkan	86.42	100	687,000	100	1,141,000	100	1,760,900	100	1,819,500	100	1,892,000	100	1,892,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	2	6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Membangun Desa	-	-	-	47%	7,700,000,000	50%	8,000,000,000	52%	8,300,000,000	55%	8,700,000,000	60%	15,194,631,700	Kecamatan
5	2	7	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Cakupan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	-	75%	17,000,000,000	80%	17,520,000,000	85%	18,000,000,000	87%	20,000,000,000	90%	23,000,000,000	90%	95,520,000,000	Kecamatan
5	2	8	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	70%	88,000,000,000	71%	88,000,000,000	72%	88,000,000,000	73%	88,000,000,000	74%	88,000,000,000	70%	88,000,000,000	Kecamatan
5	3		Sasaran 5.3 : Meningkatnya keberdayaan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.21	92.87		93.31		94.04			95.42		96.01			





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB			
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD					
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	perempuan dan anak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	49.02	50.33	51.50	52.67	53.84	55.01	55.01										
5	3	1	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2.5%	-	-	6%	820,000,000	7%	890,000,000	8%	960,000,000	9%	1,030,000,000	9%	3,700,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	
Misi 6 : Mengembangkan Dan Memajukan Kawasan Pedesaan Melalui Konsep Desa Cerdas (Smart Village), Sehat Dan Mandiri																			
6			Tujuan 6 : Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	-	0.6477	0.6583	0.689	0.7027	0.7218	0.7218	0.7218	0.7218	0.7218	0.7218	0.7218	0.7218		
6	1		Sasaran 6.1 : Terwujudnya Desa Maju dan Mandiri	Indeks Ketahanan Sosial	-	0.7465	0.748	0.7501	0.7558	0.7598	0.7598	0.7598	0.7598	0.7598	0.7598	0.7598	0.7598		
				Indeks Ketahanan Ekonomi	-	0.5576	0.5769	0.6631	0.6879	0.7029	0.7029	0.7029	0.7029	0.7029	0.7029	0.7029	0.7029	0.7029	
				Indeks Ketahanan Lingkungan	-	0.6390	0.6501	0.6537	0.6643	0.7027	0.7027	0.7027	0.7027	0.7027	0.7027	0.7027	0.7027	0.7027	0.7027





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
6	1	1	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terwujudnya jumlah masyarakat yang lebih produktif dan mandiri dalam perencanaan pembangunan	68	68	900,000,000	68	1,320,000,000	68	1,860,000,000	68	2,070,000,000	68	2,240,000,000	340	8,350,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
6	1	2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Bumdes yang lebih mandiri dan terlatih dalam pengembangan lembaga ekonomi;	4	68	195,000,000	68	410,000,000	68	470,000,000	68	500,000,000	68	1,925,000,000	340	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	
				Terciptanya produk unggulan pedesaan;	4	68		68		68		68		340				
				Tingkat persentase pendapatan kelompok masyarakat.	100	100		100		100		100		100				
6	1	3	Program Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terbentuknya Kawasan Perdesaan Sesuai Potensi dan Produk Unggulan Desa	1	-	-	1	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	8	800,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
																Anak		
6	1	4	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang dibina dan difasilitasi	68	-	-	68	920,000,000	68	1,020,000,000	68	1,120,000,000	68	1,320,000,000	340	4,380,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
6	1	5	Program peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan kinerja dan manajemen aparatur pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan.	-	-	-	68	980,000,000	68	1,200,000,000	68	1,170,000,000	68	1,350,000,000	68	4,480,000,000	
6	1	6	Penataan kelembagaan desa	Persentase Penataan kelembagaan desa	68	-	-	68	1,310,000,000	68	1,245,000,000	68	800,000,000	68	1,615,000,000	68	4,970,000,000	
6	1	7	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Yang Menunjang Tugas Pokok Dan Fungsi	-	100%	4,355,063,000.00	100%	10,000,000,000	100%	10,300,000,000	100%	10,600,000,000	100%	10,900,000,000	100%	10,900,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
Misi 7 : Memajukan Dan Menciptakan Kondisi Kehidupan Beragama Serta Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal Sebagai Basis Nilai Dalam Menciptakan Kehidupan Social																		
7			Tujuan 7 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban serta	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	65.99	68.35	71.78	75.32	79.75	85.77	85.77							





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya																	
7	1	Sasaran 7.1 : Meningkatnya Kenyamanan Kehidupan Bermasyarakat	Persentase Angka Kriminalitas per 10.000	15.27	15.08	14.41		13.62		12.86			12.12		12.12			
7	1	1	Program Pemeliharaan Kantantibmas dan Penegahan Tindak Kriminal	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	70%	80%	329,255,000	80%	711,810,500	90%	817,781,000	95%	787,781,000	95%	1,265,081,000	95%	3,911,708,500	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7	1	2	Program Peningkatan Pemebrantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Mewujudkan lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, tertib dan tentram dengan masyarakat yang berakhlak mulia	Kegiatan	-	-	-	-	4 Keg	200,000,000	4 Keg	200,000,000	-	-	4 Keg	400,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7	1	3	Program Peningkatan Pemahaman dan Penegakan Peraturan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda	90%	95%	467,781,000	100%	230,000,000	100%	230,000,000	100%	230,000,000	100%	230,000,000	100%	2,680,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	4	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Koordinasi Tim Dalam Rangka Cegah Dini Dan Deteksi Dini	100%	100%	657,500,000	100%	1,200,000,000	100%	1,340,000,000	100%	1,620,000,000	100%	1,750,000,000	100%	6,567,500,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
7	2		Sasaran 7.2 : Meningkatkan Penerapan Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Sarana Prasarana Olahraga	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar budaya Yang dilestarikan	-	50		62,5		75		87,5		100		100		
			Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Terpadu	-	2		2		2		3		11					
7	2	1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang dikelola Secara Terpadu	-	43		46,3		50		53,7		57,4		57,4		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Festival Seni Dan Budaya Daerah	-	25	2,295,000,000	30	2,594,500,000	35	4,399,950,000	40	4,834,945,000	45	5,313,439,500	45	5,313,439,500	
7	2	2	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	-	36,67	1,500,000,000	66,67	2,639,870,000	83,33	2,650,100,000	93,33	2,700,250,000	100	2,750,500,000	100	2,750,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata





KODE	MISI/TUJUAN/ SASARAN/PROG RAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT / OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
				TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD				
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	2	3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Wirausaha Muda	-	0.42	600,000,000	0.63	740,000,000	0.84	850,000,000	1.26	960,000,000	1.67	1,070,000,000	1.67	1,070,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
7	2	4	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana Dan Prasarana Olahraga Yang Memadai	-	35	7,800,000,000	75	8,650,000,000	78	8,750,000,000	81	9,050,000,000	85	9,350,000,000	85	9,350,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
7	2	5	Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga	-	32	2,220,000,000	80	3,005,767,000	85	3,000,000,000	90	3,060,000,000	100	3,900,000,000	100	3,900,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata





KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

**Kerangka Pendanaan Pembangunan
Program Perangkat Daerah**

BAB 7



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Kerangka pendanaan Pembangunan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Dalam mendesain kerangka pendanaan ini, diperlukan analisis faktor determinan sebagai penentu dan memiliki hubungan fungsional terhadap komponen-komponen pendanaan yang diproyeksikan untuk lima tahun akan datang. Untuk kerangka pendanaan hendaknya diawali dengan penetapan asumsi makro ekonomi daerah yang secara mendasar akan mempengaruhi besar-kecilnya komponen-komponen keuangan daerah yang direncanakan atau yang dikehendaki.

7.1.1. Asumsi Makro Ekonomi Daerah

Asumsi makro ekonomi daerah ini memberi dampak pada sisi analisis keuangan daerah. Pada sisi pendapatan daerah, gambaran asumsi makro ekonomi daerah akan menjadi acuan dalam memprediksi sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk lima tahun ke depan. Dengan kata lain, asumsi makro ekonomi daerah ini akan menjadi *tax base* bagi perencanaan pendapatan daerah bersangkutan. Besar kecil potensi pendapatan daerah akan sangat tergantung pada perputaran kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat daerah setempat.



Pada sisi belanja daerah, asumsi makro ekonomi daerah akan berimplikasi pada kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) pemerintah daerah. Semakin tinggi target-target makro ekonomi daerah yang ditetapkan maka semakin besar kebutuhan fiskal yang berdampak pada besarnya alokasi belanja daerah. Baik pada sisi pendapatan maupun pada sisi belanja daerah, indikator-indikator tersebut berupa, pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat yang diproksi dari PDRB Per Kapita, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, serta stabilitas harga-harga.

Tabel 7.1.
Asumsi Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023

No	Indikator Makro Ekonomi	Asumsi Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan PDRBi (%)	5.27	5.53	5.80	6.09	6.39
2	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	44.16	46.31	48.85	52.81	55.24
3	Inflasi (%)	3,5±1,0	3,0±1,0	3,0±1,0	3,0±1,0	3,0±1,0
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.67	4.62	4.57	4.53	4.50
5	Tingkat Kemiskinan (%)	5.00	4.90	4.83	4.78	4.73

Sumber: Hasil olahan tim penyusun

Asumsi makro ekonomi daerah yang disajikan dalam tabel 7.1. tersebut merupakan simplifikasi dari tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada bab V RPJMD ini. Indikator-indikator akan berimplikasi pada kerangka pendanaan yang akan ditempuh untuk lima tahun ke depan.

Pertama, pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil di atas 7,13 hingga 7,19 persen selama periode 2019-2023 memberi optimisme akan besarnya peluang munculnya sumber-sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah. kegiatan ekonomi yang tumbuh stabil akan memberi peluang berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menumbuhkan obyek-obyek pajak dan penerimaan daerah yang semakin luas. Pada sisi yang lain, target pertumbuhan ekonomi tersebut



berimplikasi pada kebutuhan fiskal (fiscal needs) dalam wujud kebutuhan belanja dan pengeluaran daerah yang besar. Sehingga pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan tambahan pendanaan yang juga besar.

Kedua, PDRB per kapita yang meningkat lebih dari Rp 10 juta per kapita dalam lima tahun, mengindikasikan meningkatnya kemampuan daya beli dan kemampuan membayar kewajiban dan pajak daerah bagi masyarakat. Sehingga dari sisi pendapatan dan penerimaan daerah, peningkatan PDRB per kapita ini menggambarkan potensi penerimaan dan pendapatan daerah yang semakin besar. Hanya saja dari sisi belanja dan pengeluaran, diperlukan alokasi anggaran yang besar guna mengakselerasi peningkatan PDRB supaya PDRB per kapita juga dapat meningkat.

Ketiga, tingkat inflasi yang stabil antara 1,0 hingga 3,5 persen setiap tahunnya merupakan kondisi perekonomian daerah yang diinginkan guna menjaga stabilitas kegiatan ekonomi masyarakat. Daya beli masyarakat terjaga pada satu sisi, sementara peluang usaha juga tetap berkembang bagi pelaku sektor produksi. Kondisi ini diperlukan dalam memastikan sumber-sumber penerimaan daerah yang tidak distorsif bagi kegiatan perekonomian sektor konsumsi dan produksi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Keempat, tingkat pengangguran terbuka yang bukan hanya rendah tetapi konsisten mengalami penurunan dalam lima tahun ke depan akan memberi gambaran meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Pengangguran yang berkurang pada satu sisi akan berarti orang yang mampu membayar pajak dan retribusi daerah akan semakin banyak sehingga pendapatan daerah dapat meningkat. Hanya saja, pada sisi yang lain menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kegiatan pembangunan daerah yang mampu



menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

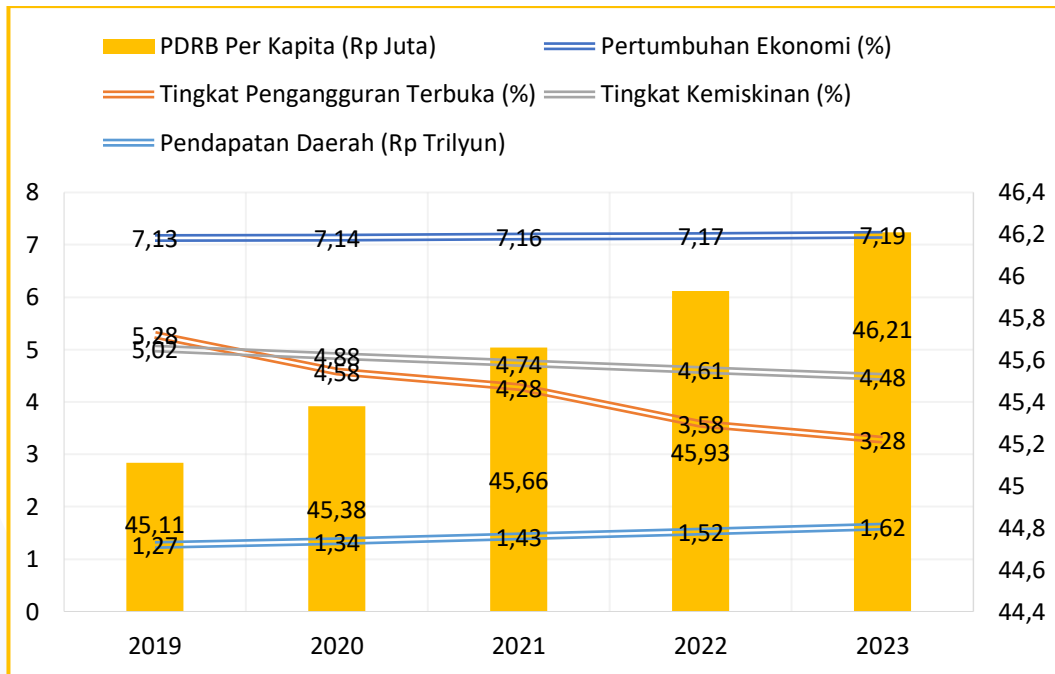
Kelima, tingkat kemiskinan yang tereduksi di bawah empat persen, memberi gambaran bahwa lebih dari 95 persen penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kemampuan dalam membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga kategori wajib pajak yang tidak mampu akan semakin berkurang. Untuk itu, dari sisi belanja dan pengeluaran daerah diperlukan strategis pembangunan daerah yang tepat sehingga kelompok-kelompok masyarakat miskin dapat dientaskan dalam lima tahun ke depan.

7.1.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Asumsi makro ekonomi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam melakukan proyeksi terhadap potensi pendapatan daerah dan kebutuhan fiskal daerah Kabupaten Sidenreng Rappang lima tahun ke depan. Selain itu, dalam proyeksi pendapatan daerah tetap memperhatikan faktor-faktor lainnya, seperti faktor kebijakan keuangan negara, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, serta tingkat pertumbuhan rata-rata realisasi pendapatan daerah dalam lima tahun terakhir yang telah berjalan. Sedangkan dari sisi proyeksi belanja dan pengeluaran daerah, selain asumsi makro ekonomi daerah ini, tetap harus diperhatikan antara lain kebijakan pembiayaan daerah, kebijakan pemerintah terkait pelayanan publik, serta tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat.



Gambar 7.1. Asumsi Ekonomi Makro dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2019-2023

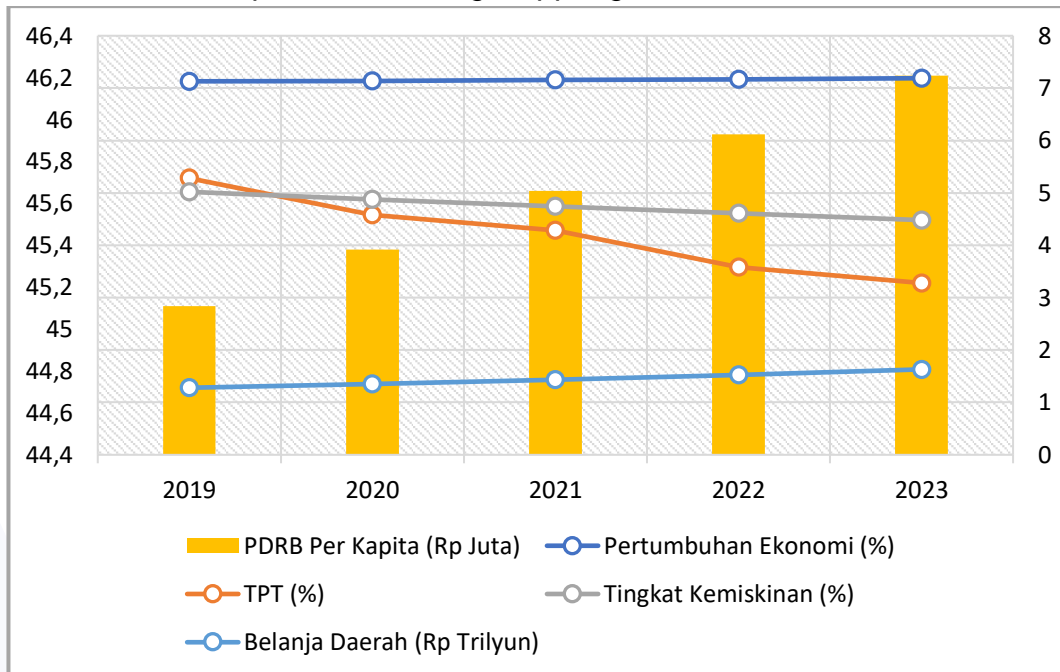


Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

Gambar 7.1. tersebut menunjukkan hubungan asumsi makro ekonomi daerah dengan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 2019-2023. Berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkat dari 7,13 persen pada tahun 2019 menjadi 7,19 persen pada tahun 2023, berpotensi mendorong peningkatan pendapatan daerah dari hanya Rp 1,27 trilyun pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 1,62 trilyun pada tahun 2023. Kondisi yang sama ditunjukkan pada peningkatan PDRB per kapita berdampak pada potensi pendapatan daerah yang sama. Sebaliknya, pada asumsi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang senantiasa menurun akan berdampak pada potensi pendapatan daerah.



Gambar 7.2. Asumsi Ekonomi Makro dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2019-2023



Sumber: Hasil Proyeksi Tim Penyusun

Analisis yang sama pada proyeksi belanja daerah, dimana target-target makro ekonomi tersebut berimplikasi pada kebutuhan belanja daerah yang meningkat seiring peningkatan atau penurunan indikator makro ekonomi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun berjalan, tahun sebelumnya atau tahun yang berikutnya.

Proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2019-2023 disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 7.2.
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2019-2023

No	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	1,274,325,553,000	1,344,413,458,415	1,425,078,265,920	1,517,708,353,205	1,623,947,937,929
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	140,872,160,000	148,620,128,800	157,537,336,528	167,777,263,402	179,521,671,840
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	29,350,387,000	30,964,658,285	32,822,537,782.10	34,956,002,738	37,402,922,930
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13,835,293,000	14,596,234,115	15,472,008,161.90	16,477,688,692	17,631,126,901
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5,738,586,000	6,054,208,230	6,417,460,723.80	6,834,595,671	7,313,017,368
1.1.4	Lain-lain PAD	91,947,894,000	97,005,028,170	102,825,329,860.20	109,508,976,301	117,174,604,642

NO.	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.2	DANA PERIMBANGAN	963,412,442,000	1,016,400,126,310	1,077,384,133,889	1,147,414,102,591	1,227,733,089,773
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19,975,650,000	21,074,310,750	22,338,769,395.00	23,790,789,406	25,456,144,664
1.2.2	Dana Alokasi Umum	649,569,016,000	685,295,311,880	726,413,030,592.80	773,629,877,581	827,783,969,012
1.2.3	Dana Alokasi Khusus Reguler	144,863,487,000	152,830,978,785	162,000,837,512.10	172,530,891,950	184,608,054,387
1.2.4	Dana Alokasi Khusus Penugasan	20,525,352,000	21,654,246,360	22,953,501,141.60	24,445,478,716	26,156,662,226





NO.	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.2.5	Dana Alokasi Khusus Afirmasi	9,978,642,000	10,527,467,310	11,159,115,348.60	11,884,457,846	12,716,369,895
1.2.6	Dana Alokasi Khusus Non fisik	118,500,295,000	125,017,811,225	132,518,879,898.50	141,132,607,092	151,011,889,588
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	170,040,951,000	179,393,203,305	190,156,795,503	202,516,987,211	216,693,176,316
1.3.1	Pendapatan Hibah	41,623,002,000	43,912,267,110	46,547,003,136.60	49,572,558,340	53,042,637,424.31
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	57,919,675,000	61,105,257,125	64,771,572,552.50	68,981,724,768	73,810,445,502.20
1.3.3	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	65,498,274,000	69,100,679,070	73,246,719,814.20	78,007,756,602	83,468,299,564.27
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	5,000,000,000	5,275,000,000	5,591,500,000.00	5,954,947,500	6,371,793,825.00

NO.	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	BELANJA	1,279,670,874,000	1,350,052,772,070	1,431,055,938,394	1,524,074,574,390	1,630,759,794,597
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	646,451,509,000	682,006,341,995	722,926,722,515	769,916,959,478	823,811,146,642
2.1.1	Belanja Pegawai	485,590,787,000	512,298,280,285	543,036,177,102.10	578,333,528,614	618,816,875,616.70
2.1.2	Belanja Bunga	1,554,000,000	1,639,470,000	1,737,838,200.00	1,850,797,683	1,980,353,520.81





NO.	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	7,272,111,000	7,672,077,105	8,132,401,731.30	8,661,007,844	9,267,278,392.90
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	745,882,000	786,905,510	834,119,840.60	888,337,630	950,521,264.36
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa	146,288,729,000	154,334,609,095	163,594,685,640.70	174,228,340,207	186,424,324,021.86
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	5,275,000,000	5,591,500,000.00	5,954,947,500	6,371,793,825.00

NO.	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
2.2	BELANJA LANGSUNG	633,219,365,000	668,046,430,075	708,129,215,880	754,157,614,912	806,948,647,955
2.2.1	Belanja Pegawai	44,245,530,000	46,679,034,150	49,479,776,199	52,695,961,652	56,384,678,967.57
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	323,880,534,000	341,693,963,370	362,195,601,172	385,738,315,248	412,739,997,315.78
2.2.3	Belanja Modal	265,093,301,000	279,673,432,555	296,453,838,508	315,723,338,011	337,823,971,672.13
	SURFLUS/DEFISIT	(5,345,321,000)	(5,639,313,655)	(5,977,672,474)	(6,366,221,185)	(6,811,856,668)
3	PEMBIAYAAN					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10,599,321,000	11,182,283,655	11,853,220,674	12,623,680,018	13,507,337,619





NO.	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
	DAERAH					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	10,599,321,000	11,182,283,655	11,853,220,674.30	12,623,680,018	13,507,337,619.40
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5,254,000,000	5,542,970,000	5,875,548,200	6,257,458,833	6,695,480,951
3.2.1	Pernyataan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,500,000,000	1,582,500,000	1,677,450,000.00	1,786,484,250	1,911,538,147.50
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	3,754,000,000	3,960,470,000	4,198,098,200	4,470,974,583	4,783,942,803.81
	PEMBIAYAAN NETTO	5,345,321,000	5,639,313,655	5,977,672,474	6,366,221,185	6,811,856,668
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN	-	-	0	0	(0)





7.1.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut, selanjutnya dilakukan penghitungan kerangka pendanaan. Hasil penghitungan kerangka pendanaan ini menunjukkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, khusus untuk alokasi belanja langsung program pembangunan daerah. Program pembangunan mencakup program pembangunan daerah dan program perangkat daerah. Menggambarkan hasil penghitungan selisih dari penerimaan daerah dan kewajiban daerah untuk belanja tidak langsung dan pengeluaran wajib daerah. Peningkatan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, dapat didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah yang lebih besar dari pertumbuhan belanja daerah, terutama untuk alokasi belanja tidak langsung.

Untuk periode 2019-2023 yang akan datang, kapasitas riil kemampuan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diproyeksikan meningkat, meskipun tergolong moderat. Meningkat dari hanya Rp 633,22 milyar pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 806,95 milyar pada tahun 2023. Inilah gambaran kemampuan keuangan daerah untuk dalam mendanai kebutuhan alokasi belanja langsung, terutama untuk alokasi belanja modal serta alokasi belanja barang dan jasa publik yang berpotensi nilai kemanfaatannya diterima langsung oleh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2019-2023 ini.

Selengkapnya hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah beserta dengan komponen-komponennya di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2019-2023 ke depan, dipaparkan pada tabel berikut ini.



Tabel 7.3.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Proyeksi				
		2019	2020	2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	1,274,325,553,000.00	1,344,413,458,415.00	1,425,078,265,919.90	1,517,708,353,204.69	1,623,947,937,929.02
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	SiLPA (Riil)	10,599,321,000.00	11,182,283,655.00	11,853,220,674.30	12,623,680,018.13	13,507,337,619.40
	Total Penerimaan	1,284,924,874,000.00	1,355,595,742,070.00	1,436,931,486,594.20	1,530,332,033,222.82	1,637,455,275,548.42
	Dikurangi:					
4	Belanja Tidak Langsung	646,451,509,000.00	682,006,341,995.00	722,926,722,514.70	769,916,959,478.16	823,811,146,641.63
5	Pengeluaran Pembiayaan	5,254,000,000.00	5,542,970,000.00	5,875,548,200.00	6,257,458,833.00	6,695,480,951.31
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	633,219,365,000.00	668,046,430,075.00	708,129,215,879.50	754,157,614,911.67	806,948,647,955.48



Selanjutnya, berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut, dialokasikan penggunaannya untuk belanja langsung daerah, baik berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun untuk alokasi belanja modal daerah selama periode 2019-2023. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut, selanjutnya didistribusikan dalam tiga prioritas berdasarkan peraturan perundangan Permendagri 86/2017. Prioritas pertama, untuk belanja pemenuhan kebutuhan belanja langsung wajib dan mengikat, serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Berupa implementasi urusan wajib pelayanan dasar, dalam hal ini pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Prioritas kedua, untuk belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah yang telah dirumuskan dan berdasarkan proses pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung. Dalam urusan pemenuhan visi dan misi kepala daerah ini, bilamana janji-janji kepala daerah termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar, maka dikategorikan sebagai prioritas pertama. Prioritas ketiga, untuk belanja urusan pemerintahan daerah lainnya yang tidak termuat dalam prioritas pertama dan kedua, khususnya untuk penyelenggaraan urusan penunjang urusan.

Bagi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode 2019-2023 yang akan datang, *Prioritas pertama*, menyangkut enam urusan wajib pelayanan dasar, oleh PP No. 2 Tahun 2018 yang dipertegas dengan Permendagri No. 100/2018 ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimum (SPM), yakni pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan bidang sosial. Untuk menjalankannya, diserahkan kepada perangkat daerah yang relevan untuk menjalankan urusan wajib pelayanan dasar yang dikoordinasikan oleh tim penyelenggara SPM Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah diangkat oleh Kepala Daerah. *Prioritas kedua*, sebagaimana naskah visi



dan misi kepala daerah terpilih Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2018-2023, fokus pada sembilan prioritas pembangunan daerah, yakni: (1) Pelayanan pendidikan dan kesehatan; (2) Penguatan perekonomian daerah; (3) Pengembangan investasi daerah; (4) Penyediaan lapangan kerja; (5) Pengembangan infrastruktur wilayah; (6) Pengembangan kawasan pedesaan; (7) Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public; (8) Penguatan karakter masyarakat; dan (9) Iklim kehidupan masyarakat yang kondusif. Mengingat untuk urusan pelayanan Pendidikan kesehatan termasuk dalam SPM maka poin pertama tergolong sebagai prioritas pertama. Sedangkan *prioritas ketiga*, fokus pada urusan pemerintahan daerah lainnya, berupa penyelenggaraan urusan penunjang dan urusan lainnya yang belum tercover dalam prioritas pertama dan kedua. Penyelenggaraannya sebagian besar oleh perangkat daerah berkaitan dengan urusan penunjang urusan, dan perangkat daerah lainnya yang tidak tergolong dalam prioritas pertama dan kedua.



Tabel 7.4.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023

No	Uraian	Proyeksi				
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	633,219,365,000.00	668,046,430,075.00	708,129,215,879.50	754,157,614,911.67	806,948,647,955.48
1	Prioritas I	309,249,015,000.00	326,257,710,825.00	345,833,173,474.50	368,312,329,750.34	394,094,192,832.87
2	Prioritas II	194,778,276,674.00	205,491,081,891.07	217,820,546,804.53	231,978,882,346.83	248,217,404,111.11
3	Prioritas III	129,192,073,326.00	136,297,637,358.93	144,475,495,600.47	153,866,402,814.50	164,637,051,011.51





7.2. Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Rencana program perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk periode Tahun 2019 sampai dengan 2023 merupakan pelaksanaan dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Sidenreng Rappang, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Program perangkat daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang pada sebagai berikut :

Tabel 7.5
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 – 2023

Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Urusan Wajib															
	Terkait Pelayanan Dasar															
1.1.	Pendidikan															
1.1.1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD (%)	61.19	100%	3,349,000,000	100%	9,573,000,000	100%	10,530,300,000	100%	11,583,300,000	100%	12,741,663,000	100	12,741,663,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.2	Program Wajib Belajar Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 7 - 15	92.41%	100	89,160,000,000	100%	90,144,000,000	100%	97,358,400,000	100%	105,704,240,000	100%	140,780,664,000	100	140,780,664,000	Dinas Pendidikan Dan





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Dasar Sembilan Tahun	Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/Mts)															Kebudayaan
1.1.3	Program BOS (Biaya Operasional Sekolah)	Waktu Pelaksanaan Operasional Sekolah	4 Triwulan	4	34,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	34,000,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.1.4	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	32.1	100%	1,850,000,000	100%	4,922,000,000	100%	5,491,200,000	100%	6,040,320,000	100%	6,644,352,000	100%	6,644,352,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.1.5	Program Peningkatan Kualifikasi Dan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%)	96.95%	-	-	98	7,352,047,350	98.5	8,087,252,085	99	8,895,977,294	99.5	9,785,575,023	99.5	9,785,575,023	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.1.6	Program	Persentase	-	85%	735,000,	-	-	-	-	-	-	-	-	85%	735,000,0	Dinas	





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru Yang Bersertifikat Semua Jengjang Pendidikan			000											00	Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1.7	Program Peningkatan Kualifikasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (PTK)	Persentase Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru	-	100%	330,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	330,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1.1.8	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Kegiatan Penunjang Manajemen Pelayanan Pendidikan Yang Terlaksana (Jumlah)	4	6	365,000,000	6	3,575,000,000	6	3,932,500,000	6	4,325,750,000	6	4,758,000,000	6	4,758,000,000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
		Persentase Dukungan Dana Dari Pemkab Terhadap Seluruh Kebutuhan Operasional AKN (%)	26.14%	26.50%		27%		27.50%		28.00%		28.50%		28.50%			





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.9	Program Pendidikan Tinggi	Persentase Layanan Pendidikan Tinggi	-	75%	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.2	Kesehatan																
1.2.1	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Obat Difasilitas Kesehatan	100%	100%	3,609,745,000	100%	3,992,973,000	100%	4,187,500,000	100%	4,431,625,000	100%	4,645,000,000	100%	20,866,843,000		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.2.2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Biaya Dan Pemeliharaan Puskesmas	14 PKM	14 PKM	16,450,000,000	14 PKM	16,668,278,600	14 PKM	16,768,278,600	14 PKM	16,868,278,600	14 PKM	16,968,278,600	14 PKM	16,968,278,600		
1.2.3	Program Pengawasan Obat Dan Makanan	Cakupan Pengawasan Obat Dan Makanan Di Apotek Dan Pasar	167 Apotek, Pasar, Warung	167 Apotek, Pasar, Warung	191,500,000	175 Apotek, Pasar, Warung	330,000,000	180 Apotek, Pasar, Warung	335,000,000	190 Apotek, Pasar, Warung	340,000,000	200 Apotek, Pasar, Warung	345,000,000	200s Apotek, Pasar, Warung	45,000,000		
1.2.4	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga Ber-PHBS	37.120 Rumah	37.500 Rumah	95,000,000	37.600 Rumah	232,300,000	37.700 Rumah	276,550,000	37.800 Rumah	303,700,000	37.900 Rumah	351,100,000	37.900 Rumah	1,254,682,000		
1.2.5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Buruk Mendapat Perawatan	2 Balita	1 Balita	1,133,475,500	1 Balita	2,110,000,000	0	2,105,000,000	0	2,150,000,000	0	2,202,500,000	0	9,980,975,500		





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2.6	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Penemuan Dan Penanganan Penyakit Menular	100%	100%	1,570,319,000	100%	4,000,000,000	100%	4,100,000,000	100%	4,200,000,000	100%	4,300,000,000	100%	4,300,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.2.7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Air Minum Sehat	50	52%	454,475,000	54%	1,032,913,400	56%	1,131,913,400	58%	1,271,913,400	60%	1,356,913,400	60%	4,948,128,600	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.2.8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Tenaga Dan Sarana Kesehatan Bersertifikat Atau Reakreditasi	14 PKM	7 PKM	814,568,000	5 PKM	1,750,000,000	2 PKM	1,760,000,000	7 PKM	1,770,000,000	5 PKM	1,780,000,000	5 PKM	1,780,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.2.9	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Dibangun/Diperbaiki	100%	100%	15,000,000,000	100%	20,000,000,000	100%	27,800,000,000	100%	33,900,000,000	100%	40,000,000,000	100%	40,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pembantu Dan Jaringannya																
1.2.10	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Yang di Bangun	-	100%	3,750,000,000	100%	4,700,000,000	100%	8,750,000,000	100%	15,800,000,000	100%	20,850,000,000	100%	20,850,000,000		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.2.11	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan Dengan Kemitraan	100%	100%	37,340,367,000	100%	15,340,367,000	100%	17,340,367,000	100%	19,340,367,000	100%	21,340,367,000	100%	21,340,367,000		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.2.12	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	Persentase Keselamatan Melahirkan	-	100%	850,000,000	100%	900,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,200,000,000	100%	1,500,000,000	100%	1,500,000,000		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.2.13	Program Prima Kesehatan	Partisipasi Aktif Dan Kelurahan Bidang Kesehatan	100%	100%	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2.14	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Penemuan Dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	100%	-	-	100	195,000,000	100	250,000,000	100	270,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.2.15	Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Yg Berperestasi	3 Tenaga Kesehatan	-	-	5 Tenaga Kesehatan	225,000,000	5 Tenaga Kesehatan	270,000,000	5 Tenaga Kesehatan	300,000,000	6 Tenaga Kesehatan	350,000,000	6 Tenaga Kesehatan	350,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.2.16	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	94.70%	-	-	100%	650,000,000	100%	720,000,000	100%	800,000,000	100%	850,000,000	100%	3,606,000,000	
1.2.17	Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Jumlah Anak Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	79.30%	100%	75,000,000	100%	170,000,000	100%	175,000,000	100%	180,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	
1.2.18	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	32.50%	100%	120,000,000	100%	150,000,000	100%	170,000,000	100%	200,000,000	100%	412,000,000	100%	412,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2.19	Program Upaya Kesehatan	Presentase Pemanfaatan Tempat Tidur (BOR)	79%	80%	3,000,000,000	81%	3,650,000,000	82%	3,700,000,000	83%	3,750,000,000	84%	3,800,000,000	85%	3,800,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1.2.20	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Presentase Capaian Hasil Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	80%	81%	750,000,000	82%	800,000,000	83%	850,000,000	84%	900,000,000	85%	950,000,000	85%	4,250,000,000	
1.2.21	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	83%	87%	10,000,000,000	90%	70,000,000,000	93%	71,000,000,000	96%	72,000,000,000	100%	73,000,000,000	100%	296,000,000,000	
1.2.22	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase Tingkat Kemandirian Pengelolaan Keuangan	35,9%	40%	70,000,000,000	45%	75,000,000,000	50%	80,000,000,000	55%	85,000,000,000	60%	90,000,000,000	60%	400,000,000,000	
1.3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang															





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.1	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	51%	52%	44,174,249,000	54%	45,000,000,000	56%	47,000,000,000	59%	50,000,000,000	61%	55,000,000,000	61%	234,174,249,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.3.2	Program Pembangunan Saluran Drainase Dan Gorong - Gorong	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	-	3%	500,000,000	5%	1,100,000,000	7%	1,500,000,000	8%	1,800,000,000	10%	1,900,000,000	10%	1,900,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.3.3	Program Pembangunan Turap/Talud /Bronjong	Terbangunnya Talud Untuk Memperkuat Jaringan Jalan	35%	37%	2,769,877,000	39	3,500,000,000	41	4,000,000,000	43	4,500,000,000	45	4,800,000,000	45	4,800,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.3.4	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Terpeliharanya Jaringan Jalan Dan Jembatan	30%	32%	18,000,000,000	34%	52,000,000,000	35%	54,000,000,000	36%	57,000,000,000	38%	60,000,000,000	38%	126,614,349,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.3.5	Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Dan Jembatan	Tersusunnya Data Jalan Dan Jembatan	2 Dok	-	-	1 Dok	500,000,000	1 Dok	5,000,000,000	1 Dok	500,000,000	1 Dok	500,000,000	6 DOK	2,000,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.3.6	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Persentase Tersedianya Dan Terpeliharanya	70%	72%	920,575,000	0.75	1,000,000,000	0.78	1,100,000,000	0.81	1,400,000,000	0.85	1,700,000,000	0.85	1,700,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Kebinaamargaan	Sarana Dan Prasarana Kebinaamargaan															Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.3.7	Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak	85%	100%	8,141,832,000	100%	8,200,000,000	100%	9,000,000,000	100%	9,800,000,000	100%	10,200,000,000	100%	10,200,000,000		Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.3.8	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Persentase Terbangunnya Infrastruktur Jalan Di Wilayah Strategis Khususnya Di Perdesaan	25%	25%	5,618,749,000	30%	5,700,000,000	32%	6,500,000,000	34%	7,500,000,000	36%	8,500,000,000	36%	8,500,000,000		Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.3.9	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Terbangunnya Infrastruktur Perdesaan	45%	50%	7,598,336,000	55%	8,500,000,000	60%	9,500,000,000	65%	10,500,000,000	70%	11,500,000,000	70%	11,500,000,000		Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.3.10	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	-	3 Dok	336,000,000	4 Dok	700,000,000	3 Dok	700,000,000	3 Dok	700,000,000	4 Dok	700,000,000	8 Dok	3,136,000,000		Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.3.11	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	100%	100%	876,200,000	100%	900,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,700,000,000	100%	1,750,000,000	100%	1,750,000,000		Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.11	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Ibadah	Persentase Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	-	-	-	100%	7,595,334,000	100%	7,709,264,000	100%	7,824,903,000	100%	7,942,276,000	100%	38,554,867	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.3.12	Program Pengembangan Data / Informasi	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	100%	100%	65,966,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	465,966,000	
1.3.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Menurunnya Jumlah Sampah	13144 KK	19716 KK	4,369,378,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.16	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	5%	100%	10,595,916,000	100%	16,500,000,000	100%	17,500,000,000	100%	18,200,000,000	100%	19,800,000,000	100%	1s9,800,000,000	
1.3.17	Program Perencanaan, Pengawasan, Pengujian & Pengendalian Mutu	Tersedianya Pelaporan Kesesuaian Program Dan Usulan Secara Tepat Dan Benar	100%	100%	59,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.18	Pengembangan Data/Infomasi Keciptakaryaan	Tersusunnya Dokumen Usulan Perencanaan Lima Tahunan	1 Dok.	-	-	1 Dok	35,000,000	1 Dok	40,000,000	1 Dok	45,000,000	1 Dok	50,000,000	1 Dok	200,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.3.19	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase Jaringan Irigasi Yang Baik	50%	55%	14.950.000.000	60.00%	40.622.000.000	65.00%	57.903.625.000	70.00%	51.947.032.000	75%	53.813.000.000	75%	269.236.904.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.3.20	Program Pengembangan, Pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau Dan SDA Lainnya	Persentase Embung Yang Tersedia	-	60%	159,000,000	65%	5,500,000,000	70%	6,787.500.000	75%	7,614.375.000	80%	8,482.594.000	80%	84.134.469.000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
1.3.21	Program Perencanaan Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Perencanaan wilayah	1	100%	1,500,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman															
1.4.1	Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Persentase Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani	19,64 Ha	-	-	38.83%	5,700,000,000	55.35%	7,000,000,000	75.45%	8,000,000,000	100%	8,789,000,000	100%	28,947,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.4.2	Peningkatan Partisipasi Masy. Dlm Membangun Desa	Persentase Luas Kawasan Kumuh Yang Tertangani	19.64%	28.12%	535,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.4.3	Perenc Pengembangan Kota-2 Menengah & Besar	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	83.28%	86.08%	3,005,000,000	89.56%	2,350,000,000	93.04%	2,375,000,000	96.50%	2,410,000,000	100%	2,435,000,000	100%	2,435,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.4.4	Penerangan Lampu Jalan	Cakupan Lingkungan Yang Aman Dan Sehat Yang Didukung Dengan Psu / Lampu Jalan	59.43%	63.21%	12,500,000,000	66.98%	14,000,000,000	71.69%	15,500,000,000	75.47%	17,000,000,000	80.19%	15,500,000,000	80.19%	74,500,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.4.5	Pengembangan Perumahan	Ratio Rumah Layak Huni	82.93%	83.11%	2,270,400,000	83.19%	12,895,900,000	83.29%	1,581,300,000	83.40%	1,816,400,000	83.52%	2,040,300,000	83.52%	20,504,300,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.4.6	Perbaikan Perumahan Akibat Bencana/Relokasi/Sosial	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	69,780	69,930	1,350,000,000	70,000	1,550,000,000	70,080	1,750,000,000	70,172	1,950,000,000	70,276	2,150,000,000	70,276	8,750,000,000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat															
1.5.1	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Penecgahan Tindak Kriminal	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	70%	80%	329,255,000	80%	711,810,500	90%	817,781,000	95%	787,781,000	95%	1,265,081,000	95%	3,911,708,500	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
1.5.2	Program Peningkatan Pemembrantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Mewujudkan Lingkungan Yang Kondusif, Aman, Nyaman, Tertib Dan Tenram	Kegiatan	-	-	4 Keg	125,000,000	4 Keg	200,000,000	4 Keg	230,000,000	4 Keg	250,000,000	4 Keg	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Dengan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia															
1.5.3	Program Peningkatan Pemahaman Dan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda	90%	95%	467,781,000	100%	500,000,000	100%	550,000,000	100%	600,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	
1.5.4	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase kejadian gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang tertangani	-	80%	3,000,000,000	83%	3,900,000,000	88%	4,000,000,000	90%	3,450,000,000	100%	5,000,000,000	100%	5,000,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	
1.6	Sosial																
1.6.1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	-	100%	72,450,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	Dinas Sosial	





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	n Sosial (PMKS) Lainnya															
1.6.2	Program Pencapaian SPM	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	-	-	-	2,150,000,000	-	2,180,000,000	-	2,210,000,000	-	2,240,000,000	-	2,650,000,000	Dinas Sosial	
1.6.3	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan Yang Tertangani	-	100	1,000,000,000	100	1,058,200,000	100	1,073,200,000	100	1,103,200,000	100	1,122,380,000	100	1,201,500,000	Dinas Sosial
1.6.4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Lembaga Panti Asuhan, SDLB, LVRI Yang Di Berdayakan	-	-	-	100	1,005,000,000	100	1,135,000,000	100	1,225,000,000	100	1,495,000,000	100	1,495,000,000	Dinas Sosial
1.6.5	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Dibina	-	100	650,000,000	100	850,000,000	100	850,000,000	100	850,000,000	100	850,000,000	100	900,000,000	Dinas Sosial





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Tidak Terkait Dengan Pelayanan Dasar																	
1.7	Tenaga Kerja																
1.7.1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)	46.57%	-	-	62.50%	2,300,000	70.80%	7,400,000	78.90%	2,600,000	95.7%	2,800,000	95.70%	15,100,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
1.7.2	Program Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja Yang Ditempatkan (%)	46.57%	50%	1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	1,900,000		
1.7.3	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jaminan Ketenagakerjaan (%)	83%	86.80%	850,000	90.90%	852,000	94.80%	864,000	98.90%	869,000	100%	876,000	100%	4,311,000		
1.8	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak																
1.8.1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Status Pelayanan Kab. Terhadap Anak (Kabupaten Layak Anak)	AKB= 18; AKI= 1; Sekolah SRA= 30%; TBA= 70%	100%	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.8.2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Terwujudnya Kesetaraan Dan Keadilan Gender	85	90%	155,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	155,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.8.3	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	% Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	16%	30%	650,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	650,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.8.4	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	2.5%	-	-	6%	820,000,000	7%	890,000,000	8%	960,000,000	9%	1,030,000,000	9%	3,700,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	62.38%	70%		75%		80%		85%		90%		90%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.8.5	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	Ratio KDRT	0.07	-	-	0.06	510,000,000	0.05	720,000,000	0.04	830,000,000	0.03	940,000,000	0.03	3,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Cakupan Perempuan Dan Anak Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tata Laksana KTP/A Dan PPT/PK Di Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.8.6	Program Pemenuhan Hak Dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	Pratama	-	-	Madya	525,000,000	Madya	575,000,000	Madya	625,000,000	Nindya	675,000,000	Nindya	2,400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan	
		Persentase	6.29	0	5	4.5	4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur															Perlindungan Anak
1.8.7	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu	100	-	-	100	190,000,000	100	210,000,000	100	230,000,000	100	250,000,000	100	880,000,000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.8.8	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio KDRT	0.07	-	-	0.06	720,000,000	0.05	640,000,000	0.04	660,000,000	3.5	680,000,000	3.5	2,700,000,000		
1.9	Pangan																
1.9.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian /Perkebunan)	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85	86		87.00		88.00		89.00		90		90			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
		Nilai Konsumsi Kalori Protein (Gr/Hr)	-	170.00	2,400,000,000	173.00	2,500,000,000	177.00	2,600,000,000	180.00	2,700,000,000	184	2,800,000,000	184	2,800,000,000		





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.10	Pertanahan																
1.10.1	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	100%	100%	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, Dan Perumahan Rakyat
1.10.2	Penataan Penguasaan Pemiikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Lahan Yang Tertata Kepemilikan Dan Pemanfaatannya	100%	100%	3,300,000,000	100%	8,300,000,000	100%	9,300,000,000	100%	10,300,000,000	100%	11,300,000,000	100%	11,300,000,000		
1.10.3	Pengelolaan Areal Pemakaman	Ratio Tpu Persatuan Penduduk	100%	100%	85,000,000	100%	250,000,000	100%	260,000,000	100%	270,000,000	100%	280,000,000	100%	280,000,000		
1.11	Lingkungan Hidup																
1.11.1	Penge Lolan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan Rth Publi Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan	14.54%	15.45%	2,200,000,000	16.36%	4,300,000,000	17.64%	5,400,000,000	18.91%	6,500,000,000	20%	7,600,000,000	200%	12,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
1.11.2	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Yang Berkurang Melalui 3 R	20%	25%	1,950,000,000	30%	9,500,000,000	37.50%	10,800,000,000	42.50%	10,900,000,000	47.50%	15,100,000,000	47.00%	15,100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
1.11.3	Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi	Tersedianya Informasi Tentang Lingkungan	100%	100%	400,000,000	100%	700,000,000	100%	800,000,000	100%	900,000,000	100%	950,000,000	100%	950,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Hidup															
1.11.4	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	36 Usaha/8s ungai/10 Kasus/1 Penghargaan	36 Usaha/8s ungai/2 Kasus/1 Penghargaan	400,000,000	36 Usaha/8s ungai/3 Kasus/1 Penghargaan	4,850,000,000	36 Usaha/8 Sungai/4 Kasus/1 Penghargaan	4,900,000,000	36 Usaha/8 Sungai/5 Kasus/1 Penghargaan	5,000,000,000	36 Usaha/8 Sungai/6 Kasus/1 Penghargaan	5,600,000,000	36 Usaha/8 Sungai/6 Kasus/1 Penghargaan	5,600,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Perlindungan Sumber daya Alam	-	80%	50,000,000	85	150,000,000	90	200,000,000	95	250,000,000	100	300,000,000	100	300,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
1.12	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil																
1.12.1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Wajib KTP Yang Di Layani Dalam Hal Pendataan Dan Kepemilikan KTP Elektrik			2,353,037,000		5,331,086,000		5,143,279,000		5,283,279,000		4,958,279,000		4,958,279,000		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.13 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa																	
1.13.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terwujudnya Jumlah Masyarakat Yang Lebih Produktif Dan Mandiri Dalam Perencanaan Pembangunan	68	68	900,000,000	68	1,320,000,000	68	1,860,000,000	68	2,070,000,000	68	2,240,000,000	340	8,350,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	
1.13.2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Bumdes Yang Lebih Mandiri Dan Terlatih Dalam Pengembangan Lembaga Ekonomi;	4	68	195,000,000	68	350,000,000	68	410,000,000	68	470,000,000	68	500,000,000	340	1,925,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak	
		Terciptanya Produk Unggulan Pedesaan;	4	68		68		68		68		68		340			
		Tingkat Persentase Pendapatan Kelompok Masyarakat.	100	100		100		100		100		100		100			
1.13.3	Program Pembangunan Dan Pengembangan	Terbentuknya Kawasan Pedesaan Sesuai Potensi	-	-	-	1	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat,	





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Kawasan Perdesaan	Dan Produk Unggulan Desa															Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.14.4	Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa Yang Dibina Dan Difasilitasi	68	-	-	68	150,000,000	68	250,000,000	68	350,000,000	68	450,000,000	68	450,000,000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak
1.15.5	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Peningkatan Kinerja Dan Manajemen Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan.	-	75%	75,000,000	80%	380,000,000	85%	400,000,000	90%	500,000,000	95%	650,000,000	95%	650,000,000		
1.13.6	Program Penataan Kelembagaan Desa	Persentase Penataan Kelembagaan Desa	68	-	-	68	175,000,000	68	231,000,000	68	281,000,000	68	300,000,000	68	300,000,000		
1.13.7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	40%	50%	840,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	50%	840,000,000		





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana															
1.14.1	Program Keluarga Berencana	Rata-Rata Anak Per Keluarga Pasangan Usia Subur	2.4	2.4	3,141,000,000	2.3	3,857,000,000	2.2	3,900,000,000	2.1	3,950,000,000	2	4,000,000,000	2	4,000,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB
1.14.2	Program Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan Peserta KB Aktif	68,5	70	125,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Rasio Akseptor KB Aktif	72165,000,000	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB
1.14.3	Program Pengembangan Pusat Informasi Dan Konseling KRR	Persentase Kawin Pertama Bagi Perempuan dibawah 20 Tahun	3,5	3,5	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Program Pengembangan Model operasional	Jumlah Kelompok BKB yang Kolektif Integratif	60	63	57,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	BKB-Posyandu-PADU																Dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Keluarga Prasejahtera Dan Sejahtera Satu	25	30	377,000,000												Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1.15	Perhubungan																
1.15.1	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Prasarana Dan Fasilitas LLAJ Dapat Berfungsi Baik	0.04	0.05	50,000,000	0.06	60,735,000	0.07	70,235,000	0.08	90,240,000	0.09	100,245,000	0.09	100,245,000		Dinas Perhubungan
1.15.2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	0.04	0.04	145,123,000	0.05	341,000,000	5.5%	341,000,000	5.7%	341,000,000	5.9%	341,000,000	5.9%	341,000,000		Dinas Perhubungan
1.15.3	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Pemasangan Rambu Rambu Lalu Lintas	0.5	0.52	50,000,000	0.06	155,735,000	0.07	180,235,000	0.08	200,235,000	0.09	300,245,000	0.09	1300,245,000		Dinas Perhubungan
1.15.4	Program Peningkatan	Jumlah Uji Kir Angkutan	0.5	0.55	76,000,000	0.57	1,950,000	0.59	2,050,000	0.63	2,550,000	0.68	2,650,000	0.68	2,886,328		





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Umum															
1.16	Komunikasi Dan Informatika																
1.16.1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Infrastruktur Dan Perangkat Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Terpasang Dan Digunakan	-	-	-	47%	4,155,000,000	65%	5,105,000,000	82%	5,170,000,000	100%	53,550,000,000	100%	53,550,000,000		Dinas Komunikasi & Informatika
1.16.2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Persentase Perangkat Dan Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Terpasang Dan Digunakan	-	30%	3,800,440,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Dinas Komunikasi & Informatika
1.16.3	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase KIM, Media Dan Layanan Publik Yang Dikelola	-	-	-	50%	4,285,000,000	65%	5,017,000,000	80%	5,652,450,000	100%	6,276,000,000	100%	6,276,000,000		Dinas Komunikasi & Informatika





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.16.4	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Informasi Dan Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	-	730 Aduan	38,640,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi & Informatika
1.16.5	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Jumlah Media (Media Cetak Dan Elektronik)	-	-	1,782,385,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi & Informatika
1.16.6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kualitas Layanan Akses Informasi	-	13 Media Online	789,490,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi & Informatika
1.17	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah																
1.17.1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Dan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Melaksanakan RAT (%)	8.15%	9%	100,000,000	10%	300,000,000	11%	300,000,000	12%	310,000,000	14%	330,000,000	14%	1,340,000	-	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
1.17.2	Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase UMK Terhadap Total UMKM (%)	97.20%	-	-	93%	4,690,000	91%	4,395,000	89%	4,395,000	87%	4,525,000	87%	18,005,000	-	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																	i
1.17.3	Program Pengembangan Kewirausahaan & Keunggulan Kompetitif UKM	Persentase UMK Terhadap Total UMKM (%)	97.20%	95.10%	2,525,000	-	-	-	-	-	-	-	-	95.10%	2,525,000	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
1.18	Penanaman Modal																
1.18.1	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Nilai Investasi PMDN Dan PMA (Juta Rupiah)	156,978	157,003	120,000,000	157,053	325,000,000	157,128	400,000,000	157,228	500,000,000	157,229	600,000,000	157,229	600,000,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.18.2	Program Peningkatan Iklim Dan Investasi Dan Realisasi Investasi	Jumlah Investor Penanaman Modal	192	194	40,000,000	196	50,000,000	198	80,000,000	200	90,000,000	200	100,000,000	200	100,000,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.18.3	Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	80	250,000,000	83	490,000,000	85	500,000,000	87	510,000,000	90	640,000,000	90	640,000,000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.18.4	Program	Persentase Izin	86.42	100	400,000,	100	500,000,	100	550,900,	100	600,500,	100	700,000,	100	700,000,0	Dinas	





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Peningkatan Dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Yang Diterbitkan			000		000		000		000		000		00	Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.19	Kepemudaan Dan Olah Raga															
1.19.1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif		36.67	1,500,000,000	66.67	2,639,870,000	83.33	2,650,100,000	93.33	2,700,250,000	100	2,750,500,000	100	2,750,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
1.19.2	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Persentase Wirausaha Muda		0.42	600,000,000	0.63	740,000,000	0.84	850,000,000	1.26	960,000,000	1.67	1,070,000,000	1.67	1,070,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
1.19.3	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana Dan Prasarana Olahraga Yang Memadai		35	7,800,000,000	75	8,650,000,000	78	8,750,000,000	81	9,050,000,000	85	9,350,000,000	85	9,350,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
1.19.4	Program Pembinaan	Persentase Cakupan		32	2,220,000,000	80	3,005,767,000	85	3,000,000,000	90	3,060,000,000	100	3,900,000,000	100	3,900,000,000	Dinas Kepemudaan





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Dan Pemasarakatan Olahraga	Pembinaan Olahraga															n, Olahraga Dan Pariwisata
1.19.5	Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Dokumen Kebijakan Pembangunan Pemuda Daerah		1	27,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
1.20.	Statistik																
1.20.1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Kompilasi Produk Statistik Sektoral Yang Tersedia	-	-	-	100%	230,000,000	100%	258,000,000	100%	277,000,000	100%	288,000,000	100%	288,000,000	-	Dinas Komunikasi & Informatika
1.20.2	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Jumlah Kompilasi Produk Statistik Sektoral Yang Tersedia	-	5 Buku	66,109,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi & Informatika
1.21	Persandian																
1.21.1	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) Dalam Ruang Lingkup Tata Kelola	Baru	-	-	Level II	518,200,000	Level III	678,000,000	Level III	721,000,000	Level IV	784,000,000	Level IV	784,000,000	-	Dinas Komunikasi & Informatika





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	(Program PPIP)																
1.21.2	Program Proteksi	Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi Dan Penetapan Tingkat Kerahasiaan Informasi Public Yang Dikecualikan	-	3 Kali	109,368,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi & Informatika
1.21.3	Program Identifikasi Dan Deteksi	Hasil Inveritasasi Tetang Data Celah Kerawanan Dan Nilai Resiko Keamanan Informasi	-	3 Kali	92,870,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi & Informatika
1.21.4	Program Penanggulangan dan Pemulihan	Laporan Tentang Terjadinya Insiden Keamanan Informasi Dan Pemulihan Data Dan Jaringan	-	2 Kali	115,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Komunikasi & Informatika





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.22	Kebudayaan															
1.22.1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	-	43	2,295,000,000	46.3	2,594,500,000	50	4,399,950,000	53.7	4,834,945,000	57.4	5,313,439,500	57.4	5,313,439,500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Festival Seni Dan Budaya Daerah		25		30		35		40		45		45		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.22.2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Keragaman Budaya	-	100	1,140,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.23	Perpustakaan															
1.23.1	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Pemustaka	-	35	900,000,000	45	905,000,000	50	1,620,000,000	55	1,390,000,000	60	1,025,000,000	60	1,025,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
1.23.2	Program Pengembangan Koleksi, Pengolahan Dan Pelestarian	Persentase Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan	-	-	-	50	900,000,000	60	1,140,000,000	70	1,285,000,000	80	1,660,000,000	80	1,660,000,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Bahan Pustaka																
1.24	Kearsipan																
1.24.1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase Peningkatan Kualitas Sistem Administrasi Kearsipan	-	-	-	50	70,000,000	60	90,000,000	80	100,000,000	90	145,000,000	90	145,000,000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
1.24.2	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	Persentase Volume Arsip/ Dokumen Daerah Yang Diselamatkan Dan Dilestarikan	-	30	50,000,000	50	60,000,000	60	70,000,000	70	80,000,000	80	90,000,000	80	90,000,000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
1.24.3	Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan	Persentase Sarana Dan Prasarana Kearsipan Dalam Kondisi Baik	-	-	-	50	30,000,000	70	80,000,000	80	35,000,000	90	125,000,000	90	125,000,000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
1.24.4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kearsipan	-	30	50,000,000	50	60,000,000	60	70,000,000	70	80,000,000	80	90,000,000	80	90,000,000		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2	Urusan Pilihan																
2.1	Perikanan																
2.1.1	Program Pengembang	Jumlah Produksi	-	575113	1,010,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Peternakan





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	an Budidaya Perikanan	Budidaya Perikanan (Ton)															Dan Perikanan
2.1.2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	-	3392	383,334,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Peternakan Dan Perikanan
2.1.3	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar	Jumlah Ikan Yang Ditebar (Ekor)	-	195000	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Peternakan Dan Perikanan
2.1.4	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	Jumlah sarana dan prasarana pengawasan	-	1	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Peternakan Dan Perikanan
2.1.5	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)			5,700,000,000	581.99		611.09		641.64		673.72		6,700,000,000		6,700,000,000	Dinas Peternakan Dan Perikanan
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	-			1796.28		2936.09		3082.89		3237.03					





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.2	Pariwisata															
2.2.1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase PAD Sektor Pariwisata	-	20%	350,000,000	30%	1,920,000,000	40%	1,950,000,000	50%	1,970,000,000	60%	1,940,000,000	60%	1,940,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
2.2.2	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Wisata Yang Terbentuk	-	1	100,000,000	5	223,000,000	11	350,000,000	18	365,000,000	26	380,000,000	26	380,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
2.2.3	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	-	500000	250,000,000	700000	300,000,000	750000	550,000,000	800000	600,000,000	900000	640,000,000	640,000,000	900000	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
2.3	Pertanian															
2.3.1	Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan	Produksi Padi (Ton)	545,606	572,886	1,810,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
		Produksi Jagung (Ton)	67,929	69,967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi	Pembinaan Pelatihan Dan Penerapan Teknologi Mesin	-	191	2,380,216,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura,





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pertanian / Perkebunan	Tanam Dan Alat Pengolahan (Unit)															Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
2.3.3	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Meningkatnya Kualitas Penyuluh Pertanian / Perkebunan (Orang)		75	911,667,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
2.3.4	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Meningkatnya Kemampuan Kelembagaan Tani (Daerah Irigasi)	9	9	1,361,740,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
2.3.5	Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya	Tersedianya Sumber Air Pada Permukaan Dan Air Tanah Dalam Untuk Kebutuhan Pada Lahan Sawah Tadah Hujan (Unit)	28	13	4,310,488,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.3.6	Program Perencanaan Pengawasan, Pengujian Dan Pengendalian Mutu	Kualitas Pembangunan Prasarana Pertanian (Paket)	2	4	68,444,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
2.3.7	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi Padi (Ton)	545,606	-	-	601,531	19,442,045,000	631,607	20,991,761,250	663,188	21,338,463,313	696,347	21,417,950,478	696,347	21,417,950,478	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	
		Produksi Jagung (Ton)	67,929	-	-	72,066	-	74,228	-	76,455	-	78,748	-	78,748	-	78,748	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
2.3.9	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi Cabai Besar (Ton)	9,300	-	-	11,253.00	587,710,000	12,378.30	643,300,000	13,616.13	723,300,000	14,977.74	828,300,000	14,978	828,300,000	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan	
		Produksi Cabai Rawit (Ton)	3,778	-	-	4,406.66		4,759.19		5,139.93		5,551.12		5,551			
		Produksi Bawang Merah (Ton)	295	-	-	300.93		303.94		306.98		310.05		310.05			
		Produksi Semangka (Ton)	334	-	-	1,336.00		2,672.00		5,344.00		10,688.00		10,688			
		Produksi Durian (Ton)	14,202	-	-	15,657.71		16,440.59		17,616.13		18,125.75		18,126			
2.3.10	Program Peningkatan	Produksi Kakao (Ton)	7,607	-	-	7,914.15	820,000,000	8,072.43	870,000,000	8,233.88	900,000,000	8,398.55	920,000,000	8,399	920,000,000	Dinas Tanaman	





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Produksi Perkebunan	Produksi Cengkeh (Ton)	620	663.70		710.16		759.87		813.06		869.97		869.97		Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
		Produksi Lada (Ton)	84	87.40		90.90		94.53		98.31		102.25		102.25		
2.3.11	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Tersedianya Jalan Pertanian Pada Sentra Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	1.5 Km	10 Km	2,300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
2.3.12	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Kelompok Tani Yang Mengakses Permodalan (Kelompok)		97	32,362,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan
2.3.13	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Terkendalnya Penyakit Menular Ternak 0,4 - 0,6 % Untuk Mendukung Pengembangan Populasi Ternak		9000	160,630,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Peternakan Dan Perikanan





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		(Dosis)															
2.3.14	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Ekor Hasil IB		3,708	391,500,000	41,675	1,558,483,000	44,801	3,626,056,000	48,161	4,152,811,600	51,773	4,222,842,760	51,773	4,222,842,760	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
		Ekor Sapi		110		6,916		7,262		7,625		8,006					
		Ekor Kambing		500		770,284		831,906		898,459		970,335					
		Ekor Ayam Buras		2,000		41,675		44,801		48,161		51,773					
2.3.15	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil Produksi Peternakan (Kelompok)		2	10,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
2.3.16	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Teknologi Peternakan (Unit)	2	6	229,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
2.3.17	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Jumlah Ternak Sapi (Ekor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Peternakan Dan Perikanan	
2.4	Perdagangan																
2.4.1	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Prosentase Cakupan Pembinaan Usaha Perdagangan/U	-	-	-	20%	230,000,000	20%	380,000,000	20%	480,000,000	30%	580,000,000	30%	580,000,000	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		saha Informal															
2.4.2	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya Efisiensi Dan Efektifitas Perdagangan Dalam Negeri	0	100%	3,400,513,000	100%	6,300,000,000	100%	6,400,000,000	100%	6,500,000,000	100%	6,600,000,000	100%	6,600,000,000		Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2.4.3	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase PAD Perdagangan	-	45%	510,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	45%	510,000,000		Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2.4.4	Program Penyelenggaraan Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTP	Prosetase Tertib Niaga	-	51%	125,904,000	63%	130,755,000	72%	140,000,000	81%	150,000,000	100%	160,000,000	100%	160,000,000		Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2.4.5	Pengembangan Unit Metrologi Legal	Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kemetrolgian	-	20%	51,745,000	20%	340,919,500	20%	400,000,000	20%	500,000,000	20%	600,000,000	20%	600,000,000		Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2.4.6	Program Perlindungan Konsumen	Persentase Perlindungan Konsumen	-	4002 Alat UTP/Ps	1,485,694,100	-	-	-	-	-	-	-	-	4002 Alat UTP/	1,485,694,100		Dinas Perdagangan Dan





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Dan Pengamanan Perdagangan														Psr		Perindustrian
2.5.	Perindustrian																
2.5.1	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Prosentase Cakupan Pemb. Kelompok & Pelaku Industri	-	19.36%	400,600,000	19.80%	1,352,000,000	20.04%	1,452,000,000	20.28%	1,552,000,000	20.52%	1,802,000,000	20.52%	1,802,000,000		Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2.5.2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Peningkatan Kapasitas Pelaku Industri	-	100%	41,924,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	41,924,000		Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2.5.3	Program Penataan Struktur Industri	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Klaster Industri Dan Dokumen Roadma Pengemb. Industri Kabupaten	-	100%	2,240,970,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2,240,970,000		Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
2.6	Transmigrasi																
2.6.1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Transmigrasi Swakarsa (%)	1.50%	5.90%	3,670,000	11.10%	1,750,000	23.90%	1,850,000	33.40%	1,500,000	38.50%	1,200,000	38.50%	9,770,000		Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																	i
3	Fungsi Penunjang Urusan																
3.1	Perencanaan																
3.1.1	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Yang Berwawasan Lingkungan	-	100%	300,000,000	100%	313,000,000	-	-	-	-	100%	250,000,000	100%	250,000,000	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan pengembangan Daerah	
3.1.2	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah Dan Lingkungan Hidup	100%	100%	170,000,000	100	800,000,000	100	830,000,000	100	860,000,000	100	900,000,000	100	900,000,000	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan pengembangan Daerah	
3.1.3	Program Kerjasama Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan	100%	100%	50,622,000	100%	55,000,000	100%	65,000,000	100%	75,000,000	100%	85,000,000	100%	85,000,000	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan pengembangan	





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																	rgan Daerah
3.1.5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan pengembangan Daerah
		Persentase Kesesuaian Program/Kegiatan Yang Direncanakan (RKPD) Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan (APBD)	100%	100%	1,700,000,000	100%	2,289,000,000	100%	2,140,000,000	100%	2,343,000,000	100%	2,590,000,000	1	2,590,000,000 -		
3.1.7	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Kesesuaian Kinerja Bidang Ekonomi	100%	100%	750,000,000	100%	795,000,000	100%	830,000,000	100%	850,000,000	100%	900,000,000	100%	900,000,000		Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan pengembangan Daerah
3.1.8	Program Perencanaan	Persentase Kesesuaian	100%	100%	170,000,000	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	300,000,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000		Badan Perencanaan





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pembangunan Sosial Dan Budaya	Kinerja Bidang Sosial Dan Budaya															n, Pembangunan, Penelitian Dan pengembangan Daerah
3.1.9	Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	Persentase Dokumen PSTEK Yang Dihasilkan	100%	100%	263,850,000	100%	400,000,000	100%	420,000,000	100%	450,000,000	100%	500,000,000	100%	550,000,000	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan pengembangan Daerah	
3.1.10	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Ditetapkan Dengan Perda	-	Ada	126,360,000	-	-	-	-	-	-	-	-	Ada	126,360,000	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan pengembangan Daerah	
3.2	Keuangan																
3.2.1	Program Peningkatan Dan Pengembangan	Dokumen APBD, Perubahan APBD Dan	3 Dokumen	3 Dokumen	6,500,000,000	3 Dokumen	7,000,000,000	3 Dokumen	8,778,079,800	3 Dokumen	10,034,762,950	3 Dokumen	10,926,009,100	3 Dokumen	10,926,009,100	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	an Pengelolaan Keuangan Daerah	Pertanggungjawaban APBD, Dokumentasi Regulasi Keuangan Daerah Lainnya															
3.2.2	Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	-	60%	650,000,000	70%	1,329,121,000	80%	1,504,612,300	90%	1,704,042,500	95%	1,930,764,200	95%	1,930,764,200	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	
3.2.3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh.	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Tahun Berjalan dan Tahun Sebelumnya	-	100%	460,000,000	100%	650,000,000	100%	471,866,000	100%	542,644,000	100%	624,043,000	100%	624,043,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	
3.2.4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Capaian Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-	100%	40,000,000	100%	150,000,000	100%	170,000,000	100%	190,000,000	100%	210,000,000	100%	210,000,000	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	
3.2.5	Program Peningkatan Dan	Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar			8,000,000,000		9,000,000,000		10,000,000,000		11,000,000,000		12,000,000,000		50,000,000,000	Badan Pendapatan Daerah	





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Tercapai Yang Didukung Jasa Layanan Yang Memadai															
3.2.6	Program Perencanaan, Pengembangan Dan Evaluasi Pendapatan Daerah																Badan Pendapatan Daerah
3.3.	Kepegawaian																
3.3.1	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	80%	173,330,000	90%	183,900,000	95%	192,270,000	100%	199,240,000	100%	887,749,700		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.3.2	Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga	Cakupan Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga	100%	100%	59.975.300	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	59.975.300		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.3.3	Program Fasilitas Pindah/Purna	Tingkat Fasilitas Pindah/Purna	100%	100%	75,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	75,000,000		Badan Kepegawaian Dan





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Tugas Pns	Tugas PNS															Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.4	Pendidikan Dan Pelatihan																
3.4.1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	10%	11,81%	1.547.669.100	16,15%	8.835.740.000	16,15%	8.998.540.000	16,15%	9.004.140.000	16,15%	9.014.640.000	16,15%	37.400.729.100		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.4.2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Cakupan ASN Yang Direkrut Sesuai Dengan Formasi	75%	80%	1.477.253.600	85%	2.646.923.000	90%	2.323.636.367	95%	2.517.097.887	100%	2.752.003.127	100%	11.716.913.981		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Cakupan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	80%		85%		90%		95%		100%		100%			
3.5	Penelitian Dan Pengembangan																
3.5.1	Program Penelitian Dan Pengembangan Potensi Daerah	Persentase Rencana Implementasi Kelitaban	100%	100%	220.209.500	100%	380.000.000	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000		Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																	Danpengembangan Daerah
3.5.3	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	100%	100%	44,240,700	100%	657,000,000	100%	700,000,000	100%	750,000,000	100%	800,000,000	100%	657,000,000		Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Danpengembangan Daerah
4	Urusan Pemerintahan Umum Lainnya																
4.1	Pengawasan																
4.1.1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2 Keatas	-	28%	889,902,000	31%	1,944,493,000	33%	2,196,953,000	36%	2,780,528,300	42%	3,100,378,300	42%	3,100,378,300		Inspektorat
4.1.2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur	Cakupan Aparatur Yg Mendapatkan Pelatihan Kompetensi Dibidangnya	-	49%	335,000,000	100%	489,450,000	100%	506,850,000	100%	686,250,000	100%	697,500,000	100%	2,655,050,000		Inspektorat





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pengawasan																
4.2	Penanggulangan Bencana Daerah																
4.2.1	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Cakupan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	-	100%	140,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	140,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4.2.2	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	-	100%	42,000,000	100%	350,000,000	100%	360,000,000	100%	370,000,000	100%	380,000,000	100	1,502,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4.2.3	Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	-	-	-	100%	250,000,000	100%	270,000,000	100%	290,000,000	100%	310,000,000	100%	310,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
4.2.4	Program Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap	-	-	-	100%	270,000,000	100%	420,000,000	100%	470,000,000	100%	520,000,000	100%	520,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Bencana															
4.2.5	Program Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	-	100%	300,000,000	100%	360,000,000	100%	420,000,000	100%	480,000,000	100%	480,000,000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.2.6	Program Kedaruratan Dan Logistik	Cakupan kedaruratan dan logistik	-	-	270,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.2.7	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban	85%	85%	2,104,200,000	85%	2,487,835,500	85%	4,680,815,000	90%	2,095,815,000	90%	5,010,815,000	90%	18,575,280,500		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
4.3	Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri																
4.3.1	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Terkait Belanegara	100%	100%	54,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.3.2	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Koordinasi Tim Dalam Rangka Cegah Dini Dan Deteksi Dini	100%	100%	657,500,000	100%	1,200,000,000	100%	1,340,000,000	100%	1,620,000,000	100%	1,750,000,000	100%	6,567,500,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4.3.3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	75,000,000	100%	600,000,000	100%	680,000,000	100%	995,000,000	100%	1,090,000,000	100%	3,440,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4.3.4	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Masyarakat Yang Mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	100%	100%	292,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	292,300,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4.3.5	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Masyarakat & SDM Partai Politik Yang Mendapatkan Pendidikan Politik	100%	100%	100,000,000	100%	105,000,000	100%	115,000,000	100%	305,000,000	100%	395,000,000	100%	1,020,000,000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4.4	Pendukung DPRD															





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.4.1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Fasilitas Rapat-Rapat DPRD Dan Kunjungan Kerja DPRD Yang Terlaksana Tepat Waktu	94.40%	100%	11,200,000,000	100%	12,651,000	100%	13,651,000	100%	14,651,000	100%	15,651,000	100%	60.208.884	Sekretariat DPRD
4.4.2	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penetapan Ranperda Menjadi Perda	84.9	100%	460,000,000	100%	490,000,000	100%	510,000,000	100%	530,000,000	100%	560,000,000	100%	560,000,000	Sekretariat DPRD
4.5	Pemerintahan Administrasi Kecamatan															
4.5.1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Membangun Desa	-	-	-	47%	7,700,000,000	50%	8,000,000,000	52%	8,300,000,000	55%	8,700,000,000	60%	15,194,631,700	Kecamatan
4.5.2	Program Pembangunan Sarana/Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Sarana/Prasarana Yang Digunakan	-	70%	15,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	70%	15,000,000,000	Kecamatan





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.5.3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Cakupan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	-	75%	17,000,000,000	80%	17,520,000,000	85%	18,000,000,000	87%	20,000,000,000	90%	23,000,000,000	90%	95,520,000,000	Kecamatan
4.5.4	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	70%	88,000,000,000	71%	88,000,000,000	72%	88,000,000,000	73%	88,000,000,000	74%	88,000,000,000	70%	88,000,000,000	Kecamatan
4.6	Kesekretariatan															
4.6.1	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Data Penyusunan LPPD dan I-LPPD	-	100%	67,904,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,904,000	Sekretariat Daerah
4.6.2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	Persentase Pengawasan Dan Palaksanaan Kegiatan Kecamatan Dan Kelurahan	-	100%	38,429,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,429,000	Sekretariat Daerah
4.6.3	Program Perencanaan Pembanguna	Persenatse Data Pendukung	-	100%	51,688,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,688,000	Sekretariat Daerah





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	n Daerah	LKPJ															
4.6.4	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase kualitas data pendukung penyusunan nama rupabumi	-	100%	49,958,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,958,000	Sekretariat Daerah
4.6.5	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya Kualitas Dan Pandalaman Agama	45	100 %	2,821,339,900	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2,821,339,900	Sekretariat Daerah	
4.6.6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah	45	100 %	184,673,850	-	-	-	-	-	-	-	-	100	224,103,850	Sekretariat Daerah	
4.6.7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah Dan Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah	45	100 %	9,705,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	9,705,100,000	Sekretariat Daerah	
4.6.8	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Penurunan Angka Penyalahgunaan Narkoba	45	100 %	43,499,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	43,499,000	Sekretariat Daerah	





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4.6.9	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah	Kualitas SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi		100%	59,628,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
4.6.10	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Kualitas SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi		100%	24,931,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
4.6.11	Program Kerjasama Pembangunan			100%	57,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
4.6.12	Program Pelayanan Administrasi Dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Daerah	-	-	-	100%	70,000,000	100%	80,000,000	100%	90,000,000	100%	100,000,000	100	340,000,000	-	Sekretariat Daerah
4.6.13	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Pengawasan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup		100%	10,985,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	10,985,000	-	Sekretariat Daerah





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.6.14	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Memperluas Akses Pendanaan Produktif Untuk Pengembangan UMKM		100%	65,729,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	65,729,000	Sekretariat Daerah
4.6.15	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Penanaman Modal		100%	39,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	39,400,000	Sekretariat Daerah
4.6.16	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Terciptanya BUMD Yang Lebih Sehat Dan Mandiri		100%	37,425,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	37,425,000	Sekretariat Daerah
4.6.17	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Terwujudnya Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan		100%	136,489,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	136,489,000	Sekretariat Daerah
4.6.18	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan	Terkendalinya Inflasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang		100%	128,194,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	86,110,000	Sekretariat Daerah





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Perdagangan																
4.6.19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan Perundang-Undangan		100%	77,516,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	77,516,000	Sekretariat Daerah	
4.6.20	Program Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	Cakupan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan		-	-	100%	322,200,000	100%	370,362,000	100%	425,087,000	100%	488,845,000	100	1,606,494,000	Sekretariat Daerah	
4.6.21	Program Penataan Pengendalian Program Pembangunan	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengendalian Jasa Konstruksi		100%	38,965,000	100%	46,343,000	100%	55,720,800	100%	66,864,960	100%	80,237,952	100	287,861,712	Sekretariat Daerah	
4.6.22	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah		100%	67,421,000	100%	-	-	-	-	-	-	-	100	67,421,000	Sekretariat Daerah	
4.6.23	Program Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	Cakupan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	-	-	-	100%	108,633,000	100%	130,359,600	100%	156,431,520	100%	187,717,824	100	583,141,944	Sekretariat Daerah	





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.6.24	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase Tersedianya Layanan Data/Informasi Pengadaan	-	100	8,156,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	8,156,000	Sekretariat Daerah
4.6.25	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase Dokumen/Arsip Yang Tertata	1	100	8,674,600	-	-	-	-	-	-	-	-	100	8,674,600	Sekretariat Daerah
4.6.26	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan	Persentase Pengadaan Yang Dimonitoring Dan Dievaluasi	1	100	6,351,200	-	-	-	-	-	-	-	-	100	6,351,200	Sekretariat Daerah
4.6.27	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Pelaksanaan Tender Secara Elektronik	1	100	70,790,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	70,790,000	Sekretariat Daerah
4.6.28	Program Penataan Pengendalian Program Pembangunan	Persentase Penyelesaian Proses Tender	0.92	100	678,292,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678,292,100	Sekretariat Daerah
4.6.29	Program Peningkatan	Persentase Pelaksanaan	0.46	-	-	50	1,055,000,000	55	1,093,000,000	60	1,133,000,000	65	1,174,000,000	65	4,455,000,000	Sekretariat Daerah





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Proses Tender Tepat Waktu															
4.6.30	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Capaian Standarisasi LPSE	3 Standar	-	-	6	355,000,000	9	381,200,000	12	407,400,000	15	433,700,000	15	1,577,300,000	Sekretariat Daerah	
4.6.31	Pembinaan Aparatur Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Aparatur Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	-	-	-	5	175,000,000	10	175,000,000	15	175,000,000	20	175,000,000	20	700,000,000	Sekretariat Daerah	
4.6.32	Program Penataan Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Serta Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			100 %	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	50,000,000	Sekretariat Daerah	
4.6.33	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat			100 %	116,592,500	100 %	-	-	-	-	-	-	-	100	116,592,500	Sekretariat Daerah	





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Daerah																
4.6.34	Program Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	Cakupan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah		-	-	-	175,000,000	-	245,000,000	-	265,000,000	-	215,000,000	-	900,000,000		Sekretariat Daerah
4.6.35	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Gugatan Masyarakat Kepada Pemda	1	1	222,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	222,000,000		Sekretariat Daerah
4.6.36	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Tertib Pembentukan Dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	1	258,245,750	-	-	-	-	-	-	-	-	1	258,245,750		Sekretariat Daerah
4.6.37 4.6.38	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemulihan Kerugian Keuangan Daerah	100%	100%		-	-	-	-	-	-	-	-	1	167,600,000		Sekretariat Daerah
		Cakupan Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	100%	100%	210,000,000												





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4.6.39	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terpeliharanya Keamanan, Ketertiban Dan Keamanan Dalam Masyarakat		100%	2,967,892,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat Daerah
4.6.40	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Data Asset Setda Yang Akurat	80%	100%	26,321,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,321,800	-	Sekretariat Daerah
4.6.39	Program Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan Daerah	-	100%	100,042,000	100%	1,143,333,000	100%	1,315,721,600	100%	1,441,518,520	100%	1,521,562,824	100%	1,521,562,824	-	Sekretariat Daerah
4.6.40	Program Pelayanan Administratif Dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Daerah	Cakupan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	-	-	-	100%	425,000,000	100%	455,000,000	100%	475,000,000	100%	495,000,000	100%	495,000,000	-	Sekretariat Daerah





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.6.41	Program Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah Dan Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Dalam Penyusunan Kebijakan daerah	-	-	-	100%	19,328,273,525	100%	20,551,060,777	100%	22,197,645,153	100%	26,631,205,228	100%	84,203,088,683	Sekretariat Daerah
4.6.42	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	60,000,000,000	100%	61,000,000,000	100%	62,000,000,000	100%	63,000,000,000	100%	64,000,000,000	100	310,000,000,000	Semua Perangkat Daerah
4.6.43	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	12,000,000,000	100%	13,000,000,000	100%	14,000,000,000	100%	15,000,000,000	100%	16,000,000,000	100	70,000,000,000	Semua Perangkat Daerah
4.6.44	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	100%	10,000,000,000	100%	11,000,000,000	100%	12,000,000,000	100%	13,000,000,000	100%	14,000,000,000	100	60,000,000,000	Semua Perangkat Daerah
4.6.45	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Keikutsertaan ASN Dalam Pendidikan Dan Pelatihan	100%	100%	60,000,000,000	100%	61,000,000,000	100%	62,000,000,000	100%	63,000,000,000	100%	64,000,000,000	100	310,000,000,000	Semua Perangkat Daerah





Kode	Urusan / Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Tahun										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.6.46	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	100%	100%	60,000,000,000	100%	61,000,000,000	100%	62,000,000,000	100%	63,000,000,000	100%	64,000,000,000	100	310,000,000,000	Semua Perangkat Daerah





PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB 8



BAB VIII

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Daerah dalam RPJM Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 meliputi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang menjelaskan tentang pencapaian setiap Misi RPJM Daerah, serta Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta arahan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya daerah.

8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan pada table berikut ini:



Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pendidikan	Poin	60,09	62,69	63,61	64,53	65,48	66,43	66,43
2	Indeks Kesehatan	Poin	75,11	75,41	75,7	76	76,3	76,6	76,6
3	Pertumbuhan PDRB	%	5.02	5.27	5.53	5.80	6.09	6.39	6.39
4	Angka kemiskinan	%	5,32	4,94	4,72	4,52	4,32	4,13	4,13
5	Gini Ratio	Poin	0,325	0,306	0,288	0,271	0,256	0,241	0,241
6	Nilai investasi	Juta Rupiah	156,997	157,002	157,052	157,127	157,227	157.227	157,227
7	Jumlah Objek Wisata Baru	Objek	11	-	1	1	1	1	15
8	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	%	47	52	54	56	59	61	61
9	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	76,2	76,9	78	80	82	84	84
10	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	-	55	60	65	70	75	75
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	-	73,33	73,36	73,4	73,44	73,49	73,49
12	Nilai SAKIP	Nilai	41,98	51,77	56,75	60,09	64,46	68,78	68,78
13	Opini laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP





NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75.18	76.30	76.61	77.14	78.32	80.80	80.80
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	92,21	92,87	93,31	94,04	95,42	96,01	96,01
16	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	49,02	50,33	51,5	52,67	53,84	55,01	55,01
17	Indeks Ketahanan Sosial	Poin	-	0.7465	0,748	0,7501	0,7558	0,7598	0,7598
18	Indeks Ketahanan Ekonomi	Poin	-	0.5576	0,5769	0,6631	0,6879	0,7029	0,7029
19	Indeks Ketahanan Lingkungan	Poin	-	0.6390	0,6501	0,6537	0,6643	0,7027	0,7027
20	Persentase Angka Kriminalitas per 10.000	%	13,3	12,55	11,7	10,86	10,01	9,17	9,17
21	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar budaya Yang dilestarikan	%	50	50	62,5	75	87,5	100	100
22	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Terpadu	Sarana Prasarana	-	2	2	2	2	3	11





8.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang disusun dan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah daerah. Penetapan indikator kinerja kunci selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel. 8.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018 – 2023

NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2017/2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1	Pertumbuhan PDRB	%	7,11	7,13	7,14	7,16	7,17	7,19	7,19
1.2	PDRB perkapita	Juta Rupiah	40.24*	44.16	46.31	48.85	52.81	55.24	55.24
1.3	Gini Ratio	Poin	0,340	0.330	0.323	0.316	0.310	0.305	0.305
1.4	Angka kemiskinan	%	5.32	5.00	4.90	4.83	4.78	4.73	4.73
1.5	Pertumbuhan PDRB Sektor Infrastruktur wilayah (Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, serta Konstruksi)	%	8,26	8,34	8,42	8,50	8,58	8,66	8,66





NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2017/2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.6	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	%	47	52	54	56	59	61	61
1.7	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	76,2	76,9	78	80	82	84	84
1.8	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	-	55	60	65	70	75	75
1.9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin		73,33	73,36	73,4	73,44	73,49	73,49
1.10	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin		CC	CC	B	B	B	B
1.11	Nilai SAKIP	Poin	41,98	51,77	56,75	60,09	64,46	68,78	68,78
1.12	Opini laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Fokus Kesejahteraan Sosial								
2.1	Indeks pembangunan manusia	Poin	69.84	70.90	71.30	71.80	72.50	73.20	73.20
2.2	Indeks Pendidikan	Poin	60,09	62,69	63,61	64,53	65,48	66,43	66,43
2.3	Indeks Kesehatan	Poin	75,11	75,41	75,7	76	76,3	76,6	76,6
2.4	Tingkat pengangguran terbuka	%	4.70	4.67	4.62	4.57	4.53	4.50	4.50
2.5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	92,21	92,87	93,31	94,04	95,42	96,01	96,01
2.6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	49,02	50,33	51,5	52,67	53,84	55,01	55,01
2.7	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		75	76	77	78	80	80
2.8	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar budaya Yang dilestarikan	%	50	50	62,5	75	87,5	100	100
B	ASPEK PELAYANAN UMUM								





NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2017/2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
	URUSAN WAJIB								
	TERKAIT PELAYANAN DASAR								
B.1	PENDIDIKAN								
1.1.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini	%	49,17	55	60	65	70	75	75
1.1.2	Persentase PAUD Berakreditasi	%	67,39	72	75	78	81	84	84
1.1.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,89	8,1	8,15	8,2	9	9	9
1.1.4	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,90	13,20	13,40	13,60	13,80	14,00	14,00
1.1.5	Persentase Guru Bersertifikasi di semua jenjang pendidikan	%	57,24	60	65	70	75	80	80
1.1.6	Penduduk Usia >15 Tahun Melek Huruf	%	90,66	91	92	93	94	95	95
B.2	KESEHATAN								
1.2.1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	%		78	80	82	85	90	90
1.2.2	Indeks Kepuasan masyarakat	Nilai		77	78	79	80	81	81
1.2.3	Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi	%		100	100	100	100	100	100
1.2.4	Angka Kematian Ibu	%		18,5	16,5	10,5	0,5	-	-
B.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.3.1	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	%	47	52	54	56	59	61	61
1.3.2	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	76,2	76,9	78	80	82	84	84





NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2017/2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.3	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik (Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat)	%	28	31,5	33	35	38	40	40
1.3.4	Persentase Penduduk Berakses Air Minum yang layak	%	84	100	100	100	100	100	100
1.3.5	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	%	82,6	86,08	89,56	93,04	96,5	100	100
1.3.6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	83,28	86,08	89,56	93,04	96,5	100	100
B.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1.4.1	Rasio rumah layak huni	%	82,93	83,11	83,19	83,29	83,4	83,52	83,52
1.4.2	Persentase Kawasan kumuh tertangani	%	19,64	28,12	38,83	55,35	75,45	100	100
1.4.3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (lampu jalan/drainase/jalan lingkungan)	%	59,43	63,21	66,98	71,69	75,47	80,19	80,19
B.5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.5.1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	%		40	45	47	50	55	55
1.5.2	Persentase Penegakan Perda	%		70	75	80	85	90	90
B.6	SOSIAL								
1.6.1	Presentase PMKS yang memperoleh	%		85	90	95	100	100	100





NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2017/2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
	bantuan sosial								
1.6.2	Presentase angka PMKS	%		80	85	90	95	97	97
1.6.3	Persentase Pelayanan penyelenggaraan urusan kebencanaan	%		100	100	100	100	100	100
1.6.4	Persentase Layanan Kebencanaan pada masyarakat (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	%		100	100	100	100	100	100
1.6.5	Persentase layanan pengurangan risiko bencana pada masyarakat	%		100	100	100	100	100	100
1.6.6	Persentase korban bencana yang tertangani	%		100	100	100	100	100	100
1.6.7	Persentase penanganan pasca bencana	%		100	100	100	100	100	100
TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR									
B.7	TENAGA KERJA								
1.7.1	Angka partisipasi angkatan kerja	%		63,9	67,4	70,9	74,5	77,9	77,9
1.7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%		4	3,5	3	2,6	2,3	2,3
B.8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1.8.1	IPG	Poin		92.87	93.31	94.04	95.42	96.01	96.01
1.8.2	IDG	Poin		50.33	51.5	52.67	53.84	55.01	55.01
1.8.3	Tingkat capaian kabupaten Layak Anak			Pratama	Madya	Madya	nindya	nindya	nindya
B.9	PANGAN								





NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2017/2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.9.1	Kontribusi tanaman pangan terhadap PDRB	%		19,65	20,77	22,05	23,18	24,59	24,59
1.9.2	Ketersediaan pangan utama	Kg		1.532,03	1.802,38	2.002,64	2.225,16	2.342,27	2.342,27
B.10	PERTANAHAN								
1.10.1	Persentase luas lahan bersertifikat	% (ha)		100 (5)	100 (12)	100 (17)	100 (13)	100 (15)	100 (62)
B.11	LINGKUNGAN HIDUP								
1.11.1	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	60,1	62,3	65,1	67,4	69,2	72,5	72,5
1.11.2	Tersedianya informasi tentang lingkungan hidup	Dok	2	2	3	4	3	2	14
1.11.3	Terlaksananya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Laporan	3	3	3	3	3	3	3
1.11.4	Terverifikasinya MHA dan kearifan local atau pengetahuan tradisional	lokasi	1	1	2	2	1	1	7
1.11.5	Tersedianya RTH public dalam wilayah kota/Perkotaan	%	14,54	15,45	16,36	17,64	18,91	20	20
B.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1.12.1	Jumlah wajib KTP, Akta kelahiran dan Akta kematian yang diterbitkan	%		80	82	85	90	93	93
1.12.2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan	%		80	82	85	90	93	93





NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2017/2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
	dan pencatatan sipil								
1.12.3	Persentase penyelesaian KTP el	%		80	82	85	90	93	93
1.12.4	Persentase tingkat pemanfaatan data dan inovasi kependudukan	%		80	82	85	90	93	93
B.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1.13.1	Indeks Desa Membangun	Poin		0,6479	0,6583	0,689	0,7027	0,7218	0,7218
1.13.2	Indeks Ketahanan Sosial	Poin		0,747	0,748	0,7501	0,7558	0,7598	0,7598
1.13.3	Indeks Ketahanan Ekonomi	Poin		0,5576	0,5769	0,6631	0,6879	0,7029	0,7029
1.13.4	Indeks Ketahanan Lingkungan	Poin		0,6392	0,6501	0,6537	0,6643	0,7027	0,7027
B.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1.14.1	Rata-rata anak per keluarga pasangan usia subur	%	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1	2	2
B.15	PERHUBUNGAN								
1.15.1	Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas	%	5,15	4,28	4	3,8	3,6	3,5	3,5
1.15.2	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
B.16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1.16.1	Persentase luas wilayah yang tercoverage jaringan internet	%		71,98	75,74	78,97	83,83	89,02	89,02
1.16.2	Persentase luas wilayah yang terjangkau infrastruktur jaringan internet dan internet lainnya	%		71,98	75,74	78,97	83,83	89,02	89,02





NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2017/2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.16.3	Persentase penyebar luasan informasi dan kerjasama media yang dikelola	%		36	50	57	79	100	100
B.17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1.17.1	Nilai rata-rata produksi koperasi	Juta Rupiah		733	750	770	790	810	810
1.17.2	Nilai rata-rata produksi UMKM	Juta Rupiah		58	68	78	88	100	100
1.17.3	Persentase koperasi aktif	%		52	55	56	58	60	60
1.17.4	Jumlah UMKM yang aktif	Unit		26.487	28.407	30.427	32.747	34.915	34.915
B.18	PENANAMAN MODAL								
1.18.1	Nilai investasi (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	156,997	157,002	157,052	157,127	157,227	157.227	157,227
1.18.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin		80	83	85	87	90	90
B.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1.19.1	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Terpadu	Sarana Prasarana	-	2	2	2	2	3	11
1.19.2	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%		38,00	45,00	57,00	67,00	88,00	88,00
1.19.3	Persentase Prestasi Olahraga	%		10,00	12,00	15,00	16,00	17,00	17,00
1.19.4	Persentase praktisi olahraga yang bersertifikat	%		5,00	8,00	9,00	11,00	12,00	12,00
B.20	STATISTIK								





NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2017/2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.20.1	Sistem data dan statistic yang terintegrasi			ada	ada	ada	ada	ada	ada
1.20.2	Persentase dokumen data/informasi dan statistic sectoral yang dihasilkan	%		100	100	100	100	100	100
B.21	PERSANDIAN								
1.21.1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam berkomunikasi perangkat daerah	%		100	100	100	100	100	100
1.21.2	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam berkomunikasi perangkat daerah			25	29	29	29	29	29
B.22	KEBUDAYAAN								
1.22.1	Persentase Budaya Lokal yang Dikembangkan Menjadi Daya Tarik Wisata.	%	50	55	62,5	75	87,5	100	100
B.23	PERPUSTAKAAN								
1.23.1	Indeks Minat Baca	Nilai		35	40	45	50	55	55
1.23.2	Persentase Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	%		35	45	50	55	60	60
1.23.3	Rasio Perpustakaan/TBM yang Aktif	%		50	60	70	80	90	90
1.23.4	Persentase Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang	%		10	20	30	40	50	50





NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2017/2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
	memiliki Sertifikat								
B.24	KEARSIPAN								
1.24.1	Persentase Penyelenggaraan Kearsipan secara Baku	%		10	30	60	80	90	90
1.24.2	Rasio Instansi Pemerintah/Swasta yang Mengelola Arsip Secara Baku	%		10	30	60	80	90	90
1.24.3	Persentase Arsip Statis dan Dinamis yang Dikelola	%		30	50	70	80	90	90
2	PELAYANAN URUSAN PILIHAN								
2.1	PARIWISATA								
2.1.1	Jumlah Objek Wisata Baru	Objek	11	-	1	1	1	1	15
2.1.2	Persentase kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara	%		35,56	45,78	60,33	71,88	88,25	88,25
2.2	PERTANIAN								
2.2.1	Hortikultura								
2.2.2	Kontribusi tanaman hortikultura terhadap PDRB	%		0,70	0,71	0,73	0,75	0,78	0,78
2.2.3	Produksi Perkebunan								
2.2.4	Kontribusi tanaman hortikultura terhadap PDRB	%		2,75	2,8	2,86	2,92	2,98	2,98
2.2.5	Produksi Peternakan								
2.2.6	Kontrobusi peternakan terhadap PDRB	%		5,22	5,62	6,04	6,51	7,01	7,01





NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2017/2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
2.3	PERDAGANGAN								
2.3.1	Persentase perbaikan/penyediaan sarana distribusi perdagangan	%		7,5	11	11	12	12	12
2.3.2	Persentase cakupan pembinaan usaha perdagangan/ usaha informal	%		10	20	20	20	30	30
2.3.3	Persentase tertib Niaga	%		51,46	63,46	72,21	80,96	100	100
2.3.4	Persentase Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kemetrolgian	%		20	20	20	20	20	20
2.4	PERINDUSTRIAN								
2.4.1	Persentase Cakupan Pembinaan kelompok dan pelaku industri	%		19,36	19,80	20,04	20,28	20,52	20,52
2.5	TRANSMIGRASI								
2.5.1	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB			0,5	0,6	0,8	0,9	1	1
2.5.2	Jumlah transmigran yang terdampak pengembangan pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan per tahun (KK)	Jumlah KK		175	100	50	50	50	50
2.6	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
2.6.1	Kontribusi perikanan terhadap PDRB	%		0,63	0,65	0,68	0,71	0,74	0,74
3	PENUNJANG URUSAN								
3.1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN								





NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2017/2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
3.1.1	Persentase program kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD)	%		100	100	100	100	100	100
3.2	KEUANGAN								
3.2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
3.3.1	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	Nilai		81	82	83	84	85	85
3.3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%		2,18	2,14	2,18	2,23	2,28	2,28
3.3.3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	%		65,05	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00
3.3.4	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis/Fungsional	%		4,57	4,28	4,17	4,10	4,03	4,03
3.3.5	Persentase ASN yang Mendapatkan Penghargaan Sesuai Bidanganya	%		3,97	0,19	0,27	0,36	0,44	0,44
3.3.6	Persentase jabatan yang diisi sesuai formasi dan kompetensi jabatan	%		80	85	90	95	100	100
3.3.7	Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN dan Mendapatkan Pembinaan	%		0,83	0,69	0,62	0,54	0,44	0,44





NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2017/2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
3.3.8	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%		80	85	90	95	100	100
3.3.9	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	%		70	75	80	85	90	90
3.4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
3.4.1	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan	%		100	100	100	100	100	100
3.5	PENGAWASAN								
3.5.1	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan BPK	%		88	90	91	92	93	93
3.5.2	Persentase penyelesaian penaganganan kasus/pengaduan	%		100	100	100	100	100	100
3.5.3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan SAKIP dengan kategori BAIK	%		22	28	33	39	44	44
3.5.4	Level maturitas SPIP pemerintah daerah	Nilai		2	3	3	3	3	3
3.5.5	Level kapabilitas APIP	Nilai		3	3	3	3	4	4
3.6	SEKRETARIAT DEWAN								
3.6.1	Persentase Fasilitasi rapat-rapat DPRD yang terlaksana tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
3.6.2	Persentase kunjungan kerja yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100
3.6.3	Persentase raperda yang disahkan	%	100	100	100	100	100	100	100





NO	ASPEK/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2017/2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD 2023
				2019	2020	2021	2022	2023	
	menjadi perda tepat waktu								
3.6.4	Persentase Penyelesaian kegiatan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
3.6.5	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100
3.6.6	Jumlah Sosialisasi dan Pelatihan DPRD dan Staf Sekretariat DPRD yang diikuti			280	320	320	360	360	360
3.6.7	Persentase Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI								
1.1	Nilai investasi (Juta Rupiah)	Juta rupiah	156,997	157,002	157,052	157,127	157,227	157.227	157,227
1.2	Indeks Desa Membangun	Poin		0,6479	0,6583	0,689	0,7027	0,7218	0,7218
1.3	Indeks Ketahanan Sosial	Poin		0,747	0,748	0,7501	0,7558	0,7598	0,7598
1.4	Indeks Ketahanan Ekonomi	Poin		0,5576	0,5769	0,6631	0,6879	0,7029	0,7029
1.5	Indeks Ketahanan Lingkungan	Poin		0,6392	0,6501	0,6537	0,6643	0,7027	0,7027
1.6	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	%	65,99	68,35	71,78	75,32	79,75	85,77	85,77
1.7	Persentase Angka Kriminalitas per 10.000	%	13,3	12,55	11,7	10,86	10,01	9,17	9,17





P E N U T U P

BAB 9



BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD merupakan pedoman bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pembangunan daerah periode perencanaan Tahun 2018-2023.

RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi misi dan janji kepala daerah terpilih dengan memperhatikan berbagai kondisi, permasalahan, isu strategis baik skala lokal, regional maupun global, mengacu kepada RPJPD dan RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJM Nasional dalam rangka sinkronisasi dan keselarasan pembangunan regional dan nasional.

Dengan adanya dokumen RPJMD ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Untuk itu, seluruh perangkat daerah dilingkup pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang harus menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
2. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 merupakan sasaran dan indikator kinerja daerah. Perangkat daerah sebagai organisasi pelaksana harus menjabarkannya ke dalam sasaran, program dan





indicator kinerja perangkat daerah yang mempunyai hasil dan dampak untuk mendukung tercapainya sasaran dan indikator kinerja daerah sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan prioritasnya masing-masing

3. RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dijabarkan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah harus melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pada setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 akan berakhir pada tahun 2023 dan pada Tahun 2023 akan diadakan pemilihan kepala daerah yang baru. Dengan demikian, pada Tahun 2023 akan terjadi masa transisi dan kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan atau RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2024. Untuk menjembatani masa transisi atau kekosongan acuan dokumen perencanaan Tahun 2024 sebelum dokumen RPJMD yang baru ditetapkan, maka penyusunan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengacu pada :

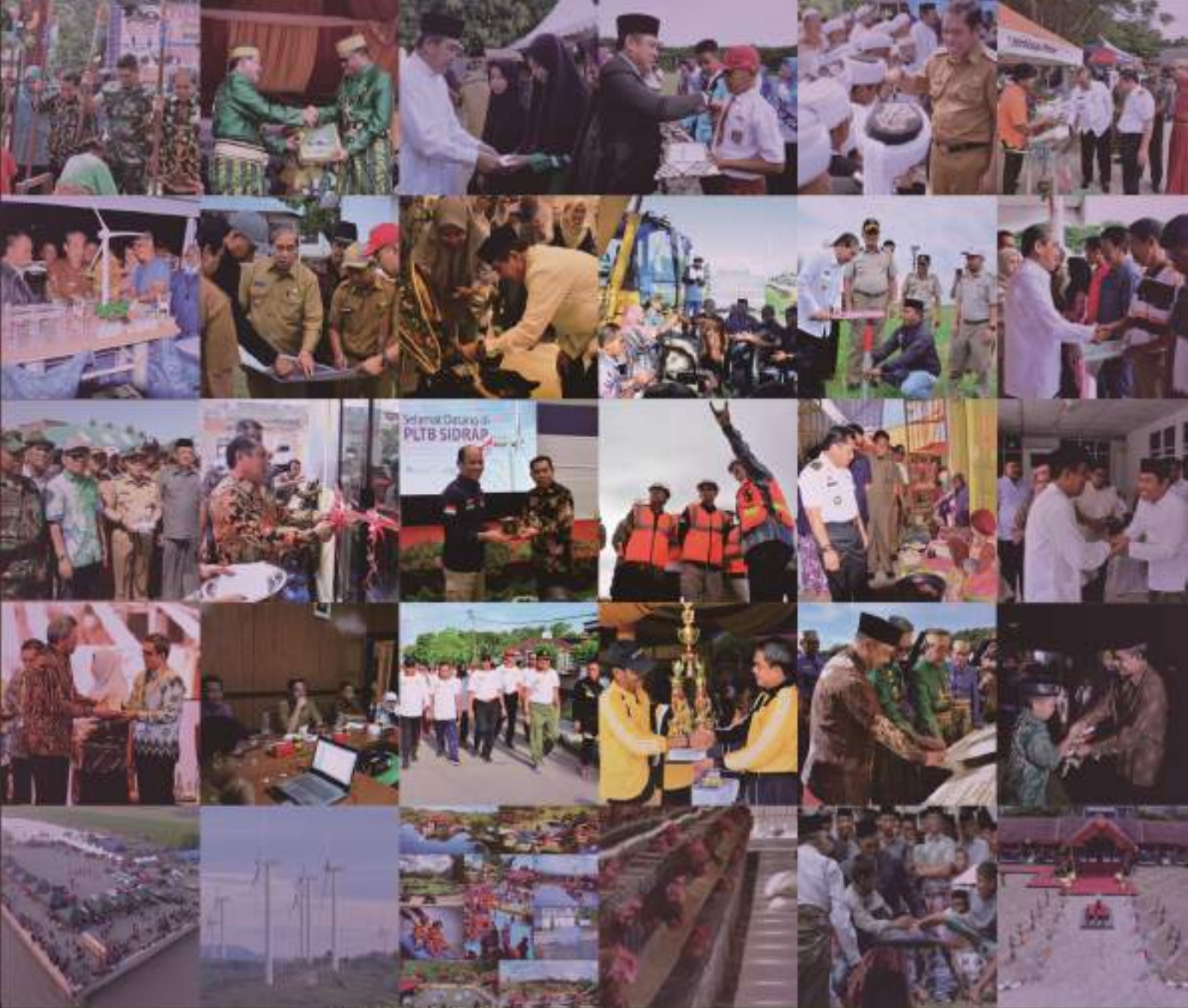
1. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Program prioritas nasional dalam RKP serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Program prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan;





4. Arah kebijakan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah;
5. Memperhatikan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih;





**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN,
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2019**